BADAN POM

2023

LAPORAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Balai Besar POM di Surabaya
Jalan Karang Menjangan No 20 Surabaya
Telp 031-5020575-5048833
Email : bbpom_surabaya@pom.go.id

KATA PENGANTAR

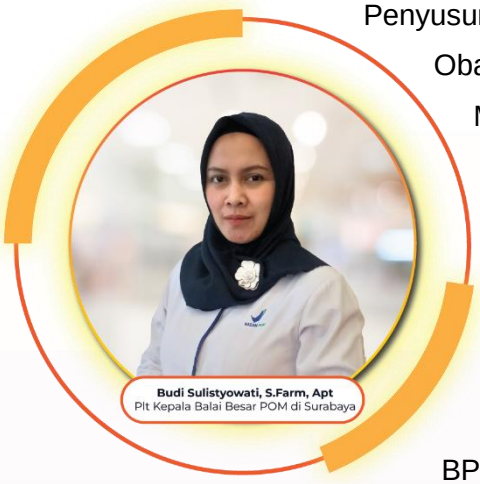

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja,

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya.

Surabaya, 28 Februari 2024

Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya,

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI SURABAYA

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt

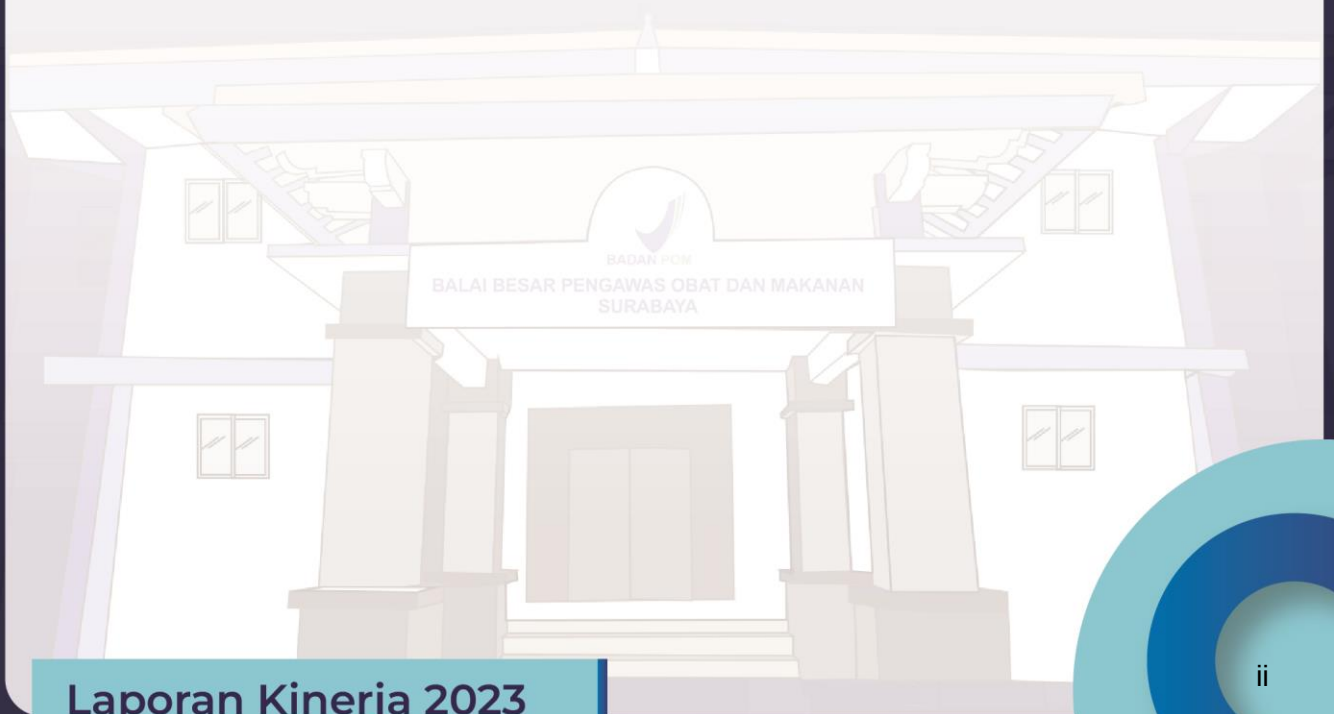

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 9 sasaran strategis memperoleh capaian “Sangat Baik” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Cukup”. **Pernyataan keberhasilan** pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,49% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2023;
2. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 104,32% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2023;
3. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 105,2% dengan kriteria **Sangat Baik,** hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2023;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 106,97% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2023;
5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,27% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektIitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2023;
6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 120% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2023;
7. Pada Tahun 2023 pada sasaran strategis ketujuh yaitu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya, memperoleh Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 98,84% dengan kriteria **Cukup**;
8. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 102,29% dengan kriteria **Sangat Baik** pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya menunjukkan

keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal;

9. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan sebesar 105,67% dengan kriteria **Sangat Baik** pada tahun 2023, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal;
10. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 109,09% dengan kriteria **Sangat Baik** pada tahun 2023, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pada Tahun 2023 pada sasaran strategis kesebelas yaitu Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel, memperoleh Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 94,79% dengan kriteria **Cukup.**

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2023 antara 92,22% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” disebabkan karena dikarenakan adanya peningkatan sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dan “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar”, hal ini disebabkan karena semua sampel obat dan sampel makanan yang masuk ke laboratorium telah berhasil dilakukan pengujian sesuai standar

Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis. Capaian TE semua kegiatan yang dilakukan efisien dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan bervariasi antara 0.00 – 0,24. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.668.106.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah Rp60.577.120.791,- atau 99,85%.

BBPOM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

Surabaya, 28 Februari 2024

Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya,

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt

HIGHLIGHT

Selama tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Juara 3 Implementasi Manajemen ASN

2. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Terbaik II Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Unit Pelaksana Teknis

3. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Peringkat pertama penilaian SAKIP Badan POM untuk kelompok Balai Besar / Balai POM

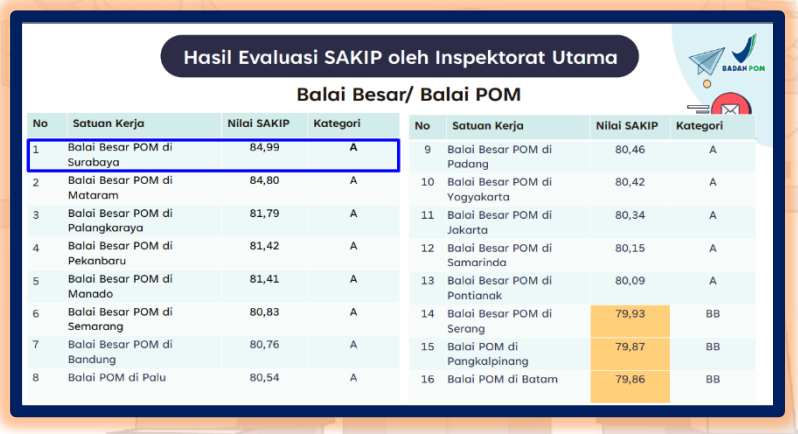

Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Utama

Balai Besar/ Balai POM

No	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
1	Balai Besar POM di Surabaya	84,99	A
2	Balai Besar POM di Mataram	84,80	A
3	Balai Besar POM di Palangkaraya	81,79	A
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	81,42	A
5	Balai Besar POM di Manado	81,41	A
6	Balai Besar POM di Semarang	80,83	A
7	Balai Besar POM di Bandung	80,76	A
8	Balai POM di Palu	80,54	A
9	Balai Besar POM di Padang	80,46	A
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	80,42	A
11	Balai Besar POM di Jakarta	80,34	A
12	Balai Besar POM di Samarinda	80,15	A
13	Balai Besar POM di Pontianak	80,09	A
14	Balai Besar POM di Serang	79,93	BB
15	Balai POM di Pangkalpinang	79,87	BB
16	Balai POM di Batam	79,86	BB

4. Juara 2 Pengawasan Kearsipan Internal Badan POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Piagam Penghargaan

NOMOR : KA.03.1.01.24.13

Diberikan Kepada :

Balai Besar POM di Surabaya

sebagai

Terbaik Kedua

Unit Kearsipan II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"

berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023

Jakarta, 29 Januari 2024

Plt. Kepala Badan,

Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt. M.Pharm, MARS

5. Terbaik 2 Anugerah pemeringkatan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM TA 2023 kategori UPT Balai Besar POM sebagai Badan Publik Informatif

BADAN POM

ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

2023

KATEGORI PPID PELAKSANA UPT BALAI BESAR POM

BALAI BESAR POM DI SURABAYA

SEBAGAI BADAN PUBLIK

INFORMATIF

Jakarta, 30 November 2023
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm., M.A.R.S.

6. Terbaik Unit Lokus Evaluasi PEKP3 dan Terbaik Unit Penyediaan Sarana Kelompok Rentan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

panrb

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

sebagai

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik
Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan

Jakarta, 21 November 2023
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si

7. Penghargaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Sebagai Peserta Pameran pada acara Surabaya Great Expo 2023 tanggal 16-20 Agustus 2023 di Exhibition Hall Grand City Surabaya

PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan Kepada :

BBPOM

Sebagai

PESERTA PAMERAN

pada acara SURABAYA GREAT EXPO 2023
tanggal 16 - 20 Agustus 2023, di Exhibition Hall, Grand City Surabaya

UMKM Kuat Surabaya HEBAT
SURA BAYA
GREAT EXPO 2023

Surabaya, 20 Agustus 2023
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA

DEWI SOERIYAWATI, ST. MT

8. Penghargaan dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur sebagai Pemateri dalam kegiatan Jambore Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Oktober 2023 di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Tuban

PENGHARGAAN

Nomor : 29 /13 - B /GP/2023

Diberikan kepada :
BBPOM di Surabaya
sebagai
PEMATERI

JAMBORE JAWA TIMUR

yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 7 Oktober 2023
di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Tuban
Semoga pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
dapat bermanfaat bagi pengembangan pribadi,
Gerakan Pramuka, masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Surabaya, 7 Oktober 2023
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Jawa Timur
Ketua,

M. ARUM SABIL, S.P., S.H.

9. Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya meraih Indeks Pelayanan Publik dengan kategori **Pelayanan Prima**

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

Pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.98/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	7.a.T	Agar dapat meningkatkan publikasi SKM terutama melalui aplikasi yang dapat diunduh.
2	Profesionalisme SDM	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
6	Inovasi	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 28 Agustus 2023

Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

Tim Penilai :

Ketua : Deasywaty, S.Si., M.Si. (.....)

Anggota : 1. F. Reinhard Nathanael. T, S.H. (.....)

2. Tia Ami Narti, A.Md. (.....)

10. Juara 1 Sekolah dengan PJAS Aman tingkat SMP Regional Barat (SMPN 1 Lamongan) Tahun 2023

11. Penghargaan atas partisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Standarisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi (27 September 2023)

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR: KP.09.04.5.51.09.23.142
DIBERIKAN KEPADA :
Balai Besar POM di Surabaya
Atas partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi
Minyak Ikan Patin dan Minuman Serbuk Kulit Pisang sebagai Bahan Baku Pangan
Semarang, 27 September 2023
Dra. Rita Endang, Apt., M. Kes.
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

12. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis CPPOB & Sosialisasi CPPOB & Nomor Izin Edar untuk UMKM Kab. Sumenep (09 Agustus 2023)

UMKM HALAL HUB SUMENEP
PIAGAM PENGHARGAAN
DIBERIKAN KEPADA :
BALAI BESAR POM SURABAYA
Atas Partisipasinya Dalam Kegiatan
"Pelatihan/Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) & Sosialisasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IPCPPOB) Serta Nomor Izin Edar Oleh Balai Besar POM Surabaya Untuk UMKM Kab. Sumenep"
Di Gedung Halal Hub Sumenep
Rabu , 09 Agustus 2023
Direktur Utama
PT Mitra Andalan Semeru
(Fikrul Manan)

13. Penghargaan sebagai Narasumber dan Penanggap atas "Success Story Kegiatan Intensifikasi Pengawasan OT SK" Pada Kegiatan Pertemuan Koordinasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselenggaran oleh Direktorat Pengawasan OT SK Badan POM tanggal 3 Oktober 2023

Certificate
OF APPRECIATION
Sertifikat ini diberikan kepada:
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
atas kontribusi dan partisipasinya sebagai
NARASUMBER DAN PENANGGAP
pada kegiatan "Pertemuan Koordinasi Inspektur Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan", yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada 02 - 03 Oktober 2023 di Bandung.
Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

14. Penghargaan telah mendampingi UMKM Kosmetik dalam meraih Nomor Notifikasi TW IV Tahun 2022

15. Apresiasi sebagai Mitra Strategis Industri Agro tahun 2022 dari Kamar Dagang & Industri Jawa Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
HIGHLIGHT vi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Aspek Strategis Organisasi 3
1.5 Analisis Lingkungan Strategis 5
1.6 Isu Strategis 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 Rencana Strategis 13
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 17
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 19
2.5 Metode Pengukuran 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 265
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 267
3.4 Realisasi Anggaran 275
BAB IV PENUTUP 292
4.1 Kesimpulan 292
4.2 Saran 294
LAMPIRAN 300
Lampiran I 300
Lampiran II 320

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya 3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM 6
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur 7
Gambar 4. Visi dan Misi 13
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya 14
Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance 26
Gambar 7. Perbandingan NPSS dan NP Tahun 2022 dan tahun 2023 27
Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan 2023 29
Gambar 9. Grafik Perbandingan Capaian Strategis dengan Balai Setara 31
Gambar 10. Persentase Obat Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak 34
Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2023 34
Gambar 12. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional 35
Gambar 13. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak 40
Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 hingga tahun 2023 40
Gambar 15. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional 41
Gambar 16. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted 45
Gambar 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2020 hingga tahun 2023 46
Gambar 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional 47
Gambar 19. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted 51
Gambar 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 hingga tahun 2023 52
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional 53
Gambar 22. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat 57
Gambar 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 hingga tahun 2023 57
Gambar 24. Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat hasil pengawasan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional 58
Gambar 25. Nilai Komponen Pendukung Indeks Kesadaran Masyarakat 64
Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran (awareness index) Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 65
Gambar 27. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan Balai setara dan target nasional 66
Gambar 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya 79
Gambar 29. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional 80

Gambar 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 86
Gambar 31. Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 86
Gambar 32. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional 87
Gambar 33. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d 2023 88
Gambar 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dari tahun 2020 sampai tahun 2023 99
Gambar 35. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional 100
Gambar 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2023 107
Gambar 37. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional 108
Gambar 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 hingga tahun 2023 113
Gambar 39. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan capaian nasional 114
Gambar 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan tahun sebelumnya 119
Gambar 41. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional 120
Gambar 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2023 133
Gambar 43. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional 134
Gambar 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 hingga tahun 2023 139
Gambar 45. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target nasional 141
Gambar 46. Grafik Aspek Indeks Pelayanan Publik 147
Gambar 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan tahun sebelumnya 155
Gambar 48. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional 156
Gambar 49. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya 165
Gambar 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan target nasional 167
Gambar 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga Tahun 2023 172
Gambar 52. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 Dengan Balai Setara 173
Gambar 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman tahun 2020 hingga tahun 2023 180
Gambar 54. Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2023 dengan Balai setara 181
Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 hingga Tahun 2023 187

Gambar 56. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2023 dengan Balai Setara dan Target Nasional 188
Gambar 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standarTahun 2020 hinagga Tahun 2023 193
Gambar 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan target nasional . 194
Gambar 59. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 hinagga Tahun 2023 200
Gambar 60. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan target nasional... 201
Gambar 61. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 hingga Tahun 2023..... 208
Gambar 62. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Setara dan Target Nasional..... 209
Gambar 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2023 222
Gambar 64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2023 223
Gambar 65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2023 228
Gambar 66. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional..... 229
Gambar 67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2023 235
Gambar 68. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain 236
Gambar 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 hingga tahun 2023..... 242
Gambar 70. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Lain yang Sejenis/setara, dengan target nasional..... 243
Gambar 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2020 hingga tahun 2023 255
Gambar 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Surabaya dengan Balai Lain yang Sejenis/setara, dengan target nasional..... 256
Gambar 73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 hingga tahun 2023 260
Gambar 74. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional..... 261
Gambar 75. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tahun 2023 262

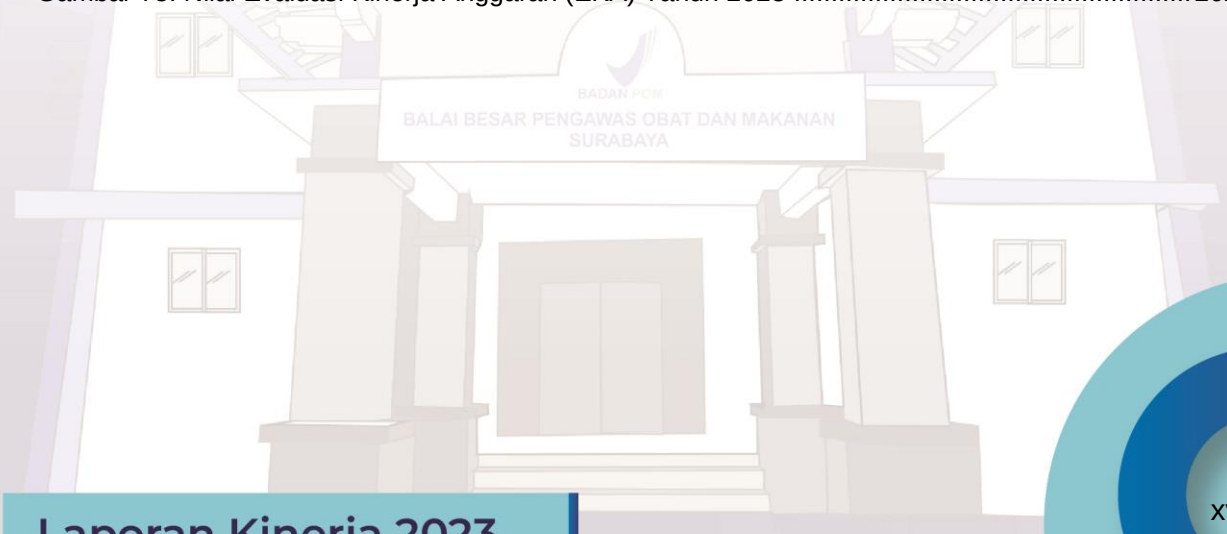

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya 15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 17
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023 19
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 27
Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai yang Setara 30
Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 32
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 33
Tabel 9. Perbandingan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan target renstra 2024 35
Tabel 10. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 37
Tabel 11. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Sebelumnya 38
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 39
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan target renstra 2024 41
Tabel 14. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 43
Tabel 15. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya 44
Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 45
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu tahun 2023 dengan target renstra 2024 46
Tabel 18. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu 48
Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya 49
Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 50
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan target renstra 2024 52
Tabel 22. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 55
Tabel 23. Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 55
Tabel 24. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 56
Tabel 25. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target renstra 2024 58
Tabel 26. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 60
Tabel 27. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 61
Tabel 28. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 63
Tabel 29.Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dengan Target Renstra 2024 65
Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 75
Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya 76

Tabel 32. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 77
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target tahun 2024 (awal) 79
Tabel 34. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 82
Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya 83
Tabel 36. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 84
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target tahun 2024 (awal) 87
Tabel 38. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 94
Tabel 39. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya 95
Tabel 40. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 96
Tabel 41. Jumlah Responden Per-Jenis Layanan tahun 2023 97
Tabel 42. Hasil SKM 97
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan target renstra 2024 99
Tabel 44. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 103
Tabel 45. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya 104
Tabel 46. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 105
Tabel 47. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 dengan target renstra 2024 107
Tabel 48. Efiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 110
Tabel 49. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya 110
Tabel 50. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 111
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan target renstra 2024 113
Tabel 52. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 115
Tabel 53. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya 116
Tabel 54. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 118
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 120
Tabel 56. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 127
Tabel 57. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebelumnya 127
Tabel 58. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 132

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target renstra 2024 133
Tabel 60. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 136
Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebelumnya 137
Tabel 62. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 138
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan target renstra 2024 140
Tabel 64. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 143
Tabel 65. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebelumnya 144
Tabel 66. Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 146
Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 hingga tahun 2023 148
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 148
Tabel 69. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dan Target Nasional 149
Tabel 70. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik 152
Tabel 71. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik sebelumnya 153
Tabel 72. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 154
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 155
Tabel 74. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 161
Tabel 75. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya 161
Tabel 76. Realisasi Tingkat Efektifitas KIR Obat dan Makanan Tahun 2023 164
Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIR Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 166
Tabel 78. Efiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE 169
Tabel 79. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE sebelumnya 170
Tabel 80. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 171
Tabel 81. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2024 172
Tabel 82. Efiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 177
Tabel 83. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya 178
Tabel 84. Perbandinagan Target dan Realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2023 178
Tabel 85. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024 180
Tabel 86. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman 184
Tabel 87. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya 185

Tabel 88. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2023 186
Tabel 89. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024 187
Tabel 90. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 190
Tabel 91. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya 191
Tabel 92. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 192
Tabel 93. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 193
Tabel 94. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 196
Tabel 95. Tindak lanjut rekoemndasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya 197
Tabel 96. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 199
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 200
Tabel 98. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 204
Tabel 99. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya 205
Tabel 100. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 206
Tabel 101. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 208
Tabel 102. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 216
Tabel 103. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya 217
Tabel 104. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya Triwulan III tahun 2023 221
Tabel 105. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2023 dengan Target Renstra tahun 2024 222
Tabel 106. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya 225
Tabel 107. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya 226
Tabel 108. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2023 227
Tabel 109. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 228
Tabel 110. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 232
Tabel 111. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya 232
Tabel 112. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2023 234
Tabel 113. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024 235
Tabel 114. Efiensi Anggaran pada Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya 238
Tabel 115. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya 238
Tabel 116. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 241
Tabel 117. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target renstra 2024 242

Tabel 118. Efiesiensi atas Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP 248
Tabel 119. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obatdan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya..... 250
Tabel 120. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya 253
Tabel 121. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2023 dengan target renstra tahun 2024 255
Tabel 122. Realisasi indikator tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi 256
Tabel 123. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal 257
Tabel 124. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya 258
Tabel 125. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2023 259
Tabel 126. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan target renstra 2024 260
Tabel 127. Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 262
Tabel 128. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran 264
Tabel 129. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya 264
Tabel 130. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022 265
Tabel 131. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023..... 276
Tabel 132. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023..... 278
Tabel 133. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023..... 281
Tabel 134. Tingkat Efisiensi Kegiatan..... 284
Tabel 135. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 285

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial Masaraat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
b. Balai POM di Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
c. Balai POM di Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 23 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Surabaya yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektIitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 136 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan Balai Besar POM di Surabaya	S-2	Apoteker	D-IV / S-1 Lain	D-III	SLTA
PNS dan CPNS	15	41	54	11	10
PPPK	-	-	10	-	-
PPNPN	3		6	3	4
Total	**18**	**41**	**70**	**14**	**14**

Sumber Daya Lainnya

a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m2 dan luas bangunan 4.496,09 m2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui e-registration.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi,

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), direvisi pada DIPA No. SP DIPA-063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp60.668.106.000,- (Enam Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 hingga 111404’ Bujur Timur dan 7012’ hingga 8048’ Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km2. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini.

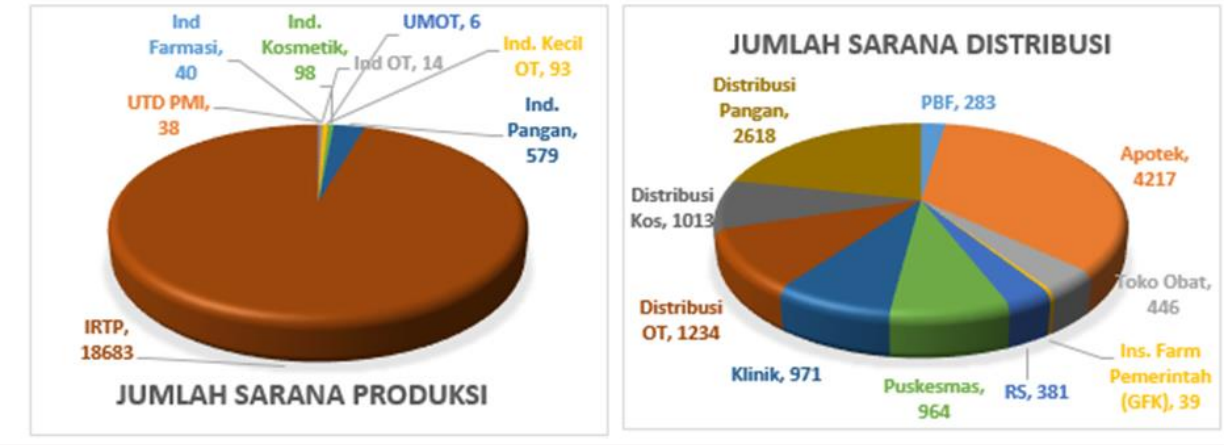

Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.6 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain:

1. **Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa**

   Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

   Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dengan upaya menambah inovasi dari 29 inovasi menjadi 31 inovasi, Inovasi baru pada triwulan I tahun 2023 diantaranya Gerakan komitmen menumbuhkan pangan aman berkualitas untuk PKL Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggung Jawab Obat dan Makanan Terstruktur

(Kembang Aster). Inovasi GEMPUR Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jatim) yang merupaka inovasi unggulan Balai Besar POM di Surabaya pada triwulan I tahun 2023 berhasil meraih penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

6. **Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. **UMKM di Jawa Timur**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman

adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantren preneur di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara siginfikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Surabaya turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

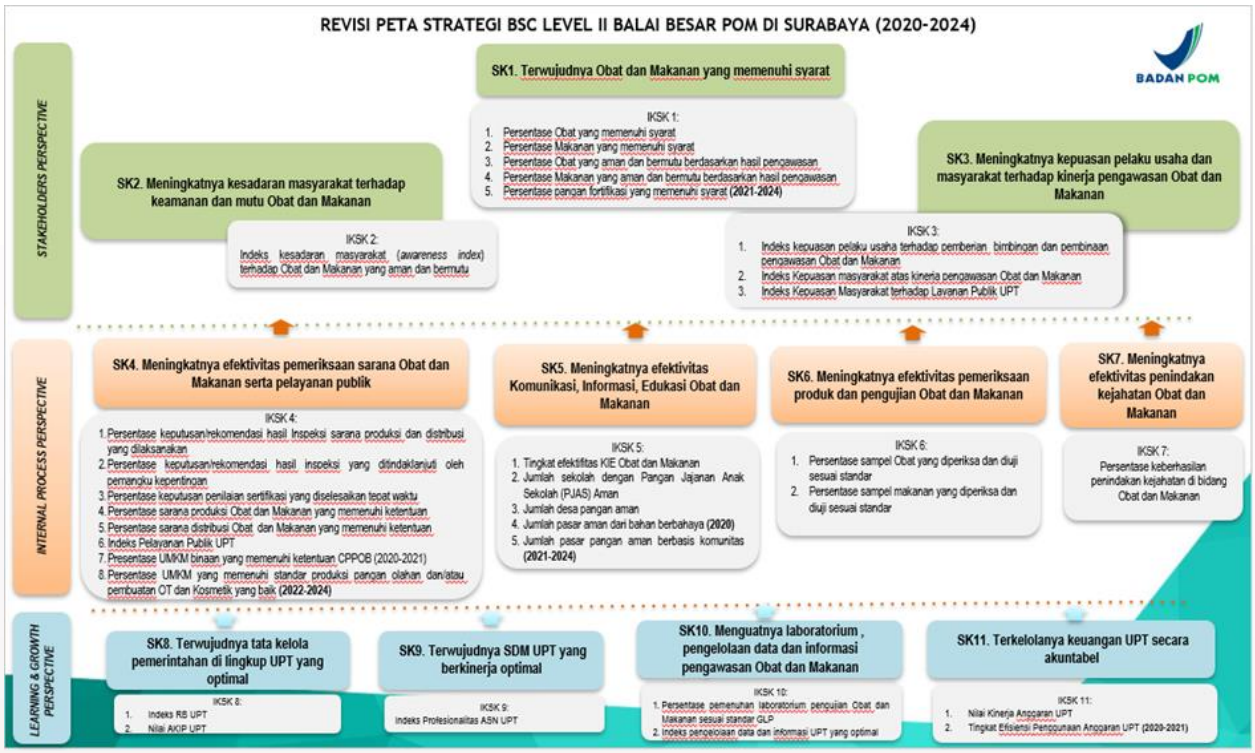

Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 30 indikator menjadi 29 indikator.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	24
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2023, terdapat perubahan target PK tahun 2023 pada indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPOM per 2 Januari 2023. Perubahan target dari 4,51 menjadi 4,60 dikarenakan adanya perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	73
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		Indeks Pelayanan Publik	4,60
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2
	Kegiatan :		**Anggaran :**
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		**61.048.715.000**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target											Anggaran
			B0	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B	B	B2	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	600,538,734
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	287,168,784

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target												Anggaran
			B0	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B	B	B2	
	memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	143,623,266
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	151,927,216
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63,394,000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT												8	280,539,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												87	223,620,000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												76	209,320,000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												9	64,653,500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46,830,000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283,620,000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525,300,000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target												Anggaran
			B0	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B	B	B2	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452,771,000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792,959,000
		Indeks Pelayanan Publik							6	6	6	6	6	6	64,653,500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3	8	3	58	55	76	75	88	8	93	96	65	315,156,000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	18,943,840,000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	8			3	36	4	67	65	80	87	0	2	811,162,000
		Jumlah desa pangan aman	5		20	37	35	48	65	783	899	82	93	37	1,154,484,000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	7	3	4	59	55	79	79	84	99	0	24	575,545,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3		20	27	35	45	55	65	75	85	95	0	744,162,000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3		20	30	38	45	55	65	75	85	95	0	439,096,000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	8		3	5	25	3	455	428	64	66	72	1,312,841,000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan	Indeks RB UPT												87	28,786,178,000
		Nilai AKIP UPT												86	90,810,000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target												Anggaran
			B0	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B	B	B2	
	UPT yang optimal														
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85	246,648,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2,835,300,000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	514,075,000
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT		46	56	6	63	66	67	69	7	72	74	92	88,500,000
															61,048,715,000

2.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.

2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performace*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara menganalisis Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Organisasi disertai dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dan Nilai Perspektif (NP), dengan mengacu pada aplikasi SIMETRIS, membandingkan NPSS tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, membandingkan realisasi kinerja 2023 dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, melakukan upaya perbaikan, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian, melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyampaikan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

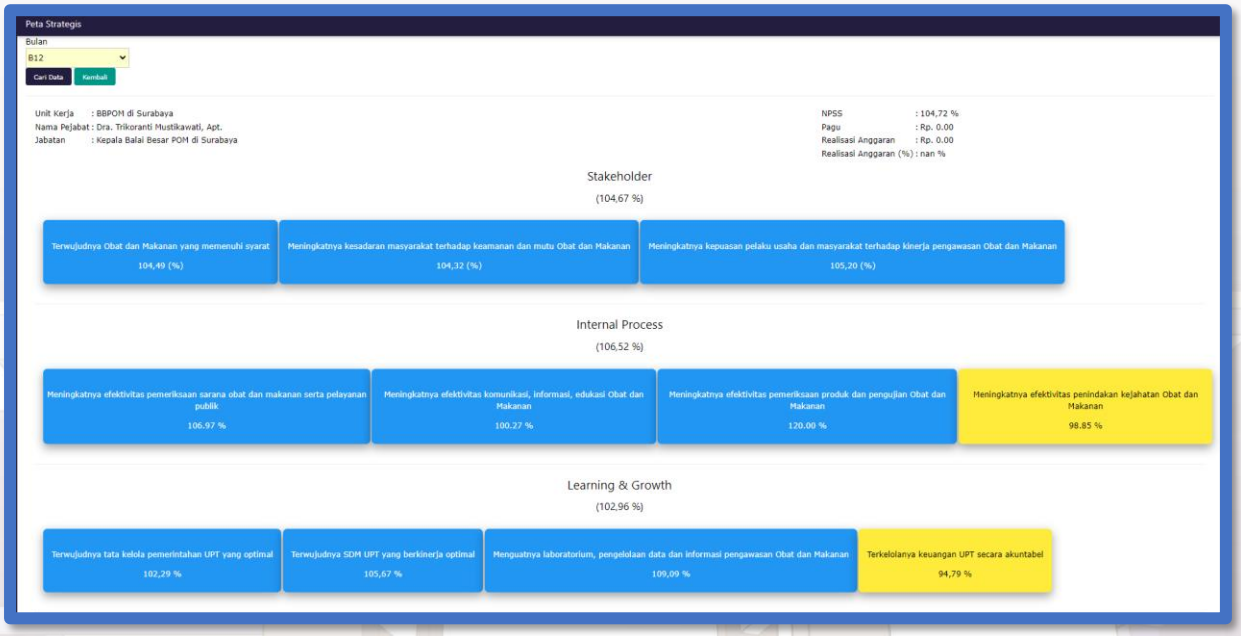

Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance

Berdasarkan Aplikasi *e-performance* yang merupakan aplikasi yang perencanaan dan kinerja bagian dari aplikasi SIMETRIS yang juga diimplementasikan di BBPOM di Surabaya,

diperoleh nilai NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2023 sebesar 104,75% dengan Predikat **Istimewa.** Nilai tersebut terdiri atas NP Perspektif Stakeholder sebesar 104,67% dengan kategori **Sangat Baik**, NP Perspektif Internal Proses sebesar 106,52% dengan kategori **Sangat Baik,** dan NP Perspektif Learning & Growth sebesar 102,96% dengan kategori **Sangat Baik.** Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target dari semua perspektif.

NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

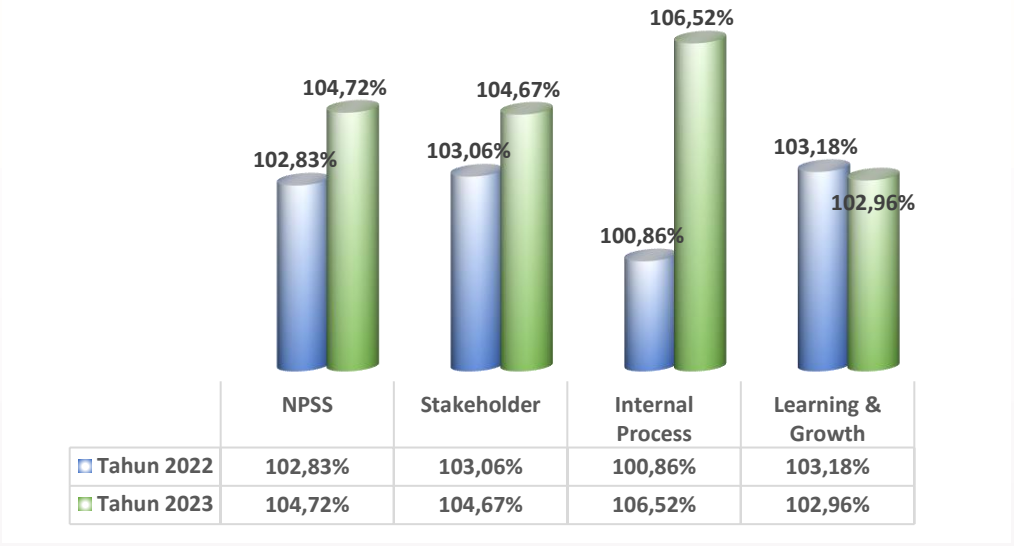

Gambar 7. Perbandingan NPSS dan NP Tahun 2022 dan tahun 2023

NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2023 naik sebesar 1,89% jika dibandingkan NPSS tahun 2022. Dari 3 (tiga) NP terdapat 2 (dua) NP yang mengalami kenaikan pada tahun 2023, yaitu NP Stakeholder naik sebesar 1,61% dan NP Internal Prosess naik sebesar 5,66%, sedangkan 1 (satu) NP lainnya, yaitu NP *Learning & Growth* mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,22%.

Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target atas 11 sasaran strategis dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebagai berikut:

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	PERSPEKTIF / SASARAN STRATEGIS	NP / NSS	KRITERIA
1	**Stakeholder**	**104,67**	**Sangat Baik**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	104,49	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	104,32	Sangat Baik

No.	PERSPEKTIF / SASARAN STRATEGIS	NP / NSS	KRITERIA
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	105.20	Sangat Baik
2	**Internal Process**	**106.52**	**Sangat Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	106.97	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	100.27	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	120.00	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	98.84	Cukup
3	***Learning & Growth***	**102.96**	**Sangat Baik**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	102.29	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	105.67	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	109.09	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	94.79	Cukup
N PSS		**104.72**	**Istimewa**

Dari 11 sasaran strategis, terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis yang mencapai kriteria **Sangat baik**, dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencapai kriteria **Cukup.** Capaian sasaran strategis tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis tahun 2022, diperoleh hasil seperti grafik di bawah ini:

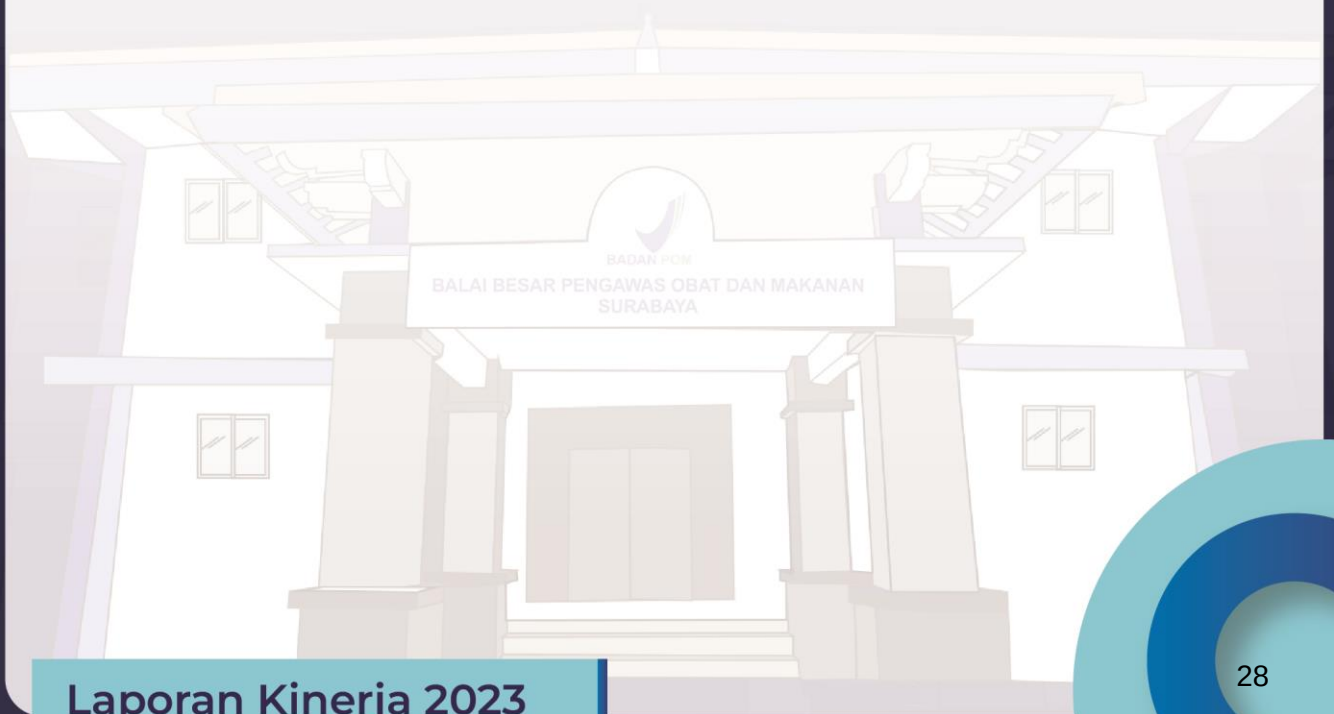

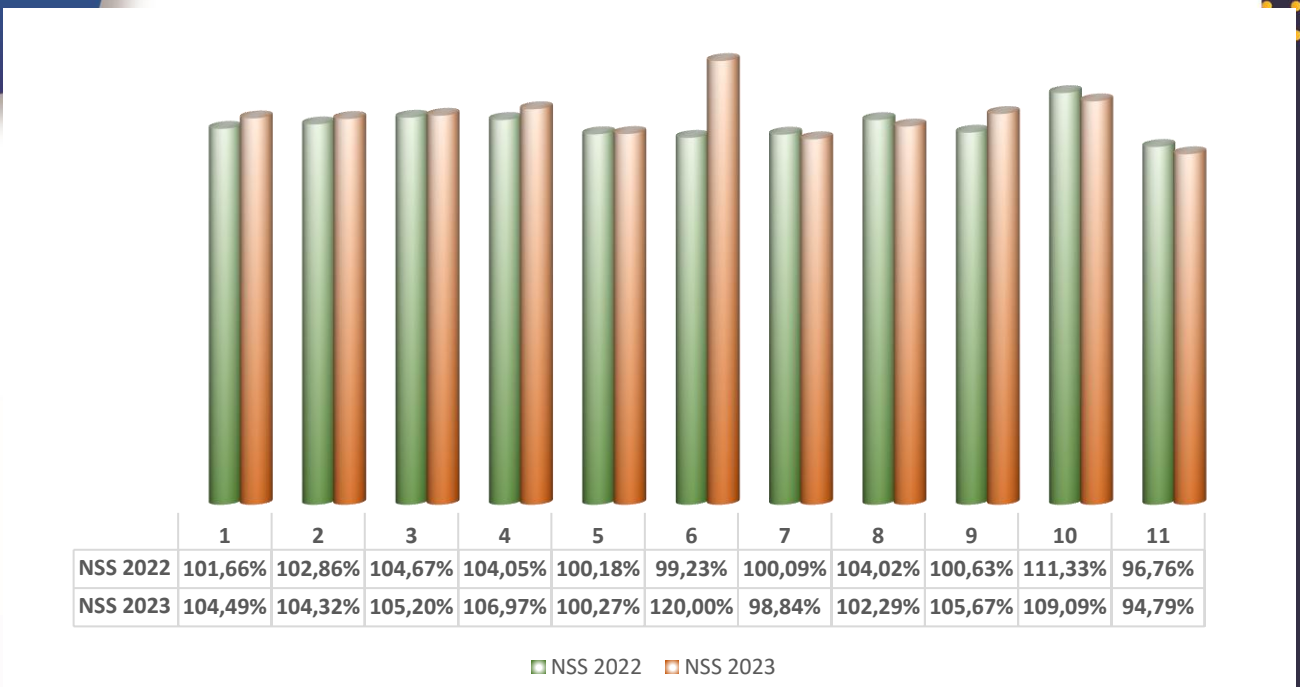

Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan 2023

Terdapat 7 (tujuh) NSS tahun 2023 yang naik dibandingkan tahun 2022, yaitu pada sasaran strategis:

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 2,83%
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 1,46%
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 0,53%
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 2,92%
- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 0,09%
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 20,77%
- Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal naik sebesar 5,04%

Terdapat 4 (empat) NSS tahun 2023 yang turun dibandingkan tahun 2022, yaitu pada sasaran strategis:

- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya turun sebesar 1,25%

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal turun sebesar 1,73%
- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan turun sebesar 2,24%
- Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel turun sebesar 1,97%.

Bila dibandingkan dengan pencapaian 2 (dua) balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai yang Setara

No.	SASARAN STRATEGIS	BBPOM di Surabaya	BBPOM di Semarang	BBPOM di Bandung
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	104,49%	103,86%	106,03%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	104,32%	99,46%	111,13%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	105,20%	104,18%	102,30%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	106,97%	108,19%	103,82%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	100,27%	101,00%	100,01%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	120,00%	120,00%	99,37%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	98,84%	107,76%	118,30%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	102,29%	104,16%	100,72%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	105,67%	106,01%	111,00%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	109,09%	120,00%	102,86%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	94,79%	95,60%	92,34%
	NPSS	**104,72%**	**106,14%**	**104,53%**

Keterangan : Capaian dengan kriteria **Cukup**

Dari data tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan balai yang setara di atas dihasilkan grafik perbandingan sebagai berikut:

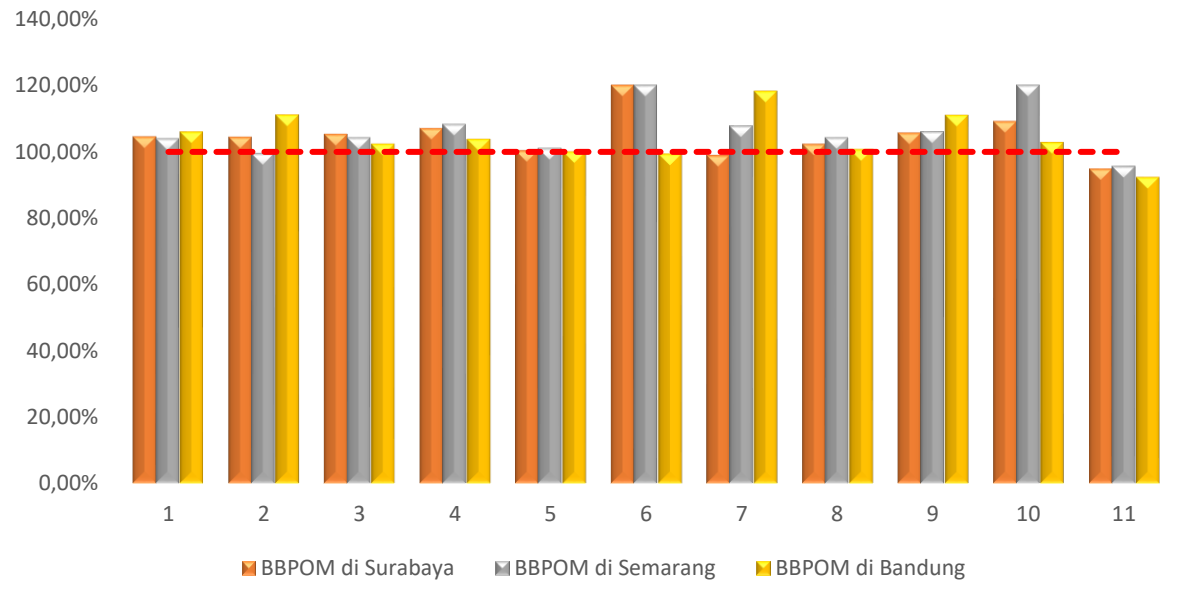

Gambar 9. Grafik Perbandingan Capaian Strategis dengan Balai Setara

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat masing-masing 2 sasaran strategis pada BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung yang targetnya belum mencapai 100%. Diantara 3 balai yang diperbandingkan, semua tidak mencapai target pada sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel, dimana IKU yang diukur adalah Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai EKA dan nilai IKPA. Terdapat 2 komponen yang berpengaruh yaitu realisasi anggaran pada IKPA dan efisiensi anggaran pada EKA yang sifatnya berlawanan. Jika realisasi anggaran tinggi, maka nilai efisiensi anggaran akan menjadi rendah. Selain itu juga terdapat kendala Pemutakhiran Halalaman III DIPA pada awal triwulan IV yang disebabkan revisi DIPA melalui DJA dalam rangka penambahan anggaran untuk gaji PPPK baru terbit pada tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan batas waktu Pemutakhiran Halaman III DIPA pada tanggal 13 Oktober 2023, sehingga nilai IKPA pada parameter Deviasi Halaman III DIPA relatif rendah. Secara keseluruhan, jika dilihat dari perhitungan NPSS ketiga balai diketahui bahwa NPS tertinggi diraih oleh BBPOM di Semarang, dan NPSS terendah pada BBPOM di Bandung.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjian 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92.54	100.59
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	90.62	107.88
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	94.81	105.34
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	85	116.44
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	83	92.22
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81	84.5	104.32
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.7	96.4	112.49
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.55	80.14	102.02
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91.98	101.08
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	97.3	104.62
		11	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	89.42	116.13
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95.54	96.51
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	67.73	104.20
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	70.86	110.72
		15	Indeks Layanan Publik	4.6	4.98	108.26
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65	70.43	108.35
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.38	94.39	101.08
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112	112	100.00
		19	Jumlah desa pangan aman	37	37	100.00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	24	24	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72	71.17	98.85
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89.7	94.23	105.05
		25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85.6	85.2	99.53
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85.5	90.35	105.67
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	87.4	99.32
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2.75	3	109.09
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95.2	90.24	94.79

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator terdapat 18 indikator BBPOM di Surabaya tahun 2023 yang mencapai target dengan kategori **Sangat Baik**, 5 (lima) indikator mencapai target dengan kategori **Baik,** dan 6 (enam) indikator mencapai target dengan kategori **Cukup.** Kategori **Sangat Baik** dan **Baik** menunjukkan bahwa indikator telah mencapai target tahun 2023.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Surabaya telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan NSS sebesar 104,49% dan kategori **Sangat Baik.**

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2023

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92.54	100.59	**Sangat Baik**

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

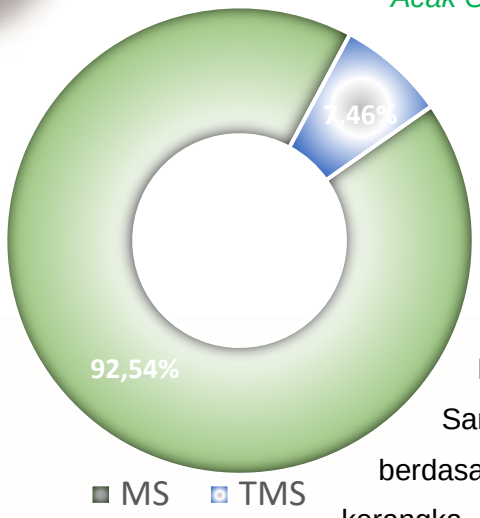

Gambar 10. Persentase Obat Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah 92.54%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 1784 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1651 sampel MS (memenuhi syarat), 133 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 89 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 39 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 5 sampel). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 **telah mencapai target** yaitu 100.59 % dengan kriteria "**Sangat Baik".**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

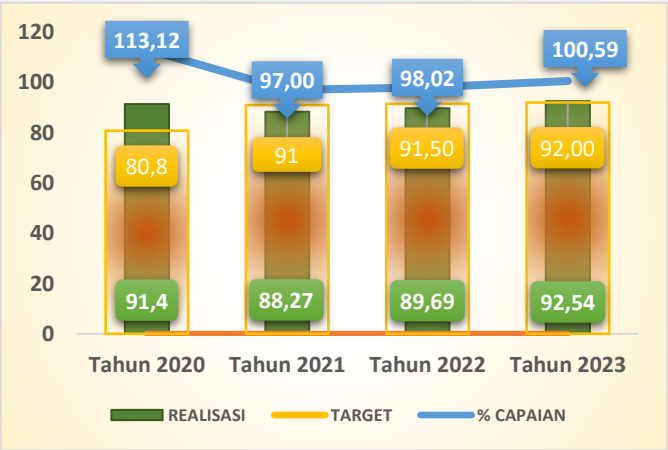

Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Terdapat penurunan realisasi di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, namun realisasi naik di tahun 2022 dan tahun 2023, begitu juga dengan capaiannya. Penurunan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 disebabkan adanya kenaikan target dari IKU tahun 2020 ke 2021 yaitu 80,8% menjadi 91,00%.

Untuk Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari 89,69% menjadi 92,54% sehingga indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah memenuhi target tahun 2023 yaitu dengan capaian sebesar 100,59% dengan kriteria **"Sangat Baik".**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 9. Perbandingan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT		REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	92,5	92,54	100,04	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	92,54		100,00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 telah mencapai target awal Renstra tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka target Renstra 2024 disesuaikan dengan realisasi 2023. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai/Melampaui**", namun mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024 seperti penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai balai koordinator untuk regionalisasi, sehingga tetap diperlukan upaya secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

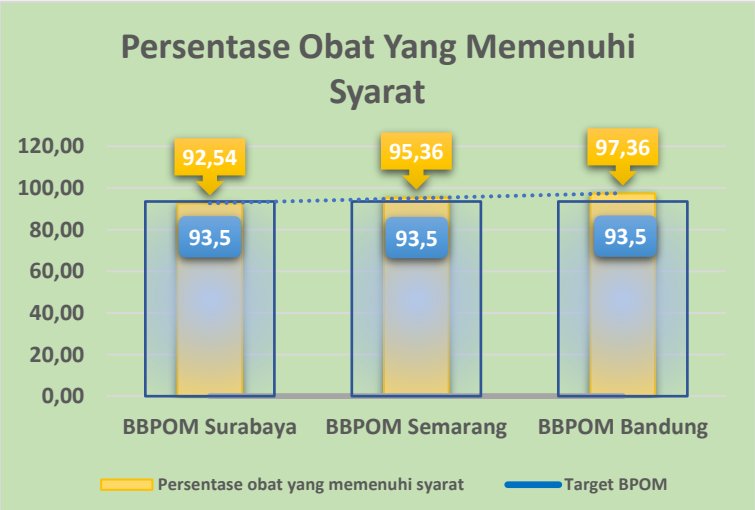

Gambar 12. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Realisasi dari

BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung berada di atas target BPOM/target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik**. Dari 1784 sampel obat acak yang disampling terdapat 133 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan terdiri dari komoditi Obat sebanyak 9 sampel, Obat Tradisional 96 sampel dan 28 sampel Kosmetik dengan rincian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Uji sebanyak 89 sampel (Obat tradisional 83 sampel, kosmetik 4 sampel, dan obat 2 sampel), dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan sebanyak 39 sampel (sampel kosmetik 24 sampel, obat tradisional 10 sampel, dan obat 5 sampel) serta TMS baik hasil uji dan ketentuan penandaan sebanyak 5 sampel (sampel obat tradisional 3, dan obat 2 sampel).

Penyumbang terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat adalah sampel obat tradisional dengan parameter uji mikrobiologi yaitu *enterobacteraceae* dan ALT sedangkan penyumbang terbanyak tidak memenuhi ketentuan penandaan adalah sampel kosmetik dengan rincian TMK penandaan antara lain alamat produsen tidak lengkap, tidak ada kode produksi/nomor batch, klaim berlebihan, tidak mencantumkan *expired date*.

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya dan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah

ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan	A	Pengadaan Sampel (acak)	24	kali/trip	24
		Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	1	pkt lelang	1

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi. Dari target 1785 sampel acak yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 1784 (99.94%) sampel disampling dan diuji, hal ini disebabkan jumlah sampel obat targeted telah melebihi dari target dengan adanya kasus dan penelusuran kasus antara lain dari sampel obat (kasus EG-DEG dan sampel pendampingan regionalisasi laboratorium), obat tradisional (kasus EG-DEG) dan sampel kosmetik dalam rangka sampel penelusuran kasus di sarana produksi kosmetik, sehingga dilakukan pengalihan jumlah sampel obat acak ke sampel targeted.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 10. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang memenuhi syarat	600,538,734	600,473,754	99.99	100.59	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium,

sehingga penyerapan anggaran maksimal. Selain itu terdapat pengurangan anggaran perlengkapan sampling, uang harian, dan penginapan perjalanan dinas pengambilan sampe untuk menambahkan anggaran pengadaan sampel Obat. Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diketahui bahwa target IKU Obat yang memenuhi syarat tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh tingginya TMK penandaan terutama dari sampel kosmetik dan tingginya TMS uji terutama dari sampel Obat Tradisional. Sehingga pada akhir tahun 2022 telah diadakan pertemuan dengan memanggil para pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksinya TMK (tidak memenuhi ketentuan) untuk diberikan pembinaan secara intensif sehingga menunjang meningkatnya capaian IKU Obat yang memenuhi syarat di tahun 2023. Telah dikembangkan inovasi untuk pendampingan pelaku usaha dalam pendaftaran produk obat tradisional yaitu Sippotra dan pendampingan pendaftaran produk kosmetik yaitu Jatim Glowing. Dengan inovasi ini diharapkan dapat menurunkan angka TMK penandaan pada produk obat tradisional dan kosmetik. Selain itu juga dikembangkan inovasi Kembang Aster sebagai salah satu bentuk intervensi pada penanggungjawab sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan supaya lebih memahami semua peraturan yang berlaku dan mematuhinya. Inovasi ini bekerjasama dengan komunitas farmasi sebagai penyelenggara pelatihan dengan narasumber dari BBPOM di Surabaya.

j. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya (terhadap triwulan sebelumnya)

Tabel 11. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Target Persentase obat yang Memenuhi Syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 92.19 % dari target 92 % (capaian 100.21%). Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji	Target Persentase obat yang Memenuhi Syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 92.26 % dari target 92 % (capaian 100.28%). Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuj	Target Persentase obat yang Memenuhi Syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 92.54 % dari target 92 % (capaian 100.59%). Semua sampel yang masuk di pengujian telah selesai diuji
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel dan melakukan intervensi kepada industri yang berada di Jawa Timur terkait	Percepatan pengujian sampel dan melakukan intervensi kepada industri yang berada di Jawa Timur terkait penandaan dan hasil uji TMS	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
	penandaan dan hasil uji TMS		
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel obat acak di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel obat acak di bulan berikutnya	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua komoditi obat acak dilakukan pengujian	Belum semua komoditi obat acak dilakukan pengujian	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober: Belum semua komoditi obat acak dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat 92.19%dari target 92 % (capaian 100.21%)	Kondisi November: Belum semua komoditi obat acak dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat 92.26%dari target 92 % (capaian 100.28%)	Kondisi Desember: Semua komoditi obat acak telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat 92.54%dari target 92 % (capaian 100.59%)
Status	**Close**	**Close**	**Close**

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	90.62	107.88		**Sangat Baik**

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Gambar 13. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak

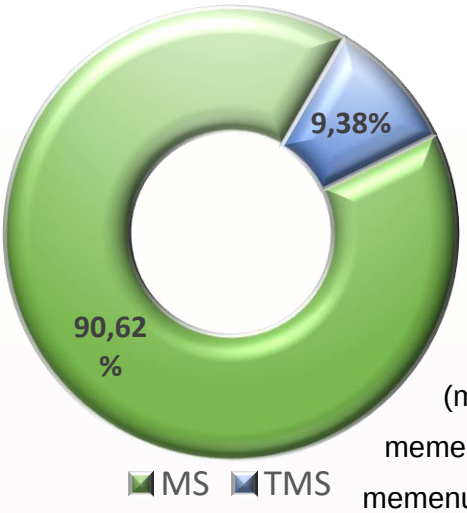

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah 90.62%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 757 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 686 sampel MS (memenuhi syarat), 71 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi memenuhi syarat hasil uji 58 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 11 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel, rusak 1 sampel). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 **telah mencapai target** yaitu 107.88 % dengan kriteria "**Sangat Baik".**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 hingga tahun 2023

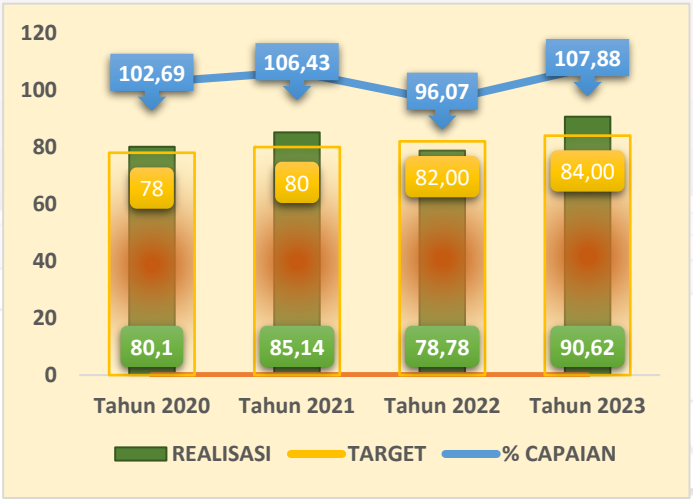

Terdapat penurunan realisasi di tahun 2022 dibandingkan dengan 2021, namun realisasi naik di tahun 2023, begitu juga dengan capaiannya. Penurunan capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 disebabkan karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap produk pangan baik terhadap mutu produk pangan maupun penandaan pada label produk.

Untuk Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari 78,78% menjadi 96,07% sehingga

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah memenuhi target tahun 2023 yaitu dengan capaian 107.88%. dengan kriteria **"Sangat Baik"**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	86	92.54	107.60	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	90.62		102.12	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai/Melampaui**", namun mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024 seperti penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai balai koordinator untuk regionalisasi, sehingga tetap diperlukan upaya secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

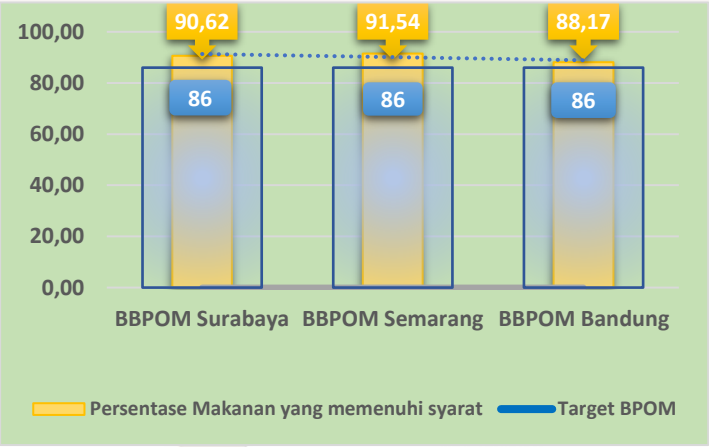

Gambar 15. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung namun realisasi dari ke 3 UPT berada di atas target BPOM/target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 **telah mencapai target** yaitu 107.88 % dengan kriteria "**Sangat Baik".**

Dari pemeriksaan 757 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 686 sampel MS (memenuhi syarat), 71 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 58 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 11 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel, rusak 1 sampel).

Pada pengujian kimia tidak memenuhi syarat hasil uji antara lain:

1. Penggunaan pengawet yang melebihi batas, ratio pengawet yang melebihi batas pada produk manisan, kripik, selai, bumbu masak.
2. Penggunaan pemanis yang dilarang seperti sakarin, siklamat pada produk manisan, kripik, selai.
3. Tidak Memenuhi syarat enzim diastase dan HMF (*Hidroxymetilfurfural*) pada produk pangan madu.
4. Tidak memenuhi syarat sulfit pada produk gula Kristal dan gula kelapa
5. Tidak Memenuhi Syarat kadar Nitrit pada produk sosis
6. Penggunaan pewarna yang dilarang seperti Ponceau, *Sunset Yellow* pada produk saus sambal dan saus tomat

Sedangkan hasil pengujian TMS Mikrobiologi meliputi parameter AKK (Angka Kapang Khamir) pada produk kopi dan keripik, Angka *Enterobacteriaceae* pada produk snack dan puding.

TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan pada sampel makanan acak yang disampling dikarenakan pencantuman label pada produk tidak sesuai yang dengan label yang telah disetujui saat registrasi produk, misalnya: mencantumkan klaim, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. TMK Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan

evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tercapai

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1	pkt lelang	1
		Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (acak)	8	kali/trip	8

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pengujian laboratorium sampel makanan acak dan pengadaan sampel makanan acak, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan acak adalah 755 sampel, dengan realisasi sampling adalah 757 sampel atau 100,26%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 14. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	287,168,784	287,118,234	99.98	107.88	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena persentase capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan reagen, media dan baku pembanding yang meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Selain itu, pengurangan anggaran perjadin biasa juga dilakukan untuk menambah ke anggaran perjadin dalam kota untuk kegiatan pengadaan sampel makanan. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tidak tercapai, sehingga pada akhir tahun 2022 telah diadakan pertemuan dengan memanggil para pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksinya TMK (tidak memenuhi ketentuan) untuk diberikan pembinaan secara intensif sehingga menunjang meningkatnya capaian IKU Makanan yang Memenuhi Syarat. Selain itu juga terus digalakkan inovasi Gempur Jatim dengan melakukan pendampingan pendaftaran produk pada pelaku usaha makanan, hal ini berkontribusi pada turunnya TMS penandaan produk makanan di tahun 2023.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 15. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai	Target Persentase makanan yang Memenuhi Syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 90,62 % dari target 84 % (capaian 107,88%). Semua sampel yang masuk di pengujian telah selesai diuji
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	Semua Pengujian sampel makanan telah selesai dilakukan
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya.	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya.	Semua Pengujian sampel makanan telah selesai dilakukan.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 734 sampel acak yang disampling sd bulan Oktober (1 sampel rusak tidak masuk lab), terdapat 206 sampel yang belum dilakukan pengujian.	Dari 750 sampel acak yang disampling sd bulan November (1 sampel rusak tidak masuk lab), terdapat 67 sampel yang belum dilakukan pengujian.	Semua Pengujian sampel makanan telah selesai dilakukan.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 91.67 %dari target 84 % dengan capaian 109.13%	Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 90,19 %dari target 84 % dengan capaian 107,37%	Kondisi Desember: Semua komoditi makanan acak telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat 90.62%dari target 84 % (capaian 107.88%).
Status	**Close**	**Close**	**Close**

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	94.81	105.34		**Sangat Baik**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Gambar 16. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted

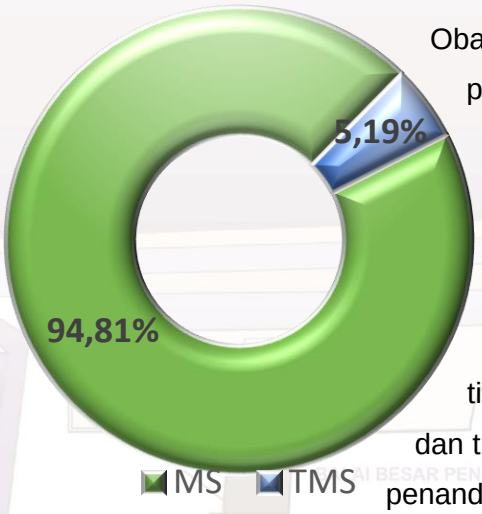

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 adalah 94,81%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 693 sampel targeted obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 657 sampel MS (memenuhi syarat), 36 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 21 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 14 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 **telah mencapai target** yaitu 105.34 % dengan kategori "**Sangat Baik"**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

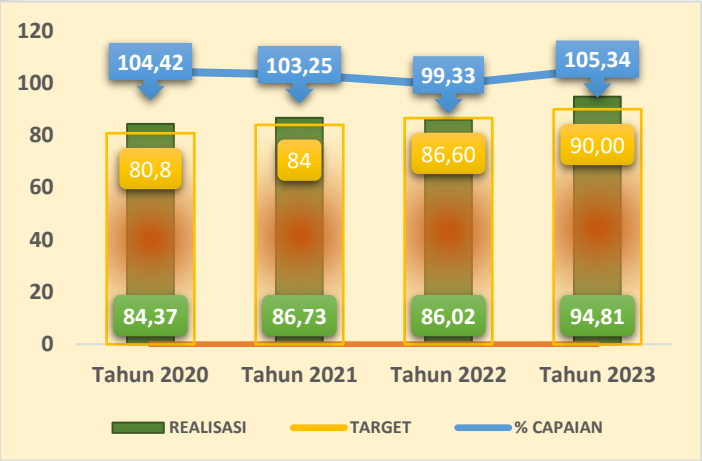

Gambar 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2020 hingga tahun 2023

Terdapat kenaikan realisasi tahun 2021 dibanding 2020, namun terjadi penurunan di tahun 2022, sedangkan capaian terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021 disebabkan karena adanya perbedaan kategori penandaan kosmetik di tahun 2021 dengan penandaan kosmetik di semester 1 tahun 2022, selain itu penurunan capaian persentase obat yang aman dan bermutu tahun 2021 disebabkan adanya kenaikan target dari IKU tahun 2021 ke 2022 yaitu 84 % menjadi 86,60%.

Untuk Realisasi Persentase Obat Yang aman dan bermutu pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari 86,02% menjadi 94,81% sehingga Persentase Obat yang Aman dan Bermutu telah memenuhi target tahun 2023 yaitu dengan capaian 105.34% dengan kategori **"Sangat Baik"**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	92.3	94.81	102.72	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	94.81		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu telah melampaui target awal Renstra tahun 2024 sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai/Melampaui**", namun mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024 seperti penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai balai koordinator untuk regionalisasi,

sehingga tetap diperlukan upaya secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

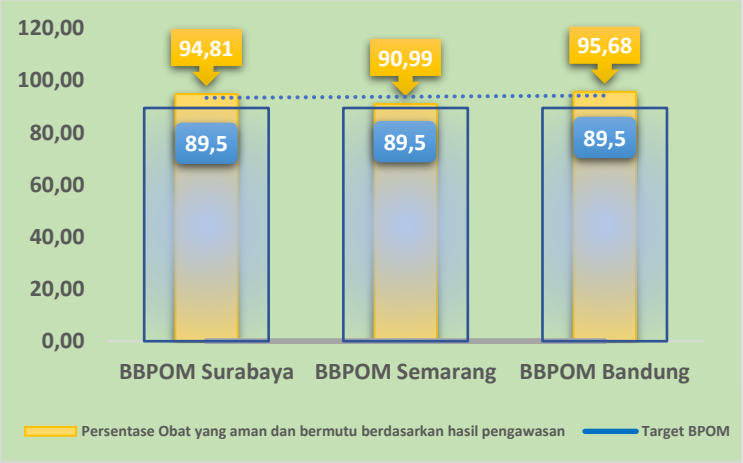

Gambar 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang namun secara keseluruhan realisasi IKU 3 Balai di atas target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori **"Sangat Baik"**. Dari 693 sampel obat targeted yang disampling terdapat 36 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari komoditi Obat sebanyak 3 sampel (obat 1 sampel, rokok 2 sampel), Obat Tradisional 17 sampel , kuasi 1 sampel dan 15 sampel Kosmetik dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 21 sampel (Obat tradisional 15 sampel; kosmetik 3 sampel; obat 3 sampel), tidak memenuhi ketentuan penandaan 14 sampel (kosmetik 11 sampel; obat tradisional 2 sampel, dan sampel kuasi 1 sampel) dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel kosmetik

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

Dari target 666 sampel targeted yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 693 (104,50%) sampel yang disampling dan diuji, hal ini disebabkan adanya sampel kasus dan penelusuran kasus antara lain dari sampel obat (kasus EG-DEG dan

sampel pendampingan regionalisasi laboratorium, obat tradisional (kasus EG-DEG) dan sampel kosmetik dalam rangka sampel penelusuran kasus di sarana produksi kosmetik.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan. Dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (targeted)	6	kali/trip	6
		Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (targeted)	1	pkt lelang	1

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang aman dan bermutu antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 18. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase obat yang Aman dan Bermutu	143.623.266	143.607.726	99,99	105,34	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium. Selain itu, penambahan anggaran pengadaan sampel obat, OT, SK, Kos dan perlengkapan sampel juga dilakukan dengan mengurangi anggaran perjadin biasa, dalam kota serta perlengkapan sampel sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diketahui bahwa target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena masih terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak adalah dari sampel kosmetik yang TMK penandaan dan sampel Obat Tradisional dengan TMS uji. Sehingga pada akhir tahun 2022 telah diadakan pertemuan dengan memanggil para pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksinya TMK (tidak memenuhi ketentuan) untuk diberikan pembinaan secara intensif sehingga menunjang meningkatnya capaian IKU Obat yang aman dan bermutu di tahun 2023. Telah dikembangkan inovasi untuk pendampingan pelaku usaha dalam pendaftaran produk obat tradisional yaitu Sippotra dan pendampingan pendaftaran produk kosmetik yaitu Jatim Glowing. Dengan inovasi ini diharapkan dapat menurunkan angka TMK penandaan pada produk obat tradisional dan kosmetik. Selain itu juga dikembangkan inovasi Kembang Aster sebagai salah satu bentuk intervensi pada penanggungjawab sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan supaya lebih memahami semua peraturan yang berlaku dan mematuhinya. Inovasi ini bekerjasama dengan komunitas farmasi sebagai penyelenggara pelatihan dengan narasumber dari BBPOM di Surabaya.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase obat yang yang aman dan bermutu sudah tercapai. Belum semua sampel targeted yang disampling telah dilakukan pengujian (dari 586 sampel obat targeted yang masuk ke laboratorium, yang belum diuji adalah 85 sampel).	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase obat yang yang aman dan bermutu sudah tercapai. Belum semua sampel targeted yang disampling telah dilakukan pengujian (dari 640 sampel obat targeted yang masuk ke laboratorium, yang belum diuji adalah 68 sampel).	Target Persentase obat yang aman dan bermutu telah tercapai yaitu dengan realisasi 94.81 % dari target 90 % (capaian 105,34%). Semua sampel yang masuk di pengujian telah selesai diuji
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel obat targeted di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel obat targeted di bulan berikutnya	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 640 sampel targeted yang disampling sd bulan Oktober, terdapat 68 sampel yang belum dilakukan pengujian	Dari 685 sampel targeted yang disampling sd bulan November, terdapat 60 sampel yang belum dilakukan pengujian	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	kondisi Oktober: Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94.93 % dari target 90 % dengan capaian 105.48%	kondisi November: Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94.88 % dari target 90 % dengan capaian 105.42%	Kondisi Desember: Semua komoditi obat acak telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutut 94.81 %dari target 90 % (capaian 105,34%)
Status	**open**	**open**	**close**

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	85%	116,44		**Sangat Baik**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

% Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

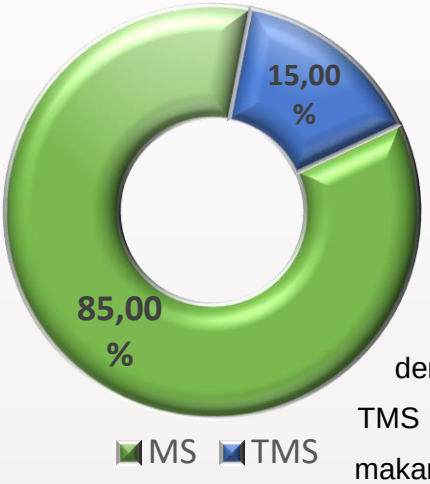

Gambar 19. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 240 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 204 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 36 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di tahun 2023 **telah mencapai target** yaitu 116,44 % dengan kategori " **Sangat Baik".**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

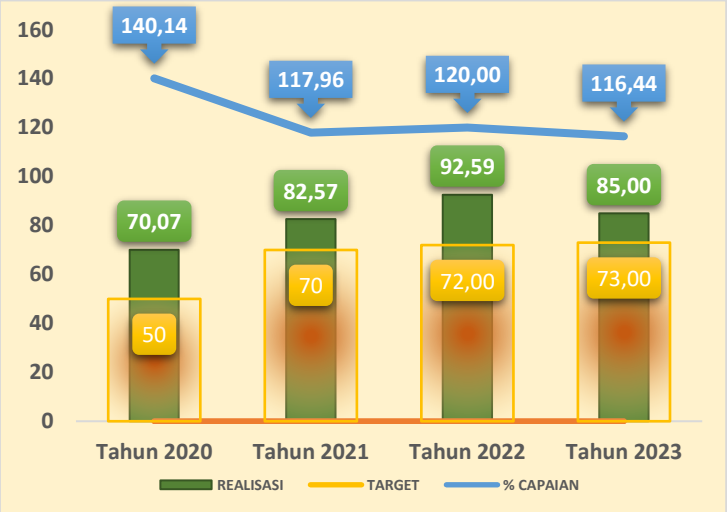

Gambar 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 hingga tahun 2023

Terjadi kenaikan realisasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022, namun terjadi penurunan capaian di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dan naik kembali di tahun 2022. Penurunan capaian secara signifikan di tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan target di tahun 2021.

Pada tahun 2023 terdapat penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2022, begitu juga dengan capaiannya dari 120% mengalami penurunan menjadi 116,44 %. namun target pada indikator Persentase Makanan Yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan target tahun 2023 telah tercapai dengan capaian sebesar 116,44% dan kategori "**Sangat Baik".**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Aman dan Bermutu tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	75	85	113.33	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	85.3		99.65	Akan Tercapai	▲

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 **telah mencapai** target 2024 pada Renstra awal sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**", mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024 seperti penunjukan BBPOM di

Surabaya sebagai balai koordinator untuk regionalisasi, sehingga diperlukan upaya lebih agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

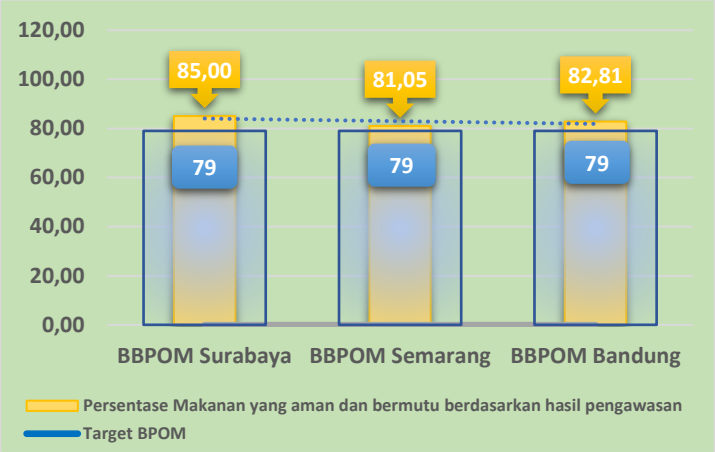

Gambar 21. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Realisasi BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang telah melebihi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga tahun 2023 telah mencapai target yaitu 116,44% dengan kategori **Sangat Baik**.

Dari pemeriksaan 240 sampel targeted makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 204 sampel MS (memenuhi syarat) dan 36 sampel tidak memenuhi syarat hasil uji.

Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil TMS tersebut terdapat pada:

- Tujuh sampel kasus kerupuk mentah yang mengandung pemanis yang dilarang
- Sepuluh sampel PJAS (dari 72 sampel PJAS) yang terdiri atas: TMS Sakarin pada saus pentol, TMS Siklamat pada Jelly, TMS Mikrobiologi *MPN E-Coli* pada es teh, es campur, es selasih, es melon, mie dan nasi kuning
- Dua sampel lokal spesifik TMS Mikrobiologi ALT (Angka Lempeng Total)
- Dua sampel kasus minyak goreng rekomendasi dari WASPROD Pangan Olahan Badan POM TMS Vitamin A
- Empat sampel kasus (2 minuman dan 2 AMDK)
- Satu sampel AMIU (Air Minum Isi Ulang)

- Enam air mineral (TMS E Coli, ALT) dan
- Empat sampel UMKM (TMS Mikrobiologi E Coli dan ALT)

Sampel PJAS merupakan sampel yang disampling di sekolah yang sudah diintervensi oleh BBPOM di Surabaya di Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Batu. Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tuban, sehingga masih perlu dilakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut agar PJAS yang dikonsumsi anak sekolah seluruhnya aman. Upaya lain yang telah dilakukan adalah bahwa BBPOM di Surabaya tetap konsisten untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu tercapai

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1	pkt lelang	1
		Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (Targeted)	4	kali/trip	4

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Pengujian laboratorium sampel makanan targeted dan Pengadaan sampel makanan acak, serta melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan targeted adalah 187 sampel, dengan

realisasi sampling adalah 240 sampel atau 128,34%. Kelebihan jumlah sampel karena adanya sampel kasus dan penelusuran kasus (kerupuk, minuman kekinian, AMDK) serta untuk memenuhi ruang lingkup pengujian kimia maupun pengujian mikrobiologi. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 22. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	151.927.216	151.900.472	99,98	116,44	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen yang diperoleh dari penghapusan anggaran penggandaan dan honor panitia pengadaan reagen dan media mikro, serta pengurangan anggaran media mikro, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Selain itu, dilakukan pengurangan anggaran pengadaan sampel makanan, pengurangan jumlah trip perjalanan dinas dalam kota dari 25 menjadi 24 kali, serta pengurangan anggaran transpor perjalanan dinas biasa untuk menambah anggaran uang harian. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah tercapai bahkan melampaui 120%, sehingga pada tahun 2023 dilakukan pengusulan untuk menaikkan target tahun 2024 pada evaluasi Renstra paruh waktu tahun 2020-2022 serta reviu RKT 2024.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 23. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang aman dan bermutu sudah tercapai	Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun Target Persentase Makanan yang aman dan bermutu sudah tercapai	Target Persentase makanan yang aman dan bermutu telah tercapai yaitu dengan realisasi 85 % dari target 73 % (capaian 116.44%). Semua sampel yang masuk di pengujian telah selesai diuji
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	Semua Pengujian sampel makanan targeted telah selesai dilakukan
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan targeted di bulan berikutnya	Semua Pengujian sampel makanan targeted telah selesai dilakukan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 217 sampel targeted yang disampling sd bulan Oktober, terdapat 41 sampel yang belum dilakukan pengujian	Dari 219 sampel targeted yang disampling sd bulan November, terdapat 5 sampel yang belum dilakukan pengujian	Semua Pengujian sampel makanan targeted telah selesai dilakukan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 83.52% dari target 73 % dengan capaian 114.41%	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 85.38% dari target 73 % dengan capaian 116.96%	Kondisi Desember: Semua komoditi makanan targeted telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu 85%dari target 73 % (capaian 116.44%)
Status	**close**	**close**	**close**

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 24. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	83,00	92,22		**Cukup**

Persentase Pangan Fortifikasi diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS dibagi Total Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat

berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai Besar POM di Surabaya. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

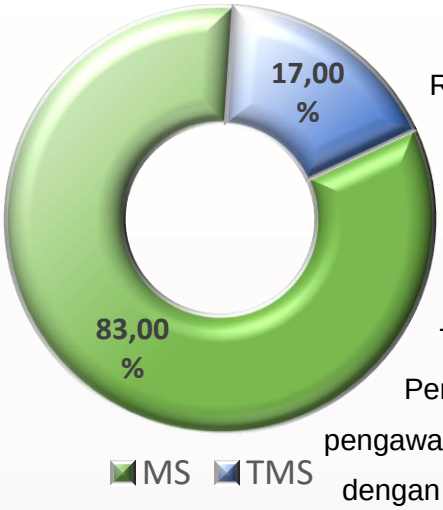

Gambar 22. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2023 sebesar 83,00%. Persentase tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan 100 sampel yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 83 sampel MS (memenuhi syarat), 17 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Tidak Mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 92,22% dan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

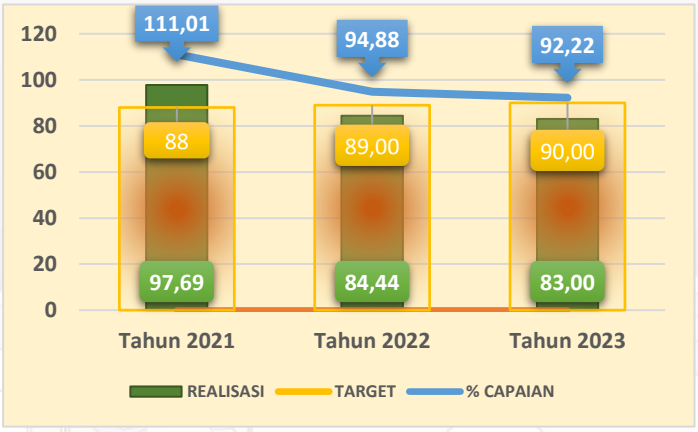

Gambar 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 hingga tahun 2023

Terdapat penurunan realisasi di tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan 2021, begitu juga dengan capaiannya. Penurunan capaian persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dan 2023 disebabkan adanya penambahan parameter uji di Pedoman Sampling tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan Pedoman Sampling di tahun 2021. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu dari 84,44% menjadi 83% sehingga Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum memenuhi target tahun 2023 dengan capaian sebesar 92,22% dan kategori **Cukup.**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 25. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target renstra 2024

PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	90	83	92.22	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	85		97.65	Akan Tercapai	▲

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tahun 2023 belum mencapai target tahun 2024 sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 diturunkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori **"Akan Tercapai"**, mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024 seperti penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai balai koordinator untuk regionalisasi, sehingga diperlukan upaya lebih sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

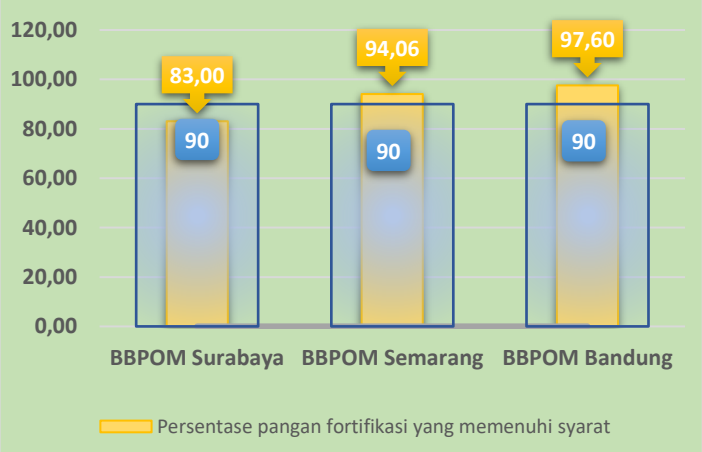

Gambar 24. Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat hasil pengawasan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya (berada dibawah target BPOM/target nasional). Realisasi dari ke 2 UPT BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung berada di atas target BPOM/target nasional).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun tahun 2023 tidak mencapai target dengan kritera **Cukup**. Sampai dengan triwulan III tahun

2023 jumlah sampel pangan fortifikasi yang masuk ke Fungsi Pengujian sebanyak 100 sampel dan sudah dilakukan pengujian dengan rincian: 55 sampel Garam, 15 sampel Tepung Terigu dan 30 sampel Minyak Goreng Sawit (MGS). Dari 100 sampel yang selesai diuji terdapat 83 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 17 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel TMS tersebut terdiri atas:

- Lima sampel garam beryodium dengan tidak memenuhi standar kadar KIO3,
- Tiga sampel tepung terigu dengan tidak memenuhi syarat Penetapan Kadar Asam Folat dan 2 sampel TMS Identifikasi Fe, dan
- Sembilan sampel Minyak Goreng Sawit (1 sampel TMS Asam Lemak Bebas dan 8 sampel TMS karena tidak mengandung Vitamin A).

Untuk sampel fortifikasi dengan TMS Kadar Asam Folat dan Identifikasi Fe merupakan sampel dengan hasil uji yang TMS berulang seperti tahun 2022. Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya sudah berkirim surat ke Badan POM dengan tembusan P3OMN dan melakukan intervensi dengan pemeriksaan sarana terhadap produsen tepung terigu tersebut serta melakukan pembinaan kepada sarana agar menggunakan fortifikan sesuai yang dipersyaratkan SNI.

Meningkatnya hasil pengujian yang TMS pada Sampel Minyak Goreng sawit terdapat pada sampel yang disampling di sarana pengemas (*Repacker*). Untuk Minyak Goreng Sawit, karena Parameter Vitamin A (total) dan Bilangan Peroksida yang diatur di SNI hanya terhadap sampel yang diambil di Pabrik, maka apabila sampel yang diambil di Peredaran dinyatakan TMS Vitamin A (total) dan/atau Bilangan Peroksida, maka disimpulkan sebagai Memenuhi Syarat (MS).

Hasil Uji yang TMS pada Minyak Goreng Sawit disebabkan antara lain :

1. Sarana Pengemas MGS membeli bahan baku MGS tanpa fortifikan Vitamin A dengan alasan tidak bisa bersaing dengan pabrik MGS bila membeli bahan baku MGS yang sudah ada penambahan Vitamin A dikarenakan harganya lebih mahal.
2. Tidak mempunyai fasilitas peralatan produksi Mixing untuk melakukan penambahan vitamin A, sehingga Kadar Vitamin A dalam produk kurang dari kadar yang dipersyaratkan.
3. Sarana penyimpanan Vitamin A tidak sesuai yang dipersyaratkan.
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha Pengemas terkait peraturan yang ditetapkan.

Kegiatan sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman sampling di tahun 2023 dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah stunting tertinggi kedua di Jawa Timur dan Kota Surabaya yang merupakan wilayah stunting terendah di Jawa Timur.

Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha garam (UMKM) dan pengemas minyak goreng kelapa sawit agar menggunakan fortifikan sesuai standar. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tercapai

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Inspeksi	QIA.008.051	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel Pangan Fortifikasi	20	kali/trip	9

Kegiatan yang menunjang IKU persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Tahun 2023 pengadaan sampling pangan fortifikasi sebanyak 100 sampel mampu dilakukan dengan 9 kali/trip dari target 1 tahun yaitu 20 kali/trip dan seluruhnya telah selesai diperiksa dan diuji.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 26. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	63.394.000	63.361.802	99,95	92,22	**75% (Tidak Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran. Terdapat pengurangan anggaran belanja bahan sampel fortifikasi untuk dialihkan ke belanja barang persediaan reagen. Penambahan jumlah trip DK pengadaan sampel fortifikasi

dari 7 kali menjadi 8 kali yang diperoleh dari pengurangan anggaran uang harian. Penambahan anggaran pengadaan sampel pangan fortifikasi yang didapat dari penghapusan anggaran reagen, pengurangan anggaran perlengkapan sampling, serta, pengurangan jumlah trip perjadin biasa dan dalam kota. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, target tahun 2023 tidak tercapai. Lokasi sampling adalah wilayah tinggi *stunting* dan rendah *stunting* sehingga sangat mempengaruhi capaian IKU, maka upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya adalah tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk garam, SNI 3751-2018 untuk tepung terigu dan SNI 7709:2019 untuk minyak goring sawit. Sudah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit (MGS) yang tidak memenuhi syarat. Pada tanggal 8 November 2023 dilakukan FGD Pangan Fortifikasi dengan mengundang 30 pelaku usaha pangan fortifikasi dan petugas BBPOM di Surabaya dengan Narasumber dari BPOM dan Akademisi Universitas Airlangga. Dengan adanya FGD ini diharapkan pelaku usaha pangan fortifikasi konsisten menerapkan CPPOB sehingga produk pangan fortifikasi memenuhi syarat dan IKU bisa tercapai.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 27. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada Indikator Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/ Permasalahan	Terdapat hasil uji tidak memenuhi syarat sd bulan Juli adalah 8 sampel (garam= 5 sampel ; tepung terigu= 3 sampel) dari 100 sampel jenis fortifikasi yang disampling dan mengakibatkan Persentase fortifikasi yang Memenuhi Syarat tidak tercapai (realisasi 88.57 dari target 90 sehingga capaian 98.41%). Telah dilakukan sampling MGS sebanyak 30 sampel tetapi belum dilakukan	Terdapat hasil uji tidak memenuhi syarat sd bulan Agustus adalah 17 sampel (garam= 5 sampel ; tepung terigu= 3 sampel, MGS= 9 sampel) dari 100 sampel jenis fortifikasi yang disampling dan mengakibatkan Persentase fortifikasi yang Memenuhi Syarat tidak tercapai (realisasi 83% dari target 90 % sehingga capaian 92.22 %). Semua sampel fortifikasi telah disampling dan diuji	Terdapat hasil uji tidak memenuhi syarat sd bulan September adalah 17 sampel (garam= 5 sampel ; tepung terigu= 3 sampel, MGS= 9 sampel) dari 100 sampel jenis fortifikasi yang disampling dan mengakibatkan Persentase fortifikasi yang Memenuhi Syarat tidak tercapai (realisasi 83% dari target 90 % sehingga capaian 92.22 %). Semua sampel fortifikasi telah disampling dan diuji

Keterangan	Juli	Agustus	September
	pengujian terhadap sampel MGS		
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Akan melakukan intervensi kepada industri yang berada di Jawa Timur terkait hasil uji TMS	Akan melakukan intervensi kepada industri yang berada di Jawa Timur terkait hasil uji TMS
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel pangan fortifikasi (MGS) di bulan berikutnya	Akan melakukan intervensi kepada industri yang berada di Jawa Timur terkait hasil uji TMS	Akan melakukan intervensi kepada industri yang berada di Jawa Timur terkait hasil uji TMS
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Sampel fortifikasi hingga bulan Juli adalah garam konsumsi Beryodium dan tepung terigu - Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 98.41%	semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian	semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Juli: - Realisasi fortifikasi yang MS 88.57% dari target 90 % dengan capaian 98.41 %; - Telah dilakukan seluruh sampling fortifikasi sesuai dengan target yaitu 100 sampel	Kondisi Agustus: - Realisasi fortifikasi yang MS 83% dari target 90 % dengan capaian 92.22 %; - Telah dilakukan seluruh sampling fortifikasi dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target yaitu 100 sampel	Kondisi September: - Realisasi fortifikasi yang MS 83% dari target 90 % dengan capaian 92.22 %; - Telah dilakukan seluruh sampling fortifikasi dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target yaitu 100 sampel
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	**close**	**close**	**close**

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Lingkup BBPOM di Surabaya

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS 104,32% dengan kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 28. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,00	84,50	104,32		**Sangat Baik**

Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\underline{R_a}$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (*Knowledege)* bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik

pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada akhir tahun 2023 **telah diperoleh hasil** pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (***awareness index***) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yaitu 84,50 terhadap target 81.0 atau dengan capaian 104,32% dan kategori **Sangat Baik**.

Gambar 25. Nilai Komponen Pendukung Indeks Kesadaran Masyarakat

Indeks kesadaran Masyarakat terdiri dari tiga komponen pendukung yaitu nilai pengetahuan, sikap dan perilaku. Capaian untuk propinsi Jawa Timur untuk tiga nilai tersebut adalah: nilai pengetahuan 90,68; nilai sikap 89,08 dan nilai perilaku 73,74. Dari data tersebut nampak bahwa nilai perilaku adalah yang paling rendah, artinya meskipun masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang keamanan dan mutu obat dan makanan namun belum tentu merubah perilakunya. Survey pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kesadaran (*awareness index)* Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

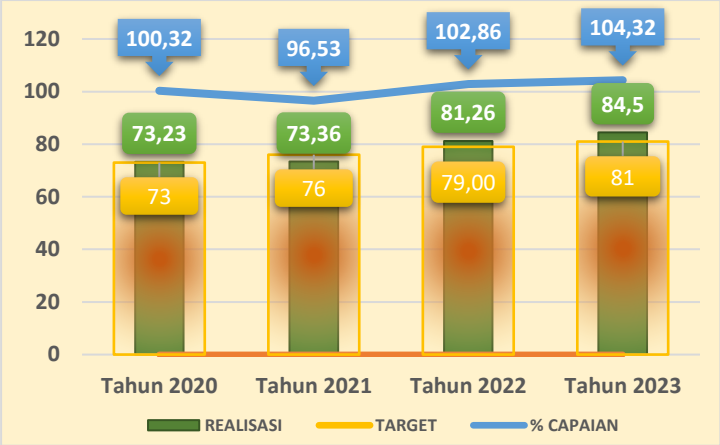

Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran (awareness index) Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 sampai tahun 2023

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun, terdapat sedikit penurunan capaian di tahun 2021 dibanding tahun 2020, dan meningkat lagi secara signifikan di tahun 2022, kemudian meningkat lagi di tahin 2023. Hal ini merupakan hasil dari upaya BBPOM di Surabaya untuk memberikan layanan publik yang hampir menyerupai layanan secara langsung misalnya KIE bersama tokoh masyarakat, *Live Chat*, Cangkrukan, Anda Menanyakan Kami Menjawab, Klinik POM, dll yang memungkinkan masyarakat melakukan konsultasi secara langsung meskipun dengan perantaraan teknologi informasi. Layanan secara langsung melalui ruang layanan ULPK juga semakin ditingkatkan dengan meningkatkan sarana prasarana di ruang layanan yang memberikan rasa nyaman kepada konsumen yang datang langsung ke kantor, misalnya fasilitas computer dan printer yang digunakan oleh pelanggan, pojok *refreshment* yang menyediakan kopi, teh, jamu, air minum dan kue kue yang dapat dinikmati oleh konsumen. Jam layanan juga semakin ditingkatkan dengan tetap memberikan layanan selama jam istirahat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 29.Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dengan Target Renstra 2024

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	84	84.5	100.60	Tercapai / Melampaui	▲

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu Dan Unit Pengampu)	84.5		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai**", namun mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024, maka tetap diperlukan upaya secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai yaitu dengan menghasilkan inovasi-inovasi dan kinerja yang lebih baik misalnya memperbanyak publikasi melalui media sosial serta memperluas cakupan KIE yang dilaksanakan secara langsung terutama kepada masyarakat pedesaan yang jarang membuka media sosial.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

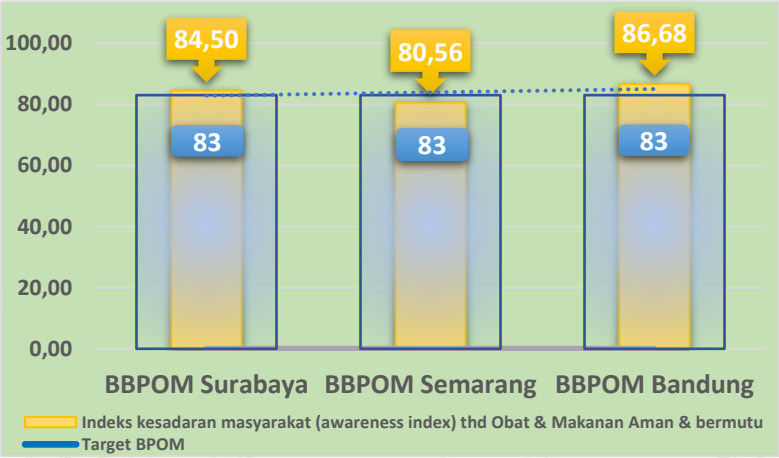

Gambar 27. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Hanya BBPOM di Bandung yang memiliki realisasi di atas target nasional, sedangkan realisasi BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang berada di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat secara nasional

adalah 89,32; nilai sikap masyarakat adalah 88,16 dan nilai perilaku masyarakat adalah 76,51. Dari hasil survey tahun 2023 diketahui bahwa nilai perilaku mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut: obat 87,12 (Baik); Obat Tradisional 83,19 (Baik); Suplemen Kesehatan 82,58 (Baik); Kosmetik 83,47 (Baik); Pangan Olahan 85,53 (Baik). Semua indeks komoditi menunjukkan peningkatan dari tahun 2022.

Sedangkan di Tingkat Propinsi Jawa Timur, Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu per komoditi adalah sebagai berikut : Obat 88,62 (Baik); Obat Tradisional 82,49 (Baik); Suplemen Kesehatan 81,88 (Baik); Kosmetik 81,20 (Baik) dan Pangan Olahan 86,11 (Baik).

Jika dibandingkan antara capaian indeks komoditi Tingkat nasional dan Propinsi Jawa Timur maka untuk 2 (dua) komoditi yaitu Obat dan Pangan Olahan indeks di Tingkat Propinsi Jawa Timur lebih tinggi dari Tingkat Nasional.

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait *variable* kadaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya infromasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua *variable*, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian-kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus Sirup yang tercemar EG DEG, kosmetik illegal dan mengandung bahan berbahaya, obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat, produk kadaluwarsa dll.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain

tentang: petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal yang lain ditanyakan antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 90,68 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 73,74. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu serta mendukung berbagai program pemerintah terkait pengawasan obat dan makanan.

Setelah masa pandemi berakhir, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi

Covid-19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media sosial antara lain *WhatsApp*, *email*, *google review*, *Instagram*, *Twitter*, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin mengetahui seluk beluk suatu organisasi termasuk BPOM.

Selama tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 3.190 layanan tatap muka langsung, melalui *WhatsApp*, telepon*, email* dan *google review*. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor *WhatsApp* BBPOM di Surabaya menggunakan *platform* kegiatan Cangkrukan dengan *tagline* "Anda Menanyakan Kami Menjawab". Selama tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 21 kali yang diikuti oleh 236 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, UMKM kosmetika, calon pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain : Standar Pelayanan Publik untuk Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan IP CPPOB, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan SPA CPKB, dan konsultasi Anda Menanyakan Kami Menjawab (AMKM).

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial secara maksimal karena telah terbiasa menggunakan layanan melalui media sosial selama masa pandemi Covid-19 dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat meskipun masa pandemi sudah semakin mereda dan berubah menjadi endemi. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya *Instagram, Twitter*, dan *Facebook*. Selama tahun 2023, BBPOM Surabaya telah menayangkan 853 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain: Tips Mengolah Daging Kurban, Stop Gratifikasi, Alur Layanan Informasi & Pengaduan, Perangi Penyalahgunaan Obat, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu, Bahaya Obat Setelan, Kenali Logo Pada Kemasan Obat, Buang sampah obat dengan aman, Cara buang sampah obat dengan perhatian khusus, Pengobatan tepat, hidup jadi lebih sehat, Kelola Obat-obat tertentu, Cegah Penyalahgunaan obat penurun badan, Penggunaan Off-Label pada obat, Keamanan Pemanis Buatan Aspartam, Cara Baca Tanggal Kedaluarsa pada kemasan obat, Kenali ciri-ciri obat ilegal dan palsu, Cek Obat Asli atau Palsu dengan BPOM *Mobile*, Waspada Klaim Berlebihan pada Suplemen Kesehatan, Waspada Jamu Berbahaya, Berbahayakah

Bahan Kimia Obat, Pastikan Produk Jamu memiliki Izin Edar, Apakah Jamu Gendong perlu ijin edar BPOM, Mitos/Fakta Jamu dapat mengatasi segala penyakit, Tips Memilih Jamu yang Aman, Jamu itu Sehat, Jauhi yang berefek instan, Ciri-ciri jamu illegal, Yang sering ditambahkan dalam OT, Bahaya Jamu Kedaluarsa, Hati-hati jamu oplosan, Mitos/Fakta Jamu dapat dikonsumsi tanpa Batasan, Waspada Kontaminan pada OT, Tips Memilih Bahan Baku Jamu, Waspada Klaim Suplemen Kesehatan, Cara aman konsumsi Suplemen Kesehatan, 3 Jenis Klaim Manfaat Suplemen Kesehatan, Ayo Cek Klik sebelum konsumsi suplemen Kesehatan, Penjelasan BPOM RI tentang Sirop Obat di Kamerun, Afrika yang terkontaminasi DE, Tips Aman sebelum belanja online Suplemen Kesehatan, Apakah semua vitamin merupakan suplemen Kesehatan, Konsumsi Vitamin C, Penjelasan BPOM RI tentang Tambahan 113 sirop yang memenuhi ketentuan, Patroli Siber, Underweight, Stunting, Wasting, Pastikan Suplemen Kesehatan memiliki izin edar, Yang harus dicantumkan pada Suplemen Kesehatan, Kenali Suplemen Probiotik, Tahukan kamu? Suplemen Selenium, Vitamin D Supelemen Kesehatan, Cek Legalitas Produk Supelemen Kesehatan, Fakta/Mitos tentang vit B12, Waspada Klaim Vit C injeksi, dan Waspada Klaim Berlebihan Suplemen Kesehatan. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya.

Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama tahun 2023, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik melalui Youtube ads, Videotron di Jl. Blauran, Koran online Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), Baliho dii Sidoarjo, sms blast di Pacitan, Magetan, Ngawi, *Google Display Network*, Transportasi (Stiker Grab Motor), ILM di JTV, sms blast Telkomsel. BBPOM Surabaya juga memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama pada saat menjadi narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya.

Pada tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memberikan informasi secara langsung melalui berbagai kegiatan pada saat menjadi narasumber berbagai kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor misalnya pada kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, Pemenuhan Komitmen SPP-IRT UMKM, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Bimtek Pengendalian dan Jaminan Mutu Pangan bagi Usaha Mikro,

Kegiatan peningkatan kesadaran akan keamanan pangan bagi pedagang pasar rakyat, Sosialisasi PJAS Aman, Pelatihan Medication Safety dan Pelaporan Insiden Kesalahan Terkait Obat, dan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP.

Pada akhir tahun 2023, BBPOM Surabaya menyelenggarakan suatu event untuk generasi z yang dikemas dalam *Zillenial Summit*: *Less Insecurity*, *Start Beauty with Safe Cosmetics Products* yang diikuti oleh kurang lebih 250 generasi *post millennial* (gemerasi Z) dan menghadirkan para pembicara yang ahli di bidangnya antara lain psikolog remaja, dokter spesialis kecantikan, pembicara dari BBPOM Surabaya dan influencer kecantikan yang banyak diikuti oleh para generasi z.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Propinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan keberagaman sosial budaya, latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, agama, adat istiadat dan lain lain merupakan tantangan tersendiri bagi BBPOM Surabaya khususnya fungsi Informasi dan komunikasi untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan akhirnya merubah perilaku yang selama ini dianggap ”benar” namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan maupun best practices yang benar sesuai ilmu pengetahuan terkini. Masyarakat yang merasa sudah benar saat membeli obat obat keras yang dijual rentengan (setelan) dengan sumber yang tidak jelas serta dijual oleh pihak pihak yang tidak mempunyai hak dan kewenangan sesuai perundang undangan. Atau masyarakat yang selama ini sudah “terbiasa” mengkonsumsi pangan mengandung bahan berbahaya, boraks misalnya, hanya karena nenek moyang mereka telah mengkonsumsi produk pangan tersebut sejak dahulu kala.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 90,68 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 73,74. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat

digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu serta mendukung berbagai program pemerintah terkait pengawasan obat dan makanan.

Setelah masa pandemi berakhir, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media sosial antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin mengetahui seluk beluk suatu organisasi termasuk BPOM.

Selama tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 3.190 layanan tatap muka langsung, melalui WhatsApp, telepon, email dan google review. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 21 kali yang diikuti oleh 236 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, UMKM kosmetika, calon pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain : Standar Pelayanan Publik untuk Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan IP CPPOB, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan SPA CPKB, dan konsultasi Anda Menanyakan Kami Menjawab (AMKM).

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial secara maksimal karena telah terbiasa menggunakan layanan melalui media sosial selama masa pandemi Covid-19 dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat meskipun masa pandemi sudah semakin mereda dan berubah menjadi endemi. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama tahun 2023, BBPOM Surabaya telah menayangkan 853 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain: Tips Mengolah Daging Kurban, Stop Gratifikasi, Alur Layanan Informasi & Pengaduan, Perangi

Penyalahgunaan Obat, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu, Bahaya Obat Setelan, Kenali Logo Pada Kemasan Obat, Buang sampah obat dengan aman, Cara buang sampah obat dengan perhatian khusus, Pengobatan tepat, hidup jadi lebih sehat, Kelola Obat-obat tertentu, Cegah Penyalahgunaan obat penurun badan, Penggunaan Off-Label pada obat, Keamanan Pemanis Buatan Aspartam, Cara Baca Tanggal Kedaluarsa pada kemasan obat, Kenali ciri-ciri obat ilegal dan palsu, Cek Obat Asli atau Palsu dengan BPOM Mobile, Waspada Klaim Berlebihan pada Suplemen Kesehatan, Waspada Jamu Berbahaya, Berbahayakah Bahan Kimia Obat, Pastikan Produk Jamu memiliki Izin Edar, Apakah Jamu Gendong perlu ijin edar BPOM, Mitos/Fakta Jamu dapat mengatasi segala penyakit, Tips Memilih Jamu yang Aman, Jamu itu Sehat, Jauhi yang berefek instan, Ciri-ciri jamu illegal, Yang sering ditambahkan dalam OT, Bahaya Jamu Kedaluarsa, Hati-hati jamu oplosan, Mitos/Fakta Jamu dapat dikonsumsi tanpa Batasan, Waspada Kontaminan pada OT, Tips Memilih Bahan Baku Jamu, Waspada Klaim Suplemen Kesehatan, Cara aman konsumsi Suplemen Kesehatan, 3 Jenis Klaim Manfaat Suplemen Kesehatan, Ayo Cek Klik sebelum konsumsi suplemen Kesehatan, Penjelasan BPOM RI tentang Sirop Obat di Kamerun, Afrika yang terkontaminasi DE, Tips Aman sebelum belanja online Suplemen Kesehatan, Apakah semua vitamin merupakan suplemen Kesehatan, Konsumsi Vitamin C, Penjelasan BPOM RI tentang Tambahan 113 sirop yang memenuhi ketentuan, Patroli Siber, Underweight, Stunting, Wasting, Pastikan Suplemen Kesehatan memiliki izin edar, Yang harus dicantumkan pada Suplemen Kesehatan, Kenali Suplemen Probiotik, Tahukan kamu? Suplemen Selenium, Vitamin D Supelemen Kesehatan, Cek Legalitas Produk Supelemen Kesehatan, Fakta/Mitos tentang vit B12, Waspada Klaim Vit C injeksi, dan Waspada Klaim Berlebihan Suplemen Kesehatan. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya.

Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama tahun 2023, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik melalui Youtube ads, Videotron di Jl. Blauran, Koran online Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), Baliho dii Sidoarjo, sms blast di Pacitan, Magetan, Ngawi, Google Display Network, Transportasi (Stiker Grab Motor), ILM di JTV, sms blast Telkomsel. BBPOM Surabaya juga memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama pada saat menjadi narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya.

Pada tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memberikan informasi secara langsung melalui berbagai kegiatan pada saat menjadi narasumber berbagai kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor misalnya pada kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, Pemenuhan Komitmen SPP-IRT UMKM, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Bimtek Pengendalian dan Jaminan Mutu Pangan bagi Usaha Mikro, Kegiatan peningkatan kesadaran akan keamanan pangan bagi pedagang pasar rakyat, Sosialisasi PJAS Aman, Pelatihan Medication Safety dan Pelaporan Insiden Kesalahan Terkait Obat, dan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP.

Pada akhir tahun 2023, BBPOM Surabaya menyelenggarakan suatu event untuk generasi z yang dikemas dalam Zillenial Summit: Less Insecurity, Start Beauty with Safe Cosmetics Products yang diikuti oleh kurang lebih 250 generasi post millennial (gemerasi Z) dan menghadirkan para pembicara yang ahli di bidangnya antara lain psikolog remaja, dokter spesialis kecantikan, pembicara dari BBPOM Surabaya dan influencer kecantikan yang banyak diikuti oleh para generasi z.

Kegiatan KIE yang selama ini dilakukan masih terbatas pada beberapa daerah yang menjadi target KIE bagi BBPOM Surabaya. Ke depan, BBPOM Surabaya harus memperbanyak frekwensi KIE ke seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

BBPOM Surabaya juga harus memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh lintas sektor agar kegiatan KIE dapat dilaksanakan secara masif ke seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah memiliki sarana dan fasilitas untuk melakukan publikasi untuk Badan POM misalnya Videotron, Baliho, transportasi umum, dll.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Infokom	BMB.001.051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A	Penyebaran Informasi Melalui Media	80	pkt lelang	99

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator selama tahun 2023 ialah penyebaran informasi melalui media yang telah dilakukan BBPOM Surabaya antara lain pembuatan vidio; iklan layanan Masyarakat di Youtube ads, Videotron di Jl. Blauran, Koran online Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), Baliho di Sidoarjo, sms *blast* di Pacitan, Magetan, Ngawi, Google Display Network, Transportasi (Stiker Grab Motor), ILM di JTV, sms blast Telkomsel dengan tema CEK KLIK, Maklumat

Pelayanan, SKM, alur informasi dan pengaduan, Konsultasi pendaftaran ulang pangan olahan, alur informasi dan pengaduan, BPOM Mobile, Cegah stunting dengan pangan aman dan bergizi seimbang, Merdeka dari *stunting* dengan pangan aman dan CEK KLIK, Cegah Stunting dengan Pangan Aman, Tips OT aman, Pangan aman cegah *stunting*, Hati-hati OT BKO, Jenis layanan BBPOM di Surabaya, Gunakan BPOM *Mobile*, Baca Informasi Nilai Gizi, Waspada penyalahgunaan Boraks, Penggunaan antibiotik yang tepat untuk cegah AMR, Keamanan kosmetik, Cek KLIK Kosmetik, dll.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	280.539.000	280.491.550	99,98	104,32%	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2023. Pada tahun 2023, anggaran Penyebaran Informasi Melalui Media hanya berkisar 280 juta, namun demikian, dilakukan upaya simplifikasi penyebaran informasi melalui *sms blast*, dengan biaya murah dengan jangkauan informasi lebih luas, sehingga target *output* dapat tercapai bahkan melebihi target. Dari target 80 kali publikasi dapat terealisasi 99 kali.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai dengan capaian 102,86%. Namun demikian, sejak akhir tahun 2022 hingga tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sehingga dikhawatirkan nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu akan menurun di tahun 2023 seiring dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Badan POM. Oleh karena itu dilakukan peningkatan upaya sosialisasi Obat dan Makanan melalui media cetak dan elektronik, terlihat dari peningkatan target dari 50 layanan di tahun 2022 menjadi 80 layanan di tahun 2023 (dengan realisasi 99 layanan). Diharapkan upaya ini dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada Badan POM khususnya Balai Besar POM di Surabaya dapat kembali meningkat dan target IKU tahun 2023 dapat tercapai. Selain itu jumlah KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2023 ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Surabaya dan Badan POM.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM Surabaya tersebut membuahkan hasil yaitu dengan tercapainya target indeks kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan, dari target 81 dapat dicapai 84.50 atau dengan nilai capaian 104.32%. BBPOM Surabaya akan terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini Kerjasama BBPOM Surabaya dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Yang masih harus dimaksimalkan adalah keterlibatan instansi swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). BBPOM Surabaya akan menggandeng beberapa instansi swasta untuk bersama sama memberikan edukasi kepada masyarakat.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Penambahan variasi dan metode kegiatan yang lebih beragam sehingga dapat memperluas cakupan informasi kepada masyarakat	Komunitas Pramuka belum dimanfaatkan sebagai kompoen masyarakat yang seharusnya dapat menjadi agent of change atau kepanjangan tangan BBPOM Surabaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publikasi melalui media relatif lancar sesuai anggaran yang tersedia. Hanya saja masih ada beberapa daerah yang belum pernah mendapatkan paparan publikasi dari BBPOM Surabaya.
Rekomendasi Perbaikan	pengembangan inovasi-inovasi yang dimiliki	Berkoordinasi dengan Kwarda Jawa Timur dalam pembentukan Rintisan SAKA POM menjadi SAKA POM.	Mengalokasikan anggaran untuk KIE mandiri selain KIE Tomas dan menambah alokasi anggaran untuk publikasi melalui berbagai media, karena media sosial belum terlalu efektif untuk masyarakat di pedesaan. Memberdayakan masyarakat/komunitas yang telah diintervensi BBPOM Surabaya.
Rencana Aksi	- Pengembangan inovasi Klinik POM (layanan desk/jemput bola) yang menjangkau pelaku usaha khususnya UMK sehingga lebih merata ke seluruh daerah	Menyampaikan usulan Kepengurusan Pimpinan SAKA POM Jawa Timur dan Majelis Pembina SAKA POM Jawa Timur	Mengaktifkan komunitas komunitas yang telah diberdayakan agar menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh dari BBPOM Surabaya. Karena akhir

Keterangan	Oktober	November	Desember
	- Pengembangan inovasi Jatim Truly yang menjangkau para pedagang kreatif lapangan dengan target di dua kota yaitu Surabaya dan kota Pasuruan		tahun tidak mungkin lagi mengalokasikan anggaran.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	terbatasnya kegiatan untuk memperluas cakupan pemberian informasi	Belum ada SK Pimpinan SAKA dan Majelis Pembina SAKA POM Jawa Timur.	Komunitas masyarakat belum tergerak untuk melakukan sosialisasi.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	bertambahnya cakupan kegiatan dengan pengembangan inovasi	Telah ditetapkan SK Pimpinan SAKA dan Majelis Pembina SAKA POM Jawa Timur.	Komunitas komunitas masyarakat mulai berinisiatif untuk melakukan sosialisasi (Desa, Sekolah, Lintas Sektor)
Timeline	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan
Status	**close**	**close**	**close**

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup BBPOM di Surabaya

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NSS 105,20% dengan kategori **Sangat Baik.**

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 32. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7	96,4	112,49		**Sangat Baik**

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara *online* dengan memberikan *link* survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. Rumus penghitungan indeks:

$$Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance* dan *empathy,* yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Setiap bulan, administrator IKEPU UPT dapat menarik data secara mandiri terkait hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Hasil tersebut berupa nilai rekapitulasi hingga bulan pengambilan data. Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian

bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM. Pengukuran dilakukan hingga November 2023 sehingga pada bulan Desember tidak terdapat kegiatan survei. Hasil yang diperoleh untuk tahun 2023 adalah 96,4.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

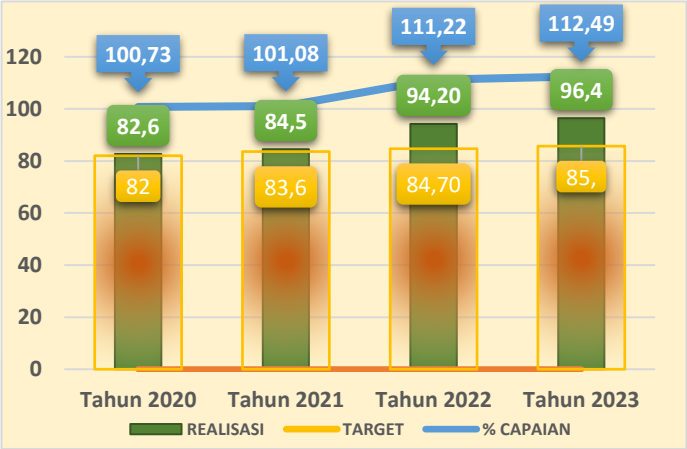

Gambar 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin merasakan manfaat terhadap bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target tahun 2024 (awal)

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	86.8	96.4	111.06	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu Dan Unit Pengampu)	96.4		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 bila dibandingkan dengan target renstra 2024 awal sudah melampaui target dengan kategori **Tercapai / Melampaui.** Dengan adanya tren peningkatan persentase capaian sejak tahun 2020, pada bulan Juli 2023, Balai Besar POM di Surabaya mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 dan usulan perubahan target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Terhadap pengajuan tersebut, terdapat surat tanggapan yang berisi reviu dengan **menaikkan target 2024**. Bila dibandingkan dengan target tahun

2024 hasil reviu, kategori Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah **Tercapai / Melampaui**. Namun dengan semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap BBPOM di Surabaya, maka tetap diperlukan upaya secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

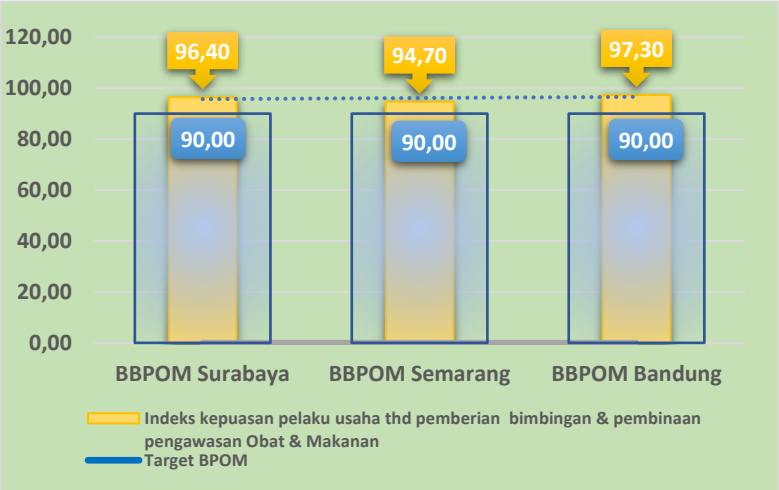

Gambar 29. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa seluruh UPT dan Badan POM memenuhi target nasional, yaitu 90. Dari ketiga Balai sejenis/setara dan Badan POM, indeks tertinggi adalah Balai Besar POM Bandung, disusul oleh Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang, dan Badan POM. Upaya peningkatan harus terus dilakukan agar target dapat selalu tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Selama tahun 2023, telah dilakukan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan yang Baik, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, dan Bimbingan Teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Selain Bimbingan Teknis, dilakukan pula Desk Konsultasi dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maupun terkait pemenuhan SPA CPKB dan SPA CPOTB Bertahap yang dibungkus dalam inovasi Klinik POM. Kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan, di antaranya di Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pacitan. Selain kegiatan Sertifikasi, terdapat pula kegiatan Inspeksi berupa FGD (Focus Group Discussion) Pangan Fortifikasi.

Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PUSAKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas Balai Besar POM di Surabaya. Survei IKEPU dilaksanakan hingga bulan November 2023, karena penarikan data dilaksanakan pada akhir November 2023.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 bila dibandingkan dengan target renstra 2024 awal sudah memenuhi target dengan kategori Tercapai / Melampaui, dengan persentase capaian melebihi 100%. Untuk mempertahankan capaian pada kategori tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.

Peningkatan kompetensi petugas terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga dapat memberikan informasi dan solusi yang tepat saat melakukan pendampingan termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus terkait registrasi produk, denah, dan lain-lain.

Mempersiapkan materi utama dan penunjang dengan baik agar mudah dipahami oleh pelaku usaha yang mengikuti kegiatan.

Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk mengisi survei sehingga dapat diperoleh hasil survei yang menyeluruh dengan cara menyiapkan lembar survei karena tidak semua pelaku usaha dapat mengisi secara online serta memberikan reward kepada responden terpilih yang telah mengisi survei.

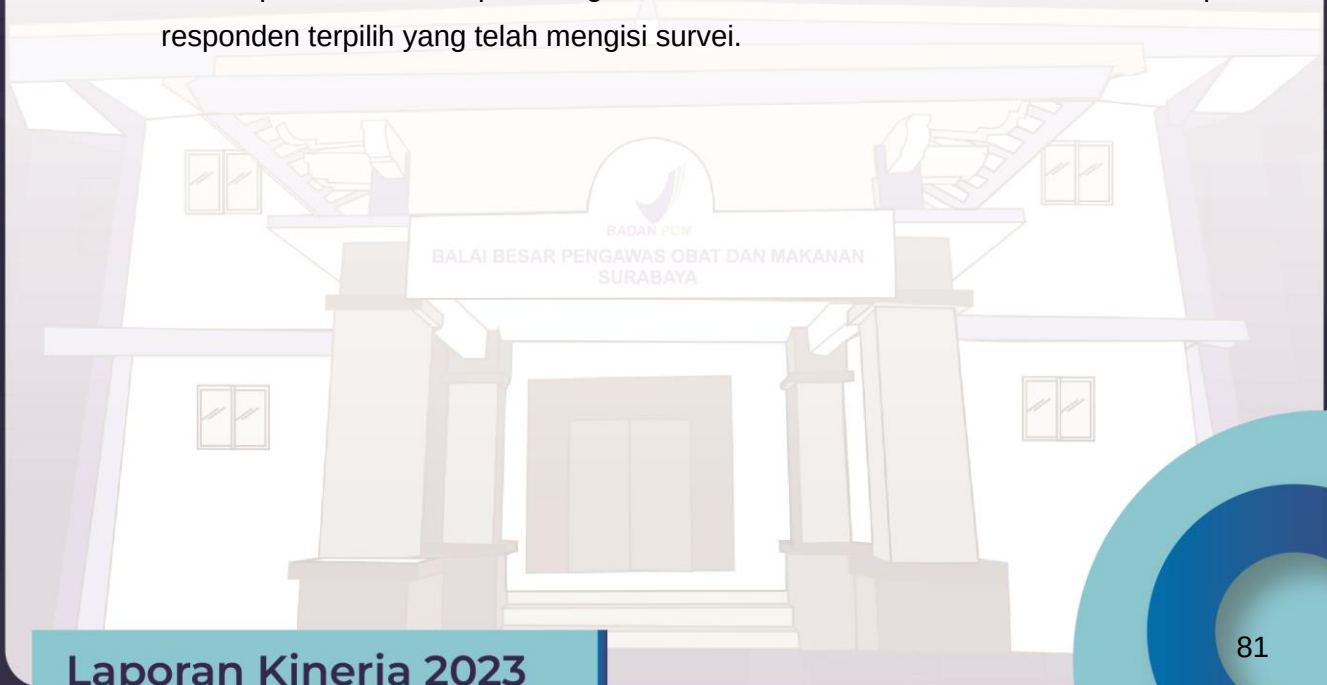

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B	Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola	2	kegiatan	2
			BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C	Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional	1	kali/trip	2
					D	Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong Melalui Fasilitator UMKM OT	1	kali/trip	0
					E	PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	1	kali/trip	1
					G	Klinik POM	2	kegiatan	3
					H	Peningkatan Kapasitas UPT dalam rangka percepatan/kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB	1	kali/trip	1

Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya selama tahun 2023 meliputi Bimtek dan desk konsultasi melalui kegiatan Klinik POM terkait Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Gempur Jatim, pendampingan UMKM obat tradisional melalui inovasi SiPPOTra, dan pendampingan bagi UMKM kosmetik melalui inovasi Jatim *Glowing*. Kegiatan Klinik POM tidak hanya menggunakan anggaran Klinik POM, namun juga menggunakan anggaran Gempur Jatim, Sippotra, dan Jatim Glowing. Kegiatan desk konsultasi dilakukan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota untuk mempermudah proses perbaikan terkait sistem OSS.

Pelaku usaha dapat mengisi survei secara *online* atau menggunakan *hardcopy* yang kemudian diinput oleh petugas ke website terkait. Pengisian survei secara *online* seringkali tidak dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga untuk kegiatan luring, pelaku usaha diberi *hardcopy* agar survei dapat dilakukan segera setelah pelaku usaha menerima bimbingan dan pembinaan.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 34. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	303,340,000	303,286,476	99.98	112,49	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah *Efisien* karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, dilakukan revisi anggaran meliputi penambahan kegiatan pertemuan pada inovasi Klinik POM, pengurangan jumlah anggota panitia, pengurangan anggaran reagen, penambahan anggaran transpor dalam kota, pengurangan anggaran paket fullday meeting, serta pengurangan anggaran perjadin PNP.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2023 sudah mencapai target tahun 2024. Pada tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Hal ini dikhawatirkan mempengaruhi nilai indeks indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sehingga akan menyebabkan nilai IKEPU menurun. Sehingga pada tahun 2023, inovasi Klinik POM dikembangkan lagi tidak hanya membuka stan konsultasi saat KIE di seluruh titik, namun juga melakukan jemput bola membuka stan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB bekerja sama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan demikian target IKEPU dapat tercapai di tahun 2023.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Tidak semua peserta mengisi survei kepuasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta terutama untuk kegiatan secara daring (*online*) dan pelaku usaha UMK	Tidak semua peserta mengisi survei kepuasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta terutama untuk kegiatan secara daring (*online*) dan pelaku usaha UMK	Tidak ada kendala, *Cut off* pengambilan data survei IKEPU pada 30 November 2023
Rekomendasi Perbaikan	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala	-

Keterangan	Oktober	November	Desember
	2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei *paperbased* bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei *online* 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/*gimmick*/modul)	2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei *paperbased* bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei *online* 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/*gimmick*/modul)	
Rencana Aksi	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei *paperbased* bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei *online* 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/*gimmick*/modul)	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei *paperbased* bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei *online* 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/*gimmick*/modul)	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan Oktober dengan nilai 96,76	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan November dengan nilai 96,43	-.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: - Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan untuk kegiatan desk IP CPPOB dan pre registrasi (klinik POM) serta FGD (Focus Group Discussion) Pangan Fortifikasi	Kondisi Desember: *Cut off* pengambilan data survei IKEPU pada 30 November 2023 sehingga tidak ada perubahan nilai IKEPU pada bulan Desember 2023.	-
Timeline	1 bulan	1 bulan	--
Status	open	open	close

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 36. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78.55	80.14	102.03		**Sangat Baik**

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan

stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut:

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\underline{R_a}$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misalnya operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misalnya dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misalnya dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Hingga triwulan III tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

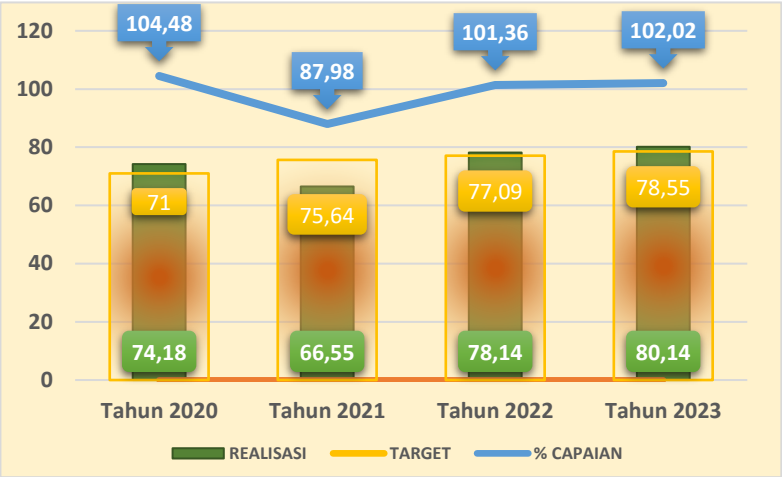

Gambar 30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi realisasi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2021, namun kembali terjadi peningkatan di tahun 2022 dan 2023.

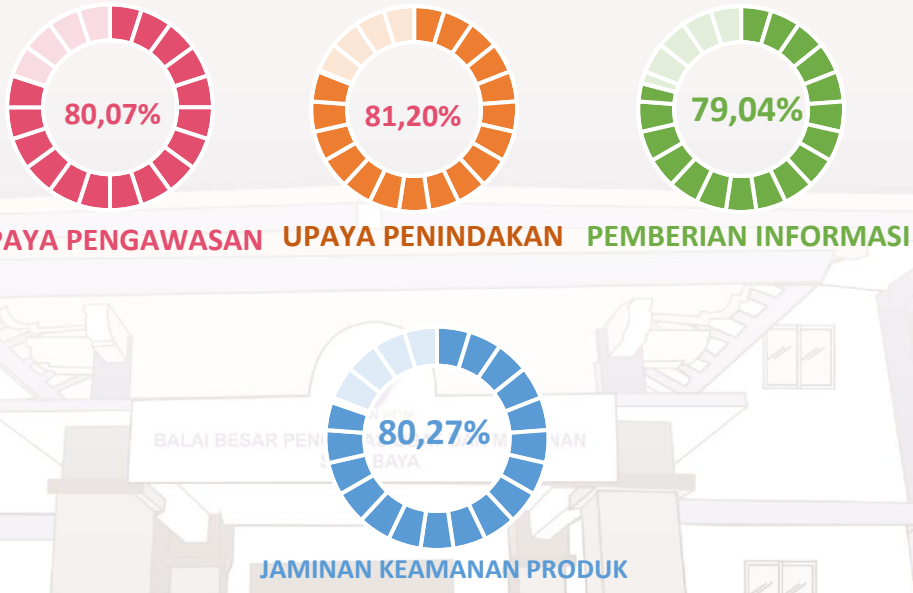

Gambar 31. Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut: upaya pengawasan 80,07; upaya penindakan

81,20; pemberian informasi 79,04 dan jaminan keamanan produk 80,27. Survey juga melakukan pengukuran Indeks Kepuasan atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan komoditi dengan rincian sebagai berikut: obat 81,24; obat tradisional 78,07; suplemen Kesehatan 80,11; kosmetik 79,78 dan pangan olahan 80,67.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target tahun 2024 (awal)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	80,01	80,14	100,16	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	80,14		100,00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra 2024 sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori **"Tercapai**". Namun demikian dari 4 variabel yang diukur, variabel pemberian informasi adalah yang nilainya paling rendah yaitu 79,04. BBPOM di Surabaya masih harus melakukan berbagai upaya agar Masyarakat tetep puas dengan kinerja pengawasan obat dan makanan di tahun 2024 terutama dengan pemberian informasi yang dilakukan BBPOM Surabaya melalui berbagai cara dan metode dengan penjadwalan yang sesuai dengan isu yang ada di Masyarakat. Media sosial, media luar ruang dan tatap muka langsung masih harus menjadi prioritas sesuai dengan demografi penduduk Jawa Timur.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Gambar 32. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

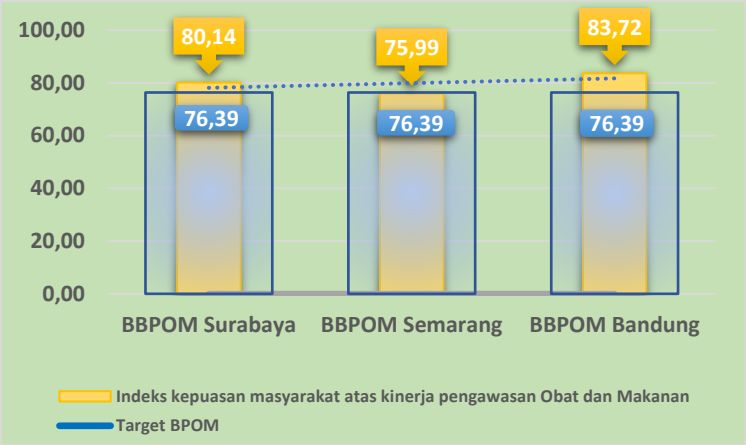

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Hanya BBPOM di Bandung yang memiliki realisasi di atas target nasional, sedangkan realisasi BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Propinsi Jawa Timur 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

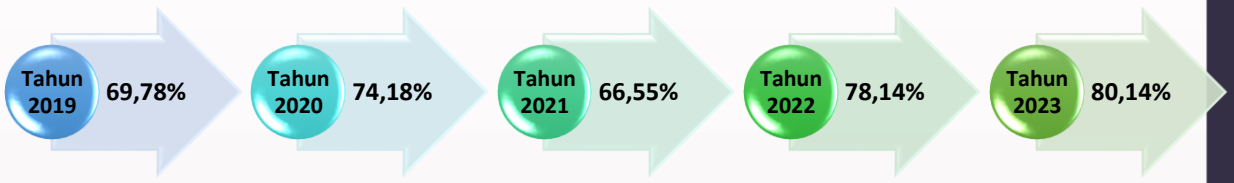

Gambar 33. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d 2023

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa terjadi peningkatan indeks kepuaasan Masyarakat kecuali pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas *website* dan media sosial BPOM (*tangibles*).

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkru'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkru'an adalah *terminology* yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkru'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadopsi konsep Cangkru'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM di Surabaya dengan masyarakat

yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkru'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Masih dalam format Cangkru'an, BBPOM Surabaya juga memberikan layanan konsultasi informasi secara langsung yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui zoom meeting dalam format AMKM "**Anda Menanyakan Kami Menjawab**" dimana setiap pelanggan dilayani oleh seorang pemberi layanan informasi melalui zoom *meeting*.

Selama tahun 2023, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 21 kali kegiatan Cangkru'an dengan jumlah total peserta 236 orang yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, UMKM kosmetika, calon pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain: Standar Pelayanan Publik untuk Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan IP CPPOB, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan SPA CPKB, dan konsultasi Anda Menanyakan Kami Menjawab (AMKM).

BBPOM Surabaya baru baru ini juga melahirkan program inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur *Trusted Culinary*) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dimulai di kota yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur yaitu Kota Batu. Sebanyak 100 orang lebih pedagang kreatif lapangan pada bulan Maret 2023 telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang *hygiene* dan sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, para PKL mendapatkan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada gerobak mereka (*street food booth/stall*). BBPOM Surabaya juga melakukan pengujian pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan menyampaikan hasilnya langsung kepada para PKL. Setelah memenuhi semua persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya.

Target program Jatim truly selanjutnya adalah PKL di wilayah alun alun kota Pasuruan dan sekitarnya yang merupakan permintaan dari Walikota Pasuruan agar semua PKL disertifikasi oleh BBPOM Surabaya. Kegiatan pembinaan kepada PKL di alun alun

Kota Pasuruan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 terhadap kurang lebih 100 PKL. Sedangkan pembinaan PKL untuk Kota Surabaya dilaksanakan pada bulan November 2023 terhadap 126 orang PKL dari 4 lokasi SWK (Sentra Wisata Kuliner) di Surabaya. Walikota Surabaya sangat mendukung kegiatan ini dan berjanji akan mereplikasi program ini untuk seluruh SWK di Kota Surabaya (ada 50 SWK di Kota Surabaya).

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur *FAQ* telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain *website* BBPOM di Surabaya, media sosial resmi BBPOM di Surabaya lainnya, misalnya *Instagram, Twitter, Facebook* diharapkan juga menjadi pelengkap bagi *website* BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, *email* dan *WhatsApp* yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan *website* BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negatif dan *Hoax* yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. *Agent of Change* BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga membentuk kader dan duta untuk menjadi *Agent of Change* BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability)*, tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Kasus EG DEG yang terjadi pada tahun 2022 sampai 2023 harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi BPOM agar senantiasa meningkatkan Sistem

Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat mengantisipasi semua tahap dan perilaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya. Tindakan pengawasan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam mengatasi kasus EG DEG diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BPOM. Masyarakat awam membutuhkan informasi yang menenangkan dan membuat mereka yakin akan produk yang akan dikonsumsinya. *Regulatory Action* yang dilakukan BPOM memaksa semua pelaku usaha mengevaluasi kembali semua SOP dan tahapan yang mereka lakukan dan meyakinkan masyarakat bahwa produk yang mereka hasilkan aman dikonsumsi. Tindakan bersama sama yang dilakukan semua pihak baik BPOM, Pelaku Usaha, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentinngan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan iklim usaha yang sehat. Tenaga Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan juga aware dan waspada dengan informasi update yang disampaikan oleh BPOM.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Badan POM sebagai organisasi pelaksana layanan publik yang telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan Quality Management System berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun berbagai aplikasi menggunakan system informasi sehingga layanan dapat diberikan secara transparan, akuntabel, menghindarkan dari KKN, meningkatkan kecepatan, efektifitas dan efisiensi serta dapat dijangkau oleh seluruh pengguna layanan. Namun demikian ternyata tidak semua masyarakat menyukai layanan yang nir kontak ini. Ada sebagaian masyarakat terutama yang literacy digitalnya tidak memadai lebih menyukai layanan tatap muka dengan membawa berbagai dokumen. Kelemahan aplikasi digital juga sangat tergantung pada jaringan internet serta rawan di hack oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini banyak dikeluhkan oleh penerima layanan publik BPOM dan menurunkan kepuasan pelanggan. Sebagai alternatif solusi jika dimungkinkan BBPOM Surabaya membuka layanan pendampingan kepada penerima layanan dengan jaringan internet yang aman dan memadai. Selain itu BPOM harus membangun aplikasi yang andal dan robust.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BBPOM Surabaya, telah dilakukan berbagai upaya. BBPOM Surabaya baru baru ini juga melahirkan program inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dimulai di kota yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur yaitu Kota

Batu. Sebanyak 100 orang lebih pedagang kreatif lapangan pada bulan Maret 2023 telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang hygiene dan sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, para PKL mendapatkan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada gerobak mereka (street food booth/stall). BBPOM Surabaya juga melakukan pengujian pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan menyampaikan hasilnya langsung kepada para PKL. Setelah memenuhi semua persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya.

Target program Jatim truly selanjutnya adalah PKL di wilayah alun alun kota Pasuruan dan sekitarnya yang merupakan permintaan dari Walikota Pasuruan agar semua PKL disertifikasi oleh BBPOM Surabaya. Kegiatan pembinaan kepada PKL di alun alun Kota Pasuruan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 terhadap kurang lebih 100 PKL. Sedangkan pembinaan PKL untuk Kota Surabaya dilaksanakan pada bulan November 2023 terhadap 126 orang PKL dari 4 lokasi SWK (Sentra Wisata Kuliner) di Surabaya. Walikota Surabaya sangat mendukung kegiatan ini dan berjanji akan mereplikasi program ini untuk seluruh SWK di Kota Surabaya (ada 50 SWK di Kota Surabaya).

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM di Surabaya, media sosial resmi BBPOM di Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negatif dan Hoax yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang

terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Infokom	QDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	A	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Webinar Keamanan Obat dan Makanan	2	kegiatan	0
					B	Pemilihan Duta Jamu Jawa Timur (Obat Tradisional Aman dari Bahan Kimia Obat)	1	kegiatan	0
					C	Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling	8	kali/trip	4
					D	Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran	1	kegiatan	5
					E	Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	1	kegiatan	0
		Infokom	QDC.001.052	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	A	Pelatihan Peningkatan Kompetensi	2	kegiatan	3
					B	Koordinasi Teknis Antar Instansi	30	kali/trip	23
					C	Pemantauan Toksikovigilan	3	bulan	3
					D	Sosialisasi Pelaporan Data Keracunan	2	kegiatan	0

Terdapat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan seperti Pemberdayaan masyarakat melalui webinar keamanan obat dan makanan, Pemilihan Duta Jamu Jawa Timur (Obat Tradisional Aman dari Bahan Kimia Obat), Penyebaran informasi dan sosialisasi keamanan obat dan makanan serta sosialisasi pelaporan data keracunan.

Kegiatan lainnya mampu menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan antara lain penyebaran informasi obat dan makanan, Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Penyebaran Informasi, Sosialisasi Melalui Media, koordinasi lintas sektor, serta Peningkatan Kompetensi petugas layanan publik.

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM di Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan

tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama tahun 2023 BBPOM di Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 4.064 melalui berbagai media antara lain secara langsung, melalui *WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast,* radio, televisi, *webinar* (Cangkruan) dan pameran. Selain itu BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber dan memberikan berbagai materi informasi sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

Selama tahun 2023, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 93 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, Pemenuhan Komitmen SPP-IRT UMKM, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Bimtek Pengendalian dan Jaminan Mutu Pangan bagi Usaha Mikro, Kegiatan peningkatan kesadaran akan keamanan pangan bagi pedagang pasar rakyat, Kuliah Profesi Apoteker FFUA angkatan 118, Sosialisasi PJAS Aman, Pelatihan Medication Safety dan Pelaporan Insiden Kesalahan Terkait Obat, dan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP, Pelatihan Lanjutan "Advance Training" Packing dan Perijinan, dll. Beberapa topik kegiatan dilaksanakan lebih dari satu kali dengan peserta yang berbeda.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 38. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	475,459,000	475,170,660	99.94	102.02%	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023, dilakukan beberapa revisi anggaran terkait Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan seperti penambahan uang harian dengan mengurangi uang transport kegiatan penyuluhan bersama laboratorium keliling, penambahan anggaran belanja persediaan untuk pembelian baku pembanding dan reagen kegiatan penyuluhan bersama labkel, penambahan anggaran belanja bahan dekorasi pameran dan paket edukasi, penambahan anggaran sewa stan, serta penambahan anggaran perjadin kegiatan Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran, penambahan anggaran transport perjadin biasa

Koordinasi. Penambahan anggaran transpor dan uang harian petugas jaga pameran kegiatan Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran serta Pengurangan anggaran baku pembanding untuk anggaran pendukung preparasi sampel, penghapusan anggaran perlengkapan uji labkel, pengurangan anggaran pembelian sampel sehingga target output dapat tercapai bahkan melebihi target.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai, namun target periode akhir renstra masih belum tercapai. Untuk perbaikan branding Balai Besar POM di Surabaya, pada triwulan I tahun 2023 telah dikembangkan inovasi *Jatim Truly* yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar daerah wisata. Inovasi ini telah mendapat dukungan dari pemda setempat. Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Setelah pada awal tahun dilakukan program inovasi *Jatim Truly* di Kota Batu, pada tahap berikutnya dilaksanakan di Kota Pasuruan dengan target para PKL yang berdagang di alun alun Kota Pasuruan. Selain itu akan dilakukan juga pembinaan kepada PKL di Kota Surabaya yang biasa berjualan di SWK (Sentra Wisata Kuliner) yang ada di kota Surabaya (sebanyak 50 SWK).

Meskipun target Renstra pada tahun 2024 telah tercapai bahkan terlampaui namun BBPOM Surabaya tetap harus mencari dan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Surabaya. Pendampingan kepada pelaku usaha utamanya UMKM tetap harus merupakan prioritas karena mereka menduduki proporsi terbesar pelaku usaha dan masih memerlukan pendampingan dari BPOM agar mereka dapat memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan yang mengalamu transformasi dari manual menjadi digital bukan merupakan hal yang mudah diikuti oleh UMKM yang pada umumnya mempunyai kemampuan literasi digital yang kurang memadai. Untuk itu BBPOM Surabaya tetap diharapkan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para UMKM sebagai penyokong ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 39. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Pelaksanaan pengembangan inovasi jatim truly dengan target PKL di Kota Pasuruan dan	Pendampingan kepada UMKM tidak dapat diselesaikan sampai tahap akhir (penerbitan nomor	Aplikasi yang dikembangkan oleh BPOM tidak mendukung fasilitasi

Keterangan	Oktober	November	Desember
	Kota Surabaya, memerlukan kolaborasi dan komitmen dengan pemerintah daerah	izin edar produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik) karena komitmen pelaku usaha yang kurang.	kepada UMKM karena sering bermasalah.
Rekomendasi Perbaikan	Target PKL yang dapat mendukung ekonomi dan pariwsata, dan di bawah binaan pemerintah kota	Membentuk fasilitator fasilitator terutama dari mahasiswa magang dan fasilitator eksternal agar mendampingi UMM sampai akhir proses penerbitan nomor izin edar.	Berkoordinasi dengan Badan POM.
Rencana Aksi	melakukan diskusi dan komunikasi intensif dengan pemerintah kota, teknis pelaksanaan, target yang tepat sasaran, dan dukungan walikota pada kegiatan	Memberikan pembekalan kepada mahasisswa magang dan peserta PAGC agar dapat mendampingi UMKM sampai terbit nomor izin edar.	Menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kepada Badan POM. Memberikan kompensasi kepada Pelaku Usaha yang dirugikan oleh BPOM.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	waktu dan target pelaksanaan belum ada	UMKM tidak didampingi fasilitator.	Aplikasi sering bermasalah, pelaku usaha mengajukan pengaduan dan komplain.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	waktu dan target pelaksanaan sudah ditetapkan	UMKM didampingi fasilitator sampai nomor izin edar keluar.	Penyelesaian masalah masih case by case sampai aplikasi betul betul difinalkan dan dijamin aman untuk digunakan.
Timeline	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan
Status	**Close**	**Close**	**Close**

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 40. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91.98	101.08		**Sangat Baik**

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat *seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Surabaya untuk tahun 2023 adalah 91.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya di tahun 2023 untuk 10 (sepuluh) jenis layanan yang dilakukan, dengan jumlah responden sebagai berikut:

Tabel 41. Jumlah Responden Per-Jenis Layanan tahun 2023

No	Jenis Layanan	Responden
1	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	63
2	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	6
3	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A	6
4	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B	3
5	Pengujian Obat dan Makanan	5
6	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	251
7	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap	17
8	Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	9
9	Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	74
10	Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	17
Total		**451**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya (berdasarkan hasil SKM) tahun 2023 yang diperoleh dari per unsur pelayanan adalah **91,98**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Hasil SKM

Unsur Pelayanan		Tahun 2023
U1	Persyaratan	90,55
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91,24
U3	Waktu Penyelesaian	91,73
U4	Biaya/Tarif	92,20
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	92,02
U6	Kompetensi Pelaksana	92,83
U7	Perilaku Pelaksana	93,57
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	92,05

Unsur Pelayanan		Tahun 2023
U9	Sarana dan Prasarana	91,24
	Total	**91,98**

Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APIP yang dikelola bersama antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil SKM yang diperoleh BBPOM di Surabaya adalah 91,98 menunjukkan realisasi telah melampaui target tahun 2023 dengan capaian 101,08%, kategori **sangat baik**.

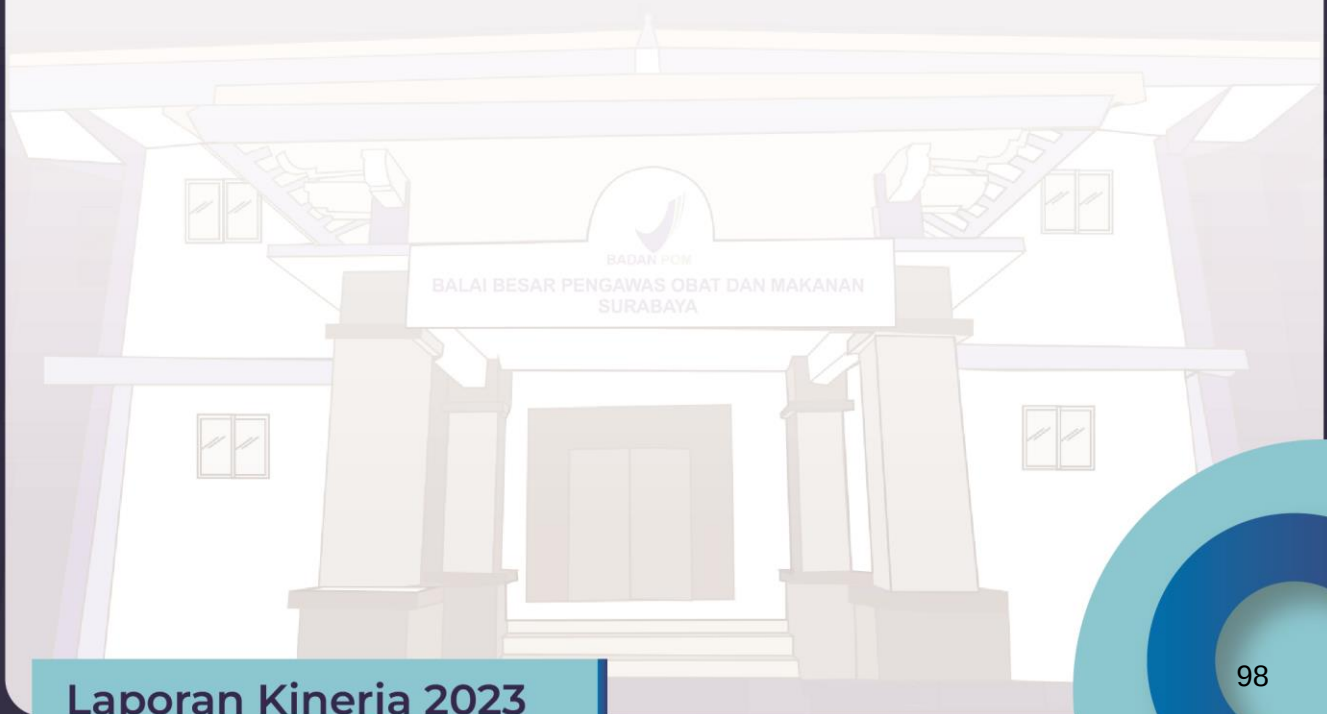

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

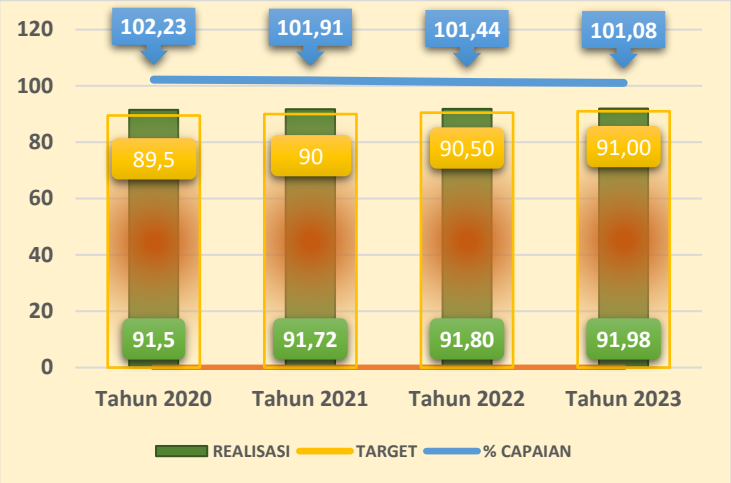

Gambar 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dari tahun 2020 sampai tahun 2023

Berdasarkan data grafik, dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan target mengalami peningkatan, dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun tersebut. Walaupun secara persentase capaian di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun upaya petugas layanan untuk konsisten memberikan survey dan penilaian yang diberikan pelanggan melalui survey menunjukkan pelanggan memberikan apresiasi yang baik kepada BBPOM di Surabaya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan target renstra 2024

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	92	91.98	99.98	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	92.5		99.44	Akan Tercapai	▲

Berdasarkan data pada tabel, realisasi tahun 2023 **belum mencapai target** 2024 yang tertuang di Renstra awal BBPOM di Surabaya. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori **"Akan Tercapai"**.

Perubahan metode survei yang disesuaikan dengan jenis layanan yang tertuang pada Standar Pelayanan Publik, menyebabkan harus ada responden yang mewakili setiap jenis layanan. BBPOM di Surabaya merupakan unit pelayanan publik yang memiliki

bisnis proses yang hampir lengkap sesuai dengan kebutuhan layanan dan kompetensi petugas layanan yang dimiliki.

Persepsi responden untuk setiap jenis layanan tentu berbeda-beda permasalahannya dan sebagian besar berkaitan dengan permasalahan pemenuhan persyaratan dan kendala di aplikasi ketika pelanggan ingin mendaftarkan produk. Penyelesaian permasalahan ini tidak hanya peran dari BBPOM di Surabaya, tetapi juga peran dari unit lain. Hal ini menjadikan bahan evaluasi dan mencari strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kendala yang dihadapi pelanggan sehingga target Renstra 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

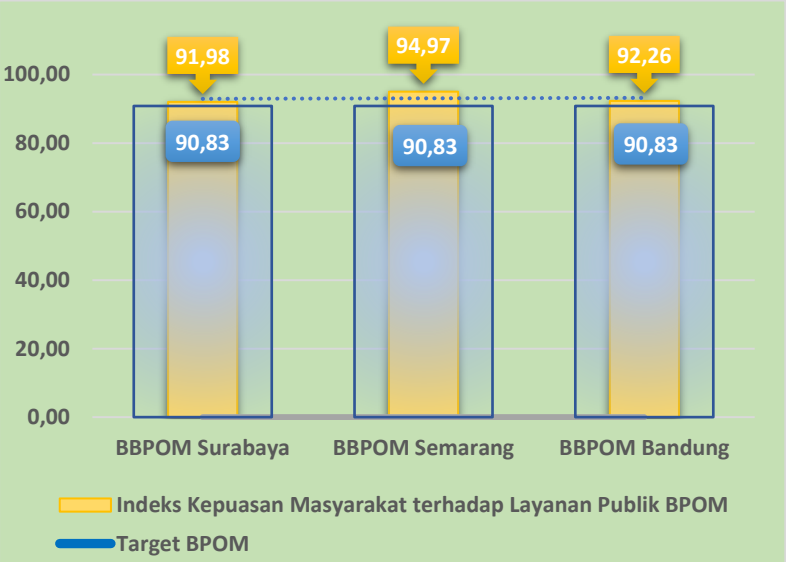

Gambar 35. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan data pada grafik, realisasi tertinggi di tingkat UPT diperoleh BBPOM di Semarang dan di tempat kedua adalah BBPOM di Bandung, dan terendah adalah BBPOM di Surabaya. Namun jika dibandingkan dengan target Badan POM, ketiga UPT termasuk BBPOM di Surabaya melampaui target Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik BBPOM di Surabaya sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian (sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017) yang diukur pada SKM.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya antara lain:

- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang mana dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan.
- Melengkapi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, BBPOM Surabaya harus memfasilitasi semua kepentingan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam katagori kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Tujuan dari revisi Standar Pelayanan Publik ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
- Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik. Kemampuan berkomunikasi dan menangani keluhan pelanggan adalah kompetensi penting dan utama sebagai pemberi layanan publik.
- Kegiatan *briefing* "*morning breeze*" untuk petugas pelayanan publik yang bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas pelayanan dalam menghadapi kendala di lapangan dan update regulasi/kebijakan terkini yang berkaitan dengan layanan publik.
- Kolaborasi eksternal untuk mengatasi tantangan SDM, yaitu dengan membentuk fasilitator mahasiswa magang yang dapat membantu pelanggan seperti membantu pelanggan ketika mengalami kendala di aplikasi layanan publik.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan. Sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang

tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat. Hampir semua fasilitas tersebut telah berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya kecuali lift khusus karena di BBPOM Surabaya tidak tersedia lift karena Gedung layanan publik hanya 2 lantai dan ruang layanan publik ada di lantai 1.

- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Meningkatkan kompetensi, memberikan reward dan punishment, untuk petugas layanan, serta penerapan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.
- Memberikan solusi dan kompensai kepada pelanggan apabila mengalami kendala dalam menerima pelayanan dari BBPOM di Surabaya.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagian besar layanan yang dilakukan BBPOM di Surabaya merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan izin edar produk, yang mana proses separuhnya lagi ada di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan juga berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan BBPOM di Surabaya mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pusat.

Untuk itu, BBPOM di Surabaya agar beradaptasi dengan regulasi terkini dengan konsisten dan kontinu meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, melakukan telaah apabila memungkinkan untuk dilakukannya penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan masukan dari masyarakat/pelaku usaha, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	1	kegiatan	1
					D	Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	20	kali/trip	33
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	1	kali/trip	1
					F	Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	1	kali/trip	1

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya.

Kegiatan yang menunjang di sepanjang tahun 2023 antara lain kegiatan pemeriksaan terhadap sarana importir/eksportir dalam rangka pemenuhan pemberian sertifikat SKI/SKE serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas layanan publik dilakukan melalui diseminasi melalui kegiatan internal substansi/*morning breeze*.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu Cangkrukan (Bincang dengan Kru Layanan), AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab), Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan Sketsa (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung back office dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 44. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

NDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	159.384.000	159.360.511	99,99	101,08	**Efisien (100%)**

NDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Layanan Publik BPOM					

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran seperti penambahan biaya kegiatan baru Desk Monitoring dan Evaluasi Realisasi Impor, revisi anggaran UH kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan penghapusan anggaran UH diklat dan transport dalam kota, serta pengurangan anggaran transport.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercapai. BBPOM di Surabaya harus terus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll agar dikembangkan lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 45. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.	jumlah responden tidak sesuai target	tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Rekomendasi Perbaikan	-	melakukan movev berkala di aplikasi agar mengetahui lebih awal kalau responden belum tercapai	-
Rencana Aksi	-	Mengingatkan petugas untuk melakukan monev dan menyebarkan kuesioner	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	Target jumlah responden belum tercapai	-

Keterangan	Oktober	November	December
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Target jumlah responden tercapai	-
Status	**Close**	**close**	**Close**

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Surabaya

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NSS 106,97% dengan kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 46. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	97,3	104,62		**Sangat Baik**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT x 100%

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 710 keputusan/rekomendasi dari 721 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 104,62 % dan mendapat kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

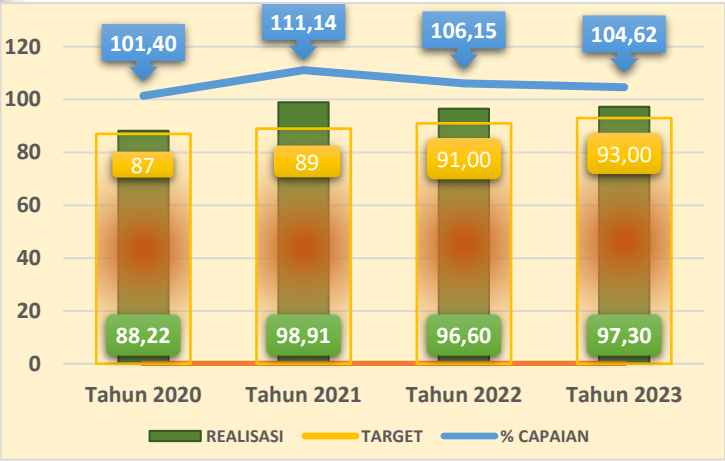

Gambar 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2023

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2020. Tahun 2022 terdapat penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021 dikarenakan target meningkat ditahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan realisasi dan penurunan capaian dari tahun 2022, namun target tetap tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 47. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	95	97.3	102.42	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	97.3		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori **"Tercapai"**, mengantisipasi adanya beberapa perubahan di tahun 2024, maka masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Gambar 37. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 pada BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung sama, yaitu 100,00, dari ketiganya yang terendah adalah BBPOM di Surabaya dengan realisasi 97,30. Namun demikian ketiga balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Indikator Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung berdasarkan persentase:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain
4. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pada tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,94%, karena terdapat 7 (tujuh) surat tindak lanjut yang belum diselesaikan oleh petugas dan sudah diberikan teguran secara lisan kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut yang menjadi tanggung jawabnya. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 90,24 %, karena terdapat 4 (empat) surat dari Pusat yang masuk diakhir Desember 2023 dan akan ditindaklanjuti di tahun 2024. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan

terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat, masing-masing memperoleh hasil 100,0 % karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti. Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan monev secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan, dan tetap memberikan terguran kepada petugas yang lalai.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2024 adalah

- Tetap melakukan menitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan
- Tetap memberikan teguran secara lisan atau tertulis pada petugas yang lalai.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Inspeksi	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D	Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	8	kali/trip	8
		Inspeksi	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E	Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	26	kali/trip	26

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 685 sarana, penelusuran kasus terhadap 23 sarana dan dalam rangka pengaduan konsumen sebanyak 13 kasus, yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Surabaya.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 48. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	91.522.000	91.490.000	99,97	106,15	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yaitu penambahan biaya perjadin tindak lanjut pengawasan pengaduan Masyarakat serta penambahan jumlah trip perjadin. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 49. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	• Terdapat 18 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana bulan September yang belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga melewati batas timeline.Surat dari pusat masuk di pertengahan Oktober • Terdapat 3 surat dari Pusat yang belum ditindaklanjuti	• Terdapat 12 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana bulan Oktober yang belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga melewati batas timeline.	• Terdapat 7 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana bulan November yang belum dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan • Terdapat 3 surat dari pusat masuk belum ditindaklanjuti
Rekomendasi Perbaikan	• Percepatan penyelesaian pembuatan surat	• Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak	Percepatan penyelesaian pembuatan surat

Keterangan	Oktober	November	Desember
	tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah melewati batas timeline ● Percepatan menindaklanjuti surat Pusat ● Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah melewati batas timeline ● Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah melewati batas timeline Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	● Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana ● Teguran lisan/mengingatkan pada petugas yang penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang melewati batas timeline ● Menindaklanjuti surat Pusat	● Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana ● Teguran lisan/mengingatkan pada petugas yang penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang melewati batas timeline	● Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana ● Teguran lisan / mengingatkan pada petugas yang penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang melewati batas timeline
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	● Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas ● Surat Pusat belum ditindaklanjuti	● Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	● Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas
Kondisi Setelah Rencana Aksi	● Petugas belum maximal untuk penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut ● Surat Pusat sudah ditindaklanjuti ● Progress Oktober: % Capaian terjadi peningkatan dari 103,72% menjadi 106,95%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan di TW 4 ini.	● Petugas belum maximal untuk penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut, masih ada surat tindak lanjut di bulan November. ● Progress November: % Capaian terjadi penurunan dari 106,95% menjadi 103,72%. Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan di bulan Desember	● Petugas belum maximal untuk penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut, masih ada surat tindak lanjut di bulan November. ● % Capaian di bulan Desember 104,62%
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	**Open**	**close**	**Close**

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 50. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	77	89,42	116,13		**Sangat Baik**

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A= Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B= Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 665 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 527 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah

kerja BBPOM di Surabaya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 116,13% dengan kkategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

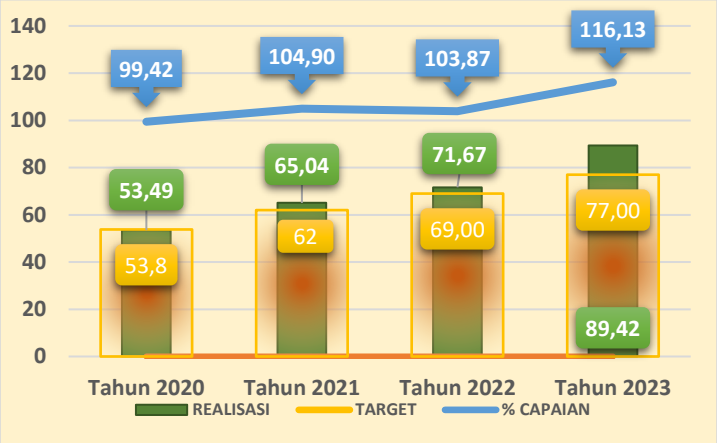

Gambar 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 hingga tahun 2023

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 juga terdapat peningkatan realisasi namun terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 dikarenakan kenaikan target di tahun 2022 dan terdapat peningkatan lagi pada realisasi dan capaian di tahun 2023. Hal ini terjadi karena komitmen bersama dan pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2020-2024

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	85	89.42	105.20	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	89.42		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 **telah mencapai target Renstra** tahun 2024 sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai**", mengingat adanya kemungkinan perubahan

kondisi strategis di tahun 2024 maka masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/ setara, dengan capaian nasional

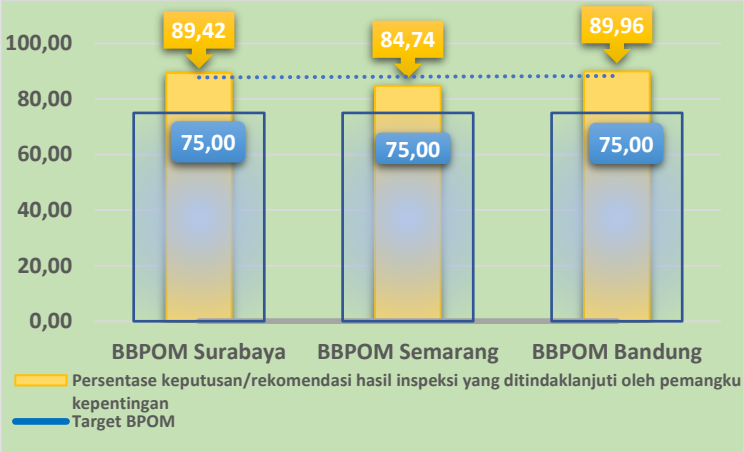

Gambar 39. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan capaian nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Ketiga balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2023, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 78,83% karena tetap selalu dilakukan sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, menanyakan melalui telepon maupun whatsApp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BBPOM Surabaya serta telah dilaksanakan Desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 100,0% karena telah dilaksanakannya Bimtek Pengawasan Post Market IRTP dan Desk Penilaian Mandiri oleh pusat untuk kab/kota di wilayah Jawa Timur dimana salah satu komponen penilaiannya Surat Tindak Lanjut dari Balai Besar POM dan feedbacknya sehingga Dinas Kesehatan memberikan feedback terhadap semua surat tindak lanjut yang telah dikirimkan oleh Balai Besar POM di Surabaya . Dari hasil tersebut diatas, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sector) masih tetap memenuhi dari target yang ditetapkan. Upaya yang masih harus terus dilakukan untuk pencapaian target 2024 antara lain mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara

daring maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif. Selain itu juga perlu melakukan kegiatan desk CAPA secara rutin untuk meningkatkan feedback dari pelaku usaha.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya yang harus tetap dilakukan untuk pencapaian target 2024 antara lain :

- Mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif
- Melakukan kegiatan Desk CAPA secara rutin untuk meningkatkan feedback dari pelaku usaha.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection	23	kali/trip	31
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B	Koordinasi Lintas Sektor	60	kegiatan	37
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A	Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan	50	kali/trip	78

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha melalui telepon, whatsApp setelah pemeriksaan agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana namun hasil yang diharapkan belum maksimal.
- Penggunaan aplikasi *Smart* POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 52. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	514.828.000	511.858.564	99,42	103,87	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yaitu penambahan biaya Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan, pengurangan anggaran penginapan kegiatan koordinasi dan konsultasi, pengurangan anggaran perjadin paket meeting luar kota, perjadin dalam kota, dan uang transport narasumber untuk dialihkan ke anggaran perjadin biasa kegiatan Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat karena untuk percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB). Hingga kemudian meningkat menjadi 89,32% di akhir tahun 2023. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 53. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	● Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan ● Sampai akhir septem ber terdapat 149 surat rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 surat rekomendasi ke lintas sektor	● Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan ● Sampai akhir septemb er terdapat 129 surat rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 surat rekomendasi ke lintas sektor yang dikirimkan	● Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan ● Sampai akhir septemb er terdapat 123 surat rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 surat rekomendasi ke lintas sektor yang dikirimkan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	yang dikirimkan belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor	belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor	belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor
Rekomendasi Perbaikan	● Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA ● Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector ● Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait progres CAPA yang harus dikirimkan ● Berkirim surat kembali ke pelaku usaha/lintas sektor terkait permintaan CAPA/ permintaan hasil tidak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha/ lintas sektor	● Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA ● Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector ● Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait progres CAPA yang harus dikirimkan ● Berkirim surat kembali ke pelaku usaha/lintas sektor terkait permintaan CAPA/ permintaan hasil tidak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha/ lintas sektor	● Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA ● Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector ● Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait progres CAPA yang harus dikirimkan
Rencana Aksi	● Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback ● Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector ● Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait CAPA yang harus dikirimkan ● Berkirim surat kembali ke pelaku usaha/lintas sektor terkait permintaan CAPA/ permintaan hasil tidak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha/ lintas sektor	● Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback ● Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector ● Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait CAPA yang harus dikirimkan ● Berkirim surat kembali ke pelaku usaha/lintas sektor terkait permintaan CAPA/ permintaan hasil tidak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha/ lintas sektor ● Telah dilaksanakan Bimtek Pengawasan Post Market IRTP dan desk Penilaian Mandiri kab/kota di BBPOM Sby oleh Pusat	● Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback ● Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector ● Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke lintas sektor dan pelaku usaha terkait CAPA yang harus dikirimkan ● Desk CAPA PBF dengan Pusat untuk percepatan sertifikasi CDOB

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	● Pelaku Usaha maupun lintas sektor tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya	● Pelaku Usaha maupun lintas sektor tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya	● Pelaku Usaha maupun lintas sektor tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	● Pelaku usaha dan lintas sektor belum optimal dalam memberikan respon dengan mengirimkan CAPA sarana ke BBPOM Surabaya ● Progress Oktober: % Capaian terjadi peningkatan dari 104,12% menjadi 107,92%. Diharapkan capaian tetap bisa ditingkatkan di TW 4 ini	● Pelaku usaha dan lintas sektor belum optimal dalam memberikan respon dengan mengirimkan CAPA sarana ke BBPOM Surabaya ● Progress November: % Capaian terjadi peningkatan dari 107,92 % menjadi 110,71%. Diharapkan capaian tetap bisa dipertahankan di bulan Desember	● Pelaku Usaha sedikit yang merespon dan lintas sektor sudah merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya ● % Capaian di bulan Desember 116,13%
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	**Close**	**Close**	**Close**

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 54. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95,54	96,51		**Cukup**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} : \frac{\textit{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \; x\ 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

(CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 diperoleh dari 18.549 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap jumlah permohonan yang masuk sebanyak 19.415. Persentase capaian sebanyak 96,51% yang masuk dalam kategori **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

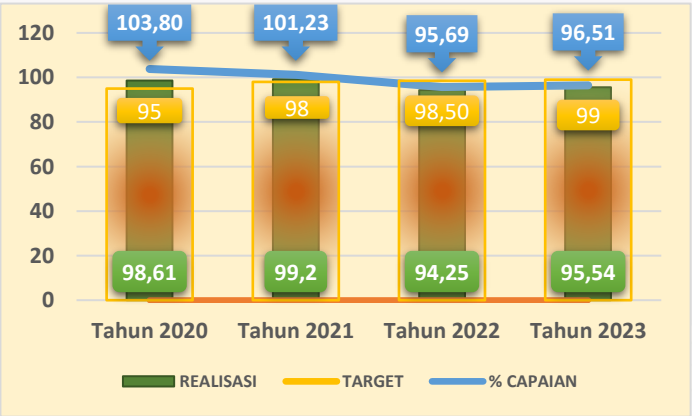

Gambar 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Sejak tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Dibandingkan tahun 2022, terdapat peningkatan realisasi dan persentase capaian pada tahun 2023, namun persentase capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Meskipun terdapat layanan prioritas terhadap 5 industri yang dapat meningkatkan pemenuhan SLA, target masih belum dapat tercapai karena masih ada kendala sistem ebpom, yaitu beberapa kali tidak dapat diakses sama sekali, di antaranya pada bulan Juli selama 1 hari kerja dan bulan September selama 2 hari kerja. Hal ini menyebabkan disaat ebpom dapat diakses pada hari berikutnya, terjadi penumpukan pengajuan/ permohonan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	99.5	95.54	96.02	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	96		99.52	Akan Tercapai	▲

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 belum mencapai target Renstra 2024 dengan kategori **Akan Tercapai**. Hal tersebut juga terjadi di tahun 2022, di mana persentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 94,72%. Dengan adanya tren hasil tersebut, pada bulan Juli 2023, Balai Besar POM di Surabaya mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 dan usulan perubahan target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Terhadap pengajuan tersebut, terdapat surat tanggapan yang berisi reviu dengan **menurunkan target tahun 2024** menjadi 96,0%.

Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 setelah direviu Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu, kategori indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah **Akan Tercapai**. Dengan demikian perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

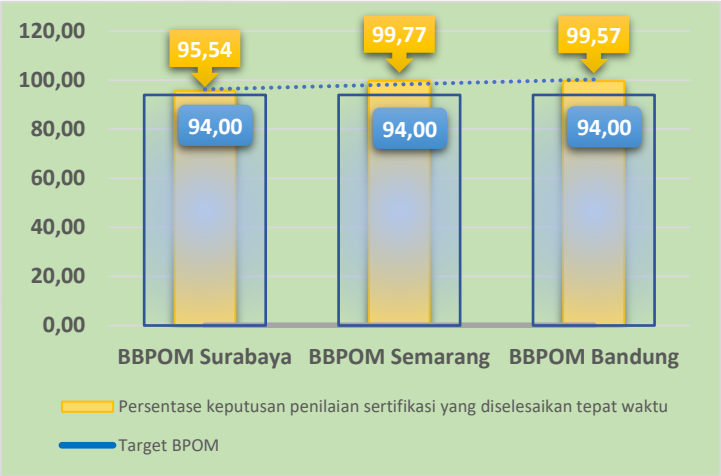

Gambar 41. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Pada tahun 2023, target nasional untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 94%. Dari ketiga Balai yang sejenis / setara dengan

Balai Besar POM di Surabaya, persentase capaian Balai Besar POM di Semarang tertinggi, disusul oleh Balai Besar POM di Bandung, lalu Balai Besar POM di Surabaya, dan Badan POM. Seluruh UPT telah memenuhi target nasional. Persentase capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah dokumen yang harus dievaluasi dan jumlah personil yang mengevaluasi dokumen tersebut.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2023 seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site,* terlebih untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat melakukan pengamatan secara keseluruhan.

Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi usaha menengah besar adalah dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan setelah Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit, yaitu paling lambat 12 bulan setelah Izin Penerapan terbit. Pemeriksaan sarana dalam rangka verifikasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada usaha mikro dan kecil juga tetap dilaksanakan, terutama yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB mendekati atau lebih dari 12 bulan.

Tindak lanjut pemeriksaan sarana dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan Sertifikasi CDOB pada tahun 2023 sebanyak 96,79% telah diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan adanya ketidakpahaman petugas terkait *timeline* penerbitan surat tindak lanjut pemeriksaan sarana sehingga diperlukan sosialisasi kembali terkait hal tersebut. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan

pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejak 21 Juni 2023, Indonesia dinyatakan menjadi kondisi endemi, namun perubahan kondisi ini tidak berpengaruh terhadap *timeline* SKI, yaitu untuk komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Perhitungan *timeline* SKI tetap sesuai peraturan yaitu 6 jam. Selain itu, sejak 5 Juli 2023, Balai Besar POM di Surabaya memberlakukan layanan prioritas kepada 5 eksportir/importir yang memiliki kepatuhan tinggi selama 6 bulan sebelumnya berdasarkan analisis resiko yang telah dilakukan. Layanan prioritas berlaku selama 6 bulan dan akan dilakukan evaluasi. Bagi penerima layanan prioritas, bila dokumen SKE/SKI masuk di e-bpom hingga pk. 14.00 di hari tersebut akan dievaluasi petugas, berbeda dengan non-prioritas, yaitu dokumen yang dievaluasi adalah yang masuk e-bpom hingga pk. 12.00 (Senin - Kamis) dan 11.30 (Jumat). Pada periode Juli - Desember 2023, penerima layanan prioritas adalah 4 eksportir dan 1 importir. Adanya layanan prioritas menyumbang peningkatan pemenuhan *timeline* SKE/SKI, namun hal ini menyebabkan waktu petugas untuk menyelesaikan pekerjaan lain menjadi berkurang.

Persentase capaian dengan kriteria cukup terutama disebabkan oleh pemenuhan penyelesaian SKI/SKE yang melebihi *timeline.* Kendala dalam pemenuhan timeline tersebut, antara lain:

- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Importir / eksportir yang tidak memahami permintaan pemenuhan data oleh petugas tidak segera berkonsultasi dengan petugas, namun mengunggah dokumen yang masih tidak sesuai sehingga terjadi penolakan lagi oleh petugas.
- Terdapat unggahan dokumen dari importir / eksportir yang perlu diklarifikasi secara langsung (tatap muka) dahulu oleh petugas sehingga waktu penyelesaian lebih lama dan berdampak pada survei kepuasan pelanggan.
- Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi.
- Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama.
- Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan evaluasi dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan yang harus dilakukan evaluasi kembali terlebih dahulu setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon.

- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
- Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, misalnya melaksanakan audit sarana, melakukan konsultasi denah, melakukan evaluasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik secara bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE.
- Terkait *timeline* yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan melakukan prioritas evaluasi berdasarkan timeline masing-masing komoditi dengan urutan sebagai berikut evaluasi SKI penolakan, SKI komoditi obat, kosmetik, lalu pangan.
- Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan *timeline* 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai *timeline* disebabkan oleh kondisi tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM atau adanya gangguan sistem pada e-bpom.
- Sejak sistem e-bpom mulai migrasi dengan Pusat Data Nasional, seringkali terjadi kendala pada sistem sehingga mengganggu pemenuhan SLA yang telah ditetapkan.
- Sejak tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem *online* dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE.

Terkait kendala-kendala tersebut, petugas Sertifikasi melakukan mitigasi, yaitu:

- Secara intens melakukan komunikasi dengan petugas Pusdatin dan kedeputian agar segera dapat memberikan informasi secara tepat kepada penerima layanan
- Memberikan respon cepat melalui WA layanan Sertifikasi dan email Sertifikasi apabila eksportir/importir membutuhkan keterangan lebih detail
- Konsultasi denah maupun CAPA yang bersifat kesepakatan waktu dengan penerima layanan, dilakukan setelah jam evaluasi e-bpom berakhir. Namun untuk

jadwal evaluasi e-bpom yang dilaksanakan bersamaan dengan audit, petugas tetap tidak dapat melakukan evaluasi secara maksimal pada saat audit.

Evaluasi terhadap realisasi impor *post border* juga dilaksanakan oleh petugas untuk mendata importir yang tidak memiliki SKI melebihi batas waktu yang ditetapkan sesuai Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Komoditi yang termasuk *post border* adalah bahan baku kosmetik dan pangan serta produk kosmetik dan pangan. Pelaksanaan evaluasi tidak mudah karena cukup banyak *HS code* yang beririsan dengan bahan atau produk non komoditi obat dan makanan. Terhadap importir yang melanggar akan diberikan surat peringatan. Surat peringatan juga diberikan kepada importir/eksportir yang diketahui melakukan rekayasa dokumen.

Sejak Desember 2023, sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, impor produk kosmetik beralih menjadi SKI *border*. Hal ini tentu akan mengurangi kegiatan evaluasi terhadap realisasi impor *post border*.

Selain kegiatan sertifikasi rutin tersebut, petugas Sertifikasi Balai Besar POM di Surabaya juga melaksanakan evaluasi terhadap pemasukan barang kiriman dan barang tentengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan, bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda dan Tanjung Perak. Rekomendasi dapat diberikan kepada pemohon bila sesuai dengan persyaratan mengacu pada Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia yang sejak Desember 2023 berlaku Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Namun ada kalanya kebijakan bersyarat diberikan melihat kondisi tertentu dari pemohon.

Diterapkan sejak akhir Februari 2023, pada tahun 2023 terdapat 254 permohonan rekomendasi pemasukan barang kiriman dan tentengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Terhadap permohonan tersebut, terdapat beberapa yang ditegah penuh karena tidak sesuai dengan peraturan dan terlalu beresiko bila diberi kebijakan. Dari pemasukan yang telah dievaluasi oleh petugas Sertifikasi, masih banyak pemohon yang tidak memahami persyaratan pemasukan sesuai peraturan yang berlaku. Sosialisasi terkait pemasukan barang kiriman dan tentengan untuk keperluan pribadi perlu dilakukan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi dengan pelaku usaha terkait kegiatan ekspor/impor, pada Agustus 2023 dilaksanakan Forum Komunikasi SKE/SKI secara daring, yang diikuti oleh lebih dari 100 eksportir/importir. Selain dari petugas Balai Besar POM di Surabaya, narasumber kegiatan berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda dan Tanjung Perak. Hal ini tentu saja karena kegiatan ekspor/impor sudah pasti melibatkan KPPBC. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha semakin tepat sehingga dapat meningkatkan *timeline* penyelesaian evaluasi dokumen.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023, Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu masuk dalam kategori Akan Tercapai. Untuk meningkatkan capaian di tahun 2024, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Melakukan peningkatan kompetensi teknis secara mandiri melalui Bimtek.
4. Melaksanakan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan yang baik.
5. Evaluasi SKI/SKE dengan service level arrangement (SLA) maksimal 6 jam untuk SKI dan 8 jam untuk SKE, membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi dari petugas. Sedangkan dengan keterbatasan jumlah petugas sertifikasi, sangat sulit untuk mencapai kondisi ideal dimana petugas hanya melakukan evaluasi SKI/SKE tanpa mengerjakan tugas yang lain.
6. Meningkatkan komunikasi internal petugas Sertifikasi maupun dengan petugas pusat agar permasalahan SKI/SKE dapat segera terselesaikan.

7. Melaksanakan forum komunikasi dengan importir/eksportir dan lintas sektor terkait agar importir/eksportir memahami peraturan yang berlaku dan memperkecil kemungkinan kekurangan atau kesalahan dokumen yang diunggah sehingga mempercepat penyelesaian evaluasi SKI/SKE.
8. Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
9. Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi timeline.
10. Mengutamakan penyelesaian evaluasi SKI/SKE sebelum menyelesaikan tugas yang lain, sebagai contoh apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi tatap muka maupun secara daring, dilakukan setelah evaluasi SKI/SKE selesai.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C	Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi	189	kali/trip	289
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	I	Bimtek Inspektur Kosmetik	1	kali/trip	0

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB masih memenuhi timeline meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, petugas BBPOM di Surabaya memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Selain itu, juga dilakukan desk Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) terkait upaya perbaikan hasil temuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya arahan tersebut, pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi ketentuan Cara Produksi yang Baik maupun Cara Distribusi yang Baik.

Realisasi pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi melebihi target. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan sertifikasi baik berupa permintaan dari pelaku usaha maupun verifikasi lapangan yang harus dilakukan terhadap UMK pangan olahan yang telah memperoleh sertifikat Izin Penerapan CPPOB.

Selain kegiatan tersebut, petugas Sertifikasi juga aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi terkait ekspor/impor yang diadakan oleh Badan POM maupun lintas sektor, misalkan GINSI dan KPPBC. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan petugas dan persamaan persepsi antar petugas.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 56. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	446.399.000	446.398.100	100,00	95,51	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Tidak Efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran untuk penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas untuk audit dalam rangka sertifikasi dan registrasi Obat dan Makanan serta anggaran konsumsi desk IP CPPOB dan kegiatan *e-registration*.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2022, diketahui bahwa target IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak tercapai. Penyumbang terbesar dari kecilnya realisasi dibanding dengan target adalah penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKI secara tepat waktu dan telah dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan. Telah dilakukan komunikasi secara intensif dengan pusat baik secara lisan maupun surat. Pencapaian IKU ini juga sudah menjadi temuan pemeriksaan BPK dan merupakan risiko organisasi yang pengendaliannya sudah dialihkan ke pusat. Namun demikian, realisasi di setiap triwulan di tahun 2023 menunjukkan target susah dicapai, sehingga pada tahun 2023 diusulkan penurunan target IKU tahun 2024.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 57. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala / Permasalahan	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Verifikasi IP CPPOB UMK Pangan banyak yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Form Penilaian 7. Masih terdapat UMK Pangan yang lama dalam penyelesaian dokumen IP CPPOB. 8. Penyelesaian CAPA IP CPPOB oleh Usaha Menengah Besar membutuhkan waktu lama terutama bila terkait perbaikan fisik 9. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 10. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 11. Adanya SKI/E prioritas menyebabkan petugas lebih lama dalam menyelesaikan evaluasi SKI/SKE sehingga waktu petugas menyelesaikan pekerjaan lain menjadi berkurang. 12. Petugas tidak memahami SLA tindak lanjut sesuai komoditinya dana evaluasi IP CPPOB UMK Pangan sehingga terdapat surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan yang melebihi timeline.	SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Verifikasi IP CPPOB UMK Pangan banyak yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Form Penilaian 7. Masih terdapat UMK Pangan yang lama dalam penyelesaian dokumen IP CPPOB. 8. Penyelesaian CAPA IP CPPOB oleh Usaha Menengah Besar membutuhkan waktu lama terutama bila terkait perbaikan fisik 9. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 10. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 11. Adanya SKI/E prioritas menyebabkan petugas lebih lama dalam menyelesaikan evaluasi SKI/SKE sehingga waktu petugas menyelesaikan pekerjaan lain menjadi berkurang. 12. Petugas tidak memahami SLA tindak lanjut sesuai komoditinya dana evaluasi IP CPPOB UMK Pangan sehingga terdapat surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan yang melebihi *timeline*.	dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Verifikasi IP CPPOB UMK Pangan banyak yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Form Penilaian 7. Masih terdapat UMK Pangan yang lama dalam penyelesaian dokumen IP CPPOB. 8. Penyelesaian CAPA IP CPPOB oleh Usaha Menengah Besar membutuhkan waktu lama terutama bila terkait perbaikan fisik 9. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 10. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 11. Adanya SKI/E prioritas menyebabkan petugas lebih lama dalam menyelesaikan evaluasi SKI/SKE sehingga waktu petugas menyelesaikan pekerjaan lain menjadi berkurang. 12. Petugas tidak memahami SLA tindak lanjut sesuai komoditinya dana evaluasi IP CPPOB UMK Pangan sehingga terdapat surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan yang melebihi *timeline*.
Rekomendasi Perbaikan	1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait	1. Berkomunikasi dengan Pusdatin terkait kendala	1. Berkomunikasi dengan Pusdatin

Keterangan	Oktober	November	Desember
	kendala tersebut. 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melaksanakan Forum Komunikasi SKI/SKE yang melibatkan importir, eksportir, petugas KPPBC Juanda dan Tanjung Perak. 4. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 5. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 6. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB 7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB 8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru 9. Saling mengingatkan petugas terkait *timeline* surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan	tersebut. 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melaksanakan Forum Komunikasi SKI/SKE yang melibatkan importir, eksportir, petugas KPPBC Juanda dan Tanjung Perak. 4. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 5. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 6. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB 7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB 8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru 9. Saling mengingatkan petugas terkait *timeline* surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan	terkait kendala tersebut. 2. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 3. Melaksanakan Forum Komunikasi SKI/SKE yang melibatkan importir, eksportir, petugas KPPBC Juanda dan Tanjung Perak. 4. Melakukan pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 5. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 6. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB 7. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB dan CPOTB 8. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru 9. Saling mengingatkan petugas terkait *timeline* surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan
Rencana Aksi	1. Menerapkan SKI/SKE prioritas terhadap 5 importir/eksportir untuk meningkatkan layanan publik 2. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom 3. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 4. Melaksanakan Forum Komunikasi SKI/SKE yang melibatkan importir, eksportir, petugas KPPBC Juanda dan Tanjung Perak. 5. Melakukan pengaturan	1. Menerapkan SKI/SKE prioritas terhadap 5 importir/eksportir untuk meningkatkan layanan publik 2. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom 3. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 4. Melaksanakan Forum Komunikasi SKI/SKE yang melibatkan importir, eksportir, petugas KPPBC Juanda dan Tanjung Perak. 5. Melakukan pengaturan	1. Menerapkan SKI/SKE prioritas terhadap 5 importir/eksportir untuk meningkatkan layanan publik 2. Selalu berkomunikasi dengan Pusdatin apabila terdapat permasalahan sistem ebpom 3. Menginformasikan secara berkala persyaratan SKI/SKE 4. Melaksanakan Forum Komunikasi SKI/SKE yang melibatkan importir, eksportir, petugas KPPBC Juanda dan Tanjung Perak. 5. Melakukan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	tugas agar meminimalkan tugas ganda 6. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 7. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB 8. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik 9. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap 10. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru	tugas agar meminimalkan tugas ganda 6. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 7. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB 8. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik 9. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap 10. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru	pengaturan tugas agar meminimalkan tugas ganda 6. Berkomunikasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut 7. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB 8. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPKB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPKB dan denah kosmetik 9. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap 10. Melaksanakan coaching dan mentoring terhadap petugas baru 11. Menjadwalkan sosialisasi terkait *timeline* surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan 12. Merespon cepat pertanyaan importir/eksportir via WA layanan Sertifikasi maupun email
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian	1. Terdapat permasalahan di sistem ebpom 2. Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir 3. Terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan

Keterangan	Oktober	November	Desember
	dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat	SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat	dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 9. Terdapat penyelesaian surat tindak lanjut dan evaluasi IP CPPOB UMK Pangan melebihi *timeline*
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: 1. Permasalahan di sistem ebpom berkurang, petugas Pusdatin merespon dengan cepat 2. Perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir berkurang, terutama untuk pelaku usaha yang sudah lama. 3. Masih terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM	Kondisi Desember: 1. Permasalahan di sistem ebpom berkurang, petugas Pusdatin merespon dengan cepat 2. Perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir berkurang, terutama untuk pelaku usaha yang sudah lama. 3. Masih terdapat petugas yang terjadwal evaluasi SKI/SKE memiliki tugas ganda 4. Terdapat permasalahan SKI/SKE yang harus dikomunikasikan dengan pusat 5. Terdapat penyelesaian SKI/SKE yang melebihi SLA sistem 6. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami peningkatan 7. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama	Capaian persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 sebesar 95,54%

Keterangan	Oktober	November	Desember
	OT membutuhkan waktu lama 8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 9. Penyelesaian SKI SKE oleh petugas membutuhkan waktu lebih karena adanya SKI SKE prioritas	8. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik mulai dipenuhi dengan waktu yang lebih cepat 9. Penyelesaian SKI SKE oleh petugas membutuhkan waktu lebih karena adanya SKI SKE prioritas	
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	**Open**	**Open**	**Close**

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 58. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	67,73	104,19		**Sangat Baik**

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:
Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No.

HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 409 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 277 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 132 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 67,73 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di adalah 104,19 % dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

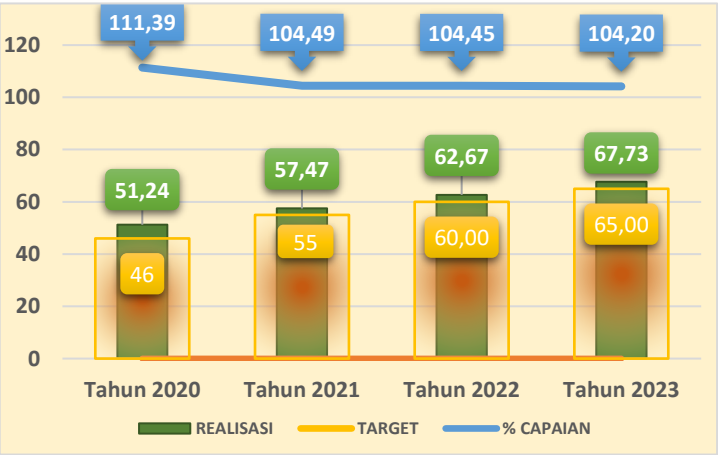

Gambar 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2023

Terdapat penurunan capaian realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2021 hingga tahun 2023, namun penurunan capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ini dikarenakan naiknya target setiap tahun sesuai reviu target Renstra. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi dibanding tahun 2022, namun capaian turun dari 104,45 menjadi 104,20.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target renstra 2024

PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	70	67.73	96.76	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	70		96.76	Akan Tercapai	▲

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Akan Tercapai.** Berdasarkan hasil

evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 tetap**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu juga mendapat kategori “Akan Tercapai”, sehingga diperlukan upaya lebih agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

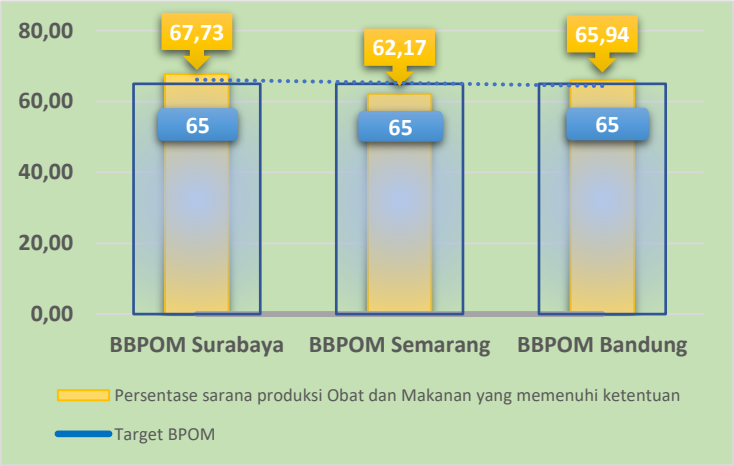

Gambar 43. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan Gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Diantara ketiga balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Semarang yang tidak mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah 67,73 % **telah mencapai target** yang ditetapkan meskipun apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2024, maka masuk pada kriteria “Akan Tercapai”. Pada tahun 2023, pemeriksaan sarana dilaksanakan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. GAP kompetensi yang muncul pada tahun 2022 makin berkurang walaupun masih ada Sebagian petugas yang belum mendapatkan pelatihan berjenjang secara lengkap terkait pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan. Pelatihan berjenjang yang sangat bergantung pada kuota yang disediakan oleh PPSDM dapat diatasi dengan melakukan Pelatihan internal yang sesuai dengan kurikulum PPSDM dan memenuhi persyaratan dari PPSDM untuk dapat diakui sebagai pelatihan berjenjang, sehingga gap kompetensi ini dapat semakin diperkecil. Penyumbang TMK terbesar adalah sarana produksi pangan, sehingga dilakukan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA dengan mengundang pelaku usaha yang mempunyai hasil pemeriksaan sarana TMK. Upaya ini perlu dilakukan terus menerus supaya pelaku usaha lebih peduli terhadap keamanan produk Obat dan makanan yang diproduksi dan senantiasa

mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk capa bagi sarana yang TMK perlu dilakukan secara periodic dengan topik bimtek yang disesuaikan dengan kajian hasil pemeriksaan sarana. Kajian ini dapat menghasilkan data pelanggaran apa yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha sehingga penetapan materi bimtek dapat lebih terarah dan pada akhirnya diharapkan mampu efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam penetapan target sarana berbasis risiko yang memanfaatkan teknologi informasi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pengawasan. Koordinasi dengan pusat agar pusat menyediakan platform manajemen inspeksi secara elektronik yang berisi data sarana dan analisa risiko untuk menyusun prioritas pemeriksaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan yang dapat dilihat secara komprehensif oleh pusat dan UPT akan dapat meningkatkan kinerja pengawasan pusat dan UPT. Balai Besar POM di Surabaya sangat membutuhkan platform seperti ini mengingat jumlah sarana dan target pemeriksaan yang banyak dimana apabila penyusunan rencana dan monev dilakukan secara manual akan menyita banyak waktu dan tidak efisien. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha juga dapat dilakukan dengan cara mengintensifkan pembinaan yang dapat berupa pemberian Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan Desk CAPA hasil pemeriksaan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Inspeksi	QIC.001.053	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	Advanced GMP Training for Inspectors Deputi 2	1	kali/trip	1
					B	Pendampingan Inspektur dalam penerapan CPOTB terkini pada pengawasan sarana melalui Joint Inspection	0	kali/trip	0
		Inspeksi	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	239	kali/trip	210
					B	Pemeriksaan CPOB	11	kali/trip	8
					C	Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB)	7	kali/trip	9

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah Advanced GMP Training for Inspectors Deputi 2 dan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan. Terdapat kegiatan Pendampingan inspektur dalam penerapan CPOTB terkini pada pengawasan sarana melalui *join inspection* bersama petugas pusat yang tidak terealisasi namun hal ini tidak mempengaruhi capaian target indikator. Pada tahun

2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pada 409 sarana, melebihi target yang seharusnya 408 sarana. Selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 60. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	447.191.000	447.038.937	99,97	104.19	**(100%) Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 terdapat revisi pengurangan anggaran yang mendukung indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari Rp.452.772.000,- menjadi Rp.447.191.000,-, meliputi anggaran *join inspection* dengan pusat. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan kegiatan bimtek kepada pelaku usaha dan desk CAPA khususnya kepada pelaku usaha pangan fortifikasi yang hasil pemeriksaan sarananya TMK atau produknya ditemukan TMS parameter fortifikasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan BBPOM di Surabaya pada program nasional percepatan penanganan *stunting* dimana Badan POM bertanggung jawab pada pengawasan sarana produsen dan produk pangan fortifikasi. Kedepannya kegiatan Bimtek pelaku usaha akan tetap dilaksanakan dan tidak terbatas pada sarana produsen pangan. Walaupun nampaknya target renstra 2024 akan tercapai, namun apabila mempertimbangkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun dimana banyak UMKM yang memproduksi pangan risiko rendah dengan izin edar melalui OSS RBA dimana hanya dilakukan evaluasi dokumen dan harus dilakukan audit lapangan satu tahun setelah izin edar terbit, ini membawa tantangan cukup berat untuk dapat mencapai target renstra 2024. BBPOM di Surabaya perlu mengintensifkan pembinaan berdasarkan kebutuhan dari kajian hasil pengawasan dan laporan kinerja per triwulan

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 61. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Sebelumnya

KETERANGAN	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Kendala/ Permasalahan	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat empat orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (kecelakaan), cuti haji, ijin off pengurusan beasiswa LPDP dan cuti alasan penting	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat tiga orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (kecelakaan) dan cuti alasan penting	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat dua orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti dan tubel
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana

KETERANGAN	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Capaian IKU pemeriksaan sarana produksi: 67,73 %
Status	**Close**	**Close**	**Close**

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 62. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	70,86	110,71		**Sangat Baik**

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasn Obat dan Bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Keputusan Kepala Badan POM nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya.

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 748 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 530 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 218 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 70,86%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2023 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110,71 % dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Gambar 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 hingga tahun 2023

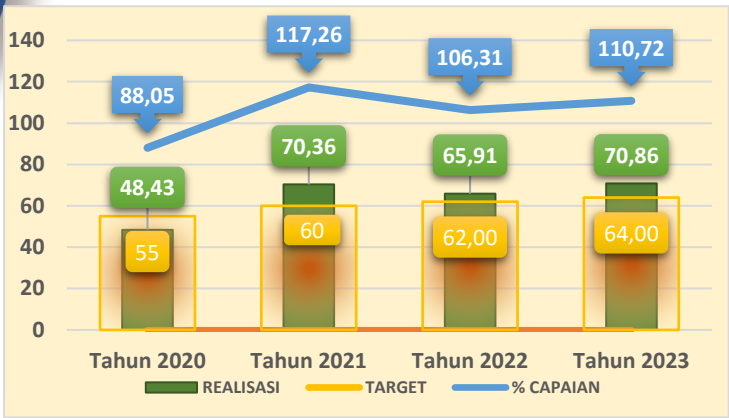

Berdasarkan gambar disamping terdapat penurunan realisasi dan capaian di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun terdapat kenaikan realisasi dan capaian di tahun 2023. Hal ini disebebkan karena pada tahun 2022 terdapat peningkatan TMS pada sarana distribusi obat tradisonal dan kosmetik, sedangkan pada tahun 2023 terdapat banyak pemeriksaan sertifikasi CDOB yang turut menyumbang sarana Memenuhi Ketentuan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024

PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	66	70.86	107.36	**Tercapai / Melampaui**	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	70.86		100.00	**Tercapai / Melampaui**	▲

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 **sudah mencapai target tahun 2024** pada Renstra awal sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Meskipun realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai**", namun demikian kondisi hingga tahun 2024 bisa berubah menyesuaikan isu baik terkait pelarut tercemar, diversi maupun isu lainnya yang mungkin terjadi dan wacana audit sertifikasi CDOB akan diserahkan kepada Subkelompok Substansi Sertifikasi dimana selama ini audit sertifikasi CDOB dilakukan oleh Subkelompok Substansi Inspeksi karena masih belum adanya personel yang kompeten di Subkelompok Substansi Sertifikasi untuk melakukan sertifikasi dan audit sertifikasi ini termasuk penyumbang sarana MK pada kinerja Subkelompok Substansi Inspeksi. Oleh karena itu masih diperlukan upaya berkesinambungan untuk mempertahankan realisasi dan mencapai target 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

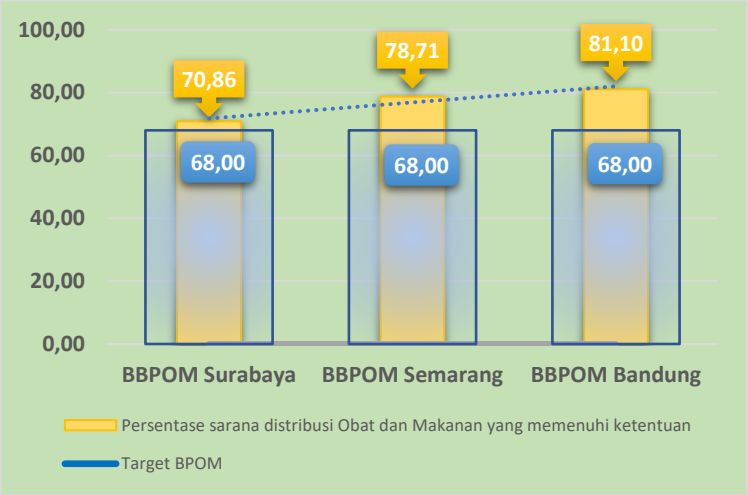

Gambar 45. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target nasional

Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Namun demikian, semua balai yang diperbandingkan capaiannya telah melebihi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2023 seperti halnya tahun 2022, selain distribusi obat dilakukan pula pemeriksaan sarana distribusi penotifikasi kosmetika, dan sarana distribusi suplemen Kesehatan dengan metode yang sama dengan tahun 2022 yaitu sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan pada sarana yang berbeda. Disamping itu, pada tahun 2023 masih dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi penotifikasi kosmetik, dan seperti pada tahun 2023 dimana pada pelaksanaan nya banyak terdapat sarana penotifikasi kosmetika yang telah berpindah lokasi / tutup.

Di tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat sebanyak 299 sarana dengan hasil 210 sarana memenuhi ketentuan dan 89 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat tersebut terdiri atas pemeriksaan pada GFK sebanyak 28 sarana dengan hasil 21 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan pada sarana PBF sebanyak 92 saranan dengan hasil 82 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana apotek sebanyak 45 sarana dengan hasil 19 sarana memenuhi ketentuan dan 26 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana klinik sebanyak 39 sarana dengan hasil 14 sarana memenuhi ketentuan dan 25 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana puskesmas sebanyak 36 sarana dengan hasil 31 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana toko obat sebanyak 15 sarana

dengan hasil 10 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan.dari 92 sarana PBF yang diperiksa, 28 sarana adalah pemeriksaan dalam rangka audit sertifikasi yang setara dengan 34% dari hasil pemeriksaan MK.

Selain tersebut diatas, pada tahun 2023 juga dilakukan pemeriksaan distribusi obat tradisional, distribusi suplemen Kesehatan, distribusi kosmetika dan distribusi pangan sebanyak 449 sarana dengan hasil 320 sarana memenuhi ketentuan dan 129 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional meliputi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 159 sarana dengan hasil 102 sarana memenuhi ketentuan dan 57 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 87 sarana dengan hasil 83 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 144 sarana yang terdiri dari pemeriksaan toko kosmetika sebanyak 113 sarana dengan hasil 75 memenuhi ketentuan dan 38 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan pada penotifikasi kosmetika dan importir sebanyak 31 sarana dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 59 sarana dengan hasil 38 sarana memenuhi ketentuan dan 21 sarana tidak memenuhi ketentuan. Untuk mendukung pencapaian target renstra tahun 2024, perlu dilaksanakan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA secara rutin dan lebih banyak setiap tahun agar semakin banyak pelaku usaha yang mematuhi peraturan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam penetapan target sarana berbasis risiko yang memanfaatkan teknologi informasi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pengawasan. Koordinasi dengan pusat agar pusat menyediakan platform manajemen inspeksi secara elektronik yang berisi data sarana dan analisa risiko untuk menyusun prioritas pemeriksaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan yang dapat dilihat secara komprehensif oleh pusat dan UPT akan dapat meningkatkan kinerja pengawasan pusat dan UPT. Balai Besar POM di Surabaya sangat membutuhkan platform seperti ini mengingat jumlah sarana dan target pemeriksaan yang banyak dimana apabila penyusunan rencana dan monev dilakukan secara manual akan menyita banyak waktu dan tidak efisien. Peningkatan komunikasi dengan fungsi penindakan untuk temuan atau sarana yang terindikasi melakukan pelanggaran pidana sebagai penguatan hasil pengawasan dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha juga dapat dilakukan dengan cara mengintensifkan pembinaan yang dapat berupa pemberian Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan Desk CAPA hasil pemeriksaan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Inspeksi	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Inspeksi Bersama	15	kali/trip	7
					B	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sarfanyar, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban Obat Dan Makanan Ilegal	362	kali/trip	385
					C	Pengawasan Kasus Khusus/Food Security	5	kali/trip	9
					D	Pengawasan Periklanan	24	kali/trip	24
					F	Pengawasan Penerapan Farmakovigilans	1	kali/trip	3
		Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik POM	2	kali/trip	0
					C	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat	1	kali/trip	1
					D	Workshop Pemantapan Teknis Pengawasan Post-Market Obat Beredar	1	kali/trip	1
					E	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan OT, SK dan Kosmetik	0	kali/trip	2
					F	Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	1	kali/trip	1
					G	Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	0	kali/trip	0
					H	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan	1	kali/trip	2
					I	Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024	1	kali/trip	0
					J	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik	1	kali/trip	0

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain: inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ sertifikasi CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan, pemeriksaan onsite dalam rangka impor ekspor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. Target pemeriksaan sarana distribusi adalah 724 sarana, namun hingga akhir tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 748 sarana atau 103,31%. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pendukung seperti pelatihan, bimtek, dan rapat koordinasi dengan pusat dan balai lain.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 64. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	732.816.000	732.600.810	99,97	110.71	**(100%) Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2023 terdapat pengurangan anggaran karena adanya automatic adjusment dari Rp792.959.000,- menjadi Rp732.816.000,-. Meskipun demikian target output dapat tercapai bahkan melebihi target dan target IKU pun tercapai, karena anggaran yang dikurangi adalah kegiatan terpadu antara Balai dengan pusat yang kemudian tetap dilaksanakan namun secara daring.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, informasinya dimanfaatkan dengan mengadakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA sebagai upaya peningkatan capaian indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya dilibatkan dalam penyampaian mata kuliah Cara Distribusi Obat yang Baik oleh Universitas Surabaya. Hal ini adalah respon positif terhadap program Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur) yang mulai dirintis sejak tahun 2022 yang dimulai dengan memberikan Bimtek kepada Apoteker Penanggung Jawab PBF yang bertempat di Aula Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan dilibatkannya BBPOM di Surabaya dalam kurikulum CDOB oleh Universitas yang memiliki program Apoteker, maka diharapkan lulusan Apoteker dapat lebih siap bekerja di sektor distribusi obat sehingga pada akhirnya. kepatuhan pelaku usaha meningkat. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan diharapkan universitas lainnya akan mengikuti jejak Universitas Surabaya. sebagai upaya percepatan pencapaian target renstra 2024.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 65. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebelumnya

KETERANGAN	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Kendala/ Permasalahan	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko	Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko

KETERANGAN	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat empat orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (kecelakaan), cuti haji, ijin off pengurusan beasiswa LPDP dan cuti alasan penting	tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat tiga orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit (kecelakaan) dan cuti alasan penting	tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan Jumlah personil inspeksi berkurang dikarenakan terdapat dua orang petugas yang tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan cuti sakit dan tubel
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Perlu dilakukan pemerataan kompetensi melalui pelatihan/sosialisasi internal dan pendampingan dari inspektur kepala/senior/ketua tim kepada petugas yang kurang kompetensi nya Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Rencana Aksi	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap	Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap

KETERANGAN	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	Penyusunan Target Pemeriksaan	Penyusunan Target Pemeriksaan	Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Hasil pemeriksaan dari beberapa personil belum memadai Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan; Capaian IKU pemeriksaan sarana dstribusi: 70,86 %
Status	**Close**	**Close**	**Close**

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 66. Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Layanan Publik	4.6	4.98	108.26		**Sangat Baik**

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2. Profesionalitas SDM (18%);
3. Sarana Prasarana (15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada triwulan III telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM, dan BBPOM di Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 4,98 dengan kategori **Pelayanan Prima**.

Berikut ini adalah hasil evaluasi dari tiap aspek:

No	Aspek	Indeks Aspek (%)	Indeks Aspek	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan	98,6	4,93	Agar dapat meningkatkan publikasi SKM terutama melalui aplikasi yang dapat diunduh
2	Profesionalisme SDM	100	5	Semua indikator telah terpenuhi
3	Sarana dan Prasarana	100	5	Semua indikator telah terpenuhi
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	100	5	Semua indikator telah terpenuhi
5	Konsultasi dan Pengaduan	100	5	Semua indikator telah terpenuhi
6	Inovasi	100	5	Semua indikator telah terpenuhi

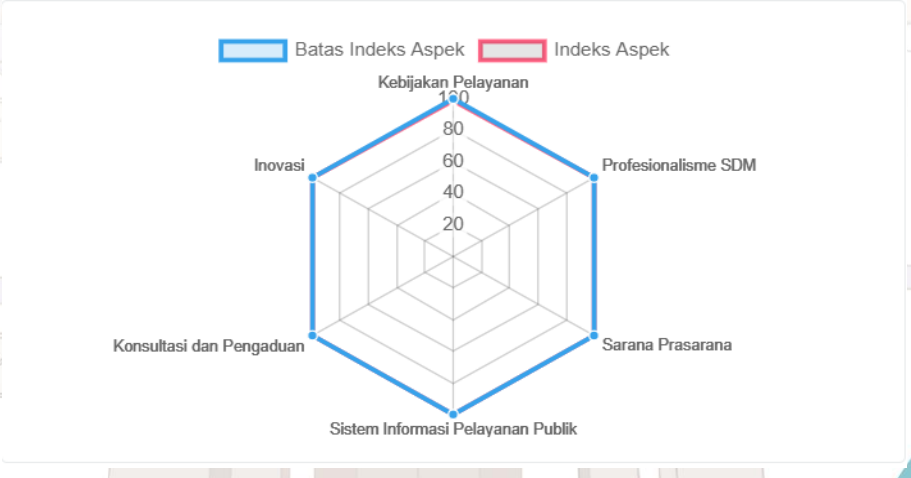

Gambar 46. Grafik Aspek Indeks Pelayanan Publik

Selain itu, pada tahun 2023 ini BBPOM Surabaya dipilih untuk mewakili BPOM sebagai Unit Lokus Evaluasi oleh Kemenpan RB untuk penilaian sebagai berikut:

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk kategori Layanan Administrasi, dan berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 795 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BBPOM di Surabaya memperoleh indeks 4,88 dengan kategori A yaitu Pelayanan Prima.
- Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan, dan berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 815 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan, BBPOM di Surabaya memperoleh kategori UPP Terbaik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

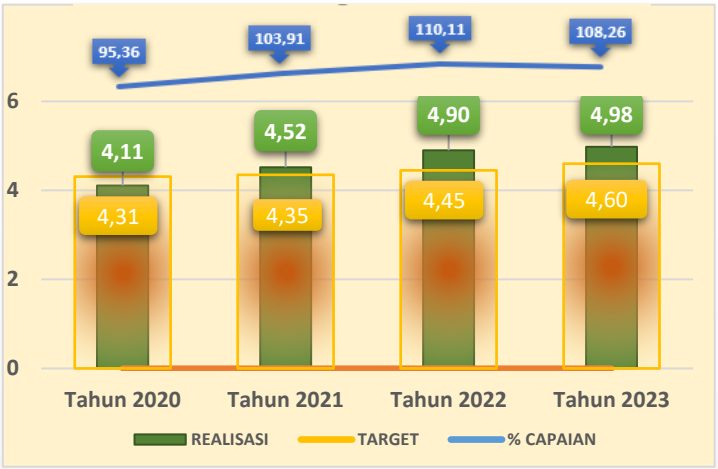

Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 hingga tahun 2023

Berdasarkan data pada gambar disamping, walaupun persentase capaian realisasi tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, namun indeks pelayanan publik yang diperoleh di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahkan mendekati nilai sempurna (nilai maksimum 5). Nilai indeks belum maksimal di aspek Kebijakan Pelayanan yaitu perlunya publikasi SKM di aplikasi yang bisa diunduh. Hal ini menjadi bahan evaluasi agar ada perbaikan ke depannya dengan berkolaborasi dengan tim IT.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

INDEKS LAYANAN PUBLIK		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	4.55	4.98	109.45	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	4.95		100.61	Tercapai / Melampaui	▲

Berdasarkan data pada tabel, persentase capaian tahun 2023 telah **Tercapai/Melampaui** target tahun 2024 yang tertuang pada Renstra BBPOM di

Surabaya, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai**", namun mengingat semakin tingginya standar pelayanan publik di tahun 2024 maka BBPOM di Surabaya harus terus berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dengan demikian

target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

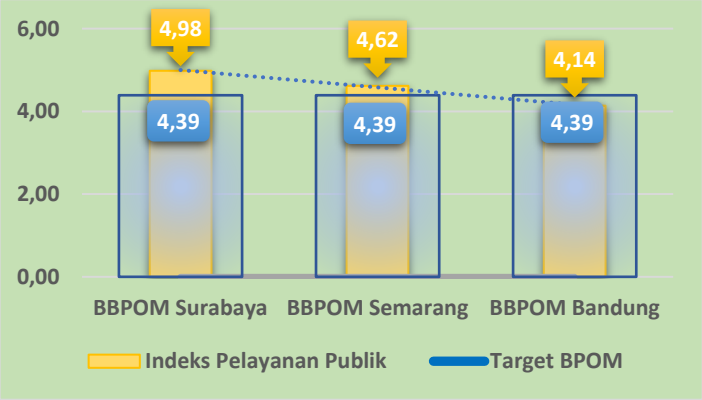

Tabel 69. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara dan Target Nasional

Berdasarkan data pada gambar disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks pelayanan publik BBPOM di Surabaya tahun 2023 mendapat nilai tertinggi dibanding BBPOM setara lainnya, dan melampaui indeks Badan POM atau berada di atas target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan BBPOM di Surabaya untuk mendapat kategori penilaian "Pelayanan Prima", yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.

- Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan. Selain itu konsistensi melakukan publikasi hasil SKM melalui berbagai media termasuk aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat.
- Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
- Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
- Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, *capacity building* dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
- Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas *coffee corner*, penyediaan minuman dan kue tradisional, dll.
- Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik.
- Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
- Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai *timeline*, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.
- Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian yang diraih tahun ini merupakan tantangan untuk mempertahankan dan menyempurnakan untuk mencapai indeks maksimal di tahun berikutnya. Tentu upaya pemenuhan seluruh aspek sebagai unit penyelenggara publik dengan predikat pelayanan prima perlu dipertahankan secara konsisten dan kontinu, dan menyempurnakan upaya yang telah dilakukan, seperti mengembangkan ide, kreatifitas, dan inovasi baru pelayanan publik, melakukan pembaruan dan penajaman inovasi pelayanan publik yang sudah dimiliki sehingga lebih berdampak secara langsung kepada masyarakat.

Upaya lainnya yang perlu diperhatikan adalah penyamaan persepsi, pemahaman, dan pemerataan kompetensi petugas pelayanan publik, penyempurnaan sistem informasi/website yang dimiliki, dan perlunya melakukan benchmarking (studi tiru) ke unit pelayanan publik lainnya baik swasta atau instansi pemerintah lainnya di bidang pelayanan untuk menambah wawasan kebutuhan pelayanan terkini dan menyempurnakan pelayanan publik yang telah dimiliki.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
15	Indeks Pelayanan Publik	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	1	kegiatan	1
					D	Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	20	kali/trip	32
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	1	kali/trip	1
					F	Pelatihan dalam rangka percepatan/efisiensi penerbitan rekomendasi importir serta mempersiapkan kemandirian UPT BPOM dalam pengawasan importir OT dan SK	1	kali/trip	1

Berbagai upaya telah dilakukan BBPOM di Surabaya untuk pengembangan dan perbaikan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang direviu dan ditetapkan setiap tahun menunjukkan komitmen pemberian pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Kegiatan yang menunjang sepanjang tahun 2023 antara lain kegiatan pemeriksaan terhadap sarana importir/eksportir dalam rangka pemenuhan pemberian sertifikat SKI/SKE, pemberian pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan desk atau layanan jemput bola melalui program Klinik POM (Konsultasi dan Layanan Informasi Keliling) ke berbagai daerah, serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas

layanan publik dilakukan melalui diseminasi melalui kegiatan internal substansi/morning breeze yang dilakukan secara rutin.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu Cangkrukan (Bincang dengan Kru Layanan), AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab), Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan Sketsa (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 70. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

NDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	159.384.000	159.360.511	99,99	108,26	**Efisien (100%)**

Berdasarkan data pada tabel di atas, didapat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dalam tahun berjalan untuk pengembangan program sesuai kebutuhan terkini, pengembangan kompetensi petugas layanan publik, dan program lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pertemuan dengan pelaku usaha dalam rangka pendampingan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2022, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,9 melebihi target tahun 2023 dan target akhir periode renstra. Namun demikian, terdapat perubahan tools penilaian di tahun 2023 oleh menpan dan setelah dilakukan konversi nilai, maka nilai indeks pelayanan publik tahun 2022 menjadi 4,52, sehingga dilakukan revisi yaitu kenaikan target IPP di tahun 2023 dari 4,51 menjadi 4,6 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perbaikan aspek pelayanan publik dilakukan secara berkesinambungan termasuk perbaikan dari

evaluasi di tahun 2022. Realisasi tahun 2023 melampaui target awal tahun 2022 (sebelum dikonversi) dan melampaui target 2023.

Di tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan inovasi layanan publik yang sudah dimiliki sejak tahun sebelumnya seperti pengembangan kolaborasi, peningkatan penganggaran, penambahan sasaran pelayanan, peningkatan dan konsistensi petugas dalam memberikan pelayanan, kemudahan pelayanan, renovasi ruang layanan publik BBPOM di Surabaya dan lain-lain. Pengembangan inovasi ini tentunya perlu dillakukan berkesinambungan menyesuaikan situasi dan perkembangan terkini sehingga inovasi semakin memberikan dampak kepada masyarakat. Penyusunan janji kinerja melalui Standar Pelayanan Publik yang direviu setiap tahun menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui berbagai survei kepada pelanggan diperlukan secara kontinu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga layanan dapat lebih baik lagi.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 71. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Proyek renovasi yang sedang berjalan mempengaruhi proses pelayanan	Renovasi yanblik telah selesai dilaksanakan. Belum dilakukan penataan ulang setelah dilakukan renovasi	Banyak pelanggan yang kesulitan proses regsitrasi di aplikasi registrasi
Rekomendasi Perbaikan	menyusun tahapan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan renovasi sesuai timeline/tepat waktu	Mengoptimalkan seluruh ruangan yanblik terutama setelah dilakukan renovasi	Pelanggan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem aplikasi di registrasi
Rencana Aksi	petugas pelayanan publik menyesuaikan pemberian layanan apabila terjadi kendala akibat pekerjaan renovasi. Misalnya mencari ruang konsultasi yang tidak mengganggu layanan.	melakukan pemindahan peralatan dan perlengkapan di tempat yang telah disiapkan	Memberikan pendampingan dan menjelaskan status di aplikasi registrasi yang sedang menyelesaikan dokumen pengajuan registrasi sebelumnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	pelayanan terdampak renovasi	belum seluruh ruangan yanblik sudah optimal	Masyarakat belum memahami kendala yang terjadi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	pelayanan dapat tetap dilakukan	Seluruh ruangan yanblik sudah dioptimalkan	Masyarakat memahami kondisinya dan mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya.
Status	**close**	**close**	**close**

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 72. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65	70,43	108,35		**Sangat Baik**

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{Jumlah\ UMKM\ OT\ \ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi

pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2023.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2023 sebesar 70,43 dengan capaian sebesar 108,35% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

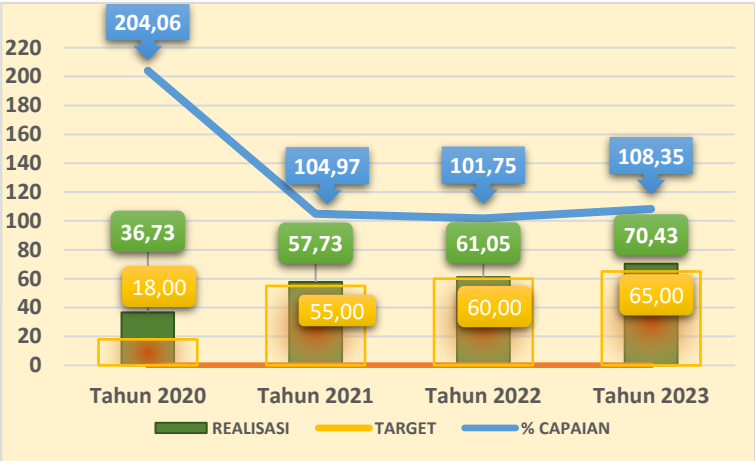

Gambar 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat peningkatan target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Sejak tahun 2021, persentase capaian indikator tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik. Dibandingkan tahun 2022, terdapat kenaikan persentase capaian. Hal ini dikarenakan upaya pendampingan terus menerus dilakukan dengan upaya percepatan melalui kegiatan inovasi Gempur Jatim, Jatim *Glowing*, dan Sippotra.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024

PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	70	70.43	100.61	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	70		100.61	Tercapai / Melampaui	▲

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 sudah mencapai target Renstra Tahun 2024 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 tetap**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu juga mendapat kategori "**Tercapai**", namun masih diperlukan upaya peningkatan kinerja agar target 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

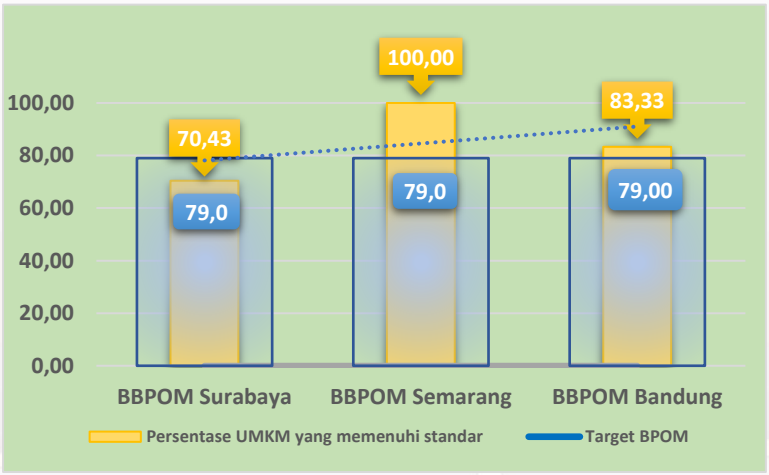

Gambar 48. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Pada tahun 2023, target nasional untuk indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 79%. Dari ketiga Balai yang sejenis / setara dengan Balai Besar POM di Surabaya, persentase capaian Balai Besar POM di Semarang tertinggi, disusul oleh Balai Besar POM di Bandung, lalu Badan POM dan Balai Besar POM di Surabaya. Balai Besar POM di Surabaya tidak memenuhi target nasional, salah satunya disebabkan oleh banyaknya UMKM pangan, OT, maupun kosmetik yang mau mengikuti kegiatan pendampingan namun kurang berkomitmen dalam memenuhi cara produksi dan/atau cara pembuatan yang baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil capaian tahun 2023, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 108,35%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot untuk obat tradisional, dan notifkos untuk kosmetik.

Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh. Meskipun Bimbingan Teknis secara khusus dilaksanakan hanya setahun sekali, pelaku UMKM yang baru bergabung tetap memperoleh materi Bimbingan Teknis seperti yang pernah disampaikan, meskipun tidak terdapat penilaian *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, pelaku UMKM tetap didampingi secara penuh.

Dari ketiga program inovasi pendampingan UMKM Balai Besar POM di Surabaya, pendampingan UMK pangan olahan adalah yang paling banyak. Namun, adanya kriteria tahapan yang harus diikuti oleh UMK pangan olahan yang didampingi, menyebabkan tidak semua yang telah didampingi dapat dihitung sebagai kegiatan pendampingan. Salah satu tahapan tersebut adalah pelaku UMK pangan olahan harus mengikuti Bimtek sesuai mekanisme dan melaksanakan *pre-test* dan *post-test*. Penilaian seringkali tidak dilakukan oleh petugas saat melakukan bimtek di luar jadwal yang telah ditetapkan karena keterbatasan waktu. Desk konsultasi dan pendampingan penerbitan Izin Penerapan (IP) CPPOB lebih dibutuhkan oleh pelaku UMK pangan olahan, sehingga tidak dapat melakukan *pre-test* dan *post-test.* Untuk mengatasi hal tersebut, selanjutnya akan dilakukan *pre-test* dan *post-test* agar data pendampingan UMK pangan olahan yang dilaporkan sesuai dengan yang telah dilakukan.

Seluruh UMK pangan olahan yang akan mendaftarkan produk di Badan POM, harus memiliki IP CPPOB. Sepanjang tahun 2023, terdapat 545 pengajuan dari UMK pangan olahan yang telah terbit sertifikat dari 991 pengajuan. Selain itu, terdapat 193 pengajuan yang ditolak. Hal ini di antaranya disebabkan oleh ketidaksesuaian skala usaha atau ketidaksesuaian KBLI dengan jenis pangan yang diproduksi.

Banyaknya IP CPPOB yang diajukan, menunjukkan bahwa sangat banyak UMK pangan olahan yang akan mendaftarkan produknya di Badan POM. Namun sayangnya, tidak semua pelaku UMK memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tahap pertama tersebut. Hal ini di antaranya disebabkan oleh pelaku UMK tidak memahami kekurangan data yang diminta namun tidak bertanya, serta tidak ada pendamping di wilayahnya yang dapat memberikan informasi yang tepat terkait pengajuan tersebut. Pada saat kegiatan Klinik POM yang dilaksanakan di kabupaten/kota, terdapat kecenderungan bahwa pelaku UMK tidak melanjutkan pengajuannya bila tidak didampingi secara intensif, padahal sumber daya Balai Besar POM di Surabaya untuk melakukan Klinik POM sangat terbatas. Hal ini juga berlaku untuk pelaku UMKM OT dan kosmetik. Pelaku UMKM juga lebih paham bila didampingi secara langsung, bukan melalui daring.

Keterbatasan sumber daya sangat berpengaruh terhadap intensifikasi pendampingan. Petugas tidak dapat secara terus menerus dan secepatnya merespon pertanyaan maupun tindak lanjut dari pelaku UMKM. Melalui Grup *whatsapp* SIPPOTra, Jatim Glowing, dan Gempur Jatim, diharapkan sesama pelaku usaha dapat saling membantu bila ada yang bertanya. Selain itu, kolaborasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota yang juga memiliki program pendampingan sangat perlu ditingkatkan, agar dapat melakukan pendampingan bila petugas Balai Besar POM di Surabaya tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pendampingan secara langsung di wilayah tersebut. Penyampaian contoh dokumen juga tetap akan dilakukan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaku UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik perlu didampingi agar dapat memenuhi standar cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik. Untuk meningkatkan capaian pendampingan dan meningkatkan konsistensi penerapan standar, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.
b. Peningkatan kompetensi petugas terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat saat melakukan pendampingan termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus.
c. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam pendampingan UMKM terkait sarana prasarana saat desk konsultasi untuk menunjang pemenuhan dokumen persyaratan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi

yang baik serta penerapan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.

d. Melaksanakan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.
e. Melaksanakan bimbingan teknis secara efektif terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik, termasuk melakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test.
f. Melakukan pendampingan secara intensif, efektif, dan sistematis sehingga UMKM dapat menerapkan dan memenuhi ketentuan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.
g. Menambahkan materi terkait pemasaran untuk meningkatkan semangat pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.
h. Berkolaborasi dengan lintas sektor dan memberdayakan mahasiswa magang dalam melakukan pendampingan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Sertifikasi	QDG.001.051	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A	GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) JATIM	22	kali/trip	22
					B	SiPPOTra (Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional)	10	kali/trip	5
					C	Jatim Glowing	10	kali/trip	5

Target pendampingan UMKM sesuai DIPA 2023 adalah 98 UMKM yang terdiri dari 77 UMK Pangan Olahan, 8 UMKM Obat Tradisional, dan 13 UMKM Kosmetik. Pada saat pelaksanaan rekruitmen pendampingan UMKM terdapat 243 UMK Pangan Olahan, 27 UMKM Obat Tradisional dan 68 UMKM Kosmetik. Balai Besar POM di Surabaya membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. Balai Besar POM di Surabaya juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2023, sehingga terdapat penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2023.

Dalam rangka pendampingan UMKM, Balai Besar POM di Surabaya memiliki inovasi Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan izin edar produknya. Pada tahun 2022, inovasi Gempur Jatim

berhasil meraih Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Hal ini menjadikan Gempur Jatim semakin dikenal baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang tertarik dan meminta untuk dilaksanakan Gempur Jatim di wilayahnya masing masing. Sepanjang 2023, telah dilaksanakan layanan jemput bola ke daerah sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan yang tercakup dalam program Klinik POM. Selain inisiatif dari Balai Besar POM di Surabaya, Klinik POM juga diadakan untuk memenuhi permintaan lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, DPMPTSP Kota Madiun, Dinas Koperasi Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi Kota Pasuruan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dan DPMPTSP Kabupaten Pacitan. Beberapa permasalahan yang dimiliki pelaku usaha adalah tidak memahami proses penerbitan atau pembaruan NIB menjadi versi RBA, tidak memahami proses penambahan dan/atau perbaikan KBLI, tidak memiliki NPWP atau NPWP berstatus KSWP tidak valid, kesulitan memiliki penanggung jawab teknis yang sesuai, tidak memahami teknologi proses produksi yang tepat. Terkait permasalahan tersebut, Balai Besar POM di Surabaya bekerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses terkait NIB, KKP Kabupaten/Kota terkait pembuatan NPWP dan/atau pembaruan status NPWP, asosiasi profesi terkait penanggung jawab teknis, dan BRIN terkait pendampingan teknologi proses produksi.

Selain permasalahan di atas, banyak pula pelaku UMKM yang tidak memiliki fasilitas perangkat teknologi seperti komputer atau laptop. Sayangnya tidak semua lintas sektor di daerah dapat menyediakan fasilitas tersebut sehingga pembuatan dokumen menjadi terhambat. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang berkomitmen tinggi sehingga dapat melakukan pemenuhan dokumen meskipun tidak memiliki fasilitas perangkat tersebut.

Selama tahun 2023 juga dilaksanakan pendampingan UMK pangan olahan bersama mahasiswa program PAGC (Pangan *Goes to Campus*) dan mahasiswa magang. UMK yang menjadi sasaran pendampingan adalah yang belum memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Keterlibatan mahasiswa sangat membantu dalam pemenuhan dokumen sebagai persyaratan penerbitan PB UMKU IP CPPOB. Setelah memperoleh dokumen IP CPPOB, pelaku usaha juga didampingi dalam pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk pangan melalui ereg-rba.pom.go.id, termasuk dalam mempersiapkan dokumen persyaratan.

Pendampingan oleh mahasiswa diutamakan untuk komoditi pangan dikarenakan tidak ada proses pemeriksaan sarana sebagai persyaratan penerbitan IP CPPOB untuk UMK. Untuk komoditi OT dan kosmetik, tahapan penerbitan PB UMKU sertifikat

CPOTB Bertahap dan sertifikat SPA CPKB tetap memerlukan pemeriksaan sarana dan evaluasi CAPA sehingga dilakukan sendiri oleh petugas Sertifikasi.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 74. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	315,156,000	315,110,750	99.99	108,35	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, dilakukan revisi anggaran meliputi penghapusan anggaran pelaporan dan penggandaan serta penyesuaian anggaran perjalanan dinas.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai namun masih banyak kendala yang harus dihadapi terutama sumber daya untuk pendampingan UMKM dalam pendaftaran produk, sehingga pada tahun 2023 dilakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten/kota untuk melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg. Hal ini adalah pembangan dari inovasi Klinik POM. Selain itu juga dilakukan advokasi ke beberapa universitas di Jawa Timur agar bersedia melakukan magang di BBPOM di Surabaya, khusus untuk membantu UMKM dalam melakukan proses pendaftaran produk.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 75. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB

Keterangan	Oktober	November	Desember
	3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi) 4. Persyaratan dasar seringkali tidak dimiliki oleh pelaku usaha, seperti KBLI yang sesuai, NPWP yang terintegrasi dengan OSS dan/atau berstatus KSWP valid.
Rekomendasi Perbaikan	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta

Keterangan	Oktober	November	Desember
	5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023	CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023	melakukan pendampingan secara intensif 5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023
Rencana Aksi	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik

Keterangan	Oktober	November	Desember
		izin edar kosmetik (notifikasi)	(notifikasi)
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: 1. Peningkatan jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB dan izin edar 2. Peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang memperoleh sertifikat CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang memperoleh SPA CPKB dan rekomendasi PNK	Kondisi Desember: 1. Peningkatan jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB dan izin edar 2. Peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang memperoleh sertifikat CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang memperoleh SPA CPKB dan rekomendasi PNK	-
Timeline	1 bulan	1 bulan	-
Status	**Open**	**Open**	**Close**

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi. Informasi. Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NSS 100,25% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.
Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 76. Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.38	94.39	101.08		**Sangat Baik**

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE di tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 405 orang. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkru'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya tahun 2023 adalah 94,39 dari target 93,38 atau dengan capaian 101,08% yang artinya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Gambar 49. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

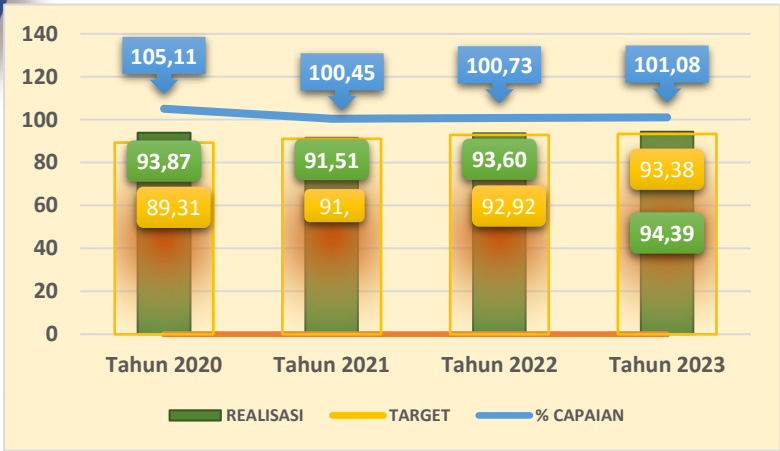

Berdasarkan data pada tabel, jika dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan capaian realisasi, sedangkan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan capaian realisasi. Tapi secara keseluruhan Tingkat efektifitas KIE dari tahun 2020 hingga tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra

TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	94.03	94.39	100.38	Tercapai / Melampaui	
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	95.2		99.15	Akan Tercapai	

Berdasarkan data pada tabel, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang tertuang pada renstra awal BBPOM di Surabaya, realisasi Tingkat Efektfitas KIE telah melampaui target dengan capaian 100,38% dengan kategori **Tercapai/Terlampaui**, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**". Dengan demikian tentu perlu mengerahkan upaya secara terus menerus dan menggunakan berbagai metode untuk memberikan sosialisasi hingga ke seluruh pelosok di Jawa Timur sehingga masyarakat semakin kenal, paham, dan berminat untuk berkontribusi turut serta melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

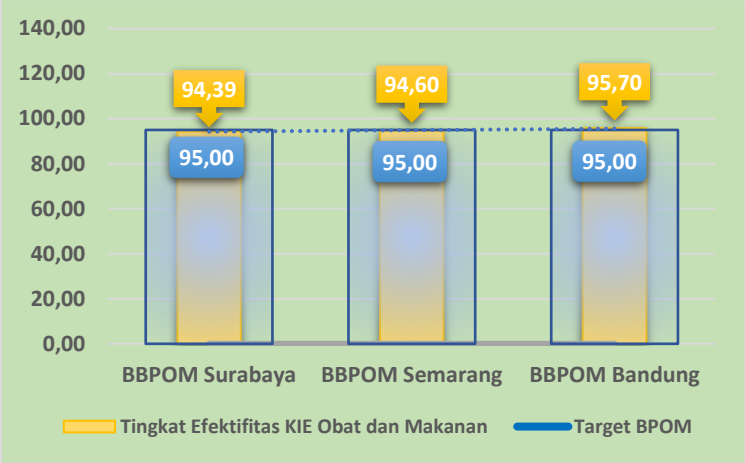

Gambar 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan target nasional

Berdasarkan data pada tabel, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Bandung, BBPOM di Semarang, dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Unit yang melampaui target nasional adalah BBPOM di Bandung.

Dengan capaian yang terendah di antara Balai yang sejenis/setara serta capaian di bawah target nasional, maka BBPOM di Surabaya perlu meningkatkan strategi, kolaborasi, inovasi, dan pengembangan ide dan kreatifitas sehingga kegiatan KIE yang dilakukan melalui berbagai media benar-benar menyentuh seluruh Masyarakat di pelosok Jawa Timur.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil survey pada tahun 2023, capaian yang diperoleh melampaui target. Hal-hal yang mempengaruhi capaian target:

- Konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur, sistematis, dan menarik.

  Perencanaan ini termasuk pemilihan media yang diminati dan yang sesuai untuk seluruh segmen masyarakat (seperti usia, domisili perkotaan/pedesaan, tren terkini, dll), baik menggunakan media langsung. media non elektronik, maupun media elektronik.
- Melakukan telaah dan pembaruan secara kontinu dengan melakukan pengamatan minat masyarakat terkini yang paling efektif dalam menerima informasi sehingga BBPOM di Surabaya terus melakukan perbaikan.
- Penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung (target peserta yang besar), seperti penyesuaian dengan kearifan lokal, senam Cek Klik, dll.

- Perencanaan kegiatan yang mencakup frekuensi, perluasan, dan pemerataan target KIE/sosialisasi/penyebaran informasi ke seluruh daerah.

  Perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di satu daerah, tetapi dilakukan pemerataan ke seluruh wilayah dengan berbagai ragam media KIE yang digunakan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Mengupayakan agar kegiatan KIE tatap muka langsung dapat merata di seluruh Kabupaten/Kota, walaupun layanan KIE selain tatap muka telah terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur. Selain itu menambah ragam dan variasi pada pelaksanaan KIE misalnya dengan menambah alat peraga yang dapat menarik perhatian sehingga masyarakat semakin paham dan lengkap tentang informasi yang disampaikan.

Selain itu menambah ragam, jenis, dan intensitas edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik untuk memperluas jangkauan informasi ke seluruh kalangan masyarakat hingga ke seluruh pelosok daerah.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan	Infokom	QDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	F	Penyuluhan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	16	kegiatan	15
					G	Sosialisasi Keamanan dan Penandaan Obat dan Makanan	16	kegiatan	20
					H	KIE Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Label Obat Tradisional	16	kegiatan	21
					I	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional	11	kegiatan	10
					J	KIE Informasi Obat dan Makanan Melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile	14	kegiatan	15
					K	Pemberdayaan Masyarakat tentang Keamanan, Mutu, dan Penandaan Obat	14	kegiatan	6
					L	Sosialisasi Konsumen Cerdas Tolak Penyalahgunaan Obat	12	kegiatan	7
					M	KIE Cerdas Memilih Kosmetika yang Aman dan Bermanfaat	12	kegiatan	12
					N	Edukasi Konsumen tentang Bahan Berbahaya pada Pangan dan Kemasan Pangan	11	kegiatan	11
					O	KIE Pengawasan Bahan Berbahaya Pada Produk Kosmetik	6	kegiatan	6

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI dimana sepanjan tahun 2023 telah terlaksana sebanyak 128 titik dengan total peserta sekitar 62.602 orang yang terdiri dari

Masyarakat Umum (PKK, Dharmawanita, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna), Produsen/ IRTP/ UMKM termasuk pedagang kaki lima, ritel, Lintas sektor (Petugas Kelurahan, Kecamatan, DPRD).

Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE lainnya antara lain kegiatan Cangkru'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting, kegiatan pameran, sosialisasi Klinik POM. Selama tahun 2023, total terdapat 66 kegiatan dan telah dilakukan intervensi kepada 2.335 orang peserta.

Selain itu, kegiatan lain yang dioptimalkan juga untuk penyebaran informasi tentang Badan POM dan informasi Obat dan Makanan adalah pada kegiatan sebagai narasumber yang diselenggarakan lintas sektor, yaitu terdapat 93 permintaan sebagai narasumber dari berbagai daerah.

KIE melalui media sosial dan media elektronik juga dilakukan secara konsisten setiap hari (untuk media sosial) dan setiap bulan (untuk media elektronik) untuk menunjukkan eksistensi BPOM di masyarakat dan pemangku kepentingan.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 78. Efiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE

NDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EF1ISIENSI
Tingkat Efektifitas KIE	18.677.701.000	18.676.455.753	99,99	101,08	**100% (Efisien)**

Berdasarkan pada tabel di atas, penggunaan sumber daya/anggaran untuk kegiatan telah efisien dengan realisasi anggaran mencapai 99,99%, sementara capaian indikator adalah 101,08%.

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengurangan anggaran, namun pada triwulan 1 terdapat pemblokiran anggaran sebanyak 60 titik kegiatan KIE bersama tokoh Masyarakat. Selain itu dilakukan juga dilakukan perubahan alokasi anggaran dikarenakan optimalisasi kebutuhan kegiatan yang dinamis dan melihat tingkat urgensi di tahun 2023. Perubahan yang dilakukan antara lain: penambahan jumlah panitia, penambahan sewa kendaraan, pengurangan anggaran perjalanan dinas, penambahan perlengkapan peserta, pengurangan anggaran konsumsi, dan penambahan anggaran pelaporan. Revisi ini dlakukan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya optimalisasi kegiatan tentu bertujuan untuk menambah manfaat kegiatan bagi masyarakat.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 adalah 92,92 sesuai target pada tahun 2022. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2022 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan penambahan jumlah peserta tiap titik dari 250 orang per titik menjadi 500 orang per titik. Penambahan jumlah peserta ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.

Tingkat efektifitas KIE tahun 2023 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkan pemahaman, minat, pilihan ragam edukasi, dan manfaat kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi, dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta menambah variasi penyampaian informasi pada saat pelaksanaan KIE khususnya yang dilakukan secara tatap muka/langsun seperti menambah alat peraga dan Senam Cek KLIK yang lebih intens.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 79. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Realisasi pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat 72%, serapan anggaran belum sesuai target	Realisasi pelaksanaan KIE 88%	Pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat yang mendekati akhir tahun sehingga terbatasnya waktu penyelesaian administrasi keuangan akhir tahun dan resiko terdapat anggaran yang tidak dioptimalkan
Rekomendasi Perbaikan	- Percepatan penyelesaian administrasi keuangan untuk kegiatan yang sudah berjalan - Konsisten untuk percepatan kegiatan yang sudah berjalan	Komunikasi dengan TA untuk pelaksanaan kegiatan dan melakukan prediksi serapan anggaran akhir tahun	Pelaksanaan KIE tidak sampai akhir tahun (bulan Desember) sehingga penyelesaian administrasi bisa selesai dengan lebih leluasa waktunya
Rencana Aksi	- Keterlibatan panitia yang lebih luas, sehingga bisa bergantian menyelesaikan administrasi. - melakukan komunikasi intens dengan TA agar kegiatan dapat segera dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan TA agar pelaksanaan KIE tidak sampai akhir tahun	kolaborasi dan komunikasi dengan para PIC KIE dengan tomas, agar menjadi perbaikan di tahun-tahun berikutnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi kegiatan KIE < 75%	Realisasi KIE <90%	KIE dilakukan di pertengahan Desember
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi kegiatan KIE > 90% pada november	Realisasi KIE 100%	Penyusunan POA pelaksanaan KIE tahun depan tidak berakhir di akhir tahun
Status	**Close**	**Close**	**Close**

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 80. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	112	100%		**Baik**

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajanan Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan. Target tahun 2023 adalah 36 sekolah baru dan 76 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021 dan 2022 serta 176 sekolah perluasan cakupan.

Hingga akhir triwulan IV tahun 2023, semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Dari 36 sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

Progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **telah tercapai** yaitu 100% atau 112 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

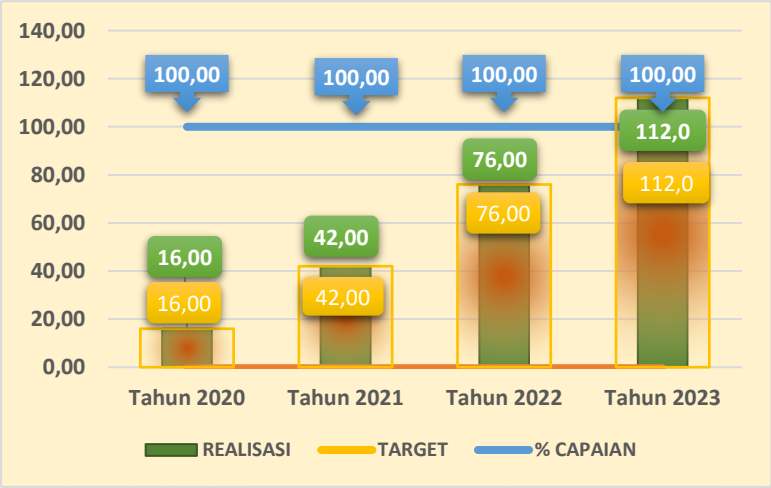

Gambar 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Terdapat kenaikan realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Sedangkan capaian tetap dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu 100%. Target inidikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 81. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2024

JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI

TARGET 2024 (Renstra Awal)	150	112	74.67	**Akan Tercapai**	
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	138		81.16	**Akan Tercapai**	

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2023 **belum** mencapai target Renstra tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka target Renstra 2024 **diturunkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "Akan Tercapai". Hal ini dikarenakan target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

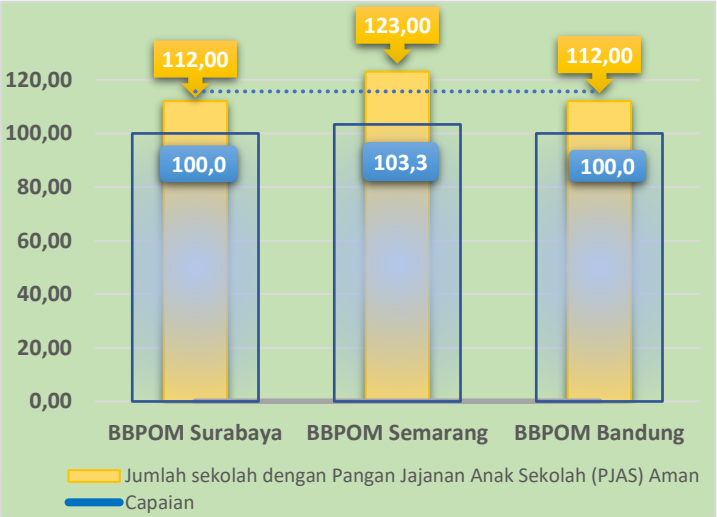

Gambar 52. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 Dengan Balai Setara

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajajan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 36 sekolah target intervensi tahun 2023. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

Pada tahun 2023 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. BBPOM di Surabaya sangat bersyukur dengan inovasi inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh BBPOM Surabaya.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu tahun 2023 telah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya Komunitas sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, orang tua siswa, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah. Agar kegiatan PJAS dapat tetap berlangsung dalam jangka waktu lama dan meluas ke sekolah lainnya maka diperlukan upaya dan strategi. Hal ini diperlukan juga agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih baik dan mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah
- Meningkatkan keterlibatan Dinas Pendidikan dalam kegiatan
- Mendorong pemda dan sekolah yang telah diintervensi untuk melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong Pemda untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan

- Mengusulkan agar keamanan pangan dimasukan dalam kurikulum pembelajaran
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di sekolah
- Meningkatkan keterlibatan orang tua siswa dalam kegiatan keamanan pangan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	QDB.001.051	Koordinasi lintas sektor	A	Koordinasi ke Kab/Kota Dalam Rangka Keamanan Pangan	94	kali/trip	20
		Infokom	QDB.001.052	Intervensi keamanan PJAS	A	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	6	kali/trip	6
					B	Pemeriksaan Keamanan PJAS	36	sekolah	36
					C	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	32	kali/trip	32
					D	Pengawalan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)	1	kegiatan	1

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.

Komunitas yang di sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah. Untuk keberhasilan program PJAS ini dalam jangka panjang diperlukan Kerjasama dan kolaborasi semua pihak termasuk para PKL di sekitar sekolah. Mereka harus diberikan pemahanan sehingga hanya akan menjual pangan yang aman.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 82. Efiensi Anggaran Pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN NDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	811,162,000	807,529,827	99,55	100	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan revisi pergeseran anggaran pengurangan biaya penginapan pada kegiatan bimtek PJAS, pergeseran anggaran perjalanan dinas pada kegiatan Pemeriksaan Keamanan PJAS, pergeseran anggaran paket meeting pada kegiatan bimtek PJAS, pergeseran anggaran perjalanan dinas Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, pengambilan sisa anggaran paket edukasi keamanan PJAS dan pengurangan anggaran test kit mikobiologi dialihkan ke anggaran Paket Informasi dan Edukasi Pengawalan Sekolah Diintervensi, penggunaan anggaran PJAS untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Implementasi BerAKHLAK, pengurangan anggaran pembelian sampel PJAS, perlengkapan sampling, tes kit mikrobiologi, serta penambahan anggaran perlengkapan kegiatan Nett Zero Carbon. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

Kegiatan PJAS di Kota kediri dilaksanakan terhadap 170 sekolah, dimana 164 sekolah merupakan replikasi kegiatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota kediri, dengan rincian sebagai berikut:

- 30 sekolah mendapatkan full intervensi sesuai tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Surabaya dan menjadi Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Kediri

- 140 sekolah adalah sebagai komunitas dan mendapatkan kegiatan Bimbingan Komunitas dari kader
- Telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi terhadap 30 sekolah dengan hasil memenuhi persayaratan. Terhadap 30 sekolah tersebut juga diberikan sertifikat penghargaan oleh Pemerintah Kota kediri dan BBPOM di Surabaya.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 83. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala Permasalahan	Terdapat sekolah yang belum melengkapi persyaratan dokumen dan kendala penyelesaian administrasi keuangan	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tahapan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tahapan kegiatan sudah selesai dilaksanakan
Rekomendasi / Perbaikan	- Mengkonfirmasi kader sekolah dan memastikan kegiatan sudah berjalan dan mendokumentasikan kegiatan - Mendata ulang untuk administrasi yang belum selesai	'-	'-
Rencana Aksi	- Komunikasi dengan para kader sekolah dan mengingatkan untuk mendokumentasikan kegiatan - Konfirmasi ulang kepada para kader untuk percepatan penyelesaian administrasi yang terkait	'-	'-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dokumen implementasi PJAS Aman dan dokumen administrasi keuangan belum lengkap	'-	'-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dokumen implementasi PJAS Aman sudah siap pada saat sertifikasi, dan data untuk dokumen administrasi keuangan sudah lengkap	'-	'-
Timeline	1 Bulan		
Status	**Open**	**Close**	**Close**

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 84. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI

Jumlah desa pangan aman	37	37	100		**Baik**

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program perecepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Hingga akhir triwulan III tahun 2023, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Audiensi dan advokasi terhadap 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang.
- Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang dan Kota Pasuruan
- Pengadaan paket informasi

- Bimtek komunitas desa, fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas dan intensifikasi keamanan pangan di 9 (sembilan) desa/kelurahan yaitu Desa Gunung Maddah Kabupaten Sampang, Kelurahan Kapasari dan Kelurahan Mojo Kota Surabaya, Desa Waru, Desa Pagerwojo dan Desa Tlasih Kabupaten Sidoarjo, Kelurahan Mojoroto Kota Kediri, Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang dan Kelurahan Kebonagung Kota Pasuruan.
- Pengawalan terhadap desa yang diintervensi tahun sebelumnya.
- Capaian tahapan jumlah desa pangan aman telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

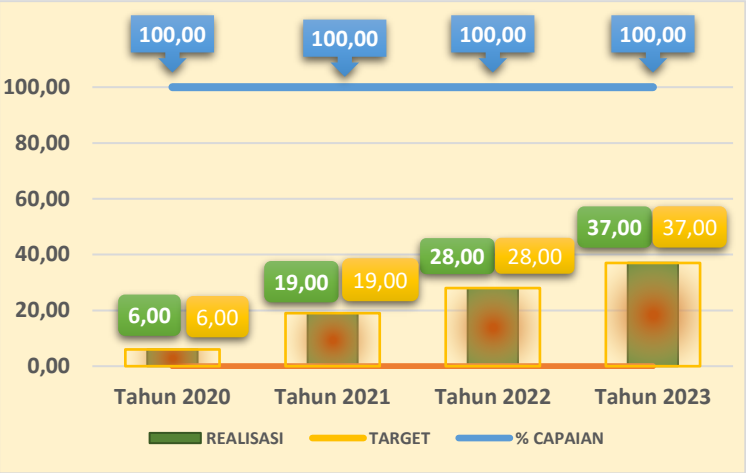

Gambar 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman tahun 2020 hingga tahun 2023

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi jumlah desa pangan aman dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun capaian dari tahun 2020 hingga 2023 adalah tetap. Target inidikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 85. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

JUMLAH DESA PANGAN AMAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	47	37	78.72	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	45		82.22	Akan Tercapai	▲

Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 diturunkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**". Target indikator

ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Gambar 54. Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2023 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian jumlah desa pangan aman tahun 2023 BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung adalah sama. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas desa yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel, pelaku usaha warung siap saji, PKK/keluarga, sekolah dan Karang Taruna/remaja.

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan gerakan keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain)
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di desa
- Membuat kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi kader dan masyarakat agar melaksanakan kegiatan keamanan pangan serta melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan olahan desa
- Membuat kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan desa pangan aman
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
19	Jumlah desa pangan aman	Infokom	QDB.002.051	Perkuatan kapasitas desa	A	Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar	6	kab/kota	6
		Infokom	QDB.002.052	Pemberdayaan komunitas desa	A	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	6	kegiatan	6
					B	Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa	9	kegiatan	9
		Infokom	QDB.002.053	Pengawasan keamanan pangan desa	A	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling	18	desa	18
		Infokom	QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A	Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman	18	desa	18
					B	Pengawalan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya	1	kegiatan	1
					C	PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	0	kali/trip	0

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 telah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 86. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah desa pangan aman	1.154.484.000	1.149.061.677	99,53	100	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pergeseran anggaran meliputi penambahan biaya penyelenggaraan kegiatan inovasi Jatim Truly dari pengurangan perjadin bimtek komunitas desa, penambahan biaya Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling serta pengurangan biaya Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman. Juga dilakukan pergeseran anggaran perjalanan dinas pada kegiatan intensifikasi pengawasan keamanan pangan desa, pengurangan anggaran Jasa penyelenggaraan kegiatan Gebyar Keamanan Pangan untuk anggaran dekorasi, pengurangan anggaran penginapan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling untuk dialihkan ke anggaran perjadin Pelatihan KKPD. Revisi pagu minus anggaran transport peserta kab/kota yang diambil dari anggaran transport narasumber kab/kota pada kegiatan Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar. Dapat disimpulkan

bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

Desa Tlasih yang merupakan salah satu target intervensi merupakan desa yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Desa tersebut merupakan sentra produksi kerupuk dimana hamper semua penduduknya merupakan pelaku usaha kerupuk. Karena masih ditemukan praktek penggunaan bahan berbahaya pada produk, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama OPD Kabupaten Sidoarjo. Melalui kegiatan FGD diharapkan ada kerjasama dan peran semua instansi di Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung terwujudnya keamanan pangan pada produk kerupuk Desa Tlasih, sehingga dapat membantu percepatan peningkatan usaha desa dan perekonomian desa.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 87. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Teknis pelaksanaan fasiltasi dan intensifikasi tahap kedua yang terkendala dengan kegiatan lain	Terdapat desa yang masih belum membuat dokumen rencana aksi, dan banyaknya data yang harus diinput ke dalam aplikasi	- Pelaporan dalam aplikasi gkpd - Masih ditemukannya penggunaan bahan berbahaya pada salah satu lokus desa yang merupakan sentra produk kerupuk yaitu Desa Tlasih Kabupaten Sidoarjo
Rekomendasi/ Perbaikan	Menyusun rencana alternatif untuk pelaksanaan fasiltasi dan intensifikasi tahap kedua	Seluruh desa memiliki dokumen rencana aksi dan seluruh data sudah diinput pada aplikasi	- Segera melengkapi pelaporan - Melaksanakan pembinaan lebih lanjut kerjasama dengan beberapa OPD terkait
Rencana Aksi	Pelaksanaan fasilitasi tahap kedua dilakukan secara mandiri oleh para kader	Mengkomunikasikan dengan Tim keamanan Pangan dan Kader Desa untuk segera menyusun dokumen rencana aksi. Untuk input data melakukan pembagian tugas kepada petugas agar data dapat diisi	- Melengkapi pelaporan sesuai hasil Monev - Melaksanakan kegiatan FGD dengan beberapa OPD kabupaten Sidoarjo dan pemdes serta paguyuban UMKM Desa Tlasih

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

Keterangan	Oktober	November	Desember
		dalam aplikasi tepat waktu	
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Fasilitasi tahap kedua belum dapat dilaksanakan	Belum semua desa memiliki dokumen rencana akis, dan terdapat data yang belum diinput dalam sistem aplikasi	- Pelaporan di aplikasi belum lengkap - UMKM masih ada yang menggunakan bahan berbahaya dan membutuhkan pembinaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Faslitasi tahap kedua dilaksanakan para kader	Seluruh desa memiliki dokumen rencana aksi dan seluruh data sudah diinput pada aplikasi	- Pelaporan lengkap - UMKM mendapatkan pembinaan dan program dari OPD dan tidak menggunakan bahan berbahaya
Status	**open**	**Open**	**Close**

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 88. Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	24	24	100		Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang

pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

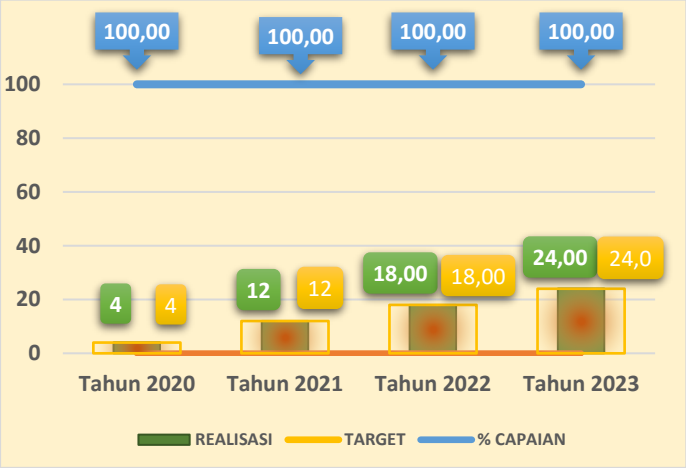

Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi Jumlah desa pangan aman 2020 hingga tahun 2023. Sedangkan capaian jumlah desa pangan aman tetap dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Target inidikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024

JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	32	24	75.00	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	30		80.00	Akan Tercapai	▲

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Akan Tercapai**, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 diturunkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**", sehingga diperlukan upaya lebih sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

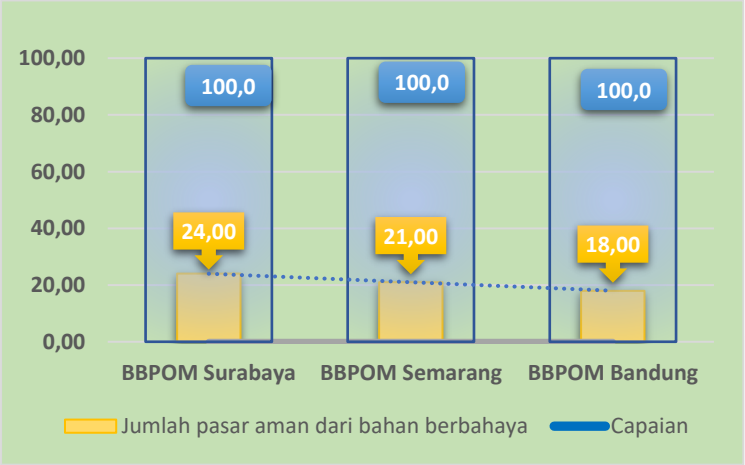

Gambar 56. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2023 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2023 yang tertinggi pada BBPOM di Surabaya sesuai target masing-masing Balai dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Dari ketiga balai yang diperbandingkan, capaiannya sebesar 100%. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 36 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, survei pasar, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, program pasar pangan aman berbasis komunitas dapat dilaksanakan tanpa menemui kendala yang berarti.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di pasar dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke pasar lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran dan melakukan replikasi kegiatan
- Kolaborasi kegiatan sehingga kegiatan lebih terasa dan berdampak seperti **intervensi PKL/Jatim Truly**
- Mendorong Pemda/pengelola pasar/kader membuat peraturan/kebijakan pemasukan bahan/produk pangan ke dalam pasar
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Infokom	QDB.003.052	Pengadaan peralatan pendukung	A	TEST KIT PASAR	6	paket	6
		Infokom	QDB.003.053	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A	Survey Pasar	6	kali/trip	6
					B	Penyuluhan Pedagang Pasar	6	kegiatan	6
					C	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya	6	kegiatan	6
					D	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	6	kali/trip	6
					E	Pelatihan Fasilitator Pasar	1	kegiatan	1
		Infokom	QDB.003.054	Pemantauan dan evaluasi	A	Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar	18	pasar	18

Kegiatan yang menunjang meliputi pengadaan test kit, survey pasar, penyuluhan pedagang pasar, bimtek petugas pennelola pasar dalam rangka pengawasan bahan

berbahaya, kampanye keamanan pangan di pasar, pelatihan fasilitator pasar, serta sampling dan pengujian sampel di pasar. Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100%, yang artinya target 24 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di triwulan IV bahkan sebelum triwulan IV berakhir, artinya lebih cepat dari yang ditargetkan semula selesai di akhir tahun. Upaya percepatan dengan menggabung ketiga program PN sangat efektif sehingga intervensi pasar dapat diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas sector yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada umumnya masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini dimanfaatkan sebagai Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 90. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	575.545.000	567.217.405	98,55%	100	**(100%) Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Selama tahun 2023 telah dilakukan pergeseran anggaran antara lain penambahan perjalanan dinas untuk sampling di pasar, pengurangan anggaran perjalanan dinas verifikasi pasar, pergeseran anggaran pengadaan tes kit, dan pengurangan anggaran untuk kegiatan Jatim Truly. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan *Rapid Test Kit* dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan *Rapid Test Kit* secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak

lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survei pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar terutama *hygiene* dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 91. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan			
Rekomendasi/ Perbaikan			
Rencana Aksi			
Kondisi Sebelum Rencana Aksi			
Kondisi Setelah Rencana Aksi			
Status	**Close**	**Close**	**Close**
Timeline			

NIHIL

Keterangan : Tidak ada kendala karena kegiatan sudah selesai pada akhir Triwulan III

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Lingkup BBPOM Di Surabaya

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NSS 120% dengan kategori **Sangat Baik.**

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 92. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	120		SANGAT BAIK

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

A= Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standarJumlah target sampel Obat x 100%

B= Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standarJumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). **Khusus untuk indikator ini, jika realisasi sebesar 100% maka capaiannya adalah 120%.** Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Dari 2477 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 2896 sampel yang masuk ke laboratorium seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan Capaian Sebesar 120 % pada kategori **Sangat Baik.** Indikator persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk salah satu indikator yang **dikonversi** menjadi 120% bila capaian realisasi mencapai 100%, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.01.24.12 tangagl 8 Januari 2024 Perihal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

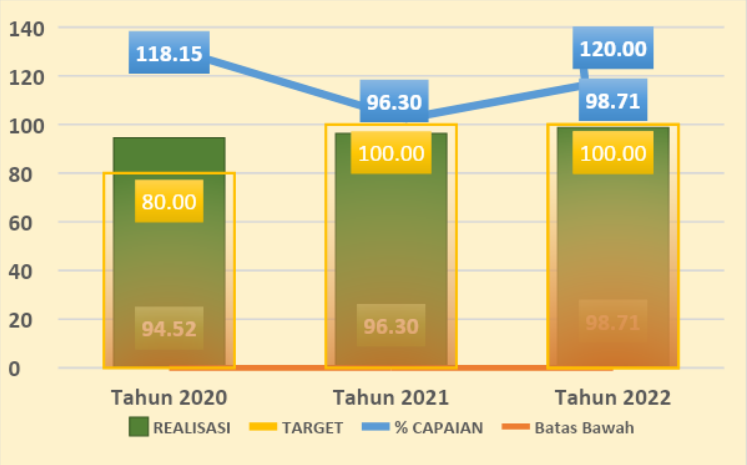

Gambar 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standarTahun 2020 hinagga Tahun 2023

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun terdapat penurunan capaian setelah target direviu sesuai permintaan Bappenas, sehingga capaian di tahun 2021 turun dan naik kembali di tahun 2022 dan 2023. Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan timeline pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 93. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	100	100	100.00	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	100		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, baik pada target Renstra awal maupun setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi pada tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai *timeline.*

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

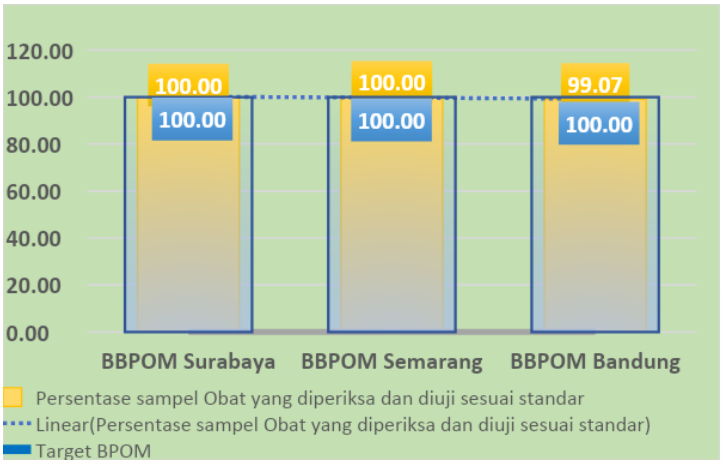

Gambar 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM Bandung. Realisasi BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang sudah mencapai target nasionai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran tahun 2022 berhasil mencapai target yang ditentukan. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 120 %. Dari 2477 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 2896 sampel yang masuk ke laboratorium seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **memenuhi target** yang ditetapkan yaitu 120 % dengan kategori **sangat baik.** Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya system regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium**.**

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling (100%), dan sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

Kendala – kendala terkait pemenuhan kebutuhan pengujian seperti biaya biaya pemeliharaan alat, reagen, baku pembanding dan pemenuhan kompetensi diatasi dengan cara berikut :

1. Bersurat kepada Sestama usulan penambahan angaran perbaikan alat ICP MS dan LC MSMS
2. Kekurangan reagen dan baku pembanding diatasi dengan sharing dengan UPT lain yang memiliki reagen tersebut
3. Pemenuhan kompetensi terkait parameter uji spesifik laboratorium regional dilakukan dengan pendampingan dari P3OMN
4. Sebagai Balai Regional BBPOM di Surabaya mendapatkan transfer alat dari Laboratorium lain untuk memenuhi sarana dan prasarana, diantaranya Sitotoksik Kabinet, LC-MSMS, serta Ion Chromatography.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan antara lain dengan meingkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain. Pemenuhan kebutuhan reagen, media, baku pembanding yang cito dapat diatasi dengan *sharing* dengan UPT lain. Begitu juga dengan kendala terkait alat, apabila ada alat yang rusak dapat berkomunikasi dengan UPT lain untuk memohon bantuan pengujian selama masa perbaikan alat. Selain itu, peningkatan anggaran juga diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti reagen, media, baku pembanding, serta pemenuhan peralatan dan perawatan alat. Sebagai laboratorium regional yang menguji seluruh parameter uji spesifik menggunakan instrumen dengan teknologi tinggi serta metode analisis yang kompleks, tentunya kebutuhan akan reagen dengan kemurnian tinggi, baku pembanding yang bervariasi serta biaya perawatan instrumen berteknologi tinggi akan meningkat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (acak)	30	kali/trip	30
		Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	1	pkt lelang	1

Badan POM telah menerapkan sistem regionalisasi laboratorium pada tahun 2022 dan telah dilakukan evaluasi pada Januari 2023. Hasil evaluasi menunjukkan masih

terdapat kelemahan yaitu karena tersebarnya laboratorium pengujian unggul di beberapa balai besar/Balai POM yang membutuhkan sumber daya yang besar dan dinilai tidak efektif. Sebagai tindak lanjut Konsep Regionalisasi diperbarui melalui SK KaBadan POM No 193 Tahun 2023 tentang regionalisasi laboratorium Badan POM dimana Konsep baru ini memusatkan pengujian unggul pada salah satu balai besar POM sebagai laboratorium regional, sedangkan Balai besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Tujuannya agar BPOM dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian nggul, inovatif dan adaptif, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengawasan post market

Pada Konsep baru Regionalisasi Laboratorium ini Balai Besar POM di Surabaya ditunjuk sebagai Balai Regional yang Bertugas melakukan pengujian kimia dan biologi unggul

Mengkoordinir BB/Balai POM/Loka POM dalam satu regional, antar regional, maupun dengan unit kerja terkait agar sistem regionalisasi laboratorium di regionalnya berjalan lancar. Adapun UPT anggota Regional Surabaya terdiri dari BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

Dalam rangka menjalankan tugasnya Balai Besar POM di Surabaya pada bulan Agustus 2023 telah melaksanakan Internalisasi Pedoman Persiapan Penerapan Konsep Baru Regionalisasi Laboratorium Badan POM secara daring dan menyelanggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan konep Baru Regionalisasi Triwulan 4 pada Bulan Desember 2023 secara luring.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 94. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	744.162.000	744.081.480	99,99	100%	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi, dan baku banding sebagai dampak sistem regionalisasi laboratorium, dimana sampel yang diuji parameter uji spesifik yang menggunakan reagen kemurnian tinggi dan baku pembanding yang belum tersedia di P3OMN. Terdapat penghapusan anggaran honor panitia pengadaan reagen dan media mikro untuk dialihkan ke anggaran reagensia, pergeseran anggaran perjalanan

dinas untuk sampling, dan pergeseran anggaran reagen ke media mikro, penambahan anggaran pengadaan sampel obat, OT, SK, Kos dari anggaran perlengkapan sampel dan perjalanan dinas sampling.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium, sehingga semakin banyak alat laboratorium yang rusak dan harus segera diperbaiki agar pengujian dapat segera diselesaikan. Namun kondisi yang terjadi, anggaran pemeliharaan alat laboratorium sudah habis mengingat tingginya pemakaian. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya telah mengajukan permintaan anggaran secara resmi ke Sestama dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN. Permintaan tersebut telah dipenuhi melalui ijin untuk melakukan revisi penambahan anggaran, sehingga alat laboratorium yang rusak dapat diperbaiki, dan pengujian berjalan lancar kembali.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 95. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	• Suhu pada laboratorium mikro tidak tercapai (Range suhu 15 - 25 derajat Celsius) Pemantauan pada Laboratorium 28 - 35 derajat celsius, hal ini dikarenakan kompresor AC Central mengalami kerusakan • HPLC Shimadzu di Lab OT-SK mengalami kendala over pressure dan masalah pada software alat setelah dilakukan kalibrasi oleh rekanan; HPLC Waters Alliance di Lab OT-SK mengalami kendala over preassure saat mulai injek sampel; HPLC Arc di Lab OT-SK mengalami kerusakan, teradapat sparepart yang harus diganti, Camag Automatic sampler di Lab OTSK mengalami kebocoran Layar Komputer pada HPLC Shimadzu mengalami gangguan • Pengujian untuk Pemenuhan SRL P3OMN belum dapat dilaksanakan dikarenakan ketersediaan baku pembanding di INFALABS. Baku tersebut diantara lain : (Desonid, Phenol, Acid Blue 62, Acid Yellow 11). ;. • Saluran gas Hidrogen untuk GC-FID bocor sehingga kebutuhan gas menjadi sangat boros.	• Saluran Pembuangan diruang cuci mikro kembali buntu • Saluran gas Hidrogen untuk GC-FID bocor sehingga boros gas. • Region Surabaya akan mendapat sampel target dari Ditwaskos sejumlah 50 sampel. Perlu diperhatikan terkait perencanaan kebutuhan reagen, suku cadang, dll. • KCKT alliance Laboratorium OTSK Valve injector dalam keadaan rusak sehingga KCKT tersebut tidak dapat dipakai	• KCKT alliance Lab OTSK masih dalam keadaan rusak pada bagian valve injector sehingga masih belum dapat digunakan

Keterangan	Oktober	November	December
Rekomendasi Perbaikan	• Penggantian Kompresor AC pada Lab Mikrobiologi • Menghubungi teksini Waters dan Shimadzu untuk dilakukan pengecekkan dan perbaikan • Melakukkan chekcing pada saluran gas dan pencucian pada Camag Auto sampler sehingga air tidak merembes Mohon dianggarkan untuk pengadaan baku pembanding dari eksternal. Baku tersebut antara lain: (Desonid, Phenol, Acid Blue 62, Acid Yellow 11). • Diusahakan meminjam baku methylchloroisotiazolinon dari P3OMN namun masih belum ada kepastian dikarenakan keterbatasan baku di lab kosmetik P3OMN). • Melaporkan jaringan gas yang bermasalah ke Kasubag TU	• Dibuatkan/diperbaiki saluran pembuangan pada lab Mikrobiologi • Perbaikan Saluran gas Hidrogen untuk GC-FID • Dilakukan pemenuhan kekurangan reagen dan baku • Dilakukan perbaikan Instrumen	• Perbaikan alat dengan pembelian suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan
Rencana Aksi	• Melaporkan kendala ke Kasubag TU • Menghubungi pihak rekanan dari alat HPLC Shimadzu dan Waters untuk dilakukan pengecekkan dan perbaikan • Perbaikan oleh tim suku cadang untuk mengecek aliran gas dan pembilas pada Camag Auto Sampler agar tidak bocor saat dilakukan penotolan • Mengusulkan anggaran untuk pengadaan baku pembanding dari eksternal. antara lain: Desonid, Phenol, Acid Blue 62, Acid Yellow 11 dan meminjam baku methylchloroisotiazolinon dari P3OMN	• Permohonan perbaikan saluran pembuangan di Mikrobiologi melalui form perbaikan • Melaporkan ke Kasubag TU dan sudah dicek oleh vendor. • Perlu dibahas dalam rapat Monev Reglab yang akan datang. • Telah mengajukan perbaikan Alat dan Masih menunggu pembelian Valve injector	• Membeli suku cadang valve injector untuk mengganti valve injector yg rusak karena di lab OTSK hanya tersedia 1 sedangkan yang dibutuhkan 2 buah valve injector
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Usulan Perbaikan/Penggantian kompesor, sudah diajukan bon perbaikan, namun masih menunggu Anggaran/tindak lanjut • HPLC Shimadzu dan Waters mengalami kendala • Camag Auto Sampler mengalami kebocoran air saat dilakukan penotolan	• Saluran pembuangan di lab mikro tidak berfungsi • saluran gas bermasalah • Baku turunan sibutramin sebagai penunjang regionalisasi masih belum lengkap • KCKT Waters Alliance mengalami kendala sehingga tidak dapat diguanakan	• Valve injector yang dibutuhkan untuk perbaikan KCKT Waters Alliance tersedia hanya 1 buah

Keterangan	Oktober	November	December
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Sudah dilaporkan ke PPK, sudah di cek oleh vendor tetapi infonya belum ada anggaran (estimasi perbaikan/penggantian komresor sebesar 40.000.000 dengan kaspasitas 12 PK) • Rekanan dari Waters sudah datang dan sedang melakukan pengecekkan dan perbaikan pada HPLC Waters yang ada di Lab OTSK • Rekanan dari Shimadzu masih mengatur jadwal untuk ke Lab OTSK BBPOM Surabaya • Camag Auto Sampler telah kembali normal setelah diperbaiki oleh tim suku cadang	• Saluran pembuangan dan saluran gas telah diperbaiki • Sudah dikomunikasikan dengan P3OMN mengenai baku turunan sildenafil yang belum tersedia, hendaknya pengadaan • Sudah dikomunikasikan dengan vendor alat untuk perbaikan KCKT Waters Alliance nya dapat dilakukan di BBPOM di Surabaya, Sehingga Menunggu anggaran BBPOM Surabaya tahun 2024	• Pembelian valve injector yang kurang akan dilakukan menunggu anggaran 2024
Status	**Close**	**Close**	**Close**

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 96. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120		**SANGAT BAIK**

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

A= Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standarJumlah target sampel Makanan x 100%

B= Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standarJumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Regional/ Balai Anggota). BBPOM di Surabaya adalah laboratorium Regional di regional Surabaya. **Khusus untuk indikator ini, jika realisasi sebesar 100% maka capaiannya adalah 120%.**

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 100%. Dari 1097 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa dan dari 1417 sampel yang masuk laboratorium seluruhnya telah diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sesuai target** yang ditetapkan yaitu 120% dengan kategori **sangat baik.**

Capaian indikator persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk salah satu indikator yang dikonversi menjadi 120% bila capaian realisasi mencapai 100%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

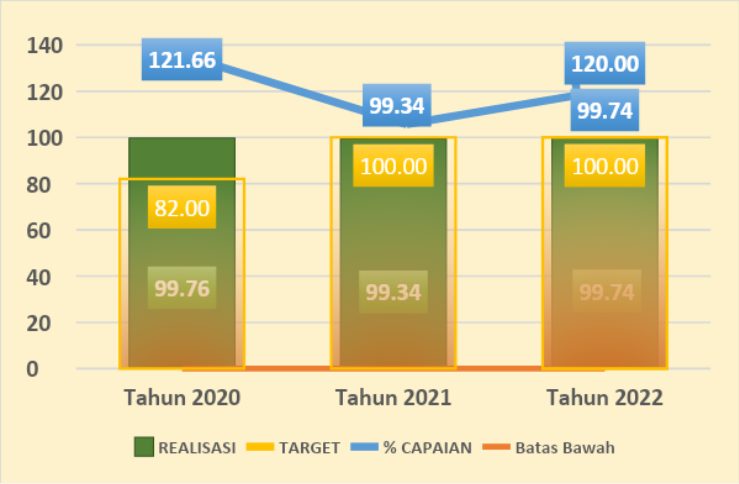

Gambar 59. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 hinagga Tahun 2023

Pada tahun 2021 realisasi dan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020, kemudian naik kembali di tahun 2022 dan 2023. Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan *timeline* pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 97. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	100	120	120	Tercapai / Melampaui	

PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	100		120	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, baik target pada Renstra Awal maupun target setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu. Tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yang telah tercapai dapat dipertahankan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

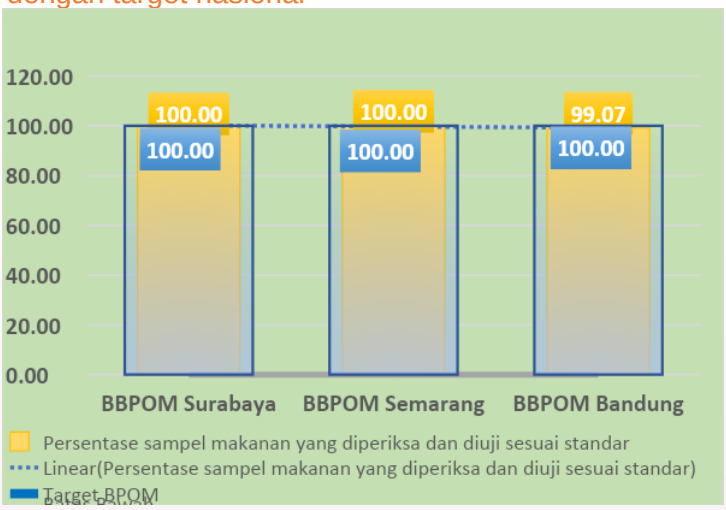

Gambar 60. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 pada BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang telah mencapai target yang ditetapkan. Diantara ketiga balai yang diperbandingkan, yang terendah dan belum mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandung, sedangkan BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang sudah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling (100%), dan seluruhnya memenuhi timeline yang ditetapkan dalam pedoman. *Timeline* pengujian sampel sesuai dengan SOP dan pedoman adalah 30 hari kerja. *Timeline* tidak dihitung bila kendala dalam pemenuhan timeline adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

Meskipun target telah terpenuhi, tetap perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeliharaan alat hal ini karena kurang lebih 20% instrumen di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Salah satu alat di laboratorium Pangan dan Air yang mengalami rusak berat adalah Nitrogen evaporator yang merupakan alat penunjang dalam pengujian kloramfenikol dan nitrofuran (parameter baru tahun 2023) yang merupakan parameter spesifik yang diuji BBPOM di Surabaya dalam rangka regionalisasi laboratorium. Alat tersebut hanya ada satu dan kondisinya sudah kurang dari 50% bagian yang dapat digunakan, perlu segera dilakukan pengadaan alat baru untuk mengantisipasi jumlah parameter regionalisasi yang menggunakan alat tersebut pada tahun 2023 yang semakin bertambah.

Antrian penggunaan instrumen juga merupakan salah satu kendala sehingga pengujian sampel melebihi 30 hari kerja, dengan adanya regionalisasi laboratorium yang merupakan sistem pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian Laboratorium pangan dan air BBPOM di Surabaya mendapatkan tugas untuk menguji parameter asetaldehid pada kemasan menggunakan GC MS dan uji residu kloramfenikol menggunakan LC MSMS. Kedua alat ini merupakan alat yang digunakan bersama antara laboratorium Pangan, Obat, Obat Tradisional-Suplemen Makanan dan Kosmetik.

Sebagai Balai Regional, Balai Besar POM di Surabaya mendapat transferan alat LC MSMS dari BBPOM di Bandung untuk memenuhi kebutuhan alat dan mengatasi kendala antrian alat.

Parameter - parameter baru yang diuji dalam rangka regionalisasi laboratorium juga menyebabkan penguji mengalami kesulitan dalam mendapatkan kondisi yang optimal. Selain kesulitan uji terkait metode baru, beberapa instruksi pusat untuk menguji komoditi terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat juga cukup berpengaruh terhadap kelangsungan pengujian, seperti misalnya pengujian BPA pada AMDK.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan antara lain dengan meingkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain. Pemenuhan kebutuhan reagen, media, baku pembanding yang cito dapat diatasi dengan *sharing* dengan UPT lain. Begitu juga dengan kendala terkait alat, apabila ada alat yang rusak dapat berkomunikasi dengan UPT lain untuk memohon bantuan pengujian selama masa perbaikan alat. Selain itu, peningkatan anggaran juga diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

pengujian seperti reagen, media, baku pembanding, serta pemenuhan peralatan dan perawatan alat. Sebagai laboratorium regional yang menguji seluruh parameter uji spesifik menggunakan instrumen dengan teknologi tinggi serta metode analisis yang kompleks, tentunya kebutuhan akan reagen dengan kemurnian tinggi, baku pembanding yang bervariasi serta biaya perawatan instrumen berteknologi tinggi akan meningkat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	1	pkt lelang	1
		Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (acak)	32	kali/trip	21

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan. Pada tahun 2022 diberlakukan regionalisasi laboratorium. dan telah dilakukan evaluasi pada Januari 2023. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kelemahan yaitu karena tersebarnya laboratorium pengujian unggul di beberapa balai besar/Balai POM yang membutuhkan sumber daya yang besar dan dinilai tidak efektif. Sebagai tindak lanjut Konsep Regionalisasi diperbarui melalui SK KaBadan POM No 193 Tahun 2023 tentang regionalisasi laboratorium Badan POM dimana Konsep baru ini memusatkan pengujian unggul pada salah satu balai besar POM sebagai laboratorium regional, sedangkan Balai besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Tujuannya agar BPOM dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian unggul, inovatif dan adaptif, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengawasan post market

Pada Konsep baru Regionalisasi Laboratorium ini Balai Besar POM di Surabaya ditunjuk sebagai Balai Regional yang bertugas melakukan pengujian kimia dan biologi unggul dan mengkoordinir BB/Balai POM/Loka POM dalam satu regional, antar regional, maupun dengan unit kerja terkait agar sistem regionalisasi laboratorium di regionalnya berjalan lancar. Adapun UPT anggota Regional Surabaya terdiri dari BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai untuk melakukan pengujian kimia dan biologi unggul Balai Besar POM di Surabaya mendapatkan transfer alat LC MSMS dari BBPOM di Bandung untuk memenuhi sarana dalam pengujian parameter spesifik sampel Makanan. Pada tahun 2023 banyak parameter baru yang menggunakan instrumen LC MSMS, selain itu juga terdapat pendampingan dari P3OMN yang

diselenggarakan oleh PPSDM untuk meningkatkan kompetensi penguji dalam melaksanakan beberapa parameter uji baru seperti penetapan kadar residu obat pada produk madu, daging danhasil perikanan.

Sebagai UPT yang bertugas mengkoordinir anggota dalam regionnay, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan Internalisasi Pedoman Persiapan Penerapan Konsep Baru Regionalisasi Laboratorium Badan POM secara daring pada bulan Agustus 2023 dan menyelanggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan konsep Baru Regionalisasi Triwulan 4 pada Bulan Desember 2023 secara luring. Hasil pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Region Surabaya dalam melaksanakan sampling maupun pengujian sampel sesuai juknis dan pedoman konsep baru regionalisasi laboratorium.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 98. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	439.096.000	439.018.706	99,98	120%	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi, dan baku banding sebagai dampak sistem regionalisasi laboratorium, dimana sampel yang diuji menjadi lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan dengan parameter yang menggunakan reagen dengan kemurnian tinggi dan baku pembanding yang belum tersedia di P3OMN. Untuk pencapaian indikator ini terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan biaya sampel, pengurangan anggaran pengadaan media mikro untuk menambah pengadaan reagensia, pengahpusan honor panitia pengadaan, dan pergeseran anggaran perjalanan dinas sampling.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat labratorium, sehingga semakin banyak alat laboratorium yang rusak dan harus segera diperbaiki agar pengujian dapat segera diselesaikan. Namun kondisi yang terjadi, anggaran pemeliharaan alat laboratorium sudah habis megingat tingginya pemakaian. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya telah

mengajukan permintaan anggaran secara resmi ke Sestama dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN. Permintaan tersebut telah dipenuhi melalui ijin untuk melakukan revisi penambahan belanja operasional, sehingga alat laboratorium yang rusak dapat diperbaiki, dan pengujian berjalan lancar kembali.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 99. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	• Suhu pada laboratorium mikro tidak tercapai (Range suhu 15 - 25 derajat Celsius) Pemantauan pada Laboratorium 28 - 35 derajat celsius, dikarenakan kompresor AC Central mengalami kerusakan	• Saluran Pembuangan diruang cuci mikro kembali buntu • Suhu ruangan instrumen LC-MS/MS panas karena AC yang terpasang tidak mampu mengcover panas yang dihasilkan oleh generator pada saat instrumen dijalankan	• SPK SIPT sampel UMKM tahun 2023 baru dikirimkan di akhir Desember 2023 sehingga masih ada pelaporan SIPT produk Pangan (UMKM) yang dikerjakan/diinput melewati tahun berjalan (2023)
Rekomendasi Perbaikan	• Penggantian Kompresor AC pada Lab Mikrobiologi	• Memperbaikisaluran pembuangan pada lab Mikrobiologi • Penambahan AC ruang Instrumen LC-MS/MS	• Koordinasi dengan Poksi Sertifikasi
Rencana Aksi	• Permohonan penggantian kompresor AC Lab Mikrobiologi	• Permohonan perbaikan saluran pembuangan di Mikrobiologi melalui form perbaikan • Permintaan penambahan AC di ruang Instrumen LC-MS/MS	• Permintaan pengiriman SPK SIPT sampel UMKM sesuai kedatangan sampel di tahun berjalan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Usulan Perbaikan/Penggantian kompesor, sudah diajukan bon perbaikan, namun masih menunggu Anggaran/tindak lanjut	• Ruang LC-MS/MS panas,sirkulasi udara dibantu 2 kipas angin	• SPK SIPT sampel UMKM terkirim melebihi tahun berjalan (awal tahun 2024)
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Sudah dilaporkan dan telah dilakukan pengecekan oleh vendor, didapatkan info perbaikan/penggantian komresor sebesar 40.000.000 dengan kaspasitas 12 PK	• Sudah dilaporkan dan direncanakan pembelian AC tahun 2024	• Dibuat kesepakatan dengan Fungsi sertifikasi,tahun berikutnya (2024) untuk mengirimkan SPK SIPT sampel UMKM sesuai dengan kedatangan sampel
Status	**Close**	**Close**	**Close**

SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP BBPOM DI SURABAYA

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya belum berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di willayah kerja BBPOM di Surabaya dengan Nilai NSS 98,84% pada kategori **Cukup.**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target, realisasi dan % capaian tahun 2023

Pengukuran capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 100. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72	71,17	98.85		**Cukup**

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2023 adalah 71,17 dari target 72. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,85% dengan kategori **Cukup.**

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Rincian pencapaian target dan realiasasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara baik BBPOM Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	3		1,0000		0,15	15,00%
Tahap I	2	0	0,7000	0,2857	0,4	30,67%
P21	1	1	0,5000	0,2857	0,3	18,33%
Tahap II	4	3	0,4000	0,2143	0,15	7,17%
Realisasi Tahun Berjalan	10					71,17%
Realisasi Carry Over		4				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	10	4	14	14	100,00%	71,17%
Target Perkara	10					

Pada tahun 2023, jumlah kasus yang ditindaklanjuti Pro Justitia oleh PPNS BBPOM di Surabaya sebanyak 10 perkara atau 100.0% dari target 10 perkara serta 4 perkara carry over tahun 2022 yang tahapan penyelesaiannya berproses di tahun 2023. Dari 10 perkara yang ditangani di tahun 2023, 4 perkara sudah tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti), 1 perkara P21 (penundaan jadwal penyerahan tahap II karena tersangka sakit), 2 perkara Tahap I (menunggu P21 dari JPU) dan 3 perkara SPDP (1 perkara dilakukan penghentian penyidikan/SP3, 2 perkara masih belum dapat dilanjut ke tahap I karena tersangka melarikan diri dan masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi).

Meskipun penanganan perkara memiliki kendala relative kompleks (antara lain tersangka tidak kooperatif, tersangka melakukan upaya hukum terkait penetapan tersangka dan tersangka melarikan diri sehingga penyelesaian perkara memerlukan

waktu lebih lama), Penyidik BBPOM Surabaya telah menyelesaikan pemberkasan dengan kualitas yang baik.

Rincian 10 perkara yang ditindaklanjuti Pro Justitia di tahun 2023 adalah 6 (enam) perkara Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan 4 (empat) perkara Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau Mengandung Bahan Dilarang

b. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

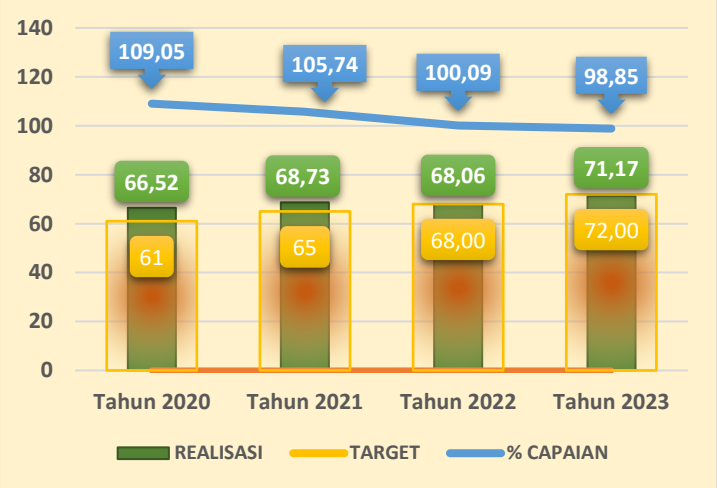

Gambar 61. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 hingga Tahun

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan terlihat sedikit fluktuatif, yaitu terdapat sedikit penurunan realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021, namun mengalami kenaikan lagi di tahun 2023. Sedangkan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan menunjukkan trend yang terus menurun dari tahun 2021 hingga tahun 2023, antara lain disebabkan tingkat kompleksitas penanganan perkara yang belum menjadi pertimbangan dalam penyesuaian target tahun berjalan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 101. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	75	71,17	94,89	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Setelah Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	70		101,67	Tercapai / Melampaui	▲

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 berdasarkan target Renstra tahun 2024 (Renstra awal) mendapat kategori **akan tercapai**, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu

di pusat, maka **target Renstra 2024 diturunkan**. Hal ini sudah mempertimbangkan banyaknya perkara carry over dan kurangnya tenaga PPNS. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Tercapai**", namun mengantisipasi adanya perubahan peraturan terkait penindakan, maka tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

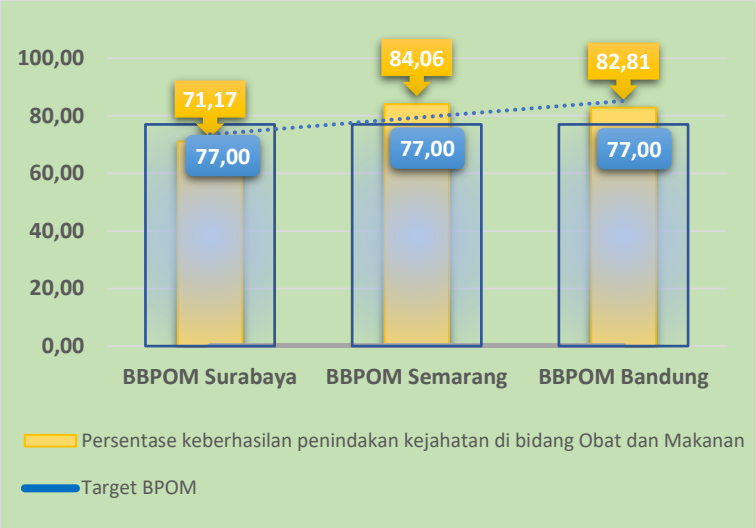

Gambar 62. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Dari ketiga Balai Besar POM yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Surabaya yang tidak dapat mencapai target nasional. Namun demikian bukan berarti kinerja penindakan di BBPOM di Surabaya yang terendah, karena barang bukti BBPOM di Surabaya memiliki nilai keekonomian cukup besar dan perkara-perkara yang ditangani memiliki kompleksitas/tingkat kesulitan yang relatif tinggi dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, untuk periode Renstra selanjutnya (2025-2029) akan diusulkan penambahan nilai ekonomi barang bukti sebagai salah satu komponen perhitungan indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2023 belum mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Sejak Januari 2023 diterapkan aplikasi E-Berpadu milik Mahkamah Agung dimana masing-masing penyidik harus memiliki akun karena permohonan persetujuan

penyitaan dan berkas perkara yang telah P21 harus dikirimkan secara online menggunakan aplikasi E-Berpadu untuk keperluan persidangan. Dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga per Januari 2023 penyidik BBPOM di Surabaya sudah memiliki akun.

- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan onsite. Berdasarkan hasil pendalaman informasi tersebut maka pada Tahun 2023 telah dilakukan operasi penindakan sebanyak 10 perkara, dengan progress tahapan sebagai berikut:
    - SPDP sebanyak 2 perkara (distribusi kosmetik TIE dan OT TIE)
    - Tahap 1 sebanyak 2 perkara (distribusi kosmetik TIE dan distribusi OT TIE)
    - P21 sebanyak 1 perkara (distribusi OT TIE)
    - Tahap 2 sebanyak 4 perkara (distribusi kosmetik TIE sebanyak 1 perkara dan distribusi OT TIE sebanyak 3 perkara)
    - SP3 ada 1 perkara (distribusi Kosmetik 1 perkara)
- Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penyitaan barang bukti oleh penyidik.
- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Selama tahun 2023 telah dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka untuk 9 perkara yaitu 6 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan 3 perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh Korwas Polda Jawa Timur untuk memberikan arahan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penyidik dan rekomendasi hasil gelar. Dari hasil gelar tersebut telah dilakukan penetapan tersangka untuk 9 perkara yang ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dan Korwas Polda Jawa Timur, sedangkan 1 perkara yaitu mengedarkan kosmetik tanpa izin edar belum dilakukan gelar perkara karena masih proses pemeriksaan saksi-saksi. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara maka dilakukan pemanggilan tersangka serta melakukan pemeriksaan tersangka.
- Kendala yang terjadi antara lain pada saat pemanggilan saksi/tersangka tidak hadir sesuai tanggal yang ditentukan sehingga berpengaruh dalam penyelesaian pemberkasan, adanya tersangka yang melarikan diri dan adanya penundaan pelaksanaan tahap 2 ke Januari 2024 karena tersangka sakit, selain itu adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga tahap 2 tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

- Pada bulan Agustus 2023 dilakukan gelar perkara dengan Direktorat Penyidikan dan Biro Hukor membahas tindak lanjut perkara importir yang mendistribusikan kosmetik dan pangan tanpa izin edar, terhadap perkara tersebut dilakukan penghentian penyidikan (SP3) karena tidak cukup alat bukti.
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan, Direktorat Narkoba Mabes Polri, BBPOM di Yogyakarta dan Loka POM di Banyumas terkait pemanggilan dan pemeriksaan saksi/tersangka.
- Selama tahun 2023 telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 7 perkara karena tidak cukup alat bukti, antara lain perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara, perkara tahun 2020 sebanyak 3 perkara, perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara, perkara tahun 2022 sebanyak 1 perkara dan perkara tahun 2023 sebanyak 1 perkara.
- Melakukan pemusnahan barang bukti yang telah inkracht (memiliki kekuatan hukum tetap) bekerjasama dengan pihak ke-3.
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Korwas Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur terkait permohonan data kendaraan bermotor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait verifikasi data NIK, Otoritas Jasa Keuangan terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, PPATK dan Bank Indonesia terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, Provider Indosat dan Provider Tri terkait permintaan data pendaftar
- Melakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down. Selama tahun 2023 telah dilakukan patrol siber terhadap 612 akun. Selain itu juga dilakukan profiling terhadap 14 akun untuk dilaporkan ke Direktorat Siber Badan POM.
- Melakukan update peta rawan kasus setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.
- Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan penggalangan dengan stake holder dilakukan kegiatan antara lain pemberian keterangan ahli kepada Penyidik Polri, selama tahun 2023 telah dilakukan pemberian keterangan ahli untuk 87 perkara Polri sebagai tindak lanjut permohonan keterangan ahli dari Polri, sebagai Narasumber kegiatan Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur, menghadiri pemusnahan Barang Bukti dan barang rampasan di Kejari Sidoarjo, undangan Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkait sosialisasi "Kampung Bebas dari Narkoba", undangan Polres Pelabuhan Tanjung Perak "Kunjungan Tim Penilaian

Kampung Tangguh Bebas Narkoba" dan undangan sosialisasi layanan dari Balai Bahasa Prov. Jawa Timur.

- Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi Penyidik :
  1. Sosialisasi Patroli Siber secara daring diselenggarakan oleh Direktorat Siber
  2. Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang di Pusdik APU Depok diselenggarakan oleh PPSDM dan Pusdik APU
  3. Diklat Intelijen Lanjutan di Pusdik Intelijen Soreang diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen
  4. FGD Tugas dan Fungsi PPNS serta pemanfaatan aplikasi PPNS diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
  5. Bimtek E-Berpadu secara daring, sosialisasi aplikasi dashboard penindakan secara daring diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan
  6. Bimtek Penanganan Pertama BB Elektronik di Badan POM diselenggarakan oleh Direktorat Siber
  7. Rakor PPNS dari Korwas Polda Jatim
  8. Forkom PPNS di Bandung diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan
  9. In House Training-Yogyakarta Microexpression, Communicatoin and Negotiation Skill
  10. In House Training Siber secara daring diselenggarakan oleh Direktorat Siber "Pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan dalam perspektif kriminologi dan urgensi viktimologi dalam penanganan kejahatan Obat dan Makanan"
  11. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Bali diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal
  12. Sosialisasi dan pelatihan penerbitan administrasi penanganan perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi (SPDP Online) kepada PPNS Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh Biro Korwas PPNS Mabes Polri
  13. FGD "Mekanisme dan Kewenangan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang atau Uang dalam Proses Penyidikan" diselenggarakan oleh BBPOM di Pekanbaru secara online
  14. In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan" diselenggarakan oleh Dit. Cegah Tangkal secara daring
  15. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan dengan tema “Perkuatan Koordinasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam Dinamika Penegakan Hukum Obat dan Makanan” diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan

16. Workshop series peningkatan pemahaman mengenai kebijakan pro bisnis dan HAM dalam pengawasan Obat dan Makanan" diselenggarakan oleh Pusakom secara daring
17. Forkom Intelijen di Kupang
18. Pelatihan secara daring sertifikasi drone diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen dan serah terima dan pengenalan alat taktis ke UPT serta sertifikasi drone petugas intelijen pusat dan UPT diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen
19. Workshop "Upaya mengeluarkan Indonesia dari priority watch list melalui kolaborasi dengan instansi terkait" diselenggarakan oleh Kemenkumham Jatim
20. FGD pemberantasan Obat dan Makanan ilegal melalui perkuatan lintas sektor diselenggarakan oleh Balai POM di Tarakan secara daring
21. Sosialisasi aplikasi SI MIRA (Sistem Informasi dan Administrasi Penanganan Perkara) diselenggarakan oleh Kejati Jatim
22. Pelatihan siber diselenggarakan oleh Direktorat Siber
23. Bimtek pendukung tugas PPNS diselenggarakan oleh PPSDM

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Memantapkan koordinasi lintas sektor (Kepolisian Daerah/Resor di wilayah kerja BBPOM Surabaya, Kejaksaan Tinggi/Negeri di wilayah kerja BBPOM Surabaya, Kanwil DJBC Jatim/Bea Cukai Juanda, BNN, BIN Daerah Jatim, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota) dan membangun jejaring dengan Asperindo dan Organda
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi PPNS secara kontinyu dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang semakin kompleks dan dinamis di era digital
3. Pemenuhan fasilitas/sarana pendukung kegiatan patroli siber, intelijen dan penyidikan
4. Membangun inovasi untuk memonitor progres tahapan penyidikan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	AEA.001.052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A	Perencanaan Penyusunan Analisis	2	kali/trip	2
					B	Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	8	kali/trip	8
					C	FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	0	kali/trip	0
		Penindakan	AEA.001.053	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A	Rapat Perencanaan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	0	kali/trip	0
					B	Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	12	bulan	12
					C	Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	6	kali/trip	6
					D	Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	0	kali/trip	0
					E	Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	0	kali/trip	0
		Penindakan	AEA.001.054	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A	Koordinasi Lintas Sektor Penindakan Obat dan Makanan	4	kali/trip	4
					B	Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan	1	kali/trip	1
					C	Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	1	kali/trip	1
					D	Pertemuan Koordinas Lintas Sektor Untuk Penguatan Intelijen di Daerah	0	kali/trip	0
					E	Forum Koordinasi	1	kali/trip	1
					F	Evaluasi Operasi Siber dan Coaching Clinic	1	kali/trip	1
					G	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik	1	kali/trip	1
					H	Pembentukan Petugas Intelijen BPOM	1	kali/trip	1
					I	Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM	1	kali/trip	1
					J	Workshop Intelijen Strategis	0	kali/trip	0
					K	Penanganan Kasus Dengan Mekanisme Ultimum Remidium	8	kali/trip	8
					L	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Yang Diserahkan/Barang Rusak	1	paket	1
					M	Sewa Gudang Untuk Barang Bukti	1	paket	1

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

		Penindakan	QCD.U09.051	Operasi Intelijen	A	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	9	perkara	9
					B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	9	perkara	9
					C	Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat	0	kaliltrip	0
		Penindakan	QCD.U09.052	Gelar Kasus dan Pelaporan	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	9	perkara	10
		Penindakan	QCD.U09.053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	9	perkara	9
		Penindakan	QCD.U09.054	Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan	9	perkara	9
					B	Penangkapan dan Penahanan	1	perkara	1
		Penindakan	QCD.U09.055	Pemberkasan	A	Pemberkasan	9	perkara	9
					B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	9	perkara	9
					C	Gelar Perkara	9	perkara	9
					D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	5	perkara	5
					E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	9	perkara	9

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator adalah kegiatan penindakan dengan target 10 perkara dan realisasi sebanyak 10 perkara, namun terdapat perkara carry over tahun 2014-2022 sebanyak 10 perkara yang masih memerlukan tindak lanjut. Untuk menunjang keberhasilan telah dilakukan upaya antara lain: Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan. Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka dalam rangka penyelesaian pemberkasan. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Korwas Polda Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2), Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur terkait permohonan data kendaraan bermotor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait verifikasi data NIK, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan Bank Indonesia terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, Provider Indosat dan Provider Tri terkait permintaan data pendaftar.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 102. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.312.841.000	1.312.438.982	99,97	98,85	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Tidak Efisien,** karena % capaian anggaran lebih besar daripada % capaian indikator kinerja. Pada tahun 2023 terdapat pergeseran anggaran dalam upaya pencapain target, antara lain penambahan biaya sewa kendaraan, penambahan biaya pemusnahan dari pengurangan biaya sewa gudang barang bukti, penghapusan beberapa kegiatna terpadu, pergeseran biaya perjalanan dinas, pengurangan anggaran konsumsi, penambahan biaya pelatihan, dan penambahan biaya komunikasi. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian perkara, sehingga untuk menindaklanjutinya maka dilaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Korwas Polda Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2), Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur terkait permohonan data kendaraan bermotor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait verifikasi data NIK, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan Bank Indonesia terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, Provider Indosat dan Provider Tri terkait permintaan data pendaftar.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 103. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Telah dilakukan pemanggilan dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro namun saksi tidak hadir tanpa alasan (tidak kooperatif) - Pengajuan transaksi keuangan perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya ke PPATK sejak September 2023 namun belum ada tindak lanjut - Permintaan izin membuka transaksi keuangan ke BI untuk perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya ke namun belum ada tindak lanjut - Permintaan data identitas diri ke Dispenduk Kota Surabaya untuk perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya namun belum ada tindak lanjut - Diterima surat P19 dari JPU untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 10 perkara	- Pengajuan transaksi keuangan perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya ke PPATK sejak September 2023 namun belum ada tindak lanjut - Permintaan izin membuka transaksi keuangan ke BI untuk perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya ke namun belum ada tindak lanjut - Permintaan data identitas diri ke Dispenduk Kota Surabaya untuk perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya namun belum ada tindak lanjut - Perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 10 perkara	- Pengajuan transaksi keuangan perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya ke PPATK sejak September 2023 namun belum ada tindak lanjut - Permintaan izin membuka transaksi keuangan ke OJK untuk perkara memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya namun permintaan tidak dapat ditindaklanjuti karena statusnya masih saksi (dapat diberikan izin membuka transaksi keuangan jika statusnya tersangka) - Pelaksanaan tahap 2 untuk tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar belum dapat dilakukan karena tersangka sakit - Perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 10 perkara
Rekomendasi Perbaikan	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan operasi Pangea (dalam kota dan luar kota) - Melakukan kegiatan penindakan dengan locus di Bojonegoro dalam rangka operasi Pangea - Mengirimkan SPDP ke Kejati Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Melakukan pemanggilan	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Pemeriksaan tersangka untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Pemeriksaan saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Pemeriksaan tambahan sebagai saksi untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Penelusuran ke IF PT. Sejahtera Lestari dalam rangka tindak lanjut surat dari direktorat Cegah Tangkal - Penggalangan dengan lintas sektor berupa kegiatan FGD terkait produksi kerupuk di Desa Tlasih Kab. Sidoarjo - Pemeriksaan tambahan sebagai saksi untuk

Keterangan	Oktober	November	December
	dan pemeriksaan saksi-saksi/tersangka - Melakukan pemeriksaan tambahan saksi dan tersangka untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Pengiriman surat pengantar tahap 2 ke Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka bersama Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai saksi petugas untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Melakukan pemeriksaan saksi pembeli untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dispenduk Kota Surabaya dalam rangka penyelesaian pemberkasan - Melakukan rapat dengan Hukor, Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Direktorat Penyidikan untuk pembahasan penanganan tindak lanjut kasus memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya - Melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis Obat dan Makanan - Mengikuti pelatihan dan pertemuan nasional untuk peningkatan kompetensi petugas/penyidik	- Penyerahan perbaikan berkas perkara (pemenuhan P19) ke JPU untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Pemeriksaan saksi ketua lingkungan untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Nganjuk - Pemeriksaan saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Penelusuran di Malang dan Sidoarjo sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal - Telah dilakukan tahap 1 untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Telah dilakukan penyerahan surat penetapan tersangka untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan ke Korwas Polda Jatim dan tersangka - Telah dilakukan pemeriksaan saksi (karyawan) untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Pengiriman pengantar tahap 2 ke Korwas Polda Jatim untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Penelusuran di Pamekasan sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal - Tahap 2 ke Kejari Gresik untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Tindak lanjut pengaduan masyarakat di Surabaya	perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Pemeriksaan tambahan sebagai saksi dan pemeriksaan saksi pembeli untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Nganjuk - Penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejati untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Pengiriman pengantar tahap 2 perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Sidoarjo - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Pengiriman surat panggilan saksi perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Koordinasi ke Kejati, Korwas Polda Jatim dan Ditlantas Polda Jatim
Rencana Aksi	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Melakukan operasi Pangea (dalam kota dan luar kota) - Melakukan kegiatan	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Pemeriksaan tersangka untuk perkara	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Penelusuran ke IF PT. Sejahtera Lestari dalam

Keterangan	Oktober	November	December
	penindakan dengan locus di Bojonegoro dalam rangka operasi Pangea - Mengirimkan SPDP ke Kejati Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi/tersangka - Melakukan pemeriksaan tambahan saksi dan tersangka untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Pengiriman surat pengantar tahap 2 ke Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka bersama Korwas Polda Jawa Timur untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai saksi petugas untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Melakukan pemeriksaan saksi pembeli untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dispenduk Kota Surabaya dalam rangka penyelesaian pemberkasan - Melakukan rapat dengan Hukor, Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Direktorat Penyidikan untuk pembahasan penanganan tindak lanjut kasus memproduksi dan mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Surabaya - Melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis Obat dan Makanan - Mengikuti pelatihan dan pertemuan nasional untuk peningkatan kompetensi petugas/penyidik	mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Pemeriksaan saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Pemeriksaan tambahan sebagai saksi untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Penyerahan perbaikan berkas perkara (pemenuhan P19) ke JPU untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Pemeriksaan saksi ketua lingkungan untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Nganjuk - Pemeriksaan saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Penelusuran di Malang dan Sidoarjo sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal - Telah dilakukan tahap 1 untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Telah dilakukan penyerahan surat penetapan tersangka untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan ke Korwas Polda Jatim dan tersangka - Telah dilakukan pemeriksaan saksi (karyawan) untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Pengiriman pengantar tahap 2 ke Korwas Polda Jatim untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Penelusuran di Pamekasan sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal - Tahap 2 ke Kejari Gresik untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Tindak lanjut pengaduan masyarakat di Surabaya	rangka tindak lanjut surat dari direktorat Cegah Tangkal - Penggalangan dengan lintas sektor berupa kegiatan FGD terkait produksi kerupuk di Desa Tlasih Kab. Sidoarjo - Pemeriksaan tambahan sebagai saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Pemeriksaan tambahan sebagai saksi dan pemeriksaan saksi pembeli untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Nganjuk - Penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejati untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Pengiriman pengantar tahap 2 perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Sidoarjo - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Pengiriman surat panggilan saksi perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Koordinasi ke Kejati Jatim, Korwas Polda Jatim dan Ditlantas Polda Jatim

Keterangan	Oktober	November	December
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Terealisasi 10 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 10 perkara	- Terealisasi 10 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 10 perkara	- Terealisasi 10 perkara dari 9 target perkara tahun 2023 - Jumlah perkara carry over sebanyak 10 perkara
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November : - Telah dilakukan pemeriksaan tersangka untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Telah dilakukan pemeriksaan saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Telah dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai saksi untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Telah dilakukan penyerahan perbaikan berkas perkara (pemenuhan P19) ke JPU untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Telah dilakukan pemeriksaan saksi ketua lingkungan untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Nganjuk - Telah dilakukan pemeriksaan saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Telah dilakukan penelusuran di Malang dan Sidoarjo sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal - Telah dilakukan tahap 1 untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Telah dilakukan penyerahan surat penetapan tersangka untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan ke Korwas Polda Jatim dan tersangka - Telah dilakukan pemeriksaan saksi (karyawan) untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Telah dilakukan pengiriman pengantar tahap 2 ke Korwas Polda Jatim untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Telah dilakukan	Kondisi Desember : - Dilakukan penelusuran ke IF PT. Sejahtera Lestari dalam rangka tindak lanjut surat dari direktorat Cegah Tangkal - Dilakukan penggalangan dengan lintas sektor berupa kegiatan FGD terkait produksi kerupuk di Desa Tlasih Kab. Sidoarjo - Dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai saksi untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai saksi dan pemeriksaan saksi pembeli untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Nganjuk - Dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap 1) ke Kejati untuk perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Lamongan - Dilakukan pengiriman pengantar tahap 2 perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Sidoarjo - Dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Dilakukan pengiriman surat panggilan saksi perkara mengedarkan kosmetika TIE dengan locus di Bojonegoro - Diterima surat P21 untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Blitar - Dilakukan koordinasi ke Kejati Jatim, Korwas Polda Jatim dan Ditlantas Polda Jatim	Kondisi Januari : -

Keterangan	Oktober	November	December
	penelusuran di Pamekasan sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal - Telah dilakukan Tahap 2 ke Kejari Gresik untuk perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Gresik - Telah dilakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat di Surabaya		
Status	Close	Close	close

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BBPOM di Surabaya yang Optimal

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NSS 102,29% pada kategori **Sangat Baik** Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 104. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7	94,23	105,05		**Sangat Baik**

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Nilai indeks RB BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2023 belum diperoleh menunggu hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Gambar 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Realisasi dan capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2023 mengalami penurunan dari realisasi dan capaian realisasi tahun 2022, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2020 dan tahun 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2023 dengan Target Renstra tahun 2024

INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	92.2	94.23	102.20	Tercapai / Melampaui	▲

INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	95.23		98.95	Akan Tercapai	▲

Capaian indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2023 dibandingkan target Renstra awal tahun 2024 masuk kategori **Tercapai/Melampaui**, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 dinaikkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**". Perlu dilakukan upaya yang intensif untuk memastikan target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

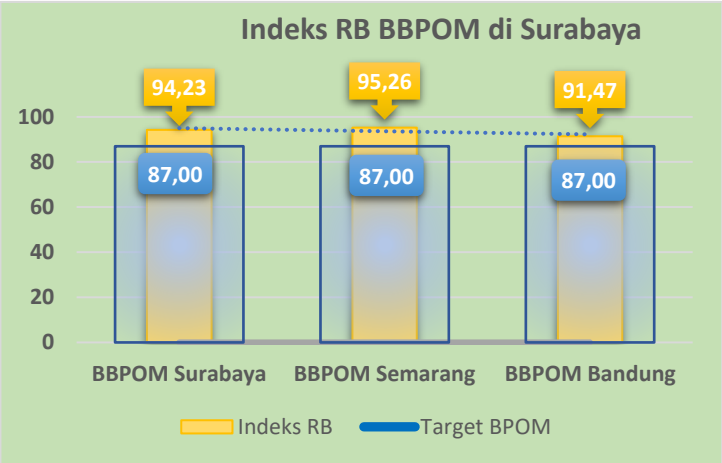

Gambar 64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian Indeks RB yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang, dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Namun demikian, ketiga Balai Besar POM yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada triwulan I tahun 2023, BBPOM Surabaya telah melakukan evaluasi inovasi yang sudah diterapkan di tahun 2022, dengan hasil mengganti 2 inovasi yang sudah tidak relevan dengan 2 inovasi baru yaitu inovasi Jatim Truly dan inovasi PAMAN. Selain itu terdapat beberapa pengembangan dari inovasi sebelumnya antara lain pengembangan aplikasi simpelsi (penambahan menu tanda tangan tanda terima tunjangan kinerja, pengembangan aplikasi Teman Odin (menambah fitur notifikasi), dan penyelesaian aplikasi SILASKAR (layanan saksi ahli). Prestasi yang berhasil di raih oleh *Agent of Change* adalah penghargaan sebagai Tim Agen Perubahan

Reformasi Birokrasi Terbaik I. Pada awal tahun juga dikembangkan inovasi aplikasi untuk mempermudah pengawasan barang tentengan, namun inovasi ini dibatalkan karena akan ada penyeragaman aplikasi dari pusat. Hasil desk sementara dengan APIP adalah adanya apresiasi karena BBPOM di Surabaya tetap mempertahankan predikat WBBM dengan terus menambah inovasi terutama inovasi layanan terhadap masyarakat. Nilai sementara hasil desk adalah 95,53, namun belum ada nilai resmi dari APIP. Terdapat 1 orang pegawai BBPOM di Surabaya yang mendapat hukuman disiplin pegawai terkait integritas di tahun 2023 yang bisa mempengaruhi penilaian RB BBPOM di Surabaya, sehingga perlu terus dilakukan pengawasan melekat dari ketua tim terhadap anggotanya terutama bila ada indikasi pelanggaran kode etik maupun integritas serta dilakukan pencegahan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan WBBM, konsistensi dan keberlangsungan program, kegiatan, dan inovasi yang dimiliki yang bedampak internal dan eksternal, melakukan evaluasi berkala yang menunjukkan upaya keberlangsungan pembangunan RB, pembaruan data dukung, melakukan penyempurnaan inovasi yang dimiliiki dan menggali ide pengembangan inovasi baru yang dibutuhkan untuk internal maupun eksternal.

Selain itu melakukan penajaman beberapa inovasi unggulan yang berdampak eksternal (seperti SiPPOTra, Jatim Glowing, Jatim Truly), dan selanjutnya dapat diikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Penajaman ini perlu dilakukan sehingga terlihat inovasi tersebut semikin tinggi efektifitas dan efisiensinya, serta membawa dampak yang semakin nyata kepada masyarakat.

Penambahan anggota AoC untuk penyegaran ide, kreatifitas, dan pemantauan khususnya terhadap inovasi-inovasi yang dimiliki. Anggota AoC ini juga menjadi penggerak/mengawal perwujudan WBBM.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
24	Indeks RB BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A	Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM	6	kegiatan	23
					C	Pemeliharaan dan Peningkatan QMS	3	kegiatan	3
					K	Workshop Penyelenggaraan Kearsipan	1	kali/trip	1
					M	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan POM	0	kali/trip	0
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	E	Sosialisasi dan Internalisasi Fraud Control Plan (FCP) Regional	1	kali/trip	0
					F	Koordinasi lintas sektor	8	kali/trip	8
		Tata Usaha	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	bulan	12
		Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	Kebersihan dan Keamanan Kantor	1	paket	1
					B	Pemeliharaan Gedung Kantor	12	bulan	12
					D	Pengadaan Keperluan Sehari-Hari	12	bulan	12
					E	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	12	bulan	12
					F	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	12	bulan	12
					G	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	12	bulan	12
					H	Pemeliharaan Sarana Gedung	12	bulan	12
					I	Kesehatan Pegawai	12	bulan	12
					J	Langganan, Listrik, Air dan Telepon	12	bulan	12
		Tata Usaha	EBA.962.051	Layanan Umum UPT	A	Pemeriksaan Kesehatan	1	kali/trip	1
		Tata Usaha	CAB.002.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1	paket	1

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Indeks RB adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks RB serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selama tahun 2023, BBPOM di Surabaya banyak dikunjungi UPT dari seluruh Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di UPT tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Surabaya. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, bahkan terdapat beberapa tambahan tambahan inovasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan di tahun 2023 antara lain Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Peningkatan Kompetensi Agent of Change, Pelatihan Lead Auditor, Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM, Workshop Penyelenggaraan Kearsipan, dan semua kegiatan operasional perkantoran serta belanja pegawai.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 106. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks RB BBPOM di Surabaya	21.640.525.583	19.696.536.166	99,76	105,05%	**100% (Efektif)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien,** karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target antara lain penambahan biaya internet karena penambahan bandwith, penambahan pemeliharan gedung kantor dari anggaran jasa kebersihan dan keamanan kantor, penambahan anggaran pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan laboratorium, penambahan anggaran langganan air dan listrik, penambahan anggaran konsumsi (snack) pertemuan dari anggaran konsumsi (makan) pertemuan dan seragam pegawai, penambahan anggaran gaji untuk PPPK, serta penambahan biaya renovasi unit pelayanan publik. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, begitu pula dengan target tahun 2023 dan 2024 sudah terlampaui. Sehingga pada tahun 2023 diusulkan perubahan target tahun 2024 agar dapat dinaikkan.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 107. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Peningkatan penerapan dan pemahaman tentang nilai2 budaya ASN dan organisasi	Peningkatan penerapan dan pemahaman tentang nilai2 budaya ASN dan organisasi	Peningkatan penerapan dan pemahaman tentang nilai2 budaya ASN dan organisasi
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan pertemuan dengan seluruh tim organisasi	"Melakukan pertemuan dengan seluruh tim organisasi	Melakukan pertemuan dengan seluruh tim organisasi
Rencana Aksi	Merencanakan pertemuan Capacity Building untuk mejaga kekompakan tim dan meningkatkan nila-nilai organisasi	Capacity Building direncanakan pada bulan Desember	Capacity Building Serve in Harmony
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	belum ada rencana pertemuan seluruh anggota tim organisasi	Capacity Building direncanakan pada bulan Desember	Capacity Building direncanakan pada bulan Desember

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kondisi Setelah Rencana Aksi	sudah ada rencana pertemuan seluruh anggota tim organisasi	"Capacity Building direncanakan pada bulan Desember	sudah ada rencana pertemuan seluruh anggota tim organisasi
Status	**Close**	**Open**	**Close**

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 108. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6	85,2	99,53		**Cukup**

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 104. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya telah mencapai 85,2 dengan kategori **Memuaskan** dan mendapat peringkat pertama Nilai AKIP tertinggi dibandingkan semua UPT di seluruh Indonesia di Lingkungan Badan POM**.** Namun demikian masih **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian sebesar 99,53% pada kategori **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

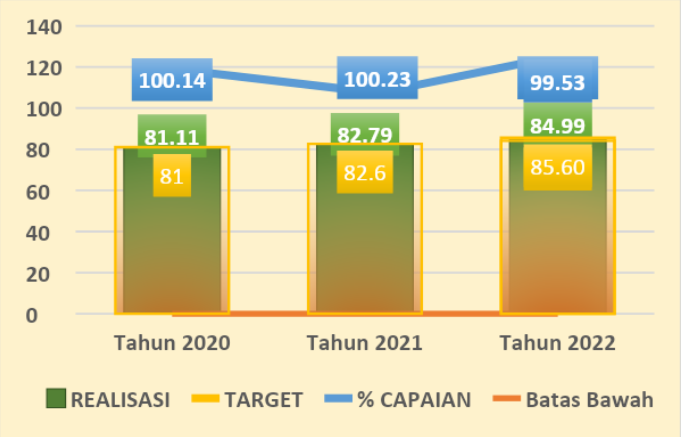

Gambar 65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2023

Terdapat kenaikan realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun demikian capaian tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022, dikarenakan adanya kenaikan target dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari 84,10 menjadi 85,60. Diupayakan selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP dari APIP, agar penilaian bisa meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

NILAI AKIP BBPOM DI SURABAYA		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	87.1	85.2	97.82	Akan Tercapai	
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	85.25		99.94	Akan Tercapai	

Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra awal tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 diturunkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai dengan selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP oleh APIP untuk menaikkan nilai pada komponen yang turun di tahun 2023.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

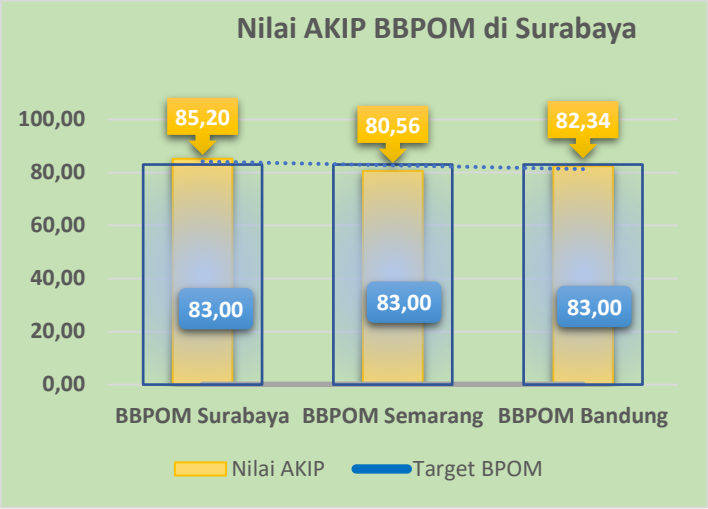

Gambar 66. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai AKIP tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Dari ketiga balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Surabaya yang berhasil mencapai target nasional. BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung belum berhasil mencapai target nasional. Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya kembali mendapat peringkat pertama Nilai AKIP tertinggi dibandingkan semua UPT di seluruh Indonesia di Lingkungan Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 85,2 (A) dibandingkan nilai tahun 2022. Meskipun nilai AKIP tersebut masih belum mencapai target, namun nilai AKIP BBPOM di Surabaya merupakan nilai tertinggi diantara seluruh UPT di lingkungan BPOM. Masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut hingga target akhir periode Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2022 sebagai berikut:

- Menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi
- belum adanya penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta inovasi terkait pelaporan kinerja
- Progres rencana aksi belum tergambarkan pada Laporan Kinerja Interim
- Belum ada penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim
- Belum adanya inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta

mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement)

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, mulai triwulan I tahun 2023, telah dilakukan perbaikan pada laporan kinerja interim dengan menambahkan penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja, menambahkan progres rencana aksi setiap triwulan, menambahkan penjelasan upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan. Inovasi terkait pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi simakin yang telah mengukur IKI individu hingga pimpinan UPT setiap triwulan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi. Telah tersedia inovasi temanqu untuk pelaporan kinerja, dimana semua pegawai dapat mengakses laporan kinerja tahunan, laporan tahunan, laporan kinerja interim triwulan, dan laporan evaluasi internal triwulan. Telah tersedia inovasi insight yang menampilkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan aplikasi simetris yang telah memuat rekapitulasi kendala, rencana aksi, dan tindak lanjut. Selain itu telah terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dibuktikan dengan kenaikan NPS dan penambahan jumlah IKU yang mencapai target. Pada triwulan I tahun 2023 juga telah disusun Laporan evaluasi Renstra Paruh Waktu yang berisi evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022 serta proyeksi ketercapaian target tahun 2024.

Hasil penilaian AKIP perkomponen sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	24.00	24.00
2.	Pengukuran Kinerja	24	21.36	17.76
3.	Pelaporan Kinerja	12	10.08	10.08
4.	Evaluasi Internal	20	15.80	16.80
5.	Capaian Kinerja	20	13.75	16.56
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	84.99	85.20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**A**	**A**

Komponen perencanaan sudah memperoleh nilai maksimal, sedangkan komponen pengukuran kinerja 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 karena perbedaan capaian kinerja pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Data yang berbeda berkaitan dengan data pengujian sampel Obat dan makanan serta data pemeriksaan sarana distribusi. Perubahan data sebenarnya dapat tertelusur dari form perbaikan data yang selalu diisi saat ada perubahan data sepanjang tahun. Data yang berubah terkadang mempengaruhi data pada bulan-bulan sebelumnya. Perubahan data pada bulan-bulan

sebelumnya ini tidak dilanjutkan dengan merubah data-data pada dokumen laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim yang sudah lewat dengan asumsi bahwa dokumen laporan triwulan sebelumnya tetap menggunakan data pada saat itu.

Nilai pada komponen pelaporan kinerja tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2022, sedangkan nilai komponen evaluasi internal dan capaian kinerja mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rekomendasi perbaikan kinerja berdasarkan hasil audit sakip tahun 2023 antara lain:

- Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, RHPK, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.
- Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan;
- Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif jika terjadi kesalahan/perubahan data;
- Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan.
- Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi baik dari hasil evaluasi SAKIP maupun hasil evaluasi internal.
- Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	D	Forum Komunikasi Perencana BPOM	1	kali/trip	1
					E	Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2022	1	kali/trip	1
					F	Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)	1	kali/trip	1
					H	Perencanaan dan Evaluasi	0	paket	0
					N	Evaluasi Sakip Regional	0	kali/trip	0
					O	Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis SAI dan Laporan Keuangan di UPT POM	1	kali/trip	1
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	D	Bimtek SAKIP dan Monev Online	1	kali/trip	1

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tim

sakip mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, dan mengikuti rapat kerja nasinal badan pengawas obat dan makanan. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim sakip setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem akip yang lebih baik secara menyeluruh. Kegiatan yang tidak terealisasi sesuai rencana adalah Perencanaan dan Evaluasi yang direvisi untuk efisiensi serta Evaluasi SAKIP Regional yang ditiadakan penyelenggaraannya oleh pusat. Evaluasi SAKIP dilakukan hanya melalui aplikasi SAPA APIP tanpa wawancara.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 110. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	33.188.000	33.184.763	99,99	99,53	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Telah dilakukan revisi anggaran pengambilan sisa anggaran Forum Komunikasi Perencana BPOM untuk Penambahan anggaran pencetakan lapkin laptah. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat 4 indikator yang mempunyai capaian diatas 120% hingga triwulan 2, sehingga ditindaklanjuti dengan membuat usulan perubahan target bulanan terhadap 4 indikator tersebut dari bulan Juli hingga Desember 2023. Kemudian dilakukan perubahan RAPK tahun 2023 pada aplikasi eplanning setelah usulan disetujui oleh Biro perencanaan dan keuangan.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 111. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Beberapa format pelaporan pada LAPKIN Interim TW III mengalami perubahan karena adanya perubahan pedoman SAKIP, yaitu: Keputusan	Terdapat 5 IKU belum memenuhi target bulan November 2023 (Pangan Fortifikasi, Sertifikasi, UMKM, Desa, Penindakan)	Terdapat reviu perubahan beberapa target IKU tahun 2024 sehingga berbeda dengan RKT 2024 yang telah disusun sebelumnya. Terdapat perubahan peta strategis

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
	Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM		Balai dengan penambahan 5 IKU baru yang sebelumnya perupakan indikator direktif penugasan
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan penyesuaian format pelaporan sesuai ketentuan pada Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023	Melakukan percepatan dan monitoring realisasi untuk memastikan target tahun 2023 tercapai pada bulan Desember 2023	Melakukan perhitungan perkiraan ketercapaian target baru tahun 2024 dan penyesuaian pada PK 2024
Rencana Aksi	Melakukan penyesuaian format pelaporan sesuai ketentuan pada Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023	Melakukan percepatan dan monitoring realisasi untuk memastikan target tahun 2023 tercapai pada bulan Desember 2023	Melakukan perhitungan perkiraan ketercapaian target baru tahun 2024 dan penyesuaian pada PK 2024
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Format pelaporan masih mengacu pada pedoman SAKIP yang lama	Realisasi IKU Pangan Fortifikasi, Sertifikasi, UMKM, Desa dan Penindakan belum memenuhi target bulan November 2023	PK 2024 masih mengacu RKT 2024 yang telah disusun sebelumnya
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: Format pelaporan telah disesuaikan dengan pedoman SAKIP yang baru	Kondisi Desember: Realisasi IKU UMKM, Desa dan Penindakan sudah mencapai target tahun 2023, sedangkan IKU Pangan Fortifikasi, Sertifikasi, GLP, dan NKA belum mencapai target 2023 dengan justifikasi	PK 2024 menyesuaikan dengan hasil reviu target dari pusat dan perubahan peta strategi baru
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan
Status	**Close**	**Open**	**close**

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan Nilai NPS 105,67% dengan kriteria **Sangat Baik**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 112. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5	90,35	105,67		**Sangat Baik**

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a) Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b) Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c) Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya di peroleh dari aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

a) Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
b) Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN;

c) Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM);

d) Dimensi Disiplin mengambil data dari Aplikasi SIAP yang diambil dari data aplikasi SIMOD.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sesuai aplikasi IP ASN BPOM sebesar 90.35. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sudah berhasil mencapai target yaitu 105.67 dengan kriteria Memenuhi Ekpektasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

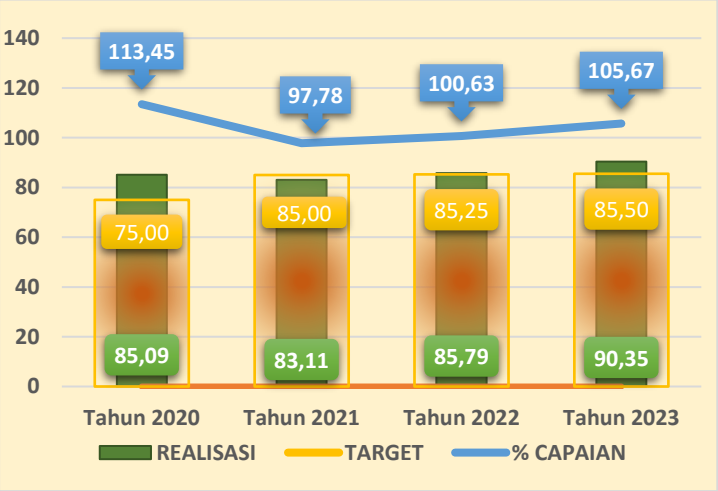

Gambar 67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2023

Dari grafik disamping diketahui bahwa terdapat penurunan relaisasi pada tahun 2021, selanjutnya meningkat di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan capaian Indeks Profesionalitas ASN yang signifikan pada tahun 2023 di bandingkan pada tahun 2022 ini dikarenakan ada perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 113. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI SURABAYA		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	85.75	90.35	105.36	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	90.86		99.44	Akan Tercapai	▲

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024, perubahan cara perhitungan indikator dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka target **Renstra 2024 dinaikkan**.

Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**". Perlu dilakukan upaya yang intensif supaya target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

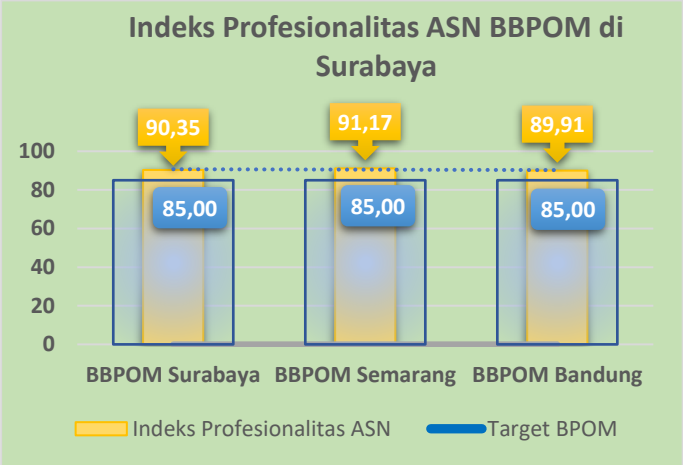

Gambar 68. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan BBPOM di Surabaya, sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Bandung.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh Dimensi Kualifikasi (pendidikan) pegawai yang disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki dengan bobot 25%, Dimensi Kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%, Dimensi Kompetensi yang dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan bobot sebesar 40%, dan Dimensi Disiplin yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 tahun. Hasil yang diperoleh pada tahun 2023 adalah 21,24 nilai kualifikasi; 39,14 nilai kompetensi; 25 nilai kinerja; dan 4,97 nilai disiplin. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP setiap triwulan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi teknis sebanyak 20 JP, setiap bulan di buat rekap capaian JP pengembangan kompetensi untuk mengingatkan masing-masing pegawai yang capaian JP kompetensi teknisnya belum tercapai, agar berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pengembangan kompetensi teknis (pelatihan teknis, manajerial, bimbingan teknis dan workshop) baik yang diselenggarakan oleh PPSDM melalui ideas atau pengembangan kompetensi mandiri, sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran IP ASN 2023 masih terdapat pegawai dengan nilai dibawah rata-rata, hal ini dikarenakan masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional. Upaya yang telah dilakukan adalah bersurat ke PPSDM agar pegawai tersebut didaftarkan/diikutkan diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural dan diklat struktural untuk pejabat fungsional.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk meningkatkan capaian nilai Indeks Profesional ASN 2024, akan di lakukan beberapa upaya perbaikan yaitu melalui :

a) Dimensi kualifikasi (pendidikan), dengan melakukan penyesuaian ijazah yang lebih tinggi dari 2 (dua) PNS Tugas Belajar yang akan lulus di bulan September 2024;
b) Dimensi kinerja, dengan secara rutin dilakukan dialog kinerja antara ketua tim dan anggota tim untuk mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja;
c) Dimensi kompetensi, dengan berkomunikasi/bersurat ke PPSDM agar pejabat struktural yang belum diklat kepemimpinan dan pejabat fungsional yang belum diklat fungsional dapat segera diikutkan diklat untuk mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
d) Dimensi disiplin, dengan melakukan sosialisasi peraturan disiplin saat apel manis dan memberlakukan *reward and punishment* melalui *Employee Of The Month*, Penghargaan Pegawai Berprestasi, dan penayangan video PINSIL.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	B	Diklat untuk Pegawai Teladan	1	kali/trip	1
					C	Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Perkuatan SDM Unggul	1	kali/trip	1
					G	Pelatihan Dasar dan Rekruitmen CPNS	2	kegiatan	4
					H	Peningkatan Kompetensi Pegawai	11	kali/trip	5
					P	Pembinaan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional	0	kegiatan	0

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai, Diklat untuk Pegawai Teladan/ Pemenang Lomba Inovasi/Arsiparis Teladan, Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural TA 2023, dan Pelatihan Dasar CPNS. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi,

capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 114. Efiensi Anggaran pada Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Profesionalitas ASN	73,756,000	73,741,913	99,98	105,67	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Terdapat pergeseran anggaran untuk pencapaian target 2023 antara lain pengurangan dana rekrutmen CPNS karena tahun ini tidak ada rekruitmen CPNS, hanya rekruitmen CP3K, serta penambahan anggaran perjalanan dinas CPNS diklat prajabatan. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN pada BBPOM di Surabaya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 115. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Belum disusun rencana kinerja PPPK TA 2022 (Kontrak kerja 3 tahun)	pada bulan november dilaksanakan workshop rencana pengembangan kompetensi	"1. Kepala Bagian Tata Usaha penempatan TMT 01 Oktober 2023 belum Diklat PIM 3;
Rekomendasi Perbaikan	Perlu dilakukan dialog kinerja antara kepala unit kerja, ketua tim kerja dengan anggota tim kerja	penyusunan rencana pengembangan kompetensi tahun 2024	Perlu di upayakan agar segera di penuhi target pengembangan kompetensi terutama yang bisa dilakukan mandiri tanpa melalui PPSDM
Rencana Aksi	Melakukan dialog kinerja antara kepala unit kerja, ketua tim kerja	melakukan monitoring GAP Kompetensi sebagai dasar	1. Telah bersurat ke PPSDM agar Kepala BAgian Tata Usaha

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
	dengan anggota tim kerja untuk menyusun draft rencana kinerja yang akan dimasukkan kebaplikasi SIMAKIN	penyusunan rencana pengembangan kompetensi	diikutkan Diklat PIM 3; 2. Berkoordinasi dengan Biro SDM agar Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dapat mengikuti diklat di Instansi Pembuna; 3. Menghimbau kepada PFM Ahli MAdya agar melakukan pelatihan Fungsional Fungsional melalui Aplikasi Ideas dikarenakan terdapat modul pelatihan fungsional di Aplikasi tsb; 4. Arsiparis Mahir telah bersurat ke ANRI mengenai jadwal Pelatihan Fungsional tetapi belum ada jawaban; 5. Menyarankan 4 pegawai yang target Diklat Teknis 20 JP agar melakukan Pelatihan Teknis di Ideas atau Mengikuti Pelatihan Internal yang diadakan di Balai.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum disusun rencana kinerja PPPK TA 2022 (Kontrak kerja 3 tahun)	rencana pengembangan kompetensi belum tersusun sesuai ketentuan	1. Kepala Bagian Tata Usaha penempatan TMT 01 Oktober 2023 belum Diklat PIM 3; 2. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama yang di angkat per 01 September 2023 belum pelatihan Fungsional; 3. PFM Ahli Madya perpindahan jabatan dari struktural belum diklat fungsional; 4. Arsiparis Mahir belum

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
			mengikuti Pelatihan Fungsional; 5. Terdapat 4 orang pegawai yang belum memenuhi Diklat Teknis 20 JP.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Rencana Kinerja PPPK TA 2022 telah disusun dan ditetapkan di aplikasi SIMAKIN, MPH juga sudah ditetapkan, saat ini sedang dalam proses penyusunan SKP Tahun 2023 dan periodik (TW IV) maksimal 10 November 2023	rencana pengembangan kompetensi telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPSDM	Untuk IP ASN Dimensi Penilaian Kompentensi semua pegawai sudah memenuhi Diklat Teknis 20 JP
Status	**Close**	**Close**	**Close**

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan Nilai NSS 109,09% dengan kategori SANGAT BAIK.

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**
   a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 116. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	87,4	99,32		CUKUP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk :

a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan;
b. menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; dan
c. monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan perubahan tools penilaian SKL, Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 302 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti dengan keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan Nomor 470 tahun 2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan

Dengan adanya perubahan tools tersebut menyebabkan beberapa Balai Regional di Badan POM kesulitan untuk mencapai terget yang telah ditentukan di awal tahun.

Pada 2023 telah dilakukan penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya dengan hasil nilai 87,4%. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 99,32% dengan kategori **Cukup.** Namun demikian, pada tahun 2023 indikator masuk ke dalam Daftar Indikator Kinerja yang dikecualikan dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

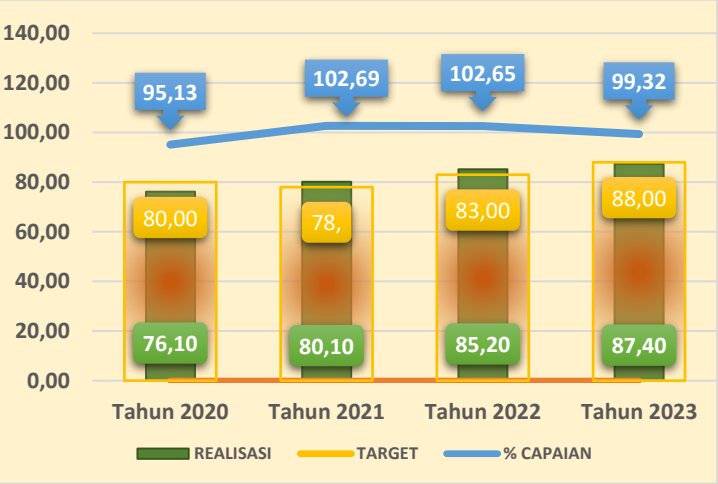

Gambar 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 hingga tahun 2023

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari tahun 2020 tahun 2022 sebagai hasil dari upaya BBPOM di Surabaya dengan melakukan monev rutin terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium; namun pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian karena adanya perubahan *tools* penilaian SKL pada triwulan IV tahun 2023 yang menambahkan standar baru terutama bagi balai Regional sehingga menyebabkan sulitnya pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan target renstra 2024

PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	93	87.4	93.98	Akan Tercapai	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	88.74		98.49	Akan Tercapai	▲

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 terhadap target Renstra awal tahun 2024 **belum mencapai** target, sehingga dilakukan reviu target 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reviu target RKT 2024 dan reviu target oleh Unit Pengampu di pusat, maka **target Renstra 2024 diturunkan**. Realisasi 2023 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori "**Akan Tercapai**", mengingat banyaknya perubahan di tahun 2024 seperti penunjukan BBPOM di Surabaya sebagai balai koordinator untuk regionalisasi, sehingga diperlukan upaya lebih sehingga target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

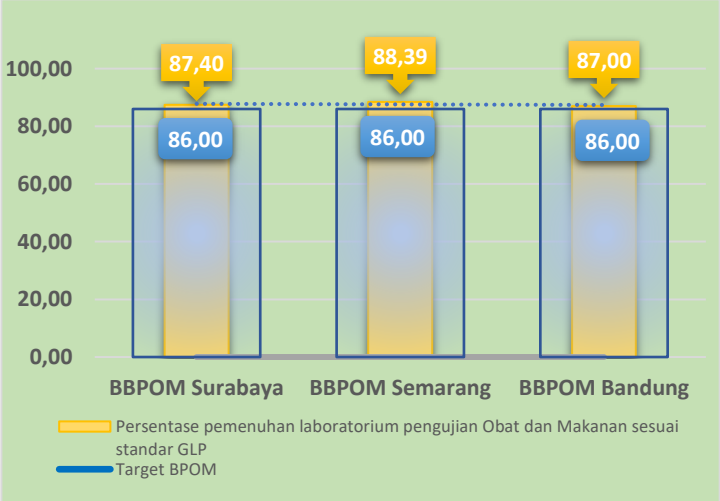

Gambar 70. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Lain yang Sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM Bandung. Dari ketiga balai yang diperbandingkan, ketiganya telah memenuhi target tahun 2023. Balai Surabaya dan Semarang sama sama sebagai Balai Regional yang terdampak cukup besar akibat perubahan tools monev SKL baru pada akhir triwulan IV.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada akhir tahun 2023 terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan penerapan konsep baru Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. BBPOM di Surabaya senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan, namun terdapat kendala diantaranya sebagai berikut.

Kendala pemenuhan Standar Ruang Lingkup Kimia :

1. Perubahan penugasan BBPOM di Surabaya sebagai Laboratorium Regional pada TW 3 Tahun 2023 berdasarkan SK Kepala Badan POM No. 193 Tahun 2023 menyebabkan adanya perubahan Standar Ruang Lingkup yang harus dipenuhi dan beberapa parameter yang sudah dipenuhi di triwulan - triwulan sebelumnya tidak lagi dihitung sebagai capaian karena adanya perubahan penugasan tersebut.
2. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan reagensia, baku pembanding, media dan suku cadang pendukung untuk pemenuhan ruang lingkup yang baru, karena tidak adanya perencanaan atas perubahan yang ada.
3. Kesulitan dari poksi inspeksi untuk memenuhi kebutuhan sampel pemenuhan ruang lingkup, karena beberapa sampel sulit ditemukan di pasaran.
4. Pengujian kelas terapi sitotoksik belum dapat dilaksanakan karena ruangan yang ada belum memenuhi persyaratan.
5. Sebagian besar RL yang harus dipenuhi adalah parameter yang diuji dengan menggunakan instrumen LC MS/MS. Sedangkan Instrumen yang ada di BBPOM di Surabaya rusak sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023.
6. Pelaksanaan pendampingan untuk parameter uji unggul (PK MIT & MCIT dalam kosmetik sediaan bilas) telah dilaksanakan, namun hasil verifikasi masih dalam tahap penyelesaian karena ada kendala selama pelaksanaan sehingga perlu mengulang proses pengujian).
7. Parameter uji unggul PK Ethyl Lauryl Arginate dalam kosmetik belum dapat dilakukan karena masih menyelesaikan verifikasi MA PK MIT & MCIT. Dijadwalkan akan dilaksanakan bulan Januari 2024.
8. Beberapa RL belum dapat dicapai karena kompetensinya belum dimiliki misalnya pengujian derivat nitrosamin dan fumonisin pada produk pangan, karena target capaian tahun 2023 sebanyak 7 parameter telah dijadwalkan untuk dapat dipenuhi melalui bimtek/ pendampingan. Sehingga sudah sangat padat untuk ditambahkan parameter yang lainnya.
9. Instrumen LC MS/MS yang ditransfer dari BBPOM di Bandung selesai diuji fungsi pada minggu ke-2 Oktober, sehingga pemenuhan kompetensi dan pengujian sampel untuk pemenuhan RL baru terpenuhi pada TW 4 karena dilaksanakan pada minggu ke-3 Oktober dan Minggu ke-2 November.
10. Keterbatasan waktu pada saat pemenuhan ruang lingkup melalui pendampingan/bimtek pengujian karena terdapat kendala pada saat analisis dengan instrumen, sehingga beberapa pengujian belum memberikan hasil yang optimal sampai dengan berakhirnya kegiatan.

11. Perlu dipertimbangkan kembali penugasan lain dari laboratorium regional karena pengujian parameter uji unggul cukup banyak dan rumit sedangkan personil yang tersedia juga belum mencukupi kebutuhan sehingga beban penguji menjadi berat.

Kendala pemenuhan kompetensi penguji kimia

1. Sebanyak 3 orang penguji kimia sudah purna tugas pada tahun 2023 dan 3 orang lagi akan purna tugas pada tahun 2024. Terdapat 7 orang PNS baru, namun kompetensi PNS baru tersebut belum sepadan dengan personel yang sudah dan akan purna tugas.
2. Terhambatnya pemenuhan kompetensi SDM untuk melakukan pengujian parameter unggul sebagai laboratorium regional karena adanya kerusakan instrumen.
3. Materi bimtek/pendampingan yang terlalu banyak dalam waktu yang terbatas sehingga pemenuhan kompetensi tidak optimal.
4. Adanya kesulitan untuk pemenuhan kompetensi dasar, karena terbatasnya sumber daya (materi maupun personil) yang tersedia untuk melakukan TOT ataupun kegiatan lain guna pemenuhan pengetahuan akan kompetensi dasar.
5. Bimtek dan pendampingan difokuskan pada pengujian dengan instrumen teknologi tinggi yang tidak diperhitungkan sebagai capaian kompetensi untuk PFM selain PFM Ahli Muda ataupun PFM Ahli Madya. Sedangkan PFM Ahli Pertama dan PFM Terampil juga masih banyak di pengujian dan perlu tetap dipenuhi kompetensinya

Kendala pemenuhan peralatan kimia :

1. Banyak peralatan / instrumen BBPOM di Surabaya yang sudah berusia lebih dari 10 tahun dan sudah tidak tersedianya suku cadang instrumen sehingga tidak dapat digunakan apabila terjadi kerusakan (misalnya KCKT, LC MS/MS, GC-MS dll), namun belum dapat diperbaharui karena belum mendapatkan persetujuan dari P3OMN dan anggaran yang belum tersedia.
2. Beberapa peralatan tidak relevan/ tidak diperlukan penambahan sesuai standar peralatan karena instrumen yang sudah ada sudah memenuhi kebutuhan, misalnya timbangan top loading, multishaker pada laboratorium pangan, oven pada laboratorium obat, detector FID instrumen GC untuk lab OT_SK, thermometer digital untuk pengujian kosmetik dan OTSK serta AAS untuk laboratorium pangan karena pengujian cemaran logam sudah banyak beralih menggunakan ICP-MS.
3. Beberapa peralatan masih membutuhkan penambahan karena sudah over kapasitas ataupun usia peralatan yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga spare part tidak tersedia namun belum dapat dipenuhi karena belum tersedianya

anggaran, misalnya GC MS/MS, nitrogen evaporator serta TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System).

4. Terdapat peralatan pada standar yang tidak relevan untuk diadakan karena frekuensi penggunaannya yang tidak optimal seperti FTIR, refractrometer, Detector ECD/NPD instrumen GC, oven vakum dan heating mantle.
5. Peralatan yang belum dapat dipenuhi karena masih belum tersedianya anggaran antara lain yaitu conductivitymeter, dehumidifier, UPS dan water purification.
6. Penggunaan instrumen dengan teknologi tinggi oleh laboratorium regional membutuhkan reagensia dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, kebutuhan akan suku cadang yang spesifik, biaya operasional, kalibrasi dan pemeliharaan/ perbaikan yang lebih besar. Oleh karena itu perlu didukung oleh kecukupan anggaran, yang tidak diantisipasi pada tahun 2023 karena adanya perubahan penugasan di TW 3

Kendala Pemenuhan SRL Mkrobiologi dan Biologi Molekuler :

1. Sudah ada personil yang ikut pelatihan namun tidak dapat melakukan implementasi untuk penambahan ruang lingkup karena media dan reagen belum tersedia.
2. Parameter uji yang tidak masuk dalam program prioritas sampling belum dapat dilakukan penambahan ruang lingkup.
3. Belum dapat memenuhi parameter uji potensi antibiotik oksitetrasiklin metode turbidimetri karena belum tersedianya spektrofotometer UV VIS.
4. Belum dapat melaksanakan penambahan SRL uji sitotoksik karena belum tersedia

   isolator dan staf belum mendapat pelatihan.

Kendala pemenuhan kompetensi Mikrobiologi dan Biologi Molekuler

1. Terdapat staf penguji yang pensiun sementara staf pengganti masih belum memiliki kompetensi yang memadai
2. Parameter uji Deteksi Vibrio cholerae/ Vibrio paraemolyticus untuk KLB sulit dipenuhi karena harus menunggu adanya kasus KLB yang memenuhi.
3. Parameter uji sterilitas obat sitotoksik belum dapat dipenuhi tahun ini karena belum adanya peralatan isolator dan kompetensi oleh seluruh personel mikrobiologi

Kendala pemenuhan kompetensi Mkrobiologi dan Biologi Molekuler

1. Peralatan isolator di laboratorium mikrobiologi belum tersedia.
2. Anaerobic jar yang ada jumlahnya masih jauh dari standar tetapi sudah berusia lebih dari 10 tahun, sebagian tidak dapat diperbaiki dan digunakan kembali.

3. Electrical pippetor banyak mengalami kerusakan pada TW 4 dan tidak dapat diperbaiki.
4. Lemari asam portable dan AW meter sudah dicoba diusulkan untuk pembelian TA 2024 tapi belum dapat teralisasi.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja dalam pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup

   Beberapa SRL sulit untuk dipenuhi untuk itu perlu diusulkan review standar pemenuhan ruang lingkup sehingga lebih relevan, terutama untuk komoditi obat karena tidak semua ruang lingkup dapat terpenuhi karena ketidaktersediaan sampel di peredaran. Selain itu upaya peningkatan pemenuhan SRL dilakukan dengan perencanaan pengujian SRL baru serta pemenuhan sarana prasarana seperti reagen, baku pembanding, alat serta kompetensi, untuk oemenuhan SRL secara bertahap
2. Pemenuhan Standar Kompetensi

   Dengan jumlah penguji yang berkurang karena purnabakti dan mutasi, cukup sulit untuk dapat melakukan pemenuhan standar kompetensi. Upaya memetakan kompetensi penguji dan kebutuhan kompetensi penguji untuk dilakukan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan bimtek yang sesuai, TOT, terutama untuk penguji baru yang masih memerlukan pemenuhan kompetensi.
3. Pemenuhan Standar Peralatan

   Peralatan bagi laboratorium regional merupana hal yang vital, pemenuhan standar peralatan melalui pengadaan tahun 2025 telah dilakukan dengan pengusulan kepada P3OMN dan Roren dengan mengutamakan alat yang diperlukan untuk pemenuhan pengujian sebagai laboratorium regional dengan memperhatikan pemenuhan standar GLP. Selain melalui pengadaan perawatan alat merupakan hal yang mutlak untuk mempertahankan performa alat, memastikan alat terkalibrasi sehingga hasil uji yang didapatkan terjamin validitasnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian	PDD.001.054	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A	Bimtek Pemeliharaan Dan Perbaikan	1	kali/trip	1
					B	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai /Balai Besar POM Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	0	kali/trip	0
					C	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia	1	kali/trip	1
					D	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	1	kali/trip	1
					E	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM pengujian	1	kali/trip	1
					F	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Kimia Pangan	1	kali/trip	1
					G	Bimbingan Teknis Pengujian	5	kegiatan	8
					I	Peningkatan Kompetensi Pegawai	3	paket	4
					J	Operasional	12	bulan	12
					K	Rekalibrasi Peralatan Laboratorium	1	kali/trip	1
					L	Pengadaan Suku Cadang dan Glassware	3	paket	6
					M	Kalibrasi Eksternal Peralatan Laboratorium	3	paket	4
		Pengujian	PDD.001.056	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	A	Forum Diseminasi hasil riset dan kajian Obat dan Makanan	1	kali/trip	1
					B	Konsultasi Sistem Mutu	1	kali/trip	1
					C	Surveilan Laboratorium Pengujian oleh KAN	1	kali/trip	3
					D	Pertemuan Teknis KAN	1	kali/trip	2
					E	Verifikasi Metode	5	paket	4
					F	Uji Profisiensi/Uji	5	paket	3
					G	Kolaborasi Metode Analisa	5	paket	4
					H	Reassesmen GLP	0	kegiatan	0
					I	Koordinasi dan	10	kali/trip	2
		Pengujian	RAB.001.051	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A	Pengadaan Alat Laboratorium	1	paket	1

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tahun 2023 antara lain dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja antara lain peningkatan kompetensi petugas pengujian melalui bimtek internal dan pendampingan, verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding, kolaborasi metoda analisa, reasesment GLP, pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, pengadaan unit alat laboratorium maupun transfer alat dari UPT lain, bimtek pengembangan pengujian, dan kalibrasi eksternal peralatan laboratorium.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 118. Efiesiensi atas Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 20223	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	3.499.758.000	3.496.899.476	99,92	99,32%	**75% (Tidak Efisien)**

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 20223	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Obat dan Makanan sesuai standar GLP					

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Belum Efisien** karena % realisasi anggaran lebih besar dari capaian indikator. Terdapat pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian target 2023 antara lain pengurangan biaya uji profisiensi untuk biaya reagen sampel kasus khusus/ prekursor/ed pendek/KLB, penambahan anggaran reagensia/media mikrobiologi kegiatan Uji Kolaborasi Metode Analisa, pergeseran anggarna konsumsi, penghapusan anggaran honor panitia pengadaan suku cadang untuk dialihkan ke anggaran belanja persediaan Reagen Pihak Ketiga/ ED Pendek/Uji Kolaborasi/Profisiensi/Regionalisasi, penambahan anggaran dari pusat untuk biaya transfer alat LCMS-MS, biaya transfer alat ion chromatografi, dan perbaikan alat LCMS-MS regional lab, serta penambahan kegiatan baru yaitu Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium Regional Surabaya. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi adanya kekurangan biaya pemeliharaan alat laboratorium sebagai dampak dari regionalisasi sehingga sampel yang diuji lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan mengakibatkan alat laboratorium mudah rusak. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuat usulan permintaan tambahan anggaran kepada Sestama dengan tembusan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN yang kemudian diberi ijin untuk revisi penambahan belanja operasional untuk pemeliharaan alat laboratorium.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 119. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obatdan Makanan sesuai standar GLP sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- terdapat perubahan tools dalam penilaian SKL menyebabkan penurunan capaian SKL pada mayoritas UPT - Hasil Uji Profisiensi NAPZA dengan judul "Penetapan Kadar Estazolam pada Sediaan Tablet" ada dalam kategori questionable	- capaian verifikasi metode analisis masih di bawah 50% - 1 KCKT di Lab OTSK masih menunggu kedatangan sparepart sehingga belum dapat diperbaiki	- Pelaksanaan pendampingan untuk parameter uji unggul (PK MIT & MCIT dalam kosmetik sediaan bilas) telah dilaksanakan, namun hasil verifikasi masih dalam tahap penyelesaian (karena ada kendala selama pelaksanaan - Parameter uji unggul PK Ethyl Lauryl Arginate dalam kosmetik belum dapat dilakukan karena masih menyelesaikan verifikasi MA PK MIT & MCIT - Beberapa RL belum dapat dicapai karena kompetensinya belum dimiliki misalnya pengujian derivat nitrosamin dan fumonisin pada produk pangan, karena target capaian tahun 2023 sebanyak 7 parameter telah dijadwalkan untuk dapat dipenuhi melalui bimtek/ pendampingan. Sehingga sudah sangat padat untuk ditambahkan parameter yang lainnya - Saat ini bimtek dan pendampingan banyak difokuskan pada pengujian dengan instrumen teknologi tinggi yang tidak diperhitungkan sebagai capaian kompetensi untuk PFM selain PFM Ahli Muda ataupun PFM Ahli Madya. Sedangkan PFM Ahli Pertama dan PFM Terampil juga masih banyak di pengujian dan perlu tetap dipenuhi kompetensinya - Peralatan yang belum dapat dipenuhi karena masih belum tersedianya anggaran antara lain yaitu conductivitymeter, dehumidifier, UPS dan water purification - Penggunaan instrumen dengan

Keterangan	Oktober	November	December
			teknologi tinggi oleh laboratorium regional membutuhkan reagensia dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, kebutuhan akan suku cadang yang spesifik, biaya operasional, kalibrasi dan pemeliharaan/ perbaikan yang lebih besar. Oleh karena itu perlu didukung oleh kecukupan anggaran, yang tidak diantisipasi pada tahun 2023 karena adanya perubahan penugasan di TW 3 - Terdapat beberapa parameter uji mikrobiologi yang belum dapat dipenuhi karena belum adanya instrumen dan kompetensi SDM - Electrical pippetor banyak mengalami kerusakan pada TW 4 dan tidak dapat diperbaiki - Belum dapat memenuhi parameter uji potensi antibiotik oksitetrasiklin metode turbidimetri karena belum tersedianya spektrofotometer UV VIS.
Rekomendasi Perbaikan	- mengusulkan penurunan target atau kebijakan penilaian SKL pada tahun 2023 dan 2024 (review renstra) - melakukan pengujian beberapa kali untuk memastikan hasil ketika mengikuti uji profisiensi	- penguji segera melakukan dan melaporkan verifikasi metode analisis - menghubungi pihak penyedia untuk melakukan perbaikan KCKT	- Melakukan pengujian dan verifikasi ulang untuk parameter uji unggul - Melakukan percepatan pemenuhan gap kompetensi - Merencanakan pengadaan reagensia, suku cadang, kalibrasi, biaya operasional sesuai dengan kebutuhan pengujian unggul - Memperbaiki instrumen yang rusak dan/atau mengadakan instrumen sesuai dengan kebutuhan pengujian

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Keterangan	Oktober	November	December
Rencana Aksi	- Menyampaikan hal tersebut pada P3OMN pada forum sosialisasi percepatan pemenuhan SKL dan pada Monev Regionalisasi Laboratorium TW 3 - Melakukan investigasi terhadap hasil dan proses pengujian pada Uji Profisiensi tersebut	- mengingatkan para penguji melalui tim pengelola uji dan metode analisis masing-masing laboratorium untuk mengerjakan dan melaporkan hasil verifikasi metode analisis - melakukan follow up kepada penyedia untuk proses penawaran sparepart sehingga dapat dilakukan pembelian	- Akan dilakukan pengujian dan verifikasi ulang untuk parameter uji unggul PK MIT & MCIT dalam kosmetik sediaan bilas, PK Ethyl Lauryl Arginate dalam kosmetik, pengujian derivat nitrosamin dan fumonisin pada produk pangan - Melakukan percepatan pemenuhan gap kompetensi dengan kepenyeliaan, diseminasi, TOT secara lebih intens, menyelipkan materi tentang pengujian dasar pada saat bimtek, memanfaatkan IDEAS dengan lebih optimal - Mencoba mengusulkan kembali peralatan yang masih memiliki gap dengan standar peralatan pada TA 2025, terutama peralatan laboratorium yang sudah over kapasitas - Mengusulkan peningkatan anggaran untuk pemenuhan reagensia, suku cadang yang spesifik, biaya operasional, biaya kalibrasi dan biaya pemeliharaan/ perbaikan instrumen pada Tahun anggaran berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- terjadi penurunan penilaian SKL, sehingga diperkirakan tidak dapat mencapai target tahun 2023 maupun 2024 - masih belum ditemukan penyebab hasil uji profisiensi ada pada kategori questionable	- masih banyak verifikasi metode analisis yang belum dilakukan atau dilaporkan - 1 KCKT di Lab OTSK masih belum dapat digunakan	- Beberapa pengujian unggul belum dilakukan verifikasi metode dan dilakukan pengujian - Adanya gap kompetensi PFM Ahli Pertama dan Terampil, terutama kompetensi pengujian dasar - Pengujian unggul belum dapat dilakukan karena belum adanya instrumen dan kompetensi SDM - Terdapat beberapa instrumen yang belum dipenuhi dan rusak serta tidak dapat diperbaiki - Kecukupan anggaran yang tidak diantisipasi pada tahun 2023 karena adanya perubahan penugasan di TW 3

Keterangan	Oktober	November	December
Kondisi Setelah Rencana Aksi	- Usulan telah disampaikan pada forum monev SKL 2023 dan hasil capaian SKL pada tahun 2023 merupakan salah satu yang penilaian yang dikecualikan - Telah dilakukan investigasi terhadap hasil dan proses pengujian pada Uji Profisiensi tersebut	- Terdapat peningkatan verifikasi metode analisis yang sudah dilaporkan - KCKT dalam proses perbaikan	- Telah dilakukan pengujian dan verifikasi ulang untuk parameter uji unggul PK MIT & MCIT dalam kosmetik sediaan bilas, PK Ethyl Lauryl Arginate dalam kosmetik, pengujian derivat nitrosamin dan fumonisin pada produk pangan - Percepatan pemenuhan gap kompetensi dengan kepenyeliaan, diseminasi, TOT secara lebih intens, menyelipkan materi tentang pengujian dasar pada saat bimtek, memanfaatkan IDEAS dengan lebih optimal - Pengusulan kembali peralatan yang masih memiliki gap dengan standar peralatan pada TA 2025, terutama peralatan laboratorium yang sudah over kapasitas - Telah diusulkan peningkatan anggaran untuk pemenuhan reagensia, suku cadang yang spesifik, biaya operasional, biaya kalibrasi dan biaya pemeliharaan/ perbaikan instrumen pada RKAKL
Status	**Closed**	**Close**	**Close**

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 120. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75	3	109,09		**Sangat Baik**

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC

   Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracuanan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email*, *sharing folder*, *dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 109,09%, sudah **mencapai target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

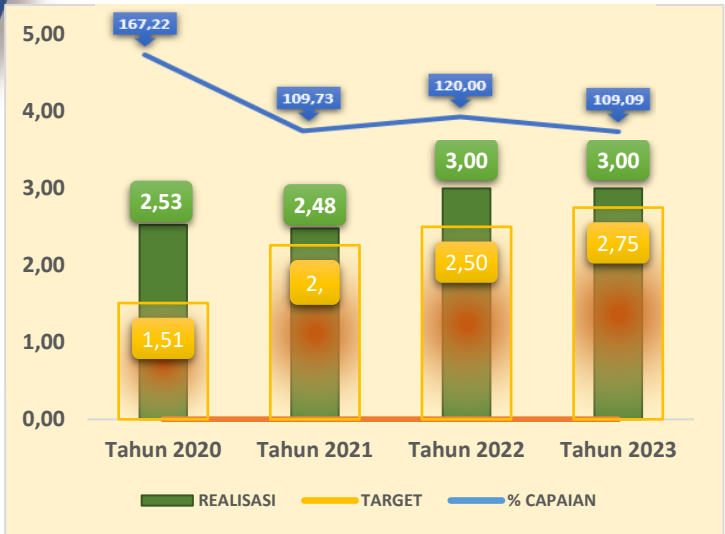

Gambar 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2020 hingga tahun 2023

Realisasi dan capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena nilai indeks yang dicapai yaitu 3 merupakan nilai indeks optimal tertinggi yang dapat dicapai, sedangkan target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Walaupun demikian realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Surabaya masih dapat tercapai dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Diperlukan upaya untuk dapat mempertahankan capaian agar target pada tahun 2024 tetap tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 121. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2023 dengan target renstra tahun 2024

INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI SURABAYA YANG OPTIMAL		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	3	3	100.00	Tercapai / Melampaui	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	3		100.00	Tercapai / Melampaui	▲

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2023 **sudah mencapai** target Renstra Tahun 2024 baik pada target Renstra Awal maupun setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Realisasi nilai 3 merupakan nilai maksimal, sehingga tidak perlu dilakukan reviu untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

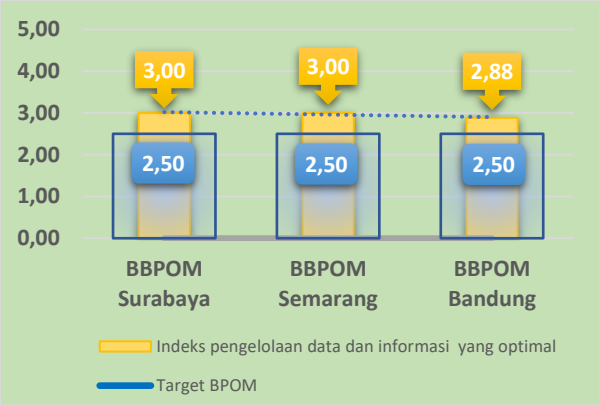

Gambar 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Surabaya dengan Balai Lain yang Sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Dari ketiga balai yang diperbandingkan, semua balai sudah melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi indikator tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 122. Realisasi indikator tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	3	3

Dari semua komponen diketahui bahwa telah mencapai nilai maksimal, yaitu 3 (tiga). Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan monev *input* SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi *Apel Online* dengan halaman *login email* pom.go.id, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email* pom.go.id dengan permintaan untuk *reply*.
- Meningkatkan viewer berita aktual dari internal Balai dengan menautkan absen apel online dengan berita aktual terbaru yang telah diupload tim media sosial & berita actual.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan tata cara perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi, mulai bulan April SIPT Pengujian mulai diperhitungkan dalam penilaian. Sepanjang tahun 2023 ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SIPT, namun target masih bisa tercapai. Perlu tetap dilakukan monev secara rutin setiap bulan untuk menjaga agar target tetap tercapai.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang	Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C	Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	bulan	12
		Tata Usaha	CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14	Unit	14

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapain target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pemeliharaan Peralatan Kantor. Pada tahun 2023 telah diadakan pengadaan Laptop, PC dan Printer dengan total sebanyak 14 unit. Serta dilakukan pengadaan Access Point serta Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan Internet. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan target indikator dapat tercapai.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 123. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN AWAL	TARGET ANGGARAN REVISI	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	514.075.000	600.531.000	600.086.977	99,93	109,09	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal. Terdapat revisi penambahan anggaran untuk pencapaian indikator ini dari Rp514.075.000,- menjadi Rp600.531.000,-. Penambahan ini terkait pemeliharaan sarana prasarana dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebaga upaya dukungan pencapaian target indikator hingga berhasil.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan diperoleh informasi bahwa pencapain target pemanfaatan SIPT terutama pada SIPT Pengujian masih belum maksimal karena masih terdapat kendala pada aplikasi SIPT, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan diskusi secara intensif baik melalui personal maupun menggunakan aplikasi pengaduan itsm.pom.go.id supaya segala permasalahan SIPT dapat teratasi dan target indikator indeks pengelolaan data dan informasi dapat tercapai..

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 124. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala/ Permasalahan	Indeks Oktober stabil di angka 3 masih terdapat kendala pada infrastruktur jaringan di Gedung Laboratorium	Indeks November stabil di angka 3	Indeks Desember stabil di angka 3
Rekomendasi Perbaikan	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks PDI terutama pada Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT Menambah Access Point pada Gedung Laboratorium, mempertimbangkan penggantian ISP	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks PDI terutama pada Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks PDI terutama pada Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT
Rencana Aksi/Tindak Lanjut	penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji Pengadaan Access Point	penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji Pemasangan Access Point	penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji Pemasangan Access Point
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	%Sarana : 95.41 %Sampling : 113,22 %Pengujian : 77,82	%Sarana : 91.27 %Sampling : 113,64 %Pengujian : 79,14	%Sarana : 90,88 %Sampling : 110,68 %Pengujian : 78,28
Kondisi Setelah Rencana Aksi	%Sarana : 91.27 %Sampling : 113,64 %Pengujian : 79,14 Telah dilaksanakan pengadaan Access Point	%Sarana : 90,88 %Sampling : 110,68 %Pengujian : 78,28 Telah dilaksanakan pemasangan Access Point	%Sarana : 104,51 %Sampling : 104,09 %Pengujian : 99,03
Status	**Close**	**Close**	**Close**

SASARAN 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mengelola Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel dengan Nilai NSS 94,74% dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi.

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 125. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95.2	90.24	94.79		Cukup

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian. dan analisis atas Kinerja Anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2023 adalah 90,24, diperoleh dari nilai IKPA 95,91 dan nilai EKA 86,46. Capaian nilai kinerja anggaran

BBPOM di Surabaya tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 95,2% dengan kkategori **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

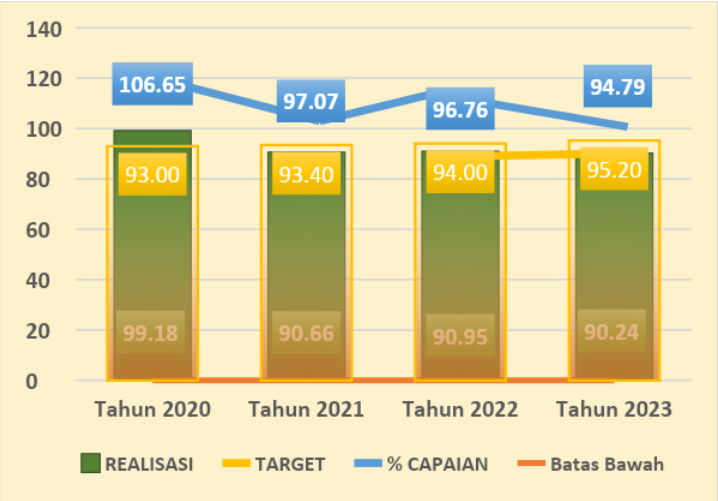

Gambar 73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 hingga tahun 2023

Berdasarkan grafik disamping, diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan capaian nilai kinerja anggaran dari tahun 2021, 2022 dan 2023 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi namun belum dapat mencapai target tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi lagi dan target belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh penurunan Nilai IKPA pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran realtif tinggi hingga 99,83%, akibatnya nilai efisiensi sangat kecil, sehingga menurunkan Nilai Kinerja Anggaran.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024

Tabel 126. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan target renstra 2024

NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI SURABAYA		REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI	
TARGET 2024 (Renstra Awal)	96.4	90.24	93.61	**Akan Tercapai**	▲
TARGET 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	90.31		99.92	**Akan Tercapai**	▲

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, baik target pada Renstra awal penyusunan maupun target setelah dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Rorenkeu) bersama Unit Pengampu terkait. Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 terhadap Target 2024 pada Renstra Awal dan target renstra setelah direviu masuk pada pada kategori **Akan Tercapai**. Telah diusulkan reviu target untuk diturunkan di tahun 2024, karena pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi maka nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Dari hasil perhitungan proyeksi, diperkirakan target tahun 2024 sesuai Rentra awal tidak akan bisa tercapai bila masih ada instruksi target penyerapan anggaran 99%, sehingga

setelah dilakukan reviu oleh Rorenkeu dan Unit Pengampu, terdapat penyesuaian target tahun 2024 menjadi 90,31.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

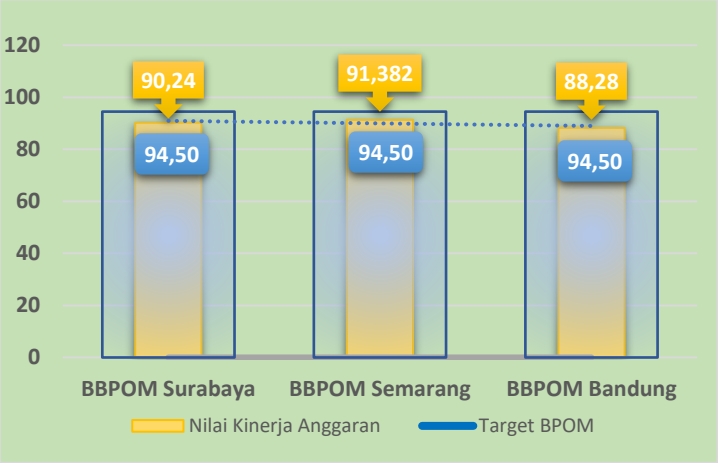

Gambar 74. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Realisasi dari ketiga balai yang diperbandingkan berada dibawah target nasional BPOM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023. Dari 8 (delapan) indikator pada penilaian IKPA, terdapat 4 (empat) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya, tidak mendapat nilai 100, yaitu Indikator Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana penjelasan berikut:

- Tidak tercapainya nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Realisasi Anggaran dikarenakan pada triwulan III terdapat deviasi sebesar 73,76% pada belanja barang (52) yang disebabkan rencana lebih rendah daripada penyerapan anggaran karena pelaksanaan kegiatan KIE yang pada mulanya dijadwalan pada triwulan I dan II baru bisa dilaksanakan secara intensif di triwulan III, namun tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III DIPA karena proses revisi DIPA melalui DJA dalam rangka penambahan alokasi anggaran untuk PPPK dan baru terbit pada tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan batas akhir pemutakhiran Halaman 3 DIPA pada tanggal 13 Oktober 2023.
- Tidak tercapaianya nilai 100 pada indikator Belanja Kontraktual disebabkan karena terdapat 4 (empat) kontrak tender dini (sebelum tahun anggaran) yang terlambat didaftarkan karena ada kendala pada pendaftaran akun SAKTI PPK.
- Tidak tercapainya nilai 100 pada indikator Pengelolaan UP dan TUP dikarenakan:

1. total *revolving* pengelolaan UP dalam sebulan tidak mencapai pagu UP Balai Besar POM di Surabaya, sehingga nilai Komponen pengelolaan GUP hanya sebesar 88,78.
2. Komponen setoran GUP bulan Januari s.d November 2023 mendapatkan nilai 100, namun pada bulan Desember 2023 mengalami penurunan menjadi 97,88 dikarenakan ada kendala pada proses pemutakhiran data POK sehingga data yang digunakan untuk pengajuan TUP akhir tahun tidak sesuai dengan nilai sisa anggaran yang ada di SPANINT.

Tabel 127. Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	135	063	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	73.49	97.60	93.70	100.00	96.67	100.00	100.00	95.91	100%	95.91
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.35	19.52	9.37	10.00	9.67	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.75		97.59					100.00			

Nilai EKA tahun 2023 adalah 86,46 dengan komponen nilai penyerapan 99,83; konsistensi 99,99; capaian RO 100; efisiensi 1,09; dan nilai efisiensi 52,71. Nilai efisiensi masih tergolong sangat rendah dibandingkan komponen penilaian yang lain. Hal ini karenakan realisasi anggaran berbanding terbalik dengan nilai efisiensi, pada saat realisasi anggaran tinggi maka nilai efisiensi akan rendah. Sedangkan realisasi anggaran anggaran menjadi indikator penilaian pada penilaian IKPA.

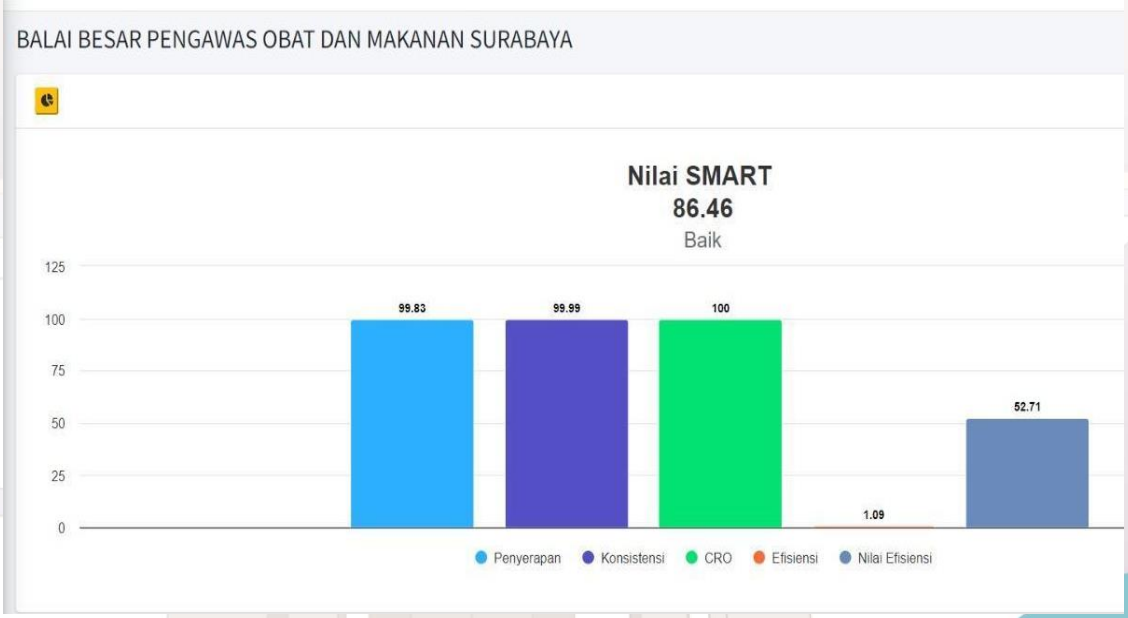

Gambar 75. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tahun 2023

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya perbaikan atas tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 yaitu:

1. Telah dilakukan usulan penurunan target Indikator Nilai Kinerja Anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100
3. dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Surabaya II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B	Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara	2	kali/trip	2
					G	Workshop Pengadaan Barang/Jasa Badan POM	1	kali/trip	1
					J	Reviu LK BMN Regional	1	kali/trip	1
					I	Pemusnahan	3	kali/trip	3
					L	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Mataram)	1	kali/trip	0

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain Pengelolaan Keuangan; Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Mataram); dan Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis SAI dan Laporan Keuangan di UPT POM.

Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua kendala. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Selain itu juga mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 128. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	86.289.000	86.283.131	99,99	94,79	**75% Tidak Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Tidak Efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Meski demikian, anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian indikator relatif kecil. Di tahun 2023 terjadi penurunan anggaran untuk pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dari Rp88.500.000,- menjadi Rp86.289.000,-. Terdapat pergeseran anggaran perjalanan dinas dan penambahan anggaran pemusnahan barang persediaan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, didapat informasi bahwa Nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat memperoleh nilai maksimal dikarenakan proses Revisi DIPA BPOM dalam rangka penambahan alokasi anggaran untuk gaji PPPK baru terbit tanggal 17 Oktober 2023, Sedangkan batas akhir pemutakhiran Halaman 3 DIPA pada tanggal 13 Oktober 2023, sehingga tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan yang ketat pada indikator-indikator yang lain agar nilai IKPA pada akhir tahun tidak semakin turun.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 129. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya sebelumnya

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kendala/ Permasalahan	Revisi DIPA Penambahan Alokasi Anggaran untuk gaji PPPK baru terbit pada tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan batas akhir pemutakhiran halaman III DIPA tanggal 13 Oktober 2023	Nilai IKPA pada indikator Deviasi halaman III DIPA mengalami penurunan karena tidak dapat dilakukan pemutakhiran halaman III DIPA	Pemutakhiran data POK pada awal Desember 2023 terhambat karena PJ Revisi masih baru dan kurang memahami tahapannya
Rekomendasi Perbaikan	Mengawal indikator penilaian IKPA yang lain agar tidak terjadi penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan	Mengawal indikator penilaian IKPA yang lain agar tidak terjadi penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan	Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB untuk mengatasi kendala pada proses Pemutakhiran data POK
Rencana Aksi	Mengawal indikator penilaian IKPA yang lain agar tidak terjadi penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan	Mengawal indikator penilaian IKPA yang lain agar tidak terjadi penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan	Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB untuk mengatasi kendala pada proses Pemutakhiran data POK
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Penurunan nilai IKPA pada indikator Halaman III DIPA	Penurunan nilai IKPA pada indikator Halaman III DIPA	Proses pemutakhiran data POK tidak berhasil

Keterangan	Oktober	Nopember	Desember
Kondisi Setelah Rencana Aksi	November: Indikator penilaian IKPA pada Deviasi halaman III DIPA mengalami penurunan	Desember: Indikator penilaian IKPA pada Deviasi halaman III DIPA mengalami penurunan	Pemutakhiran data POK dapat berjalan dengan lancar
Status	Close	Close	close
Timeline	**1 bulan**	**1 bulan**	**1 bulan**

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BBPOM di Surabaya oleh APIP dalam hal ini inspektorat II. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai upaya perbaikan seperti dibawah ini:

Tabel 130. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	**Perencanaan**					
	-	-	-	-	-	-
2.	**Pengukuran**					
a.	Menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi	pemanfaatan aplikasi simakin versi 1 yang telah mengukur IKI individu hingga pimpinan UPT setiap triwulan secara berjenjang dan berkelanjutan ehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi			Kinerja individu belum dapat terukur secara memadai. Tingkat kontribusi masing-masing personil masih belum dapat dituangkan dalam nilai.	Kinerja masing-masing individu dapat diukur dengan baik.
3.	**Pelaporan**					
a.	Belum adanya penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta inovasi terkait pelaporan kinerja	Laporan kinerja 2022 telah memuat penjelasan adanya perubahan anggaran pada poin efisiensi sumber daya disetiap IKU.			Penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja belum dituangkan	Laporan kinerja telah mencakup penjelasan mengenai perubahan anggaran dan mengaitkannya dengan capaian

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
		Pelaporan kinerja dapat diakses oleh semua pegawai melalu inovasi temanqu			dalam laporan kinerja	kinerja serta inovasi.
4.	Evaluasi internal					
a.	Progres rencana aksi belum tergambarkan pada Laporan Kinerja Interim	telah ditambahkan progres rencana aksi pada laporan kinerja interim tw 1 tahun 2023			Progres rencana aksi belum tergambarkan pada Laporan Kinerja Interim	Laporan Kinerja Interim telah menggambarkan progres rencana aksi.
b.	Belum ada penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim.	Telah ditambahkan penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim tw 1 tahun 2023			Belum ada penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim.	Laporan Kinerja Interim telah memuat penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan.
c.	Belum adanya inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah dikembangkan inovasi **Insight** yang memuat rekapitulasi kendala, rencana aksi, dan tindak lanjut			Belum adanya inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Evaluasi kinerja internal telah dituangkan dalam inovasi **Insight.**
5.	**Capaian Kinerja**					
a.	Memanfaatkan evaluasi internal Triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan	Terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dibuktikan dengan kenaikan NPS dan penambahan jumlah IKU yang mencapai target.			Belum semua potensi target kinerja tidak tercapai dapat diantisipasi secara maksimal.	Memanfaatkan laporan kinerja periode sebelumnya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif pada saat ada target yang berpotensi tidak tercapai.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
	alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*)					

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan *Continuous Improvement*, Balai Besar POM di Surabaya senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Pemanfaatan informasi tersebut meliputi:

1. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diketahui bahwa target IKU Obat yang memenuhi syarat tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh tingginya TMK penandaan terutama dari sampel kosmetik dan tingginya TMS uji terutama dari sampel Obat Tradisional. Sehingga pada akhir tahun 2022 telah diadakan pertemuan dengan memanggil para pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksinya TMK (tidak memenuhi ketentuan) untuk diberikan pembinaan secara intensif sehingga menunjang meningkatnya capaian IKU Obat yang memenuhi syarat di tahun 2023. Telah dikembangkan inovasi untuk pendampingan pelaku usaha dalam pendaftaran produk obat tradisional yaitu Sippotra dan pendampingan pendaftaran produk kosmetik yaitu Jatim Glowing. Dengan inovasi ini diharapkan dapat menurunkan angka TMK penandaan pada produk obat tradisional dan kosmetik. Selain itu juga dikembangkan inovasi Kembang Aster sebagai salah satu bentuk intervensi pada penanggungjawab sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan supaya lebih memahami semua peraturan yang berlaku dan mematuhinya. Inovasi ini bekerjasama dengan komunitas farmasi sebagai penyelenggara pelatihan dengan narasumber dari BBPOM di Surabaya.
2. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tidak tercapai, sehingga pada akhir tahun 2022 telah diadakan pertemuan dengan memanggil para pelaku usaha dengan

hasil pemeriksaan sarana produksinya TMK (tidak memenuhi ketentuan) untuk diberikan pembinaan secara intensif sehingga menunjang meningkatnya capaian IKU Makanan yang Memenuhi Syarat. Selain itu juga terus digalakkan inovasi Gempur Jatim dengan melakukan pendampingan pendaftaran produk pada pelaku usaha makanan, hal ini berkontribusi pada turunnya TMS penandaan produk makanan di tahun 2023.

3. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diketahui bahwa target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena masih terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak adalah dari sampel kosmetik yang TMK penandaan dan sampel Obat Tradisional dengan TMS uji. Sehingga pada akhir tahun 2022 telah diadakan pertemuan dengan memanggil para pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana produksinya TMK (tidak memenuhi ketentuan) untuk diberikan pembinaan secara intensif sehingga menunjang meningkatnya capaian IKU Obat yang aman dan bermutu di tahun 2023. Telah dikembangkan inovasi untuk pendampingan pelaku usaha dalam pendaftaran produk obat tradisional yaitu Sippotra dan pendampingan pendaftaran produk kosmetik yaitu Jatim Glowing. Dengan inovasi ini diharapkan dapat menurunkan angka TMK penandaan pada produk obat tradisional dan kosmetik. Selain itu juga dikembangkan inovasi Kembang Aster sebagai salah satu bentuk intervensi pada penanggungjawab sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan supaya lebih memahami semua peraturan yang berlaku dan mematuhinya. Inovasi ini bekerjasama dengan komunitas farmasi sebagai penyelenggara pelatihan dengan narasumber dari BBPOM di Surabaya.
4. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah tercapai bahkan melampaui 120%, sehingga pada tahun 2023 dilakukan pengusulan untuk menaikkan target tahun 2024 pada evaluasi Renstra paruh waktu tahun 2020-2022 serta reviu RKT 2024.
5. Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2023, target tahun 2023 tidak tercapai. Lokasi sampling adalah wilayah tinggi *stunting* dan rendah *stunting* sehingga sangat mempengaruhi capaian IKU, maka upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya adalah tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk garam, SNI 3751-2018 untuk tepung terigu dan SNI 7709:2019 untuk minyak goring sawit. Sudah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit (MGS) yang tidak memenuhi syarat. Pada tanggal 8

November 2023 dilakukan FGD Pangan Fortifikasi dengan mengundang 30 pelaku usaha pangan fortifikasi dan petugas BBPOM di Surabaya dengan Narasumber dari BPOM dan Akademisi Universitas Airlangga. Dengan adanya FGD ini diharapkan pelaku usaha pangan fortifikasi konsisten menerapkan CPPOB sehingga produk pangan fortifikasi memenuhi syarat dan IKU bisa tercapai.

6. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 telah tercapai dengan capaian 102,86%. Namun demikian, sejak akhir tahun 2022 hingga tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sehingga dikhawatirkan nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu akan menurun di tahun 2023 seiring dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Badan POM. Oleh karena itu dilakukan peningkatan upaya sosialisasi Obat dan Makanan melalui media cetak dan elektronik, terlihat dari peningkatan target dari 50 layanan di tahun 2022 menjadi 80 layanan di tahun 2023 (dengan realisasi 99 layanan). Diharapkan upaya ini dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada Badan POM khususnya Balai Besar POM di Surabaya dapat kembali meningkat dan target IKU tahun 2023 dapat tercapai. Selain itu jumlah KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2023 ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Surabaya dan Badan POM.
7. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa target indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2023 sudah mencapai target tahun 2024. Pada tahun 2023 Badan POM diterpa isu sirup obat yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Hal ini dikhawatirkan mempengaruhi nilai indeks indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sehingga akan menyebabkan nilai IKEPU menurun. Sehingga pada tahun 2023, inovasi Klinik POM dikembangkan lagi tidak hanya membuka stan konsultasi saat KIE di seluruh titik, namun juga melakukan jemput bola membuka stan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB bekerja sama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan demikian target IKEPU dapat tercapai di tahun 2023.
8. Target IKU Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 telah tercapai, namun target periode akhir renstra masih belum tercapai. Untuk dilakukan perbaikan branding Balai Besar POM di Surabayadengan mengembangkan inovasi Jatim Truly yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar daerah wisata. Kondisi saat ini target Renstra pada tahun 2024 telah tercapai bahkan terlampaui

namun BBPOM Surabaya tetap harus mencari dan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Surabaya.

9. Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 telah tercapai, namun belum mencapai target Renstra tahun 2024. Untuk itu BBPOM di Surabaya terus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll terus dikembangkan agar lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Melakukan peningkatan kompetensi dan perilaku pemberi layanan, serta mengupayakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Memperbanyak sarana pengaduan masyarakat melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Serta meningkatkan pemanfaatan *website* sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk.
10. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, untuk mengawal indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat tercapai, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
11. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, untuk mengawal indikator Persentase keputusanrekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat tercapai maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat dalam rangka percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB). Hingga kemudian meningkat menjadi 89,32% di akhir tahun 2023. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
12. Berdasarkan laporan kinerja 2022, diketahui bahwa target IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak tercapai. Penyumbang terbesar dari kecilnya realisasi dibanding dengan target adalah penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKI secara tepat waktu dan telah dilakukan upaya perbaikan secara

berkesinambungan. Telah dilakukan komunikasi secara intensif dengan pusat baik secara lisan maupun surat. Pencapaian IKU ini juga sudah menjadi temuan pemeriksaan BPK dan merupakan risiko organisasi yang pengendaliannya sudah dialihkan ke pusat. Namun demikian, realisasi di setiap triwulan di tahun 2023 menunjukkan target susah dicapai, sehingga pada tahun 2023 diusulkan penurunan target IKU tahun 2024.

13. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, dalam rangka mengawal IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan kegiatan bimtek kepada pelaku usaha dan desk CAPA khususnya kepada pelaku usaha pangan fortifikasi yang hasil pemeriksaan sarananya TMK atau produknya ditemukan TMS parameter fortifikasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan BBPOM di Surabaya pada program nasional percepatan penanganan stunting dimana Badan POM bertanggung jawab pada pengawasan sarana produsen dan produk pangan fortifikasi. Kedepannya kegiatan Bimtek pelaku usaha akan tetap dilaksanakan dan tidak terbatas pada sarana produsen pangan.
14. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, dilaksanakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk CAPA sebagai upaya peningkatan capaian indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Surabaya dilibatkan dalam penyampaian mata kuliah Cara Distribusi Obat yang Baik oleh Universitas Surabaya. Hal ini adalah respon positif terhadap program Kembang Aster (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penanggungjawab Obat dan makanan Terstruktur) yang mulai dirintis sejak tahun 2022 yang dimulai dengan memberikan Bimtek kepada Apoteker Penanggung Jawab PBF yang bertempat di Aula Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan dilibatkannya BBPOM di Surabaya dalam kurikulum CDOB oleh Universitas yang memiliki program Apoteker, maka diharapkan lulusan Apoteker dapat lebih siap bekerja di sektor distribusi obat sehingga pada akhirnya. kepatuhan pelaku usaha meningkat. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan diharapkan universitas lainnya akan mengikuti jejak Universitas Surabaya. sebagai upaya percepatan pencapaian target renstra 2024.
15. Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2022, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,9 melebihi target tahun 2023 dan target akhir periode renstra. Namun demikian, terdapat perubahan tools penilaian di tahun 2023 oleh menpan dan setelah dilakukan konversi nilai, maka nilai indeks pelayanan publik tahun 2022 menjadi 4,52, sehingga dilakukan revisi yaitu kenaikan target IPP di tahun 2023 dari 4,51 menjadi 4,6 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perbaikan aspek pelayanan publik dilakukan secara berkesinambungan termasuk

perbaikan dari evaluasi di tahun 2022. Realisasi tahun 2023 melampaui target awal tahun 2022 (sebelum dikonversi) dan melampaui target 2023.

Di tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan inovasi layanan publik yang sudah dimiliki sejak tahun sebelumnya seperti pengembangan kolaborasi, peningkatan penganggaran, penambahan sasaran pelayanan, peningkatan dan konsistensi petugas dalam memberikan pelayanan, kemudahan pelayanan, renovasi ruang layanan publik BBPOM di Surabaya dan lain-lain. Pengembangan inovasi ini tentunya perlu dillakukan berkesinambungan menyesuaikan situasi dan perkembangan terkini sehingga inovasi semakin memberikan dampak kepada masyarakat. Penyusunan janji kinerja melalui Standar Pelayanan Publik yang direviu setiap tahun menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui berbagai survei kepada pelanggan diperlukan secara kontinu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga layanan dapat lebih baik lagi.

16. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai namun masih banyak kendala yang harus dihadapi terutama sumber daya untuk pendampingan UMKM dalam pendaftaran produk, sehingga pada tahun 2023 dilakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten/kota untuk melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg. Hal ini adalah pembangan dari inovasi Klinik POM. Selain itu juga dilakukan advokasi ke beberapa universitas di Jawa Timur agar bersedia melakukan magang di BBPOM di Surabaya, khusus untuk membantu UMKM dalam melakukan proses pendaftaran produk.
17. Mempertimbangkan capaian IKU Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 pada tahun 2023 dilakukan antara lain yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan penambahan jumlah peserta tiap titik dari 250 orang per titik menjadi 500 orang per titik. Penambahan jumlah peserta ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.Tingkat efektifitas KIE tahun 2023 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkan pemahaman, minat, pilihan ragam edukasi, dan manfaat kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi, dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta menambah variasi penyampaian informasi pada saat pelaksanaan KIE khususnya yang dilakukan secara tatap muka/langsun seperti menambah alat peraga dan Senam Cek KLIK yang lebih intens.
18. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, untuk mengawal IKU Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman maka dilakukan

pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Memperluas cakupan penerapan keamanan pangan dengan memberdayakan pemerintah daerah. Kegiatan keamanan pangan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh BPOM di kabuapten/kota ini dapat di replikasi oleh pemerintah daerah agar penerapan keamanan pangan dapat terwujud semakin meluas.

19. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, untuk mengawal IKU Jumlah desa pangan aman, maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.
20. Untuk mengawal IKU Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan Rapid Test Kit dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan Rapid Test Kit secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya.
21. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 pada IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, IKU Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obatdan Makanan sesuai standar GLP, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium, sehingga semakin banyak alat laboratorium yang rusak dan harus segera diperbaiki agar pengujian dapat segera diselesaikan. Namun kondisi yang terjadi, anggaran pemeliharaan alat laboratorium sudah habis mengingat tingginya pemakaian. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya telah mengajukan permintaan anggaran secara resmi ke Sestama dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta P3OMN. Permintaan tersebut telah dipenuhi melalui ijin untuk melakukan revisi penambahan anggaran, sehingga alat laboratorium yang rusak dapat diperbaiki, dan pengujian berjalan lancar kembali.

22. Dalam rangka mengawal IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian perkara, sehingga untuk menindaklanjutinya maka dilaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Korwas Polda Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pemberkasan terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (tahap 2), Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur terkait permohonan data kendaraan bermotor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait verifikasi data NIK, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan Bank Indonesia terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, Provider Indosat dan Provider Tri terkait permintaan data pendaftar.
23. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sudah tercapai, begitu pula dengan target tahun 2023 dan 2024 sudah terlampaui. Sehingga pada tahun 2023 diusulkan perubahan target tahun 2024 agar dapat dinaikkan.
24. Dalam rangka mengawal IKU Nilai AKIP, berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat 4 indikator yang mempunyai capaian diatas 120% hingga triwulan 2, sehingga ditindaklanjuti dengan membuat usulan perubahan target bulanan terhadap 4 indikator tersebut dari bulan Juli hingga Desember 2023. Kemudian dilakukan perubahan RAPK tahun 2023 pada aplikasi *e-planning* setelah usulan disetujui oleh Biro perencanaan dan keuangan.
25. Sebagai upaya pengawalaan pada IKU Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pemantauan pengembangan kompetensi secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat.
26. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan pada IKU Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, diperoleh informasi bahwa pencapain target pemanfaatan SIPT terutama pada SIPT Pengujian masih belum maksimal karena masih terdapat kendala pada aplikasi SIPT, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan diskusi secara intensif baik melalui personal maupun menggunakan aplikasi pengaduan itsm.pom.go.id supaya segala permasalahan SIPT dapat teratasi dan target indikator indeks pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.
27. Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, didapat informasi bahwa Nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat memperoleh nilai maksimal dikarenakan proses Revisi DIPA BPOM dalam rangka penambahan alokasi anggaran untuk gaji PPPK baru terbit tanggal 17 Oktober 2023, Sedangkan

batas akhir pemutakhiran Halaman 3 DIPA pada tanggal 13 Oktober 2023, sehingga tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan yang ketat pada indikator-indikator yang lain agar nilai IKPA pada akhir tahun tidak semakin turun.

3.4 Realisasi Anggaran

a. Realisai anggaran tahun 2023

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432784/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp61.048.715.000,- (enam puluh satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Pergeseran atau perubahan pagu anggaran yang terjadi pada tahun 2023 terdiri atas:

1. *Selfblocking* dalam rangka *Automatic Adjustment* sebesar Rp11.288.914.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
2. Pada tanggal 12 Juli 2023 telah dilakukan pengajuan revisi pemotongan belanja pegawai sehingga total anggaran menjadi Rp58.638.001.000,- (lima puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seribu rupiah).
3. Pada tanggal 4 Agustus 2023 dilakukan pengajuan revisi penambahan anggaran untuk kebutuhan operasionalisasi regionalisasi laboratorium sebesar dan pergeseran anggaran antar Rincian Output untuk biaya renovasi ruangan pelayanan publik dalam rangka penilaian Unit Pelayanan Publik oleh Menpan sehingga total anggaran menjadi Rp Rp59.077.061.000,- (lima puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah).
4. Pada tanggal 14 September 2023 dilakukan pengajuan revisi anggaran belanja pegawai untuk gaji PPPK sehingga total anggaran menjadi Rp60.468.306.000,- (enam puluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
5. Pada tanggal 11 Desember 2023 dilakukan pengajuan revisi penambahan anggaran belanja barang dalam rangka perbaikan alat laboratorium berupa ICP-MS sebesar Rp199.800.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi Rp60.668.106.000,- (enam puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah)

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

Dari total pagu anggaran sebesar Rp60.668.106.000,- (enam puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp60.565.942.725,- (enam puluh milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan persen realisasi sebesar 99,83%.

b. Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi kinerja pada Balai Besar POM di Surabaya tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 131. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92.54	100.59	600,538,734	600,473,754	99.99
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	90.62	107.88	287,168,784	287,118,234	99.98
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	94.81	105.34	143,623,266	143,607,726	99.99
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	85	116.44	151,927,216	151,900,472	99.98
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	83	92.22	63,394,000	63,361,802	99.95
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	81	84.5	104.32	280,539,000	280,491,550	99.98
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.7	96.4	112.49	303,340,000	303,286,476	99.98

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78.55	80.14	102.02	475,459,000	475,170,660	99.94
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91.98	101.08	159,384,000	159,360,511	99.99
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	97.3	104.62	63,864,000	63,854,000	99.98
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	89.42	116.13	558,299,000	557,868,285	99.92
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	95.54	96.51	446,399,000	446,398,100	100.00
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	67.73	104.20	447,191,000	447,038,937	99.97
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	70.86	110.72	732,816,000	732,600,810	99.97
15	Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.98	108.26	159,384,000	159,360,511	99.99
16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar	65	70.43	108.35	315,156,000	315,110,750	99.99
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.38	94.39	101.08	18,677,701,000	18,676,455,753	99.99
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112	112	100.00	811,162,000	807,529,827	99.55
19	Jumlah desa pangan aman	37	37	100.00	1,154,484,000	1,149,061,677	99.53
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	24	24	100.00	575,545,000	567,217,405	98.55
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	744,162,000	744,081,480	99.99
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	439,096,000	439,018,706	99.98
23	Persentase keberhasilan	72	71.17	98.85	1,312,841,000	1,312,438,982	99.97

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
	penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						
24	Indeks RB UPT	89.7	94.23	105.05	27,471,110,000	27,404,118,123	99.76
25	Nilai AKIP UPT	85.6	85.2	99.53	33,188,000	33,184,763	99.99
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5	90.35	105.67	73,756,000	73,741,913	99.98
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	87.4	99.32	3,499,758,000	3,496,899,476	99.92
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75	3	109.09	600,531,000	600,086,977	99.93
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.2	90.24	94.79	86,289,000	86,283,131	99.99

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja yang terendah sebesar 92,22% yaitu pada indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan realisasi anggaran sebesar 99,95%. Sedangkan capaian kinerja tertinggi sebesar 116,44% pada indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 99,98%.

c. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 132. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	600.538.734	600.473.754	99,99
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	287.168.784	287.118.234	99,98
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	143.623.266	143.607.726	99,99
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	151.927.216	151.900.472	99,98
		5	Persentase pangan fortifikasi	63.394.000	63.361.802	99,95

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
			yang memenuhi syarat			
		Total		1.246.652.000	1.246.461.988	99,98
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	280.539.000	280.491.550	99,98
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	303.340.000	303.286.476	99,98
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	475.459.000	475.170.660	99,94
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	159.384.000	159.360.511	99,99
		Total		938.183.000	937.817.647	99,96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	63.864.000	63.854.000	99,98
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	558.299.000	557.868.285	99,92
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	446.399.000	446.398.100	100,00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	447.191.000	447.038.937	99,97

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	732.816.000	732.600.810	99,97
		15	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	159.384.000	159.360.511	99,99
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	315.156.000	315.110.750	99,99
		Total		2.723.109.000	2.722.231.393	99,97
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	18.677.701.000	18.676.455.753	99,99
		18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	811.162.000	807.529.827	99,55
		19	Jumlah desa pangan aman	1.154.484.000	1.149.061.677	99,53
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	575.545.000	567.217.405	98,55
		Total		21.218.892.000	21.200.264.662	99,91
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	744.162.000	744.081.480	99,99
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	439.096.000	439.018.706	99,98
		Total		1.183.258.000	1.183.100.186	99,99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.312.841.000	1.312.438.982	99,97
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya	27.471.110.000	27.404.118.123	99,76

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
	BBPOM di Surabaya yang optimal	25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	33.188.000	33.184.763	99,99
		Total		27.504.298.000	27.437.302.886	99,76
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	73.756.000	73.741.913	99,98
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.499.758.000	3.496.899.476	99,92
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	600.531.000	600.086.977	99,93
		Total		4.100.289.000	4.096.986.453	99,92
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	86.289.000	86.283.131	99,99

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran terendah pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,76%. Sedangkan realisasi anggaran tertinggi pasa sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dan sasaran strategis Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%.

d. Realisasi anggaran per Kegiatan

Tabel 133. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	B	c	d	e=(d/cx100)	F	G	h=(g/fx100)
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100	394.553.000	394.526.719	99,99
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	16754	19429	115,97	916.627.000	916.567.708	99,99

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	B	c	d	e=(d/cx100)	F	G	h=(g/fx100)
3.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	967.019.000	966.630.812	99,96
4.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	80	99	123,75	280.539.000	280.491.550	99,98
5.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	173.505.000	173.504.400	100
6.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	14	14	100	114.811.000	114.711.000	99,91
7.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100	200.000.000	199.956.200	99,98
8.	Layanan Umum	1	1	100	690.000	689.975	100
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100	3.263.526.000	3.260.668.076	99,91
10.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	9	10	111,11	918.288.000	917.912.263	99,96
11.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	112	100	811.162.000	807.529.827	99,55
12.	Desa Pangan Aman	37	37	100	1.154.484.000	1.149.061.677	99,53
13.	Pasar aman dari bahan berbahaya	24	24	100	575.545.000	567.217.405	98,55
14.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	64355	64937	100,9	19.153.160.000	19.151.626.413	99,99
15.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	98	98	100	315.156.000	315.110.750	99,99
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	942	997	105,84	878.192.000	878.037.412	99,98
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2451	2477	101,06	1.488.324.000	1.488.162.960	99,99
18.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	100	100	100	63.394.000	63.361.802	99,95
19.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	408	409	100,25	460.701.000	460.543.437	99,97
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	724	748	103,31	902.629.000	902.274.839	99,96
21.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	1	1	100	236.232.000	236.231.400	100

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	B	c	d	e=(d/cx100)	F	G	h=(g/fx100)
	Good Laboratory Practice						
22	Layanan Perkantoran	1	1	100	27.399.569.000	27.332.304.166	99,75

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa terdapat tiga kegiatan yang anggarannya terealisasi 100% yaitu pada rincian output Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (capaian realisasi t volume 100%), Layanan Umum (capaian realisasi volume 100%), dan Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* (capaian realisasi volume 100%). Sedangkan realisasi anggaran yang terendah sebesar 98,55% yaitu pada rincian output Pasar aman dari bahan berbahaya (capaian realisasi volume 100%).

e. Pengukuran efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianinput} IE = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 134. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TE	CAPAIAN
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0.00	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0.16	Efisien
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0.00	Efisien
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	0.24	Efisien
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.00	Efisien
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.00	Efisien
7	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.00	Efisien
8	Layanan Umum	0.00	Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.00	Efisien
10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	0.11	Efisien
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.00	Efisien
12	Desa Pangan Aman	0.00	Efisien
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	0.01	Efisien
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0.01	Efisien
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.00	Efisien
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0.06	Efisien
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	0.01	Efisien
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	0.00	Efisien
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	0.00	Efisien

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TE	CAPAIAN
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0.03	Efisien
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.00	Efisien
22	Layanan Perkantoran	0.00	Efisien

Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan **Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,24. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara

lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 135. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran	Capaian Indikator	IE	TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,98	104	1,05	0,05	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,98	104	1,04	0,04	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,96	105	1,05	0,05	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,97	107	1,07	0,07	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,91	100	1,00	0,00	Efisien

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran	Capaian Indikator	IE	TE	Kategori
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,99	120	1,20	0,20	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	99,97	99	0,99	-0,01	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	99,76	102	1,03	0,03	Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	99,98	106	1,06	0,06	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99,92	109	1,09	0,09	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	99,99	95	0,95	-0,05	Tidak Efisien

Diantara 11 sasaran strategis, masih ada 2 sasaran strategis yang tidak efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

i. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar Rp1.246.461.988,- atau 2,06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis pertama adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
ii. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp280.491.550,- atau 0,46% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui

media. Kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan hasil survei kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

iii. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp937.817.647,- atau 1,55% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registrasi pangan olahan, Desk CAPA Sertifikasi CDOB, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketiga adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan

iv. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp2.722.231.393,- atau 4,49% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gempur Jatim), pendampingan UMKM obat tradisional SiPPOTra, pendampingan UMKM kosmetik (Jatim *Glowing*), peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis keempat adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

v. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp21.200.264.662,- atau 35,00% dari

keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kelima adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

vi. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.183.100.186,- atau 1,95% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan, pemeliharaan sistem mutu pengujian, pengadaan alat laboratorium, dan sarana prasarana penunjang pengujian seperti suku cadang, baku pembanding, dll. Kegiatankegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan belum tercapainya semua target 2 indikator. Sehingga kedepannya perlu penambahan anggaran pengadaan alat laboratorium karena kendala terbesar saat pengujian adalah alat labratorium yang rusak sehingga terjadi antrian pemakaian alat laboratorium dan berdampak pengujian melebihi *timeline* uji. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis keenam adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

vii. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.312.438.982,- atau 2,17% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketujuh adalah **tidak efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.

viii. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal”, anggaran yang

direalisasikan sebesar Rp27.437.302.886,- atau 45,29% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

ix. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp73.741.913,- atau 0,12% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada tercapaianya target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesembilan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

x. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp4.096.986.453,- atau 6,76% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesepuluh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

xi. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp86.283.131,- atau 0.14% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Anggaran yang dipergunakan memang sangat kecil dan belum berdampak nyata

terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan belum tercapainya target indikator. Target indikator belum tercapai karena adanya komponen pengukuran yang sifatnya berlawanan, yaitu jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA tinggi, sedangkan penyerapan anggaran yg tinggi menyebabkan nilai efisiensi pada komponen EKA menjadi rendah. Selain itu juga disebakan karena rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III pada IKPA karena tidak dapat melaksanakan Pemutakhiran Hal III DIPA pada awal TW IV. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesebelas adalah **tidak efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran yang dikeluarkan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Rencana Strategis 2021-2024. BBPOM di Surabaya mempunyai 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan IV tahun 2023, telah dilakukan 22 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 9 sasaran strategis memperoleh capaian kategori **Sangat Baik** dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian kategori **Cukup**.
2. **Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis** adalah sebagai berikut :
    1) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 104.49% dengan kategori **Sangat Baik.**
    2) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 104.32% dengan kategori **Sangat Baik;**
    3) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 105.20% dengan kategori **Sangat Baik**;
    4) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 106.97% dengan kategori **Sangat Baik**;
    5) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 100.27% dengan kategori **Sangat Baik**;
    6) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 120,00% dengan kategori **Sangat Baik**;

7) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 98.84 % dengan kategori **Cukup**;
8) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal dengan NSS sebesar 102.29% dengan kategori **Sangat Baik**;
9) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan NSS sebesar 105,67% dengan kategori **Sangat Baik;**
10) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NSS sebesar 109.09 % dengan kategori **Sangat Baik;**
11) Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya belum berhasil mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel dengan NSS sebesar 94.79% dengan dengan kategori **Cukup**.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2023 antara 92,22% sampai dengan 120,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Prosentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat” disebabkan karena banyaknya pangan yang belum difortifikasi di wilayah stunting tempat pengambilan sampel, sehingga hasil Ujinya TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar** dan **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**, hal ini disebabkan semua sampel obat dan sampel makanan yang masuk ke laboratorium telah berhasil dilakukan pengujian sesuai standar.

Pada tahun 2023 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 hingga 0,24 (Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah keefisienan yang terjadi.

4.2 Saran

Dari 29 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target tahun 2023, terkait hal tersebut akan dilakukan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum mencapai target dikarenakan masih tingginya sampel pangan fortifikasi yang hasil ujinya TMS. Kegiatan sampling pangan fortifikasi telah dilaksanakan sesuai Pedoman sampling di tahun 2023 dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah *stunting* tertinggi kedua di Jawa Timur dan Kota Surabaya yang merupakan wilayah *stunting* terendah di Jawa Timur. Untuk itu BBPOM di Surabaya akan selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar sarana produksi konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.
2. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target dikarenakan pemenuhan penyelesaian SKI/SKE yang melebihi *timeline*. Terkait kendala tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah:
    1) Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.
    2) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
    3) Melakukan peningkatan kompetensi teknis secara mandiri melalui Bimtek.
    4) Melaksanakan *desk CAPA* untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan yang baik.

5) Evaluasi SKI/SKE dengan *service level arrangement (SLA)* maksimal 6 jam untuk SKI dan 8 jam untuk SKE, membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi dari petugas. Sedangkan dengan keterbatasan jumlah petugas sertifikasi, sangat sulit untuk mencapai kondisi ideal dimana petugas hanya melakukan evaluasi SKI/SKE tanpa mengerjakan tugas yang lain.
6) Meningkatkan komunikasi internal petugas Sertifikasi maupun dengan petugas pusat agar permasalahan SKI/SKE dapat segera terselesaikan.
7) Melaksanakan forum komunikasi dengan importir/eksportir dan lintas sektor terkait agar importir/eksportir memahami peraturan yang berlaku dan memperkecil kemungkinan kekurangan atau kesalahan dokumen yang diunggah sehingga mempercepat penyelesaian evaluasi SKI/SKE.
8) Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
9) Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi *timeline*.
10) Mengutamakan penyelesaian evaluasi SKI/SKE sebelum menyelesaikan tugas yang lain, sebagai contoh apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi tatap muka maupun secara daring, dilakukan setelah evaluasi SKI/SKE selesai

3. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum mencapai target diantaranya:
   1) dikarenakan pada saat pemanggilan saksi/tersangka tidak hadir sesuai tanggal yang ditentukan sehingga berpengaruh dalam penyelesaian pemberkasan,
   2) adanya tersangka yang melarikan diri
   3) adanya penundaan pelaksanaan tahap 2 ke Januari 2024 karena tersangka sakit,
   4) adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga tahap 2 tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023,
   5) Selama tahun 2023 telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 7 perkara karena tidak cukup alat bukti, antara lain perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara, perkara tahun 2020 sebanyak 3 perkara, perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara, perkara tahun 2022 sebanyak 1 perkara dan perkara tahun 2023 sebanyak 1 perkara.

   Terkait kendala-kendala tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah:
   1) Memantapkan koordinasi lintas sektor (Kepolisian Daerah/Resor di wilayah kerja BBPOM Surabaya, Kejaksaan Tinggi/Negeri di wilayah kerja BBPOM Surabaya, Kanwil DJBC Jatim/Bea Cukai Juanda, BNN, BIN Daerah Jatim,

Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota) dan membangun jejaring dengan Asperindo dan Organda

2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi PPNS secara kontinyu dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang semakin kompleks dan dinamis di era digital
3) Pemenuhan fasilitas/sarana pendukung kegiatan patroli siber, intelijen dan penyidikan
4) Membangun inovasi untuk memonitor progres tahapan penyidikan.

4. Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 85,2 (A) dibandingkan nilai tahun 2022. Meskipun nilai AKIP tersebut masih belum mencapai target, namun nilai AKIP BBPOM di Surabaya merupakan nilai tertinggi diantara seluruh UPT di lingkungan BPOM. Masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut hingga target akhir periode Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Upaya-upaya yang akan dilakukan:
   - Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, RHPK, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.
   - Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan;
   - Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif jika terjadi kesalahan/perubahan data;
   - Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan.
   - Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi baik dari hasil evaluasi SAKIP maupun hasil evaluasi internal.
   - Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
5. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum mencapai target dikarenakan terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan penerapan konsep baru Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. Upaya perbaikan untuk peningkatan

kinerja dalam pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat dilakukan dengan cara :

1) Pemenuhan Standar Ruang Lingkup

   Beberapa SRL sulit untuk dipenuhi untuk itu perlu diusulkan review standar pemenuhan ruang lingkup sehingga lebih relevan, terutama untuk komoditi obat karena tidak semua ruang lingkup dapat terpenuhi karena ketidaktersediaan sampel di peredaran. Selain itu upaya peningkatan pemenuhan SRL dilakukan dengan perencanaan pengujian SRL baru serta pemenuhan sarana prasarana seperti reagen, baku pembanding, alat serta kompetensi, untuk oemenuhan SRL secara bertahap

2) Pemenuhan Standar Kompetensi

   Dengan jumlah penguji yang berkurang karena purnabakti dan mutasi, cukup sulit untuk dapat melakukan pemenuhan standar kompetensi. Upaya memetakan kompetensi penguji dan kebutuhan kompetensi penguji untuk dilakukan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan bimtek yang sesuai, TOT, terutama untuk penguji baru yang masih memerlukan pemenuhan kompetensi.

3) Pemenuhan Standar Peralatan

   Peralatan bagi laboratorium regional merupana hal yang vital, pemenuhan standar peralatan melalui pengadaan tahun 2025 telah dilakukan dengan pengusulan kepada P3OMN dan Roren dengan mengutamakan alat yang diperlukan untuk pemenuhan pengujian sebagai laboratorium regional dengan memperhatikan pemenuhan standar GLP. Selain melalui pengadaan perawatan alat merupakan hal yang mutlak untuk mempertahankan performa alat, memastikan alat terkalibrasi sehingga hasil uji yang didapatkan terjamin validitasnya.

6. Nilai Kinerja Anggaran UPT belum mencapai target 2023 dikarenakan adanya indikator yang berlawanan pada penilaian EKA, dimana apabila capaian tinggi maka nilai efisiensi akan rendah. Selain itu juga terdapat beberapa indikator pada IKPA yang belum mendapat nilai optimal, yaitu pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP dan TUP. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 yaitu:

   1) Melakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100

2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Surabaya II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

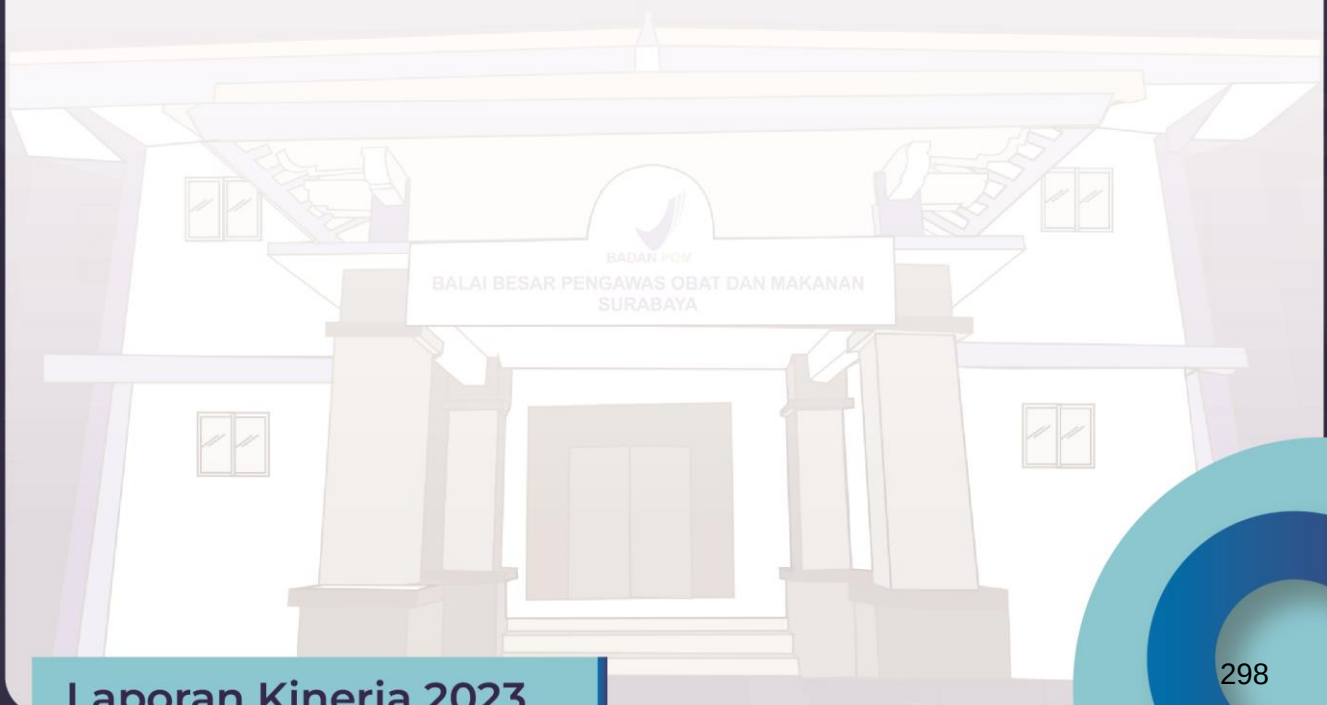

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran I

1. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,20 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Surabaya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.7
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.55
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.38

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89.7
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	85.6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.2

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
61,048,715,000.00

Surabaya,20 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	595.329.600, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	289.803.360, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	148.832.400, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	149.292.640, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63.394.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	280.539.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.7	223.620.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.55	209.320.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	64.653.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46.830.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283.620.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525.300.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452.771.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792.959.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	64.653.500, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	10.8	31.1	50.8	59.5	70.6	76.5	83.8	89.1	91.3	96	65	315.156.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	18.943.840.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.8	2.1	17.1	32.1	39.6	47.1	57.1	62.1	72.1	82.2	95.5	112	811.162.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	31.7	35	42.8	54.4	67.8	77.8	80	90	37	1.154.484.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	744.162.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	439.096.000, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	6.8	12.1	14.3	18.5	26.5	33.4	37.7	50.7	59.1	66.8	72	1.312.841.000, 00
23.	Indeks RB UPT												89.7	28.786.178.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												85.6	90.810.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	246.648.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2.835.300.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	514.075.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		46	56	61	63	66	67	69	71	72	74	95.2	88.500.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.8	1.7	13.3	41.1	52.9	59.5	72.9	72.9	85.4	97.9	100	24	575.545.000, 00
Total														61.048.715.000, 00

Surabaya, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Revisi RAPK Per 7 Agustus 2023

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	595.329.600, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	289.803.360, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	148.832.400, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	149.292.640, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63.394.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	280.539.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.7	223.620.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.55	209.320.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	64.653.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	46.830.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	283.620.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	525.300.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	452.771.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	792.959.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	64.653.500, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	10.8	31.1	50.8	59.5	70.6	76.5	83.8	89.1	91.3	96	65	315.156.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	93.38	18.943.840.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.8	2.1	17.1	32.1	39.6	47.1	64.7	67.5	80	86.67	100	112	811.162.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	31.7	35	42.8	65	78.83	84.99	87.21	93.32	37	1.154.484.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	744.162.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	439.096.000, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2	6.8	12.1	14.3	18.5	26.5	38.14	41.55	49.28	63.42	65.59	72	1.312.841.000, 00
23.	Indeks RB UPT												89.7	28.786.178.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												85.6	90.810.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	246.648.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88	2.835.300.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	514.075.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		46	56	61	63	66	67	69	71	72	74	95.2	88.500.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.8	1.7	13.3	41.1	52.9	59.5	72.9	72.9	85.4	97.9	100	24	575.545.000, 00
Total														61.048.715.000, 00

Surabaya, 07 Agustus 2023

Kepala Balai Besar POM di Surabaya

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
BADAN POM

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815, 5048833 | Fax. (031) 5015486
BADAN POM E-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.06.22.0174 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5. 12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2023.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

RUSTYAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.22.0174 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6.	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah	7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	kerja BBPOM di Surabaya	8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64
		15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,51
		16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		19.	Jumlah desa pangan aman	37
		20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	89,7
		25.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	95,2

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

RUSTYAWATI

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No	Program/Kegiatan	Output			Input (Anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	394.553.000	394.526.719	99,99
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	16.754	19.429	115,97	916.627.000	916.567.708	99,99
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	967.019.000	966.630.812	99,96
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	80	99	123,75	280.539.000	280.491.550	99,98
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	173.505.000	173.504.400	100,00
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	14	14	100,00	114.811.000	114.711.000	99,91
7	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	200.000.000	199.956.200	99,98
8	Layanan Umum	1	1	100,00	690.000	689.975	100,00
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	3.263.526.000	3.260.668.076	99,91
10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	9	10	111,11	918.288.000	917.912.263	99,96
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	112	100,00	811.162.000	807.529.827	99,55
12	Desa Pangan Aman	37	37	100,00	1.154.484.000	1.149.061.677	99,53
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	24	24	100,00	575.545.000	567.217.405	98,55
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	64.355	64.937	100,90	19.153.160.000	19.151.626.413	99,99
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	98	98	100,00	315.156.000	315.110.750	99,99
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	942	997	105,84	878.192.000	878.037.412	99,98
17	Sampel Obat. Obat Tradisional. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2.451	2.477	101,06	1.488.324.000	1.488.162.960	99,99
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	100	100	100,00	63.394.000	63.361.802	99,95

	oleh BB/BPOM						
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	408	409	100,25	460.701.000	460.543.437	99,97
20	Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	724	748	103,31	902.629.000	902.274.839	99,96
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	236.232.000	236.231.400	100,00
22	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	27.399.569.000	27.332.304.166	99,75

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100.00	99.99	1.00	0.00	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	115.97	99.99	1.16	0.16	100 %
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100.00	99.96	1.00	0.00	100 %
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	123.75	99.98	1.24	0.24	95 %
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100.00	100.00	1.00	0.00	100 %
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.00	99.91	1.00	0.00	100 %
7	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100.00	99.98	1.00	0.00	100 %
8	Layanan Umum	100.00	100.00	1.00	0.00	100 %
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.00	99.91	1.00	0.00	100 %
10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	111.11	99.96	1.11	0.11	100 %
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100.00	99.55	1.00	0.00	100 %
12	Desa Pangan Aman	100.00	99.53	1.00	0.00	100 %
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	100.00	98.55	1.01	0.01	100 %
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	100.90	99.99	1.01	0.01	100 %
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100.00	99.99	1.00	0.00	100 %
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	105.84	99.98	1.06	0.06	100 %
17	Sampel Obat. Obat Tradisional. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	101.06	99.99	1.01	0.01	100 %

18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	100.00	99.95	1.00	0.00	100 %
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	100.25	99.97	1.00	0.00	100 %
20	Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	103.31	99.96	1.03	0.03	100 %
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.00	100.00	1.00	0.00	100 %
22	Layanan Perkantoran	100.00	99.75	1.00	0.00	100 %

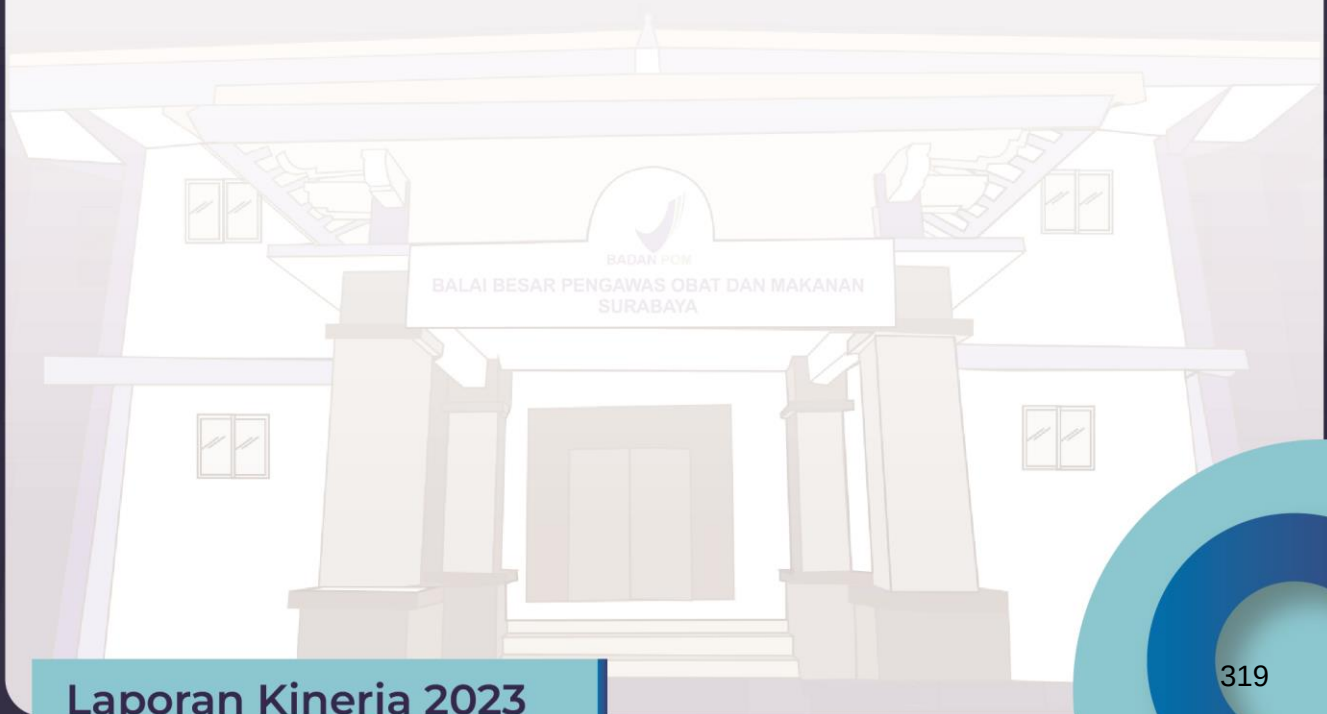

Lampiran II

KERTAS KERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s,d Desember												INDIKATOR RAPK (KUN		
					Jumlah sampling Desember	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai	RAPK s,d Desember (Jan-Des)		
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*				pembilang	Penyebut	capaian
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Obat	Random	Surabaya	561	565	0	0	0	8	565	565	556	9	9	0	565			
			Kabupaten Kediri	42	42	0	0	0	1	42	42	40	2	2	0	42			
			Kabupaten Jember	62	62	0	0	0	1	62	62	61	1	1	0	62			
			TOTAL	665	669	0	0	0	10	669	669	657	12	12	0	669			
		Targeted	Surabaya	136	146	0	0	0	0	146	146	145	1	1	0	146			
			Kabupaten Kediri	9	15	0	0	0	1	15	15	14	1	1	0	15			
			Kabupaten Jember	15	15	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	15			
			TOTAL	160	176	0	0	0	1	176	176	174	2	2	0	176			
		TOTAL RANDOM DAN		825	845	0	0	0	11	845	845	831	14	14	0	845			
2	Obat Tradisional	Random	Surabaya	367	370	0	0	0	11	370	370	274	96	96	0	370			
			Kabupaten Kediri	27	27	0	0	0	3	27	27	19	8	8	0	27			
			Kabupaten Jember	41	41	0	0	0	2	41	41	32	9	9	0	41			
			TOTAL	435	438	0	0	0	16	438	438	325	113	113	0	438			
		Targeted	Surabaya	158	161	0	0	0	1	161	161	144	17	17	0	161			
			Kabupaten Kediri	11	11	0	0	0	3	11	11	8	3	3	0	11			
			Kabupaten Jember	17	18	0	0	0	3	18	18	16	2	2	0	18			
			TOTAL	186	190	0	0	0	7	190	190	168	22	22	0	190			
		TOTAL RANDOM DAN		621	628	0	0	0	23	628	628	493	135	135	0	628			
3	Obat Kuasi	Random	Surabaya	24	24	0	0	0	0	24	24	24	0	0	0	24			
			Kabupaten Kediri	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2			
			Kabupaten Jember	3	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3			
			TOTAL	29	29	0	0	0	0	29	29	29	0	0	0	29			
		Targeted	Surabaya	11	12	0	0	0	1	12	12	11	1	1	0	12			
			Kabupaten Kediri	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1			
			Kabupaten Jember	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1			
			TOTAL	13	14	0	0	0	1	14	14	13	1	1	0	14			
		TOTAL RANDOM DAN		42	43	0	0	0	1	43	43	42	1	1	0	43			
4	Suplemen Kesehatan	Random	Surabaya	97	89	0	0	0	1	89	89	89	0	0	0	89			
			Kabupaten Kediri	8	8	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8			
			Kabupaten Jember	1	11	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	11			
			TOTAL	106	108	0	0	0	1	108	108	108	0	0	0	108			
		Targeted	Surabaya	42	50	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50			
			Kabupaten Kediri	3	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3			
			Kabupaten Jember	4	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5			
			TOTAL	49	58	0	0	0	0	58	58	58	0	0	0	58			
		TOTAL RANDOM DAN		155	166	0	0	0	1	166	166	166	0	0	0	166			
5	Kosmetik	Random	Surabaya	736	736	0	0	0	39	736	736	708	28	28	0	736			
			Kabupaten Kediri	54	54	0	0	0	6	54	54	49	5	5	0	54			
			Kabupaten Jember	80	80	0	0	0	10	80	80	70	10	10	0	80			
			TOTAL	870	870	0	0	0	55	870	870	827	43	43	0	870			
		Targeted	Surabaya	315	320	0	0	0	11	320	320	305	15	15	0	320			
			Kabupaten Kediri	23	23	0	0	0	3	23	23	20	3	3	0	23			
			Kabupaten Jember	35	35	0	0	0	4	35	35	30	5	5	0	35			
			TOTAL	373	378	0	0	0	18	378	378	355	23	23	0	378			
		TOTAL RANDOM DAN		1243	1248	0	0	0	73	1248	1248	1182	66	66	0	1248			
6	Rokok	Targeted	Surabaya	4	4	0	0	0	1	4	4	2	2	2	0	4			
			Kabupaten Kediri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			TOTAL	5	4	0	0	0	1	4	4	2	2	2	0	4			
	TOTAL	Random	Surabaya	1785	1784	0	0	0	59	1784	1784	1651	133	133	0	1784	1651	1784	92,54%
			Kabupaten Kediri	133	133	0	0	0	10	133	133	118	15	15	0	133	118	133	88,72%
			Kabupaten Jember	187	197	0	0	0	13	197	197	177	20	20	0	197	177	197	89,85%
			TOTAL	2105	2114	0	0	0	82	2114	2114	1946	168	168	0	2114	1946	2114	92,05%
		Targeted	Surabaya	666	693	0	0	0	14	693	693	657	36	36	0	693	657	693	94,81%
			Kabupaten Kediri	48	53	0	0	0	7	53	53	46	7	7	0	53	46	53	86,79%
			Kabupaten Jember	72	74	0	0	0	7	74	74	67	7	7	0	74	67	74	90,54%
			TOTAL	786	820	0	0	0	28	820	820	770	50	50	0	820	770	820	93,90%
	TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK		Surabaya	2451	2477	0	0	0	73	2477	2477	2308	169	169	0	2477			
			Kabupaten Kediri	181	186	0	0	0	17	186	186	164	22	22	0	186			
			Kabupaten Jember	259	271	0	0	0	20	271	271	244	27	27	0	271			
			TOTAL	2891	2934	0	0	0	110	2934	2934	2716	218	218	0	2934			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Surabaya	755	757	0	0	1	12	756	756	686	70	71	0	757	686	757	90,62%
			Kabupaten Kediri	60	60	0	0	0	0	60	60	56	4	4	0	60	56	60	93,33%
			Kabupaten Jember	89	94	0	0	0	7	94	94	83	11	11	0	94	83	94	88,30%
			TOTAL	904	911	0	0	1	19	910	910	825	85	86	0	911			
		Targeted	Surabaya	187	240				1	240	240	204	36	36	0	240	204	240	85,00%
			Kabupaten Kediri	17	17				0	17	17	16	1	1	0	17	16	17	94,12%
			Kabupaten Jember	25	25				2	25	25	21	4	4	0	25	21	25	84,00%
			TOTAL	229	282	0	0	0	3	282	282	241	41	41	0	282			
		TOTAL RANDOM DAN		1133	1193	0	0	1	22	1192	1192	1066	126	127	0	1193			
2	Fortifikasi	Targeted	Surabaya	100	100				0	100	100	83	17	17	0	100	83	100	83,00%
			Kabupaten Kediri	15	15				0	15	15	12	3	3	0	15	12	15	80,00%
			Kabupaten Jember	15	15				9	15	15	7	8	8	0	15	7	15	46,67%
			TOTAL	130	130	0	0	0	9	130	130	102	28	28	0	130			
	TOTAL PANGAN		Random	904	911	0	0	1	19	910	910	825	85	86	0	911			
			Targeted	359	412	0	0	0	12	412	412	343	69	69	0	412			
			TOTAL	1263	1323	0	0	1	31	1322	1322	1168	154	155	0	1323			

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU (84.50)

Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2023

Tabel 3. Realisasi Indeks dan Capaian Kesadaran Masyarakat Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
15	Jawa Timur	520	81.00	84.50	104.32%

-

3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (96.4)

Tabel 2. Capaian Indeks Balai Besar/Balai POM Tahun 2023

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Realisasi	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
20	Balai Besar POM di Surabaya	85.7	96.4	112.5%	17	596

4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (80,14)

Tabel 5. Realisasi Indeks dan Persentase Capaian Kepuasan Masyarakat Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
15	Jawa Timur	520	78.55	80.14	102.03%

5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM (91.98)

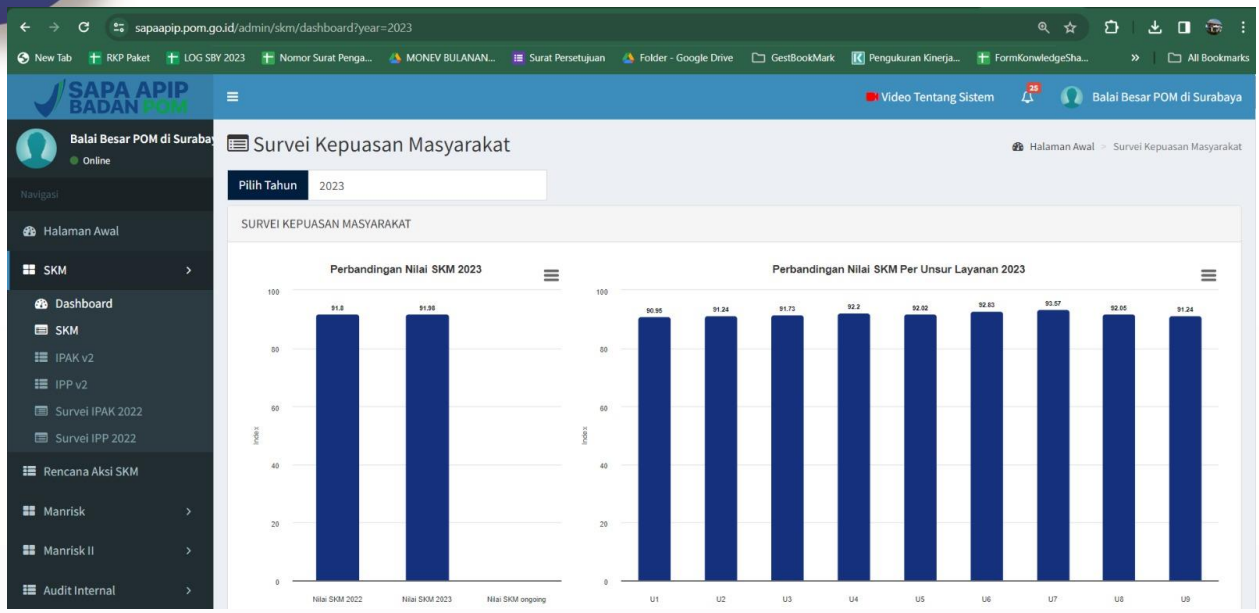

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN (97,30)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi *	TL**	Rekomendasi *	TL**	Rekomendasi *	TL**	Rekomendasi *	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	8	19	18	16	16	216	211	211	216	97,6851852
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3	10	10	2	2	66	66	66	66	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	100
		Kosmetik	1	3	2	2	0	0	41	41	41	41	100
		Pangan	25	22	29	32	31	34	336	334	334	336	99,4047619
		Total	30	36	60	62	49	52	663	656	656	663	98,94
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	4	6	1	1	0	0	21	21	21	21	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	100
		Kosmetik	0	1	4	0	4	4	15	11	11	15	73,3333333
		Pangan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
		Total	4	7	5	1	4	4	41	37	37	41	90,24
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	1	1	0	0	0	0	6	6	6	6	100
		Pangan	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	100
		Total	1	1	0	0	0	0	13	13	13	13	100,00
TOTAL			**35**	**44**	**65**	**63**	**53**	**56**	**721**	**710**			97,30

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER (89,42)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	8	24	18	24	16	11	211	178	178	211	84,36019
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	7	10	8	2	5	67	44	44	67	65,671642
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	1	0	0	4	2	2	4	50
		Kosmetik	6	0	1	4	2	2	40	29	29	40	72,5
		Pangan	22	28	31	29	34	20	330	261	261	330	79,090909
		Total	39	59	60	66	54	38	652	514	514	652	78,83
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	1	1	2	3	13	13	13	13	100
		Total	0	0	1	1	2	3	13	13	13	13	100,00
TOTAL			**39**	**59**	**61**	**67**	**56**	**41**	**665**	**527**			89,42

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (95,54)

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Oktober			November			Desember			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	875	875	795	863	863	766	820	820	810	9020	9676	93,22
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	924	924	922	877	877	863	740	740	714	9047	9241	97,90
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	32	32	32	28	28	28	131	131	115	482	498	96,79
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	1	5	5	0	1	1	0	0	0	14	14	100,00
Total			1832	1836	1754	1768	1769	1658	1691	1691	1639	18563	19429	95,54

9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (67,73)

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	38	14	1	0	1	1	0	1	0	0	0	13	8	5				
2	Industri Bahan Baku Obat	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0				
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2				
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	67	20	3	3	0	2	2	0	0	0	0	20	18	2				
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1				
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	6	7	0			1	1	0	0	0	0	4	3	1				
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)	5		0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)	14		0	0	0	0			0	0	0	2	2	0				
11	Industri Kosmetik	86	47	2	2	0	3	3	0	1	0	1	47	34	13				
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)	10		0			0			0			0	0	0				
13	Industri Pangan	900	294	23	16	7	33	20	13	2	1	1	291	194	97				
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	28286	15	0	0	0	2	0	2	0	0	0	18	8	10				
	Surabaya	29448	408	29	21	8	43	26	17	3	1	2	409	277	132	409	277	132	67,73

10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI (70,86)

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)		86	8	7	1	6	6	0	5	5	0	92	82	10	92	82	10	
2	Apotek		41	5	0	5	3	1	2	0	0	0	45	19	26	45	19	26	
3	Toko Obat		16	4	3	1	1	0	1	0	0	0	15	10	5	15	10	5	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)		28	1	0	1	1	1	0	1	1	0	28	21	7	28	21	7	
5	Rumah Sakit (RS)		45	6	5	1	5	5	0	0	0	0	44	33	11	44	33	11	
6	Puskemas		36	2	2	0	4	4	0	1	0	1	36	31	5	36	31	5	
7	Klinik		39	2	1	1	3	1	2	1	1	0	39	14	25	39	14	25	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	673	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	102	57	159	102	57	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	675	87	1	1	0	0	0	0	0	0	0	87	83	4	87	83	4	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	302	113	4	2	2	0	0	0	1	1	0	113	75	38	113	75	38	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	275	31	1	0	1	0	0	0	1	0	1	31	22	9	31	22	9	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1120	59	4	2	2	1	0	1	1	1	0	59	38	21	59	38	21	
	Surabaya	2770	724	38	23	15	24	18	6	11	9	2	748	530	218	748	530	218	70,86

11. Indeks Layanan Publik BPOM (4,98)

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

Pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.98/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	7.a.T	Agar dapat meningkatkan publikasi SKM terutama melalui aplikasi yang dapat diunduh.
2	Profesionalisme SDM	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
6	Inovasi	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	

12. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK (70,43)

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s,d, tahun N	Progres s,d, bulan	CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN		
									Des	Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi	% UMKM yang MS
SURABAYA	Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	8	8	10			
		2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi	20%	30%	Maret-April			20			
		3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan	40%	70%	Maret-Oktober			40			
		4	Sertifikasi	20%	90%	September-			20			
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			10	9	14	
									100			64,29
	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	13	13	10			
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			40			
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			40			
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			10	69	123	
	Total Progres								100			56,10
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	77	77	10			
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20			
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40			
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			20			
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			10	70	77	
	Total Progres								100			90,91
	Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						98	98	100,00			70,43

13. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (94,39)

Tingkat Efektifitas KIE

Balai Besar POM di Surabaya

Triwulan 4 – Tahun 2023

Keterangan	Hasil
Tingkat Efektifitas KIE Triwulan 4	**94,39**
Target Triwulan 4	93,38
Capaian terhadap Target Triwulan 4	101,08%
Total Responden	405

TOTAL RESPONDEN : 405

Indeks Total

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	93.66	3.75
Pemahaman	95.38	3.82
Manfaat	94.07	3.76
Minat	94.01	3.76
Indeks	94.39	3.78
Target	93.38	3.74
Capaian	101.08 %	

Indeks Kegiatan

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	92.12	3.68
Radio	96.51	3.86
Brosur, majalah, koran	92.22	3.69
Videotron / Billboard	96.59	3.86
Transportasi Umum	96.15	3.85
Bioskop	95	3.8
Media Online	90.48	3.62
Talkshow Televisi	96.25	3.85
Talkshow Radio	98.75	3.95
CFD	95	3.8
Pameran	93.45	3.74
Penyuluhan	93.71	3.75
Media Sosial	93.52	3.74
Virtual	92.53	3.7

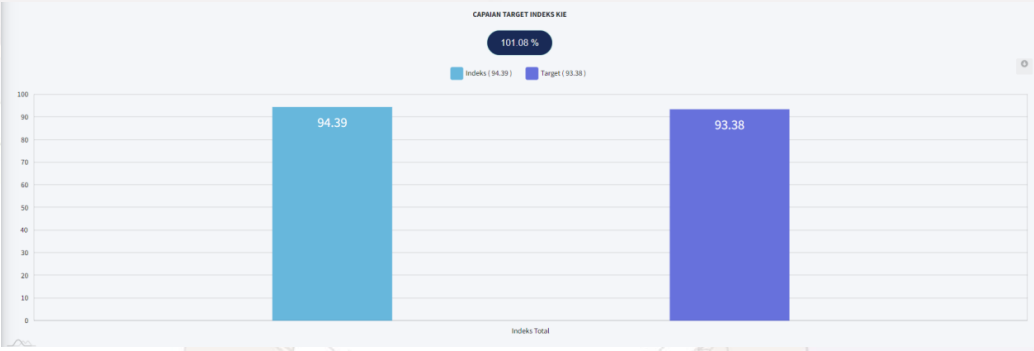

14. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN (112)

UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s,d Tahun N	Progres s,d, bulan (KUMULATIF)			Ralisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1, Capaian RAPK akhir tahun 2, Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
							s,d Oktober	s,d November	s,d Desember	
Surabaya	1	Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April	36	112	20,00	20,00	20,00	112
	2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			10,05	10,05	10,05	
	3	Bimbingan teknis keamanan	15,00	April - Juni			15,00	15,00	15,00	
	4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			10,00	10,00	10,00	
	5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			15,00	15,00	15,00	
		- Pembentukan Tim Keamanan								
		- Intervensi Keamanan Pangan								
	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov			0,00	20,00	20,00	
	7	Pengawalan	10,00	Okt - Des			10,00	10,00	10,00	
		Total skor (Tahun N)	**100,00**		**36**	**112**	80,05	100,05	100,05	**112**

15. JUMLAH DESA PANGAN AMAN (37)

UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s,d Tahun N	Progres (%)			Ralisasi Jumlah Desa Tahun N : 1, Capaian RAPK akhir tahun 2, Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
							s,d Oktober	s,d November	s,d Desember	
Surabaya	1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-april	9	37	20,00	20,00	20,00	37
	2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan,	5,00	Jan-april			5,00	5,00	5,00	
	3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April - Juli			15,00	15,00	15,00	
	4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi	15,00	Mei - Okt			15,00	15,00	15,00	
	5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00	Juni - Nov			10,00	10,00	10,00	
	6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Mei-Nov			5,00	10,00	10,00	
	7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	Nov - Des			0,00	0,00	10,00	
	8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Des			5,00	5,00	5,00	
	9	Pengawalan	10,00	Jun - Des			10,00	10,00	10,00	
		Total	**100,00**		**9**	**37**	**85,00**	**90,00**	**100,00**	**37**

16. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (24)

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s,d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Ralisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1, Capaian RAPK akhir tahun 2, Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
								s,d Oktober	s,d November	s,d Desember	
20	Surabaya	1	Adokasi	20,00	Jan - Apr	6	24	20,00	20,00	20,00	24
		2	Survey Pasar	5,00	Jan			5,00	5,00	5,00	
		3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - mei			15,00	15,00	15,00	
		4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	15,00	Apr - Mei			15,00	15,00	15,00	
		5	Penyuluhan	10,00	Jun - Jul			10,00	10,00	10,00	
		6	Kampanye	10,00	Jun - Jul			10,00	10,00	10,00	
		7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15,00	Sep - Okt			15,00	15,00	15,00	
		8	Pengawalan	10,00	Feb - Okt			10,00	10,00	10,00	
			Total	**100,00**		**6**	**24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**24**

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

17. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR (100%)

SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
10	Oktober	2451	2307	Benar	2900	2534	Benar	90,75
11	November	2460	2460	Benar	2900	2754	Benar	97,48
12	Desember	2477	2477	Benar	2896	2896	Benar	100,00

SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
10	Oktober	1051	1051	Benar	1263	1023	Benar	90,50
11	Nopember	1069	1069	Benar	1263	1255	Benar	99,68
12	Desember	1097	1097	Benar	1417	1417	Benar	100,00

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN (71,17)

INDIKATOR PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

UPT		Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S,D, DESEMBER										
				Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
				Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s,d bulan n	Perkara Carry Over							
SURABAYA	Surabaya	SPDP		10	4	3		1,00		0,15	15,00%	71,17%	100,00%	71,17
		Tahap I				2		0,70	0,29	0,4	30,67%			
		P21				1	1	0,50	0,29	0,3	18,33%			
		Tahap II				4	3	0,40	0,21	0,15	7,17%			
		Total		10	4	10	4							

19. INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA (94,23)

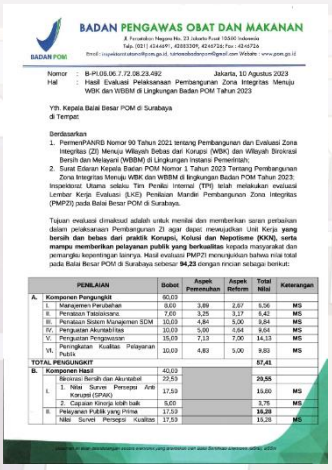

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Perceteakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4263333Ext. 4244724 Fax: (021) 4244724
Email: inspektoratutama@pom.go.id, sekretariatbadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.05.06.7.72.08.23.492 Jakarta, 10 Agustus 2023
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Balai Besar POM Tahun 2023

Yth. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
di Tempat

Berdasarkan
1. Permenpanrb Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2023;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Surabaya.

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Surabaya sebesar **94,23** dengan rincian sebagai berikut:

	PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	**Komponen Pengungkit**	60,03				
I.	Manajemen Perubahan	8,60	3,89	2,67	6,56	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,60	3,25	2,17	5,42	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,03	4,84	5,00	9,84	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,03	5,00	4,64	9,64	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,03	7,13	7,00	14,13	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,03	4,83	5,00	9,83	MS
	TOTAL PENGUNGKIT				**57,41**	
B.	**Komponen Hasil**	40,03				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,53			**20,55**	
	1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,53			16,80	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,53			**16,28**	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas	17,53			16,28	MS

PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
Pelayanan (SPKP)					
TOTAL HASIL				**36,83**	
NILAI PMPZI				**94,23**	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

20. NILAI AKIP (85.200)

LAMPIRAN
Surat Dinas Plt. Inspektur Utama
Nomor : B-PI.04.7.01.24.05
Tanggal : 09 Januari 2024

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2023

3. Balai Besar POM

No	Satuan Kerja	Tahun 2023	
		Nilai	Kategori
1.	Balai Besar POM di Surabaya	85.200	A
2.	Balai Besar POM di Mataram	83.810	A
3.	Balai Besar POM di Pekanbaru	83.440	A
4.	Balai Besar POM di Palangkaraya	82.910	A
5.	Balai Besar POM di Manado	82.700	A

21. INDEKS PROFESIONALITAS ASN (90,35)

NO	UNIT KERJA	DATA IP	AKSI
1	Balai Besar POM di Surabaya / 16	• Kualifikasi : 21.24 • Kompetensi : 39.14 • Kinerja : 25 • Disiplin : 4.97 • Total : 90.35 • Target Roren : 85.5 • Target Sudah Terpenuhi (+ 4.85)	View Data

Rekapitulasi IP ASN Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2023	TARGET 2023
Balai Besar POM di Serang	90,81	84,00
Balai Besar POM di Surabaya	90,35	85,50

22. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP (87.4)

LAPORAN RINGKAS PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TAHUN 2023

Unit Kerja: : **Balai Besar POM di Surabaya**
Tanggal Penilaian: : **28 Desember 2023**
Nama Tim Penilai: : **1. Aan Risma Uli N., SSi., MSi, Apt**
2. Febriana Sari, SSi, MSi

Hasil Penilaian:

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	86.6
2	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	88.4
3	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)	87.3
Persentase Pemenuhan SKL (%)		87.4

23. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL (3)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	128	124	134
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	127	124	133
total_individu_aktif	127	124	133
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	29,77	30	29,78
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	29,77	30	29,78
Perhitungan (%)	99,54	100	99,56
Perhitungan per TW	99,2	99,28	99,3
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Login BOC	40	40	40
Akses BCC	60	60	60
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	301	240	86
Perhitungan	312,8	306,18	287,83
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	12	24	17
Jumlah Viewer	2188	3254	2078
Perhitungan Rata2 Berita	12	13,09	13,42
Perhitungan Rata2 Pengunjung	138,18	137,74	136,11
Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry	20	43	24
Jumlah Verifikasi	20	43	24
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	99,79	99,81	99,82
Nilai Indeks per TW	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	Oktober	November	Desember
% Sarana	91,27	90,88	104,51
% Sampling	113,64	110,68	104,09
% Pengujian	79,14	78,28	99,03
Rata-Rata	94,68	93,28	102,54
Indeks per Bulan	3	3	3
Komposit SIPT	2,4	2,4	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	3

24. NILAI KINERJA ANGGARAN (90,24)

Nilai IKPA (95,91)

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	135	063	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	73.49	97.60	93.70	100.00	96.67	100.00	100.00	95.91	100%	95.91
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.35	19.52	9.37	10.00	9.67	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.75		97.59					100.00			

Nilai EKA (86,46)

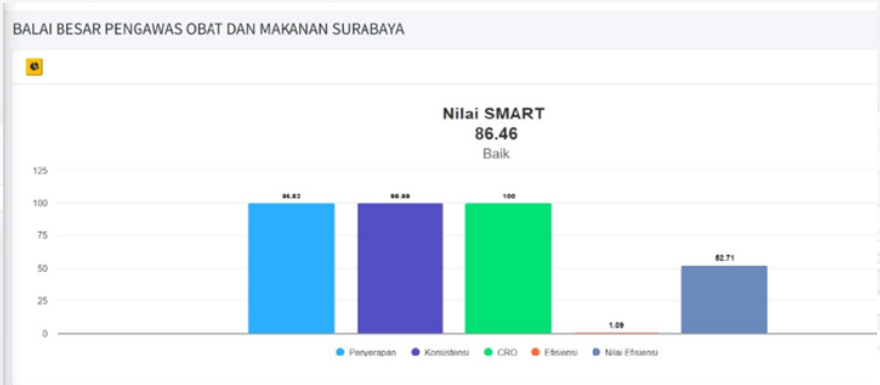

Nilai NKA : (95,91 x 40%) + (86,46 x 60%) = 90,24